

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'laikum, wr, wb,

Puji dan Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 sesuai ketentuan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah”, telah dapat diselesaikan.

Penyusunan LPPD kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat yang meliputi beberapa substansi pelaporan antara lain Dasar Hukum, Gambaran Umum Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah yang mencakup Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah, Prioritas Daerah, Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi yang mencakup Urusan Wajib, dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

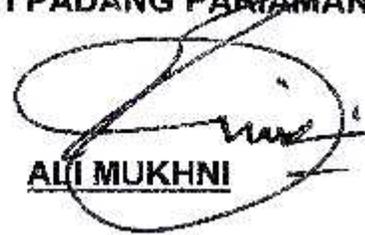
Tujuan penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 ini adalah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 dan sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat di evaluasi secara objektif dan menyeluruh atas kinerja Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan baik dalam metode penyajian maupun dalam kelengkapan datanya, oleh karena itu kami membuka diri untuk menerima masukan berupa kritik dan saran- saran atas isi laporan ini demi kesempurnaan untuk tahun-tahun berikutnya. Kepada Tim Penyusun yang telah bekerja maksimal menyelesaikan penyusunan Buku LPPD Tahun 2015 ini kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengucapkan terima kasih banyak atas hasil kerja yang telah Saudara berikan untuk daerah tercinta.

Akhir kata, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia- Nya kepada kita semua, Amin.

Parit Malintang,      Maret 2016

**BUPATI PADANG PARIAMAN**



**ALI MUKHNI**

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>A. DASAR HUKUM</b> .....	<b>1</b>
<b>B. GAMBARAN UMUM DAERAH</b>	<b>1</b>
1. KONDISI GEOGRAFIS .....	1
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS .....	3
3. KONDISI EKONOMI .....	5
A. POTENSI UNGGULAN DAERAH .....	5
B. PERTUMBUHAN EKONOMI/PDRB .....	7
<b>BAB II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>9</b>
A. PERNYATAAN VISI DAN MISI .	9
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH .....	11
C. PRIORITAS DAERAH .....	20
<b>BAB III. URUSAN DESENTRALISASI</b>	<b>21</b>
<b>A.. RINGKASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)</b>	<b>21</b>
1. ANGGARAN, REALISASI, DAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB ....	22
2. ANGGARAN, REALISASI, DAN PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN	24
3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH .....	25
<b>B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN</b>	<b>28</b>
1. PENDIDIKAN .....	28
2. KESEHATAN .....	37
3. LINGKUNGAN HIDUP .....	56
4. PEKERJAAN UMUM .....	59
5. TATA RUANG .....	62
6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN .....	63
7. PERUMAHAN .....	70
8. KEPEMUDAAN & OLAH RAGA .....	71
9. PENANAMAN MODAL .....	75
10. KOPERASI & UKM .....	77
11. KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL .....	82
12. KETENAGAKERJAAN .....	86
13. KETAHANAN PANGAN .....	89
14. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK .....	91
15. KELUARGA BERENCANA & KESEJAHTERAAN SOSIAL ...	94
16. PERHUBUNGAN .....	98
17. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	102
18. PERTANAHAN .....	104
19. KESATUAN BANGSA & POLITIK .....	107
20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN.....	108
21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA .....	163
22. S O S I A L .....	169
23. KEBUDAYAAN .....	176
24. STATISTIK .....	178
25. KEARSIPAN.....	181
26. PERPUSTAKAAN .....	184
<b>C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN</b>	<b>190</b>
1. KELAUTAN DAN PERIKANAN .....	190
2. PERTANIAN .....	197

3.	KEHUTANAN .....	206
4.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL .....	209
5.	PARIWISATA .....	212
6.	INDUSTRI .....	215
7.	PERDAGANGAN .....	217
8.	TRANSMIGRASI .....	221
<b>BAB IV</b>	<b>TUGAS PEMBANTUAN</b>	<b>223</b>
A.	TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA	223
1.	URUSAN KESEHATAN .....	223
2.	URUSAN TENAGA KERJA .....	224
3.	URUSAN PERTANIAN .....	225
4.	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .....	227
5.	URUSAN PERDAGANGAN .....	230
<b>BAB V</b>	<b>TUGAS UMUM PEMERINTAHAN</b>	<b>233</b>
A.	KERJASAMA ANTAR DAERAH .....	233
B.	KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL .....	234
C.	PEMBINAAN BATAS WILAYAH .....	242
D.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA .....	242
E.	PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS .....	245
F.	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM.....	247
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>250</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>		
<b>LAMPIRAN III.1</b>		
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPDTAHUN 2015		
<b>LAMPIRAN III.2</b>		
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015		
<b>LAMPIRAN III.3</b>		
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015		

## BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibentuk sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu diantara 19 (sembilan belas) daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan pusat pemerintahan berada di Parit Malintang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dari wilayah kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, mengamanatkan bahwa Bupati berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

### A. Dasar Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015 adalah :

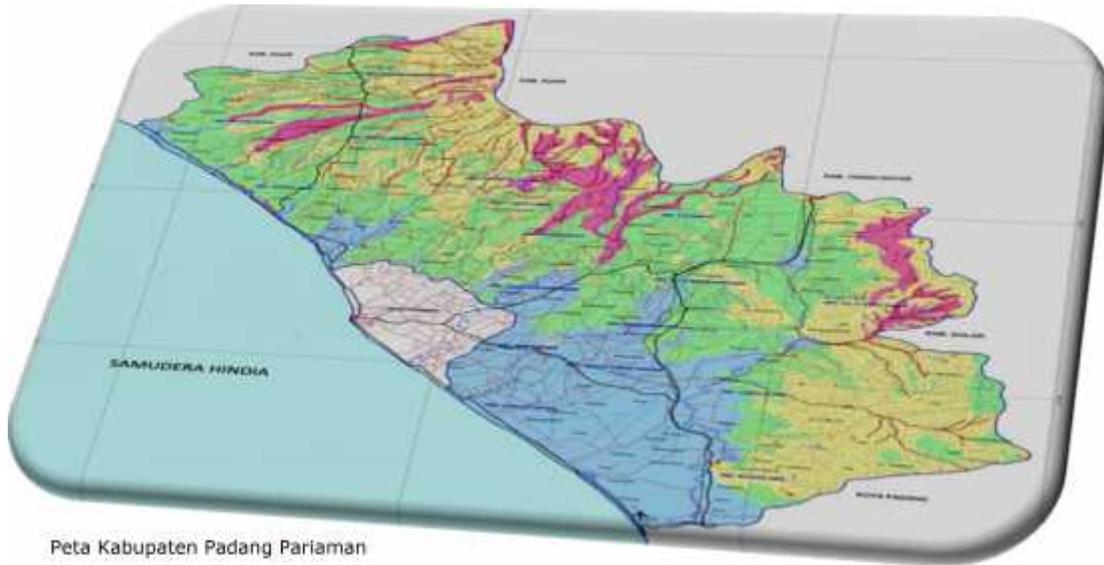
- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015;
  - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015;

## B. Gambaran Umum Daerah

### 1. Kondisi geografis daerah

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 60,5 Km yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°11'-0°49' Lintang Selatan dan 98°36' - 100°28' Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 60 Nagari. Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Agam, sebelah Selatan dengan Kota Padang, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, dan sebelah Barat dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 228,70 km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas wilayah terkecil, yakni 25,56 km<sup>2</sup>. Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan dari IV Koto Aur Malintang tercatat berada di wilayah yang paling tinggi yaitu 251 meter dari permukaan laut sedangkan yang paling rendah adalah Ulakan Tapakis, Sungai Limau, Gasan Gadang dengan ketinggian 2 meter dari permukaan laut.



Peta Kabupaten Padang Pariaman

## 2. Gambaran umum demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 tercatat sebanyak 458.746 jiwa, terdiri dari 232.851 orang laki-laki dan 225.895 orang perempuan. Untuk Laju perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel Perkembangan Penduduk 2010-2015

TAHUN	PENDUDUK			SEX RASIO
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
2010	193.472	200.099	393.571	85,61
2011	193.412	200.432	393.844	96,06
2012	194.787	202.096	396.883	96,25
2013	196.873	204.017	400.890	96,50
2014	198.315	205.215	403.530	96,64
2015	232.851	225.895	458.746	103.07

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk sebaran penduduk, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Batang Anai yaitu berjumlah 51.785 jiwa, dan diikuti oleh Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah 48.630 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Padang Sago dengan jumlah 9.195 jiwa, pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk menurut Kecamatan :

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Lubuk Alung	25,028	23,602	48,630
2	Batang Anai	26,638	25,147	51,785
3	Nan Sabaris	14,939	15,133	30,072
4	2 x 11 Kayu Tanam	12,666	12,915	25,581
5	VII Koto Sungai Sarik	21,175	20,617	41,792
6	V Koto Kampung Dalam	14,367	13,355	27,722
7	Sungai Geringging	18,999	17,967	36,966
8	Sungai Limau	18,442	17,379	35,821
9	IV Koto Aur Malintang	11,955	11,568	23,523
10	Ulakan Tapakis	11,880	11,402	23,282
11	Sintuk Toboh Gadang	10,087	10,052	20,139
12	Padang Sago	4,553	4,642	9,195
13	Batang Gasan	6,835	6,463	13,298
14	V Koto Timur	8,832	8,551	17,383
15	2 x 11 Enam Lingkung	8,740	9,173	17,913
16	Patamuan	8,573	8,490	17,063
17	Enam Lingkung	9,142	9,439	18,581
JUMLAH		232,851	225,895	458,746

### 3. Kondisi ekonomi

#### a. Struktur Ekonomi

Selama kurun waku 2010-2014, struktur perekonomian Padang Pariaman menurut lapangan usaha masih didominasi oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB Padang Pariaman yang mencapai lebih dari 20 persen selama lima tahun terakhir. Kemudian lapangan usaha yang cukup berperan dalam pembentukan PDRB Padang Pariaman adalah lapangan usaha Industri Pengolahan yang mampu berkontribusi lebih dari 10 persen selama periode 2010 – 2014. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, lapangan usaha Kontruksi dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian juga cukup berkontribusi dalam pembentukan PDRB Padang Pariaman dengan share

sebanyak 6 sampai dengan 8 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen.

Untuk melihat lebih jelasnya mengenai struktur perekonomian Padang Pariaman sebagai tersebut diatas, berikut ini disajikan data peranan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ) sebagai berikut :

Tabel Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)  
Tahun 2010 2014

No.	Lapangan Usaha/ Industry	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishery	23,89	23,09	22,10	21,14	20,89
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	6,22	5,89	5,81	5,85	6,20
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	13,85	13,60	13,29	12,78	11,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
F	Konstruksi/Construction	7,34	7,43	7,55	7,65	7,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	9,67	9,51	9,23	8,67	8,27
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	21,34	22,95	24,48	26,73	28,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,83	0,82	0,81	0,78	0,78
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	3,15	3,05	3,05	2,85	2,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	1,51	1,50	1,54	1,49	1,44
L	Real Estat/Real Estate Activities	1,08	1,03	0,97	0,94	0,92
M, N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	5,27	5,23	5,14	5,03	4,74
P	Jasa Pendidikan/Education	4,00	4,09	4,20	4,22	4,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,52	0,53	0,57	0,56	0,54
R,S, T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	1,16	1,13	1,12	1,18	1,15
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS - Padang Pariaman dalam Angka 2015

## b. Pertumbuhan ekonomi

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Pergeseran tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan data statistik yang diperoleh, perekonomian Padang Pariaman pada tahun 2014 mengalami sedikit perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Padang Pariaman tahun 2014 sebesar 6,03 persen, sedangkan tahun 2013 mencapai 6,18 persen.

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, berikut ini disajikan data statistik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010-2014 :

Laju Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2014

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60	5,85	5,94	6,18	6,03

Sumber data : Padang Pariaman dalam Angka 2015

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan peningkatan yang signifikan yakni sebesar 24,87 persen. Selanjutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi juga

memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi yakni sebesar 10,58 persen. Pada urutan ketiga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Padang Pariaman pada tahun 2014 adalah lapangan usaha Kontruksi sebesar 9,18 persen.

Untuk melihat pertumbuhan riil PDRB berdasarkan lapangan usaha dari tahun 2010-2014 secara rinci dapat di lihat pada tabel berikut :

Laju Pertumbuhan Riil PDRB  
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2010 2014

<b>Real Growth Rate of GRDP by Industrial Origin (percent), 2010 2014 Lapangan Usaha/ Industry</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>(1)</b>		<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishery</i>	1,72	2,68	2,69	3,84	7,11
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	6,56	0,86	4,31	6,96	7,83
<b>C</b>	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	2,18	4,67	6,59	7,67	5,62
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	-1,11	6,49	12,20	1,34	24,87
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	5,47	2,48	1,52	4,72	4,36
<b>F</b>	Konstruksi/ <i>Construction</i>	8,58	6,97	8,31	11,17	9,18
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4,92	4,62	6,28	6,95	8,27
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	9,02	10,77	7,59	3,88	2,53
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3,62	2,45	4,28	4,54	6,60
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	14,18	8,18	11,64	10,20	10,58
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	5,28	8,72	9,65	7,41	5,95
<b>L</b>	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,84	3,71	4,11	5,68	5,71
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6,47	7,42	8,23	8,48	8,65
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	10,29	7,05	2,56	9,04	1,81
<b>P</b>	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	12,70	8,18	8,84	7,24	7,28
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,08	8,06	10,47	7,84	8,46
<b>R,S, T,U</b>	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	6,96	4,92	6,80	7,03	7,21
<b>Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product</b>		<b>5,60</b>	<b>5,85</b>	<b>5,94</b>	<b>6,18</b>	<b>6,03</b>

Sumber data : Padang Pariaman dalam Angka 2015

Pada tahun 2014, sebagian besar lapangan usaha tumbuh di kisaran 7 sampai 8 persen antara lain, lapangan usaha Jasa Perusahaan (8,65 persen), lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,46 persen), lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8,27 persen), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (7,83 persen), lapangan usaha Jasa Pendidikan (7,28 persen), lapangan usaha Jasa Lainnya (7,21 persen) serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (7,11 persen).

Sementara itu lapangan usaha lainnya mampu tumbuh di bawah 7 %. Termasuk juga lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang merupakan kontributor tertinggi terbesar dalam pembentukan PDRB Padang Pariaman, justru hanya tumbuh sebesar 2,53 % di tahun 2014.

c. PDRB Perkapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Selama periode 2010 – 2014, PDRB perkapita Padang Pariaman selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010, PDRB perkapita Padang Pariaman tercatat sebesar 21,07 juta rupiah, selanjutnya terjadi kenaikan sebesar 13,24 persen di tahun 2011 sehingga mejadi 23,86 juta rupiah.

Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2013 PDRB perkapita kembali meningkat menjadi 26,72 juta rupiah dan 30,63 juta rupiah per tahun. Hingga akhirnya pada tahun 2014, PDRB perkapita Padang Pariaman meningkat cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 16,62 persen menjadi 35,72 juta rupiah pertahun atau sekitar 2,97 juta rupiah perbulannya.

Perkembangan PDRB Perkapita menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp)  
Tahun 2010 2014

Lapangan Usaha/Industry		2010	2011	2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishery</i>	5,03	5,51	5,90	6,47	7,46
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,31	1,41	1,55	1,79	2,21
<b>C</b>	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	2,92	3,24	3,55	3,91	4,25
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>F</b>	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1,55	1,77	2,02	2,34	2,71
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2,04	2,27	2,47	2,65	2,95
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,50	5,48	6,54	8,19	10,18
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,18	0,20	0,22	0,24	0,28
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,66	0,73	0,82	0,87	0,99
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,32	0,36	0,41	0,46	0,51
<b>L</b>	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,23	0,24	0,26	0,29	0,33
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1,11	1,25	1,37	1,54	1,69

	Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>					
<b>P</b>	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	0,84	0,97	1,12	1,29	1,50
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19
<b>R,S,T, U</b>	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,24	0,27	0,30	0,36	0,41
<b>Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product</b>		<b>21,07</b>	<b>23,86</b>	<b>26,72</b>	<b>30,63</b>	<b>35,72</b>

Sumber data : Padang Pariaman dalam Angka 2015

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Sebagai implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun RPJM 2011-2015. Dokumen tersebut selain sebagai alat perencanaan, juga sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap unit kerja. Disamping itu, RPJM juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

RPJM Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, mengandung arti penting dalam mewujudkan *good governance*, yaitu aspek transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan proses penyusunan dokumen ini melibatkan partisipasi masyarakat dengan pendekatan campuran, yaitu *top down* dan *bottom up*.

Dalam dokumen RPJM Kabupaten Padang Pariaman 2011-2015 secara formal didefinisikan pernyataan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan daerah serta prioritas daerah.

#### A. VISI DAN MISI

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Pariaman Tahun 2010-2015 merupakan rencana pelaksanaan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005 – 2025. Adapun Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 -2015 adalah sebagai berikut :

**“Menjadi Kabupaten Unggul Dalam Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Cerdas dan Sejahtera”**

Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Menjadikan Kabupaten yang unggul, Masyarakat Religius, Mewujudkan Masyarakat Cerdas, dan Masyarakat yang Sejahtera, secara lebih terperinci dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kabupaten Unggul yang dimaksud adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan menciptakan dan memelihara suatu lingkungan yang dapat mempertahankan daya saing di daerah. Kemampuan daerah untuk menghasilkan nilai tambah secara berhasil dalam persaingan nasional, regional dan/atau internasional. Dalam waktu bersamaan masyarakat di daerah yang bersangkutan juga menikmati suatu standar hidup yang meningkat dan berkelanjutan serta pendapatan riil yang meningkat.

2. Masyarakat Religius yang dimaksudkan disini adalah Suatu masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dalam berintegrasi sesama anggota masyarakat.
3. Cerdas dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang berkualitas dan berilmu pengetahuan maka untuk mewujudkannya dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan yang dilihat dari ketersediaan sarana dan Prasarana pendidikan, peningkatan program dan kualitas pendidikan disemua tingkatan dan berkelanjutan.
4. Sejahtera dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar, berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejahtera dalam visi ini, mengarah pada tujuan terlayani dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang.

#### M I S I :

Untuk mencapai Visi "Menjadi Kabupaten Unggul Dalam Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Cerdas dan Sejahtera" ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berkualitas berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu berbasiskan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasiskan sistem agribisnis dan agroindustri
5. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Misi untuk Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berkualitas berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" adalah landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah: taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan.

Misi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu berbasis sinergitas antara pemerintah dan masyarakat merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan. Membentuk birokrasi yang profesional, dan mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Misi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkepribadian wirausaha merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruhan pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.

Misi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasis sistem agribisnis dan agroindustri merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

Misi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan juga tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan perwujudan pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang baik

## B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

1. Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berkualitas berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” Strategi pembangunan dalam Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berkualitas berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah adalah :
  1. Meningkatkan akses informasi keagamaan
  2. Optimalisasi fungsi rumah ibadah dan peran alim ulama

3. Peningkatan fasilitas seni dan budaya
4. Peningkatan event seni dan budaya
5. Optimalisasi peran lembaga adat

Sedangkan Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

- 1 Mengaktifkan wirid-wirid dan pesantren ramadhan
  - 2 Meningkatkan kualitas pengelolaan rumah ibadah  
Meningkatkan insentif guru TPA/MDA, Gharin, Imam dan khatib
  - 3 Mervitalisasikan kawasan tradisional dan bersejarah
  - 4 Melestarikan situs bersejarah dan cagar budaya
  - 5 Membinaan kesenian tradisional
  - 6 Meningkatkan kapasitas lembaga adat dan budaya
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu berbasiskan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.  
Strategi pembangunan dalam Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu berbasiskan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat meliputi :
1. Penerapan dan Implementasi Good Governance.
  2. Penerapan Kapasitas Sumber Daya dan Ketrampilan serta Profesional Aparatur.
  3. Peningkatan pengelolaan kepegawaian.
  4. Peningkatan manajemen keuangan.
  5. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan Asset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data asset yang akurat.
  6. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
  7. Meningkatkan Pengawasan Internal.
  8. Reformasi Pelayanan Sektor Publik.
  9. Pengembangan e-Goverment
  10. Meningkatkan hubungan timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan media massa
  11. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan
  12. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
  13. Meningkatkan efektifitas penerapan Peraturan Daerah
  14. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah oleh Eksekutif dan Legislatif
  15. Meningkatkan efektifitas pelayanan
  16. Meningkatkan database kependudukan
  17. Meningkatkan partisipasi mesyarakat dalam kehidupan politik
  18. Fasilitasi peran dan fungsi lembaga legislatif
  19. Pengembangan hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif
  20. Meningkatkan jumlah poskamling yang aktif dan berfungsi dengan baik
  21. Penurunan kasus/kejadian pelanggaran Kamtibmas
  22. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengamanan lingkungan

23. Peningkatan peran dan fungsi lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
24. Peningkatan kualitas SDM Aparatur
25. Pengembangan sistem perencanaan daerah yang partisipatif
26. Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan
27. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat
28. Meningkatkan partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
29. Meningkatkan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya
30. Meningkatkan pemberdayaan kesejahteraan keluarga

Sedangkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Penciptaan budaya disiplin, tertib dan aman
2. Mengembangkan Diklat Aparatur
3. Penempatan Pegawai sesuai dengan kompetensi
4. Pengembangan sistem informasi terpadu
5. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peningkatan manajemen asset daerah daerah terpadu
7. Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah terpadu
8. Peningkatan kualitas laporan keuangan
9. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber –sumber pendapatan yang syah
10. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
11. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan
12. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan lembaga pemerintah daerah
13. Meningkatnya kemampuan penanganan kasus
14. Penerapan standar pelayanan minimal
15. Pengembangan data dan informasi berbasis IT
16. Peningkatan keterbukaan informasi publik
17. Peningkatan publikasi dan dokumentasi produk-produk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
18. Peningkatan hubungan pemerintah dengan masyarakat dan media masa
19. Terpublikasinya penyelenggaraan pemerintah daerah secara proporsional dan efektif
20. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
21. Peningkatan Pelayanan dan SDM Perpustakaan dan Arsip
22. Melakukan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah
23. Meningkatnya jumlah dan kualitas Peraturan Daerah
24. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan
25. Fasilitasi penguatan pelayanan kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah
26. Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan Nagari
27. Penguatan Otonomi Pemerintahan Nagari
28. Meningkatkan Pelayanan masyarakat ke arah satu pintu
29. Pembangunan Data base Kependudukan
30. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
31. Penerapan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan

32. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik
  33. Memfasilitasi peran dan fungsi lembaga legislatif;
  34. Mengembangkan hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif;
  35. Meningkatkan jumlah Poskamling yang aktif dan berfungsi dengan baik.
  36. Menurunkan kasus/kejadian Pelanggaran Kamtibmas
  37. Peran aktif masyarakat dalam Pengamanan Lingkungan
  38. Meningkatkan peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
  39. Mengikutsertakan aparatur pada Pelatihan dan Bimbingan Teknis
  40. Peningkatan kualitas musrenbang
  41. Fasilitasi dan Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah
  42. Penguatan kapasitas kelembagaan perencana
  43. Tersedianya data dan informasi statistik
  44. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan nagari
  45. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
  46. Peningkatan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat
  47. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
  48. Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat nagari
  49. Mendorong pendayagunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam
  50. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan
  51. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
  52. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkepribadian wirausaha.
- Strategi Pembangunan dalam sumberdaya yang berkualitas dan berkepribadian wirausaha adalah melalui :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan sekolah
  2. Pengembangan kualitas layanan pendidikan
  3. Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan
  4. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan serta Kualifikasi Guru
  5. Meningkatkan mutu, kualitas dan manajemen pendidikan
  6. Pengembangan IT dalam pendidikan
  7. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berbasis teknologi dan multi media.
  8. Pengembangan pendidikan non formal dan informal
  9. Peningkatan prestasi olahraga
  10. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga yang representatif
  11. Meningkatkan Pembinaan dibidang Pemuda

12. Meningkatkan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat secara terarah dan berjenjang
13. Peningkatan akses dan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat
14. Pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional kepada masyarakat
15. Peningkatan pengelolaan RS yang aman dan bersinergis dengan lingkungan masyarakat
16. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan
17. Peningkatan status kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu, anak, lansia dan gizi
18. Penurunan prevalensi gizi buruk
19. Peningkatan upaya pengendalian penyakit menular, tidak menular
20. Peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat
21. Peningkatan upaya pelayanan dan pemulihan kesehatan masyarakat
22. Mempercepat penurunan angka kematian Ibu (AKI) hamil, menyesuaikan dan nifas serta angka kematian bayi (AKB)
23. Meningkatkan peran aktif masyarakat, swasta dalam pembangunan kesehatan
24. Meningkatkan upaya pelayanan dan pemulihan kesehatan bagi keluarga miskin
25. Meningkatkan pemerataan penyuluhan KDRT dan masyarakat
26. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan perempuan-perempuan di nagari percontohan
27. Meningkatkan kualitas Perempuan Politik dalam menghadapi pemilu
28. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Institusi masyarakat dalam program KB, KS
29. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi bagi masyarakat
30. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
31. Meningkatkan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS
32. Peningkatan kemandirian, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
33. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis

Sedangkan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
2. Meningkatkan kualifikasi guru
3. Pengembangan pendidik non formal
4. Mengembangkan PKBM dan lembaga ketrampilan
5. Memfasilitasi pengembang belajar paket A,B,C
6. Peningkatan pelayanan Belajar paket A,B ,C
7. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik
8. Peningkatan pengawasan dan manajemen pendidikan
9. Peningkatan Pemerataan Kesempatan Penyetaraan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidikan dan kependidikan
10. Meningkatkan Akses Pendidikan Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
11. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa

12. Akses internet di sekolah
13. Pengembangan pendidikan berbasis teknologi dan multi media.
14. Memfasilitasi Fasilitas kegiatan PKBM dan lembaga pendidikan ketrampilan (sanggar belajar)
15. Pembinaan atlet dan pelaku olahraga
16. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga
17. Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
18. Fasilitas penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan;
19. Pengembangan jiwa kepeloporan dan kemandirian pemuda.
20. Meningkatnya persentase pencapaian prestasi olahraga
21. Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga;
22. Fasilitas dan partisipasi event-event olahraga.
23. Meningkatnya rasio sarana pelayanan umum kesehatan
24. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan
25. Meningkatkan rasio medis kesehatan
26. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan
27. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik dalam hal penguasaan ilmu dan teknologi, perilaku serta keterampilan teknis
28. Melakukan standarisasi mutu pelayanan melalui klasifikasi tipe dan akreditasi
29. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana rumah sakit serta sarana penunjang
30. Melakukan pembenahan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana rumah sakit
31. Optimalisasi terhadap akses dan kualitas pelayanan kesehatan
32. Menyederhanakan dan mempersingkat prosedur pelayanan rumah sakit
33. Meningkatkan akses dan jangkauan serta kualitas pelayanan kesehatan keluarga/masyarakat
34. Peningkatan penanganan status gizi keluarga/ masyarakat
35. Peningkatan jangkauan mutu pelayanan kesehatan keluarga (ibu, anak, lansia)
36. Peningkatan kualitas gizi masyarakat
37. Meningkatkan upaya pencegahan dan penurunan angka kesakitan masyarakat
38. Peningkatan sistem surveillance penyakit menular dan tidak menular yang berkembang di masyarakat
39. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan perilaku hidup sehat
40. Peningkatan advokasi yang lebih membantu kelompok masyarakat miskin
41. Meningkatkan Pemerataan pelayanan kesehatan
42. Peningkatan kualitas layanan puskesmas
43. Meningkatkan kualitas penyehatan lingkungan
44. Peningkatan pemberdayaan dan penyuluhan kesehatan lingkungan
45. pemberdayaan dan penyuluhan kesehatan lingkungan
46. Terlaksananya Fasilitas dan Sosialisasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI)

47. Meningkatkan kualitas hidup perempuan terutama dibidang pendidikan , kesehatan dan ekonomi
  48. Pemberdayaan kader posyandu
  49. Pembinaan dan pengawasan terhadap klinik kesehatan dan peredaran obat dan makanan
  50. Mengembangkan kemitraan dengan penyedia pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
  51. Peningkatan advokasi yang lebih membantu kelompok masyarakat miskin
  52. Penyuluhan / Sosialisasi pada Siswa sekolah smpai pada masyarakat di nagari
  53. Melaksanakan fasilitasi dan advokasi PUG bagi Perempuan
  54. Terlksananya Fasilitasi dan Sosialisasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI)
  55. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perempuan politik di Legislatif
  56. Pengembangan dan peningkatan penyediaan pelayanan KB
  57. Fasilitasi kegiatan promotif dan kaderisasi KB
  58. Peningkatan kesadaran reproduksi sehat, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
  59. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
  60. Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, Anak Jalanan, Anak Terlantar
  61. Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS;
  62. Meningkatkan SDM Para Pencari Kerja
  63. Peningkatan Mutu, Keahlian dan pengetahuan Para Pencari Kerja
  64. Menciptakan Hubungan yang Harmonis antara Pengusaha dan Pekerja
  65. Peningkatan kualitas, pengetahuan dan Kepribadian yang baik antara Pengusaha dan Pekerja
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasis sistem agribisnis dan agroindustri
- Strategi Pembangunan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasis sistem agrobisnis dan agro industri meliputi :
1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan perikanan
  2. Penerapan sistim pertanian modern, intensifikasi dan optimalisasi lahan terlantar dan pekarangan serta penerapan teknologi pertanian
  3. Peningkatan Produksi Ternak
  4. Peningkatan Produksi Perikanan
  5. Peningkatan Kapasitas Petani , Kelembagaan Petani dan Pelaku Agribisnis
  6. Meningkatnya daya saing produk Pertanian dan Perikanan
  7. Pemberdayaan Tenaga Penyuluh
  8. Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan
  9. Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan UMKM
  10. Pengembangan kebijakan peningkatan ekonomi lokal
  11. Pengembangan kualitas SDM UMKM dan koperasi

12. Mengembangkan sentra produksi komoditi unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan
13. Pengembangan kebijakan investasi
14. Pengembangan destinasi pariwisata
15. Pengembangan kualitas obyek dan event-event pariwisata
16. Mengembangkan kawasan wisata kuliner
17. Mengembangkan kawasan wisata Religi
18. Peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal
19. Pemberdayaan masyarakat miskin

Sedangkan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Membangun dan memelihara infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung
  2. Meningkatkan Jumlah Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
  3. Peningkatan, Perluasan dan Peremajaan Tanaman Perkebunan
  4. Meningkatkan Populasi Ternak
  5. Meningkatkan Produksi Perikanan
  6. Peningkatan Kawasan Konservasi dan Budidaya Perikanan
  7. Peningkatan Kualitas SDM Pertanian dan Perikanan
  8. Peningkatan Kapasitas Penyuluh
  9. Peningkatan Jumlah Kelompok Binaan
  10. Pengembangan produk olahan dan pemasaran bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil pertanian dan perikanan
  11. Fasilitasi pengembangan industri pengolahan
  12. Meningkatkan kemudahan permodalan bagi UMKM dan Koperasi
  13. Peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan Koperasi
  14. Peningkatan keterampilan dan manajemen pelaku UMKM dan Koperasi
  15. Pengembangan Komoditi Unggulan
  16. Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki lima di pasar tradisional
  17. Peningkatan pelayanan investasi dan kejelasan regulasi
  18. Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata
  19. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
  20. Peningkatan pengelolaan objek wisata
  21. Pembinaan terhadap masyarakat sekitar objek wisata
  22. Menata dan mengelola kawasan wisata kuliner
  23. Menata dan mengelola kawasan wisata religi
  24. Meningkatkan sarana dan prasarana pada daerah tertinggal
  25. Peningkatan kapasitas masyarakat miskin
5. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan  
Strategi Pembangunan dalam Mewujudkan Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi :
1. Percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana perkantoran pemerintahan
  2. Pengembangan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis
  3. Membangun Wilayah strategis dan cepat tumbuh

4. Mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah sesuai dengan potensinya
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan
6. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jasa transportasi
7. Meratanya pelayanan teknologi komunikasi dan informatika di setiap Nagari
8. Meningkatnya pengelolaan sarana irigasi dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian
9. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pelestarian lingkungan
10. Meningkatnya implementasi Amdal , UKL dan UPL setiap penanggung jawab kegiatan
11. Menekan tingkat kerusakan lingkungan hidup dari pihak yang tidak bertanggung jawab
12. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
13. Memulihkan lahan kritis, lahan bekas tambang galian C, kawasan pantai, kawasan konservasi dan sumber daya alam.
14. Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah
15. Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW
16. Membangun sarana dan prasarana pada kawasan rawan bencana
17. Meningkatnya kesiapsiagaan dan kepedulian masyarakat terhadap bencana
18. Pengurangan Resiko Bencana
19. Mempercepatan penyaluran Bantuan Rehab Rekon Rumah Masyarakat Pasca Gempa 30 September 2009
20. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sedangkan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pembangunan kantor pemerintahan di kawasan ibukota kabupaten
2. Pembangunan sarana Pendukung Pusat Pemerintahan
3. Pembangunan infrastruktur dan utilitas kawasan ibukota kabupaten
4. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
5. Lanjutan pembangunan mesjid makam syekh Burhanuddin
6. Lanjutan pembangunan water boom
7. Pelaksanaan pembangunan yang terpadu, sinergi dan terintegrasi
8. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan
9. Fasilitas prasarana perhubungan
10. Pemeliharaan prasarana perhubungan
11. Pengaturan trayek angkutan umum
12. Pembangunan terminal
13. Penyediaan sarana prasarana perhubungan dan informasi fasilitas transportasi
14. Penyediaan sarana/rambu-rambu lalu lintas
15. Peningkatan Fasilitas Terminal
16. Pembangunan Terminal Tipe B
17. Pembangunan Terminal Truk

18. Pengawasan dan pengujian kelayakan terhadap kendaraan umum/kendaraan masal dan kendaraan barang
19. Pengaturan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika
20. Fasilitasi dan bantuan pemeliharaan sumber air milik masyarakat
21. Penguatan kelembagaan masyarakat pengelola air
22. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tentang pelestarian lingkungan hidup
23. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
24. Penyusunan dokumen Amdal, UKL dan UPL bagi setiap penanggung jawab kegiatan
25. Meningkatkan kebersihan dan penghijauan lingkungan
26. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
27. Pelestarian Lingkungan hidup
28. Pemulihan Lahan kritis, lahan bekas tambang galian c, kawasan pantai, kawasan konservasi dan sumber daya alam
29. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah
30. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan
31. Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
32. Peningkatan fasilitas Jalur Evakuasi
33. Sosialisasi pengurangan resiko bencana dan Mitigasi Bencana
34. Percepatan penyaluran Bantuan Rehab Rekon Rumah Masyarakat Pasca Gempa 30 September 2009
35. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemanfaatan sumber daya alam
36. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam

#### C. PRIORITAS DAERAH

Rencana Kerja Kegiatan Prioritas merupakan rencana kerja prioritas pembangunan yang dikelompokkan dalam 8 (delapan) prioritas sebagai berikut:

Prioritas 1 : Rekonstruksi dampak Bencana Alam Terhadap Infrastruktur Sosial dan Perekonomian

Prioritas 2 : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta rekonstruksi Infrastruktur pendidikan dan normalisasi proses belajar/ mengajar; serta Peningkatan aksesibilitas, kualitas, dan pelayanan Kesehatan serta Rekonstruksi Infrastruktur kesehatan;

Prioritas 3 : Menekan pertambahan penduduk miskin akibat gempa dan sekaligus menekan Angka Kemiskinan melalui penyediaan Kesempatan Kerja pada Program-program Rekonstruksi Dampak Gempa Bumi

Prioritas 4 : Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM dan perkuatan modal usaha dalam peningkatan ekonomi masyarakat

Prioritas 5 : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan

Nagari

Prioritas 6 : Peningkatan Tatakelola Pemerintah yang Baik dan Bersih

Prioritas 7 : Antisipasi Pekat melalui Peningkatan Kehidupan Beragama

Prioritas 8 : Peningkatan Iklim Usaha dan Jaminan Investasi

## BAB III

### PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI

#### A. RINGKASAN BELANJA URUSAN DESENTRALISASI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, menyebutkan bahwa muatan urusan Desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Untuk melihat pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015, diuraikan sebagai berikut :

## 1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksanaan Urusan Wajib

No	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	(%)	SKPD Pelaksana
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
1	Pendidikan	-	1.367.089.000	18.594.627.250	38.635.947.950	58.597.664.200	55.561.794.966	94,82	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	42.767.480.050 9.504.822.529	12.608.328.950 8.225.528.602	15.971.398.257 5.656.484.200	9.773.499.088 9.665.308.000	81.120.706.345 24.826.978.719	61.626.298.029,5 21.825.644.626	75,97 87,91	Dinas Kesehatan, RSUD Parit Malintang
3	Lingkungan Hidup	115.882.407 -	73.370.000 -	1.492.999.610 402.250.000	584.426.514 20.000.000	2.423.953.663 422.250.000	2.257.849.874 418.490.000	93,19 99,11	Kantor LH Dinas PU
4.	Pekerjaan Umum	12.408.049.543,15	902.215.000	22.312.233.450	152.552.709.700	188.175.207.693,15	171.313.232.760	91,03	Dinas PU
5	Tata Ruang	-	18.317.350	49.200.000	550.000.000	617.517.350	603.073.350	97,66	Dinas PU
6	Perencanaan Pembangunan	2.086.076.718	673.985.000	2.076.281.000	215.800.000	5.052.142.718	4.420.730.015	87,50	Bappeda
7	Perumahan	-	3.500.000	11.500.000	100.000.000	115.000.000	112.645.000	97,95	Dinas PU
8	Kepemudaan dan Olah Raga	2.518.875.570	6.110.000	3.798.821.000	-	6.323.806.570	6.175.580.986	97,66	Disporabudpar
9	Penanaman Modal	-	40.500.000	139.000.000	-	179.500.000	166.362.000	92,68	BPMP2T
10	Koperasi & UKM	3.364.449.986	3.519.974.986	864.800.000	62.838.000	4.447.612.986	4.354.641	98	Dinas Koperindag dan ESDM
11	Kependudukan & Catatan Sipil	1.890.995.368	150.180.000	1.099.324.947	131.638.358	3.321.711.368	2.856.916.336	86	Disdukcapil
12	Ketenagakerjaan	-	1.800.000	426.200.000	-	428.000.000	431.019.150	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja
13	Ketahanan Pangan	-	8.075.000	500.954.994	-	543.000.000	509.029.994	93,74	BP3KKP
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	4.110.000	262.740.000	-	266.850.000	254.298.450	95.30 5	BPMPKB
15	KB dan Keluarga Sejahtera	447.792.500	570.295.000	1.051.140.000	1.433.154.000	3.460.099.000	3.323.564.818	96,05	BKKBD



22	Sosial	4.200.322.655	1.800.000	4.778.314.000	167.700.000	4.947.814.000	4.225.808.464	84	Dinas Sosnaker
23	Budaya	-	600.000	1.157.400.000	-	1.158.000.000	1.149.225.172	99,24	Disporabudpar
24	Statistik	-	56.500.000	124.935.000	-	181.435.000	154.133.666	84,95	Bappeda
25	Kearsipan	-	6.465.000,-	80.953.140,-	-	88.919.750,-	87.418.140,-	98,31	Ktr. Perpus & Arsip
26	Perpustakaan	79.115.900,-	12.990.000,-	474.583.060,-	67.810.000,-	632.997.350,-	620.396.990,-	98,00	Ktr. Perpus & Arsip

## 2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksanaan Urusan Pilihan

No	Urusan Pilihan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	(%)	SKPD Pelaksana
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
1	Kelautan dan Perikanan	3.555.342.810	3.462.407.190	3.131.863.146	1.323.051.146	12.480.828.810	11.700.048.123	93,74	Dinas Kelautan dan Perikanan.
2	Pertanian	8.258.515.618	114.030.000	1.110.439.920	1.760.578.410	3.109.700.000	2.985.048.285	95,99	BP3KKP
		-	181.233.998	28.199.870.500	331.466.002	28.712.570.500	19.777.486.018	97,64	Distannakhut
3	Kehutanan	-	199.806.002	1.500.209.998	-	1.700.016.000	19.755.486.019	97,64	Distannakhut
4	Energi dan SDM	-	7.715.000	11.626.452.068	1.521.684.000	13.155.851.068	-	95	Dinas Koperindag ESDM
5	Pariwisata	-	3.250.000	897.970.000	1.000.000.000	1.901.220.000	851.405.900	44,78	Disporabudpar
6	Industri	-	1.300.000	518.152.999	-	519.542.999	-	81	Dinas Koperindag & ESDM
7	Perdagangan	-	6.940.000	3.064.858.337	42.000.000	3.113.798.337	-	85	Dinas Koperindag & ESDM
8	Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial Tena-ga Kerja.

Ket : Belanja Tidak Langsung disajikan berdasarkan SKPD di salah satu urusan

### 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Dalam pembentukan SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dibentuk melalui beberapa Peraturan Daerah, yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariaman
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Untuk melihat susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta data jumlah personil tahun 2015, dapat dilihat pada tabel berikut :

SKPD	NAMA/ NOMENKLATUR	JUMLAH PNS
Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman	1
Staf Ahli		5
Asisten	1. Asisten Administrasi Pemerintahan 2. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum	1 1 1
Bagian	1. Bagian Pemerintahan Umum 2. Bagian Pemerintahan Nagari 3. Bagian Pertanahan 4. Bagian Hukum 5. Bagian Kesejahteraan Rakyat 6. Bagian Ekonomi dan Pembangunan 7. Bagian PDE 8. Bagian Organisasi dan PAN 9. Bagian Umum dan Protokol 10. Bagian Humas 11. Bagian Keuangan	6 9 4 8 6 10 5 8 20 5 8
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman	22
Inspektorat	Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	35
Dinas Daerah	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Perhubungan komunikasi & Informatika 4. Dinas PU 5. Dinas Koperindag ESDM 6. Dinas Sosial Tenaga Kerja 7. Dinas Pemuda Olah Raga Budaya dan Pariwisata 8. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 10. Dinas Kelautan dan Perikanan 11. Dinas Pertanian Peternakan Kehutanan	4.988 666 41 196 41 45 35 39 25 54 137
Kantor	1. Kantor Lingkungan Hidup 2. Kantor Perpustakaan dan Arsip 3. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	14 10 36 9

Rumah Sakit Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah	127
Lembaga Teknis Lainnya	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37
	2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB	74
	3. Badan Kepegawaian Daerah	94
	4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	92
	5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21
	6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	25
	7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	
Sekretariat Korpri		6
Kecamatan	1. Kecamatan Nan Sabaris	14
	2. Kecamatan Ulakan Tapakis	10
	3. Kecamatan Sungai Geringging	12
	4. Kecamatan Patamuan	11
	5. Kecamatan V Koto Timur	12
	6. Kecamatan Enam Lingkung	17
	7. Kecamatan Padang Sago	11
	8. Kecamatan V Koto Kampung Dalam	15
	9. Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam	12
	10. Kecamatan IV Koto Aur Malintang	9
	11. Kecamatan Lubuk Alung	14
	12. Kecamatan Batang Anai	20
	13. Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung	16
	14. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	12
	15. Kecamatan Sungai Limau	13
	16. Kecamatan VII Koto	15
	17. Kecamatan Batang Gasan	14
Jumlah		7.346

1. Urusan Pendidikan

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.523.400.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 1.354.342.571,00 atau 88,90 %. Adapun indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

- a) Tersedianya surat menyurat Dinas pendidikan Kabupaten Padang Pariaman selama setahun.
- b) Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor selama satu tahun.
- c) Tersedianya honor dan insentif petugas pengelola keuangan SKPD selama satu tahun
- d) Tersedianya jasa kebersihan kantor selama satu tahun.
- e) Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11 (sebelas) surat kabar lokal.
- f) Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman tamu dan rapat kantor selama satu tahun.
- g) Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah selama satu tahun.
- h) Tersedianya Belanja jasa tenaga kerja non pegawai selama satu tahun.

Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi keuangan pada 8 kegiatan dibawah ini kurang dari 90 % karena adanya efisiensi dalam penggunaan dana, Pencapaian kinerja keuangan atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	tahun	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	tahun	96,800,000.00	35,057,830.00	36.22
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1	1	tahun	558,100,000.00	506,940,000.00	90.83
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	1	tahun	35,000,000.00	34,915,900.00	99.76
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	1	tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	1	1	tahun	17,500,000.00	17,192,000.00	98.24
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1	1	tahun	125,000,000.00	123,636,841.00	98.91
8	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran^)	1	1	tahun	636,000,000.00	581,600,000.00	91.45
Jumlah					1,523,400,000.00	1,354,342,571.00	88.90

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 5 (lima) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 305.000.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 282.372.069,00 atau 92,58 %. Adapun indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

- a) Terlaksananya pengadaan meubeleur selama 1 tahun sebanyak 1 (satu) unit
- b) Terlaksananya pengadaan gedung kantor selama 1 tahun sebanyak 9 (Sembilan) unit
- c) Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama satu tahun
- d) Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional untuk roda empat dan roda dua selama satu tahun.
- e) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor selama satu tahun.

Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan atas program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Pengadaan meubeleur	1	1	tahun	10,000,000.00	9,840,000.00	98.40
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1	1	tahun	75,000,000.00	74,665,500.00	99.55
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	1	tahun	100,000,000.00	83,981,500.00	83.98
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1	1	tahun	100,000,000.00	97,333,069.00	97.33
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1	1	tahun	20,000,000.00	16,552,000.00	82.76
JUMLAH					305,000,000.00	282,372,069.00	92.58

### 3. Program peningkatan disiplin aparatur

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 41.650.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 33.615.000,00 atau 80,71%. Adapun indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

- a) Terlaksananya pengadaan pakaian dinas sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) steel pakaian.

Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan atas program peningkatan disiplin aparatur dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1	1	tahun	41,650,000.00	33,615,000.00	80.71
JUMLAH					41,650,000.00	33,615,000.00	80.71

### 4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 30.000.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 29.915.580,00 atau 99.72 %. Adapun indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

- a) Terkirimnya PNS untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis sebanyak 30 orang..

Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan atas Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	tahun	30.000.000,00	29,915,580.00	99.72
JUMLAH					30.000.000,00	29,915,580.00	99.72

#### 5. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 43.500.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 34.368.500,00 atau 79.01 %. Adapun indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

- a) Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 9 (sembilan) dokumen terdidi atas : LAKIP, LPPD, RKA, DPA, DPPA, RENJA, Profil Pendidikan, KUAPPAS, KUAPPASP dsb dan 5 kegiatan yang diikuti untuk mendukung kegiatan tersebut.

Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan atas Program peningkatan kinerja aparatur dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	tahun	43,500,000.00	34,368,500.00	79.01
JUMLAH					43,500,000.00	34,368,500.00	79.01

#### 6. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.497.800.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 2.497.452.000,00 atau 99,99%. Adapun indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:

- a. Tersedianya pengadaan perlengkapan APE PAUD sebanyak 10 paket selama 1 tahun
- b. Tersedianya biaya transportasi guru PAUD sebanyak 535 orang
- c. Telaksananya monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini selama 1 tahun ke seluruh PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
- d. Tersedianya dana Operasional Sekolah Untuk TK Pembina Kabupaten di kecamatan Enam Lingsung selama 1 tahun

- e. Tersedianya dana Operasional Sekolah Untuk TK Pembina Kecamatan di Kecamatan Batang Anai selama 1 tahun
- f. Terlaksananya kegiatan JAMBORE PAUD yang diikuti 100 orang peserta
- g. Terlaksananya Jambore PTK PAUDNI yang diikuti 4 orang peserta
- h. Tersediannya Insentif Guru Honorer Jenjang TK sebanyak 111 orang per bulan

Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan atas Program pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Pengadaan perlengkapan sekolah	1	1	tahun	50,000,000.00	49,975,000.00	99.95
2	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1	1	tahun	1,926,000,000.00	1,926,000,000.00	100.00
3	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	1	1	tahun	21,000,000.00	20,920,000.00	99.62
4	Penyediaan Dana Operasional Sekolah Untuk TK Pembina Kabupaten <sup>^</sup> )	1	1	tahun	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00
5	Penyediaan Dana Operasional Sekolah Untuk TK Pembina Kecamatan <sup>^</sup> )	1	1	tahun	35,000,000.00	34,762,000.00	99.32
6	Jambore PAUD <sup>^</sup> )	1	1	tahun	10,000,000.00	9,996,000.00	99.96
7	Jambore PTK PAUDNI	1	1	tahun	10,000,000.00	9,999,000.00	99.99
8	Penyediaan Insentif Guru Honorer Jenjang TK	1	1	tahun	400,800,000.00	400,800,000.00	100.00
JUMLAH					2,497,800,000.00	2,497,452,000.00	99.99

#### 7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 16 (enam belas) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 6,965,665,000.00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 6,918,059,510.00 atau 99,32 %. Adapun indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

- a. Tersedianya Dana Operasional dan Pembinaan Manajemen BOS Tingkat Kabupaten selama 1 tahun kepada 410 SD, 60 SMP dan 38 SMA se Kabupaten Padang Pariaman
- b. Terselenggaranya Olimpiade Sain Siswa Nasional (OSSN) Tingkat SD/SMP yang diikuti oleh SD (410 SD x 2 orang x 3 MP = 2.460 orang) dan SMP (60 SMP x 1 orang x 3 MP = 180 orang)
- c. Terselenggaranya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD/SMP SD yang diikuti oleh dimana (410 SD x 2 orang x 3 MP = 2.460 orang) dan SMP (60 SMP x 1 orang x 3 MP = 180 orang)
- d. Terselenggaranya kegiatan Lomba Mata Pelajaran dan Kreatifitas Siswa SD yang diikuti oleh SD (410 SD x 2 orang x 3 MP = 2.460 orang)
- e. Terselenggaranya kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD/SMP yang diikuti (410 SD x 2 orang x 3 MP = 2.460 orang) dan SMP (60 SMP x 1 orang x 3 MP = 180 orang)
- f. Tersedianya Insentif Guru Honorer Jenjang Pendidikan Dasar sebanyak 1.289 orang dan Honor Operator Sekolah sebanyak (410 SD dan 60 SMP)
- g. Terselenggaranya Ujian Sekolah (US) SD/MI) sebanyak 410 Sekolah
- h. Terselenggaranya Pengadaan Ruang Kelas (sharing Provinsi) sebanyak 10 Sekolah

- i. Terselenggaranya Kegiatan DAK Pendidikan SD/SDLB serta pendamping.
- j. Terselenggaranya Kegiatan DAK Pendidikan SMP/SMPLB serta pendamping.
- k. Terselenggaranya Pembanguna sarana air bersih dan sanitary untuk 44 SD dan 2 SMP
- l. Tersedianya Dana Operasional Sekolah TK/SD Model selama 1 tahun
- m. Tersedianya Dana Operasional UPTD untuk 17 UPTD
- n. Tersedianya Dana Operasional SMP Satu Atap untuk 12 SMP

Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan atas Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Penyediaan Dana Operasional dan Pembinaan Manajemen BOS Tingkat Kabupaten	1	1	tahun	39.200.000,00	34.289.000,00	87.47
2	Olimpiade Sain Siswa Nasional (OSSN) Tingkat SD/SMP	1	1	tahun	33,500,000.00	23,260,000.00	69.43
3	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD/SMP	1	1	tahun	22,000,000.00	18,192,000.00	82.69
4	Lomba Mata Pelajaran dan Kreativitas Siswa SD	1	1	tahun	20,000,000.00	14,190,000.00	70.95
5	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD/SMP	1	1	tahun	55,100,000.00	51,841,250.00	94.09
6	Penyediaan Insentif Guru Honorer Jenjang Pendidikan Dasar	1	1	tahun	5,479,200,000.00	5,396,400,000.00	98.49
7	Ujian Sekolah (US) SD/MI)	1	1	tahun	28,000,000.00	26,750,000.00	95.54
8	Pengadaan Ruang Kelas (sharing Provinsi)	1	1	tahun	650,000,000.00	634,459,300.00	97.61
9	Kegiatan DAK Pendidikan SD/SDLB	1	1	tahun	15,845,400,000.00	14,681,325,930.00	92.65
10	Kegiatan DAK Pendidikan SD/SDLB (Dana Pendamping)	1	1	tahun	2,456,037,000.00	2,289,418,109.00	93.22
11	Kegiatan DAK Pendidikan SMP/SMPLB	1	1	tahun	5,333,200,000.00	5,058,507,121.00	94.85
12	Kegiatan DAK Pendidikan SMP/SMPLB (Dana Pendamping)	1	1	paket	826,646,000.00	792,260,172.00	95.84
13	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	1	1	tahun	4,600,000,000.00	4,358,668,846.00	94.75
14	Penyediaan Dana Operasional Sekolah TK/SD Model	1	1	tahun	75,000,000.00	69,889,000.00	93.19
15	Penyediaan Dana Operasional UPTD	1	1	tahun	217,999,600.00	203,678,196.00	93.43
16	Penyediaan Dana Operasional SMP Satu Atap	1	1	tahun	89,500,800.00	89,500,800.00	100,00
JUMLAH					35,770,783,400.00	33,742,629,724.00	94.33

## 8. Program Pendidikan Menengah

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 16.179.046.300,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 15.563.832.916,00 atau 96,20%. Adapun indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Kegiatan Lomba Kreativitas Siswa (LKS) pada 15 SMK se Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Terlaksananya Kegiatan Ujian Nasional (UN) Ujian Nasional (UN) SMP/MTSN, SMA/SMK yang diikuti oleh 60 SMP dan 38 SMA seluruh Kabupaten Padang Pariaman

- c. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Siswa Berprestasi Olimpiade Sains SMA yang diikuti 15 orang peserta
- d. Terlaksananya Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMA yang diikuti oleh 38 Sekolah Se Kabupaten Padang Pariaman
- e. Tersedianya Operasional Bea Siswa Bagi Keluarga Tidak Mampu dengan target tingkat TK sebanyak 80 orang, tingkat SD sebanyak 2.142 orang, tingkat SMP sebanyak 2.000 orang, Tingkat SMA/SMK sebanyak 2.857 orang dan Perguruan Tinggi sebanyak 500 orang.
- f. Terlaksananya Kegiatan Seleksi Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSSN) Tingkat SMA sebanyak (23 sekolah x 9 MP x 3 orang = 621 orang)
- g. Terlaksananya kegiatan MGMP SMP/SMA dimana Tingkat SMA/SMK terdiri atas 9 Mata Pelajaran dan SMP 14 Mata Pelajaran.
- h. Tersedianya operasional Akademi Komoditas selama 1 Tahun
- i. Tersedianya Insentif Guru Honorer jenjang Pendidikan Menengah sebanyak 605 orang dan Honor Operator Sekolah sebanyak 38 Sekolah.
- j. Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Ruang Kelas Baru Bagi SMP (Dana Sharing) sebanyak 10 Sekolah
- k. Terlaksananya Pengadaan Ruang Kelas Baru Bagi SMA/SMK (Dana Sharing) sebanyak 10 Sekolah
- l. Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Mebelair Bagi SD/SMP (Dana Sharing) sebanyak 50 Ruang Sekolah
- m. Terlaksananya Kegiatan DAK Pendidikan SMA dan pendamping
- n. Terlaksananya Kegiatan DAK Pendidikan SMK dan Pendamping
- o. Tersedianya Biaya Operasional SMA/SMK sebanyak 23 Sekolah

Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan atas Program pendidikan menengah dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Lomba Kreatifitas Siswa (LKS)	1	1	tahun	26,000,000.00	995,000.00	3.83
2	Ujian Nasional (UN) SMP/MTSN, SMA/SMK	1	1	tahun	23,000,000.00	11,403,200.00	49.58
3	Pelatihan Siswa Berprestasi Olimpiade Sains SMA	1	1	tahun	35,000,000.00	25,156,000.00	71.87
4	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMA	1	1	tahun	44,500,000.00	43,010,000.00	96.65
5	Operasional Bea Siswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	1	1	tahun	10,000,000.00	7,980,000.00	79.80
6	Seleksi Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSSN)	1	1	tahun	20,000,000.00	17,074,000.00	85.37
7	Pemberdayaan MGMP SMP/SMA	1	1	tahun	260,000,000.00	249,390,000.00	95.92
8	Operasional Akademi Komoditas	1	1	tahun	300,000,000.00	295,149,278.00	98.38
9	Penyediaan Insentif Guru Honorer Jenjang Pendidikan Menengah	1	1	tahun	1,456,200,000.00	1,418,400,000.00	97.40
10	Pengadaan Ruang Kelas Baru Bagi SMP (Dana Sharing)	1	1	tahun	750,000,000.00	747,415,000.00	99.66
11	Pengadaan Ruang Kelas Baru Bagi SMA/SMK (Dana Sharing)	1	1	tahun	1,000,000,000.00	997,929,950.00	99.79
12	Pengadaan Mebelair Bagi SD/SMP (Dana Sharing)	1	1	tahun	500,000,000.00	406,968,250.00	81.39
13	Kegiatan DAK Pendidikan SMA	1	1	tahun	4,129,390,000.00	3,896,184,719.00	94.35

					00	0	
14	Kegiatan DAK Pendidikan SMA (Dana Pendamping)	1	1	tahun	640,055,400.00	596,640,024.00	93.22
15	Kegiatan DAK Pendidikan SMK	1	1	tahun	5,380,780,000.00	5,291,178,000.00	98.33
16	Kegiatan DAK Pendidikan SMK (Dana Pendamping)	1	1	tahun	834,020,900.00	823,556,495.00	98.75
17	Penyediaan Biaya Operasional SMA/SMK	1	1	tahun	770,100,000.00	735,403,000.00	95.49
JUMLAH					16,179,046,300.00	15,563,832,916.00	96.20

## 9. Program Pendidikan Non Formal

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 11 (sebelas) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 519.000.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 450.665.655,00 atau 86,83 %. Adapun indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Setara SD sebanyak 2 Kelompok
- b. Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP\* sebanyak 2 kelompok
- c. Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA\* sebanyak 2 kelompok
- d. Tersedianya Dana Operasional SKB Sungai Limau\* selama 1 tahun
- e. Tersedianya Dana Opeasional Rumah Baca Masyarakat selama 1 tahun
- f. Terselenggaranya Kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) dengan melibatkan 100 anak
- g. Terselenggaranya Ujian Nasional Paket A dan B dengan peserta sebanyak 100 peserta
- h. Terselenggaranya Ujian Nasional Paket C dengan peserta sebanyak 75 peserta
- i. Terlaksananya Kegiatan Penuntasan Buta Aksara >15 Tahun (Dana Sharing) sebanyak 17 kelompok
- j. Terlaksananya Biaya Operasional SKB (dana sharing)
- k. Tersedianya Insentif guru SLB (Non PNS) sebanyak 11 orang

Pada pelaksanaan program ini, dari beberapa indikator ada 1 kegiatan yang tidak mencapai dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan atas Program pendidikan non-formal dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Tar get	Re alis asi	Satua n		(Rp)	(%)
1	Penyelenggaraan Paket A Setara SD*	1	1	tahun	25,000,000.00	24,649,000.00	98.60
2	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP*	1	1	tahun	25,000,000.00	24,605,000.00	98.42
3	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA*	1	1	tahun	25,000,000.00	24,769,000.00	99.08
4	Penyediaan Dana Operasional SKB Sungai Limau*	1	1	tahun	100,000,000.00	96,836,180.00	96.84
5	Penyediaan Dana Opeasional Rumah Baca Masyarakat*	1	1	tahun	40,000,000.00	39,998,000.00	100.00
6	Penyelenggaran Hari Anak Nasional (HAN)	1	1	tahun	20,000,000.00	19,980,000.00	99.90
7	Penyelenggara Ujian Nasional Paket A dan B	1	1	tahun	15,000,000.00	10,777,000.00	71.85
8	Penyelenggara Ujian Nasional	1	1	tahun	13,000,000.00	9,614,000.00	73.95

Paket C							
9	Penuntasan Buta Aksara > 15 Tahun (Dana Sharing)	1	1	tahun	41,400,000.00	0.00	0.00
10	Biaya Operasional SKB (dana sharing)	1	1	tahun	175,000,000.00	159,837,475.00	91.34
11	Insentif guru SLB (Non PNS)	1	1	tahun	39,600,000.00	39,600,000.00	100.00
JUMLAH					519,000,000.00	450,665,655.00	86.83

#### 10. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 355.000.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 292.688.900,00 atau 82,45 %. Adapun indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya kegiatan Sertifikasi Pendidik pada seluruh Tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK sederajat selama 1 tahun sebanyak 4000 orang
- b. Terlaksananya Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan selama 1 tahun yang dilakukan oleh seluruh pengawas sekolah dengan menyediakan dana transportasi untuk pengawas satuan pendidik sebanyak 54 orang
- c. Terselenggaranya Ujian Sekolah (US) SMP, dan SMA yang diikuti 60 Tingkat SMP dan 38 tingkat SMA/SMK sederajat
- d. Terlaksananya Seleksi Guru dan Pengawas Berprestasi
- e. Terselenggaranya kegiatan Akreditasi Sekolah
- f. Terselenggaranya Kegiatan Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2015
- g. Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah tingkat SD sebanyak 410 sekolah, tingkat SMP sebanyak 60 sekolah dan tingkat SMA/SMK sebanyak 38 sekolah.

Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan atas Program mutu pendidikan dan tenaga kependidikan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	1	1	tahun	35,000,000.00	20,705,500.00	59.16
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	1	tahun	150,000,000.00	147,763,200.00	98.51
3	Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) SMP, SMP, SMA	1	1	tahun	12,000,000.00	11,515,000.00	95.96
4	Seleksi Guru dan Pengawas Berprestasi	1	1	tahun	20,000,000.00	14,468,800.00	72.34
5	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	1	1	tahun	73,000,000.00	43,766,400.00	59.95
6	Penyelenggaraan Hari Pendidikan Nasional	1	1	tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
7	Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah	1	1	tahun	50,000,000.00	39,470,000.00	78.94
JUMLAH					355,000,000.00	292,688,900.00	82.45

#### 11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 122.500.000,00. Dari jumlah anggaran

tersebut direalisasikan sebesar Rp 99.186.500,00 atau 80,97%. Adapun indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

- a) Tersedianya operasional kegiatan Penetapan Angka Kredit Guru
- b) Terlaksananya kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD, SMP, SMA/SMK dengan sampel sekolah
- c) Tersedianya Operasional Pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dimana sekolah yang tesosialisasi sebanyak 410 sekolah tingkat SD, 60 sekolah tingkat SMP dan 38 sekolah tingkat SMA/SMK
- d) Terlaksananya Pengembangan Kurikulum dengan SMA/SMK sebanyak 9 Mata Pelajaran dan SMP sebanyak 14 Mata Pelajaran

Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan atas Program mutu pendidikan dan tenaga kependidikan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Targe t	Realisa si	Satua n		(Rp)	(%)
1	Penetapan Angka Kredit Guru	1	1	tahun	20,000,000.00	19,865,000.00	99.33
2	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD, SMP, SMA/SMK	1	1	tahun	16,500,000.00	16,046,100.00	97.25
3	Operasional Pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	1	1	tahun	36,000,000.00	26,896,400.00	74.71
4	Pengembangan Kurikulum				50,000,000.00	36,379,000.00	72.76
JUMLAH					122,500,000.00	99,186,500.00	80.97

## 12. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.530.000.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 2.415.251.420,00 atau 95.46%. Adapun indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

- a) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah digunakan untuk pembebasan lahan dan penggantian tanaman yang berada di lahan Akademi Komoditas di Sungai Sirah Kecamatan Sungai Limau

2. Urusan Kesehatan  
 a. Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan  
 1. Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>38,353,226,295</b>	<b>18,431,825,397</b>	<b>48.06</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2,020,890,000</b>	<b>1,771,295,942</b>	<b>87.65</b>
1	Penyedia jasa surat menyurat	118,000,000	117,961,000	99.97
2	Penyedia jasa komunikasi & sumber daya air, listrik	102,000,000	101,114,292	99.13
3	Penyedia jasa Adm keuangan	602,340,000	411,627,500	68.34
4	Penyedia jasa kebersihan kantor	97,350,000	94,635,676	97.21
5	Penyedia bahan bacaan perundang2 an	5,000,000	5,000,000	100.00
6	Penyedia makan minum	59,250,000	39,462,000	66.60
7	Rapat2 koordinasi konsul luar daerah	150,000,000	149,967,974	99.98
8	Penyedia jasa pendukung adm perkantoran	171,950,000	141,653,000	82.38
9	Penyediaan jasa tenaga shift puskesmas rawatan	715,000,000	709,874,500	99.28
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1,125,100,000</b>	<b>1,081,065,382</b>	<b>96.09</b>
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	144,500,000	144,111,000	99.73
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	228,750,000	226,444,500	98.99
3	Pengadaan meubelair	259,000,000	244,059,500	94.23
4	Pengadaan Alat Laboratorium	157,850,000	157,850,000	100.00
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	150,000,000	149,575,000	99.72
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	105,000,000	94,025,882	89.55
7	Pem Rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor	30,000,000	29,999,500	100.00
8	Rehab sedang/ berat gedung kantor	50,000,000	35,000,000	70.00
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>200,000,000</b>	<b>343,852,500</b>	<b>171.93</b>
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	200,000,000	194,180,000	97.09
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>158,325,000</b>	<b>149,672,500</b>	<b>94.53</b>
1	Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	#DIV/0!
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	8,925,000	8,696,000	97.43
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	124,400,000	124,105,000	99.76
4	Penataan administrasi kepegawaian	25,000,000	16,871,500	67.49
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>40,000,000</b>	<b>39,941,100</b>	<b>99.85</b>
1	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40,000,000	39,941,100	99.85
<b>VI</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>1,875,485,000</b>	<b>1,754,347,784</b>	<b>93.54</b>
1	Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan (DAK)	1,844,315,000	1,723,608,784	93.46
2	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sediaan Farmasi di Puskesmas	31,170,000	30,739,000	98.62

<b>VII</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>158,600,000</b>	<b>91,915,000</b>	<b>57.95</b>
1	Peningkt pel kes bg korban pengungsi Bencana	30,000,000	27,535,000	91.78
2	Peningkt pel & penanggulangan masalah kes	98,000,000	37,110,000	37.87
3	Penilaian Puskesmas berprestasi	30,600,000	27,270,000	89.12
<b>VIII</b>	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>13,050,000</b>	<b>13,050,000</b>	<b>100.00</b>
1	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	13,050,000	13,050,000	100.00
<b>IX</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>359,000,000</b>	<b>250,767,100</b>	<b>69.85</b>
1	Pengem. media promosi informasi sadar hidup sehat	214,000,000	122,441,800	57.22
2	Peningkatan Kapasitas Pengelola UKBM dan Batra di Tingkat Puskesmas, Bides, Toma dan Kader	47,000,000	40,385,000	85.93
3	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan	98,000,000	87,940,300	89.74
<b>X</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>397,000,000</b>	<b>376,442,000</b>	<b>94.82</b>
1	Pemberian tambahan makanan & vitamin	99,000,000	91,718,000	92.64
2	Pengadaan MP ASI	75,000,000	72,259,000	96.35
3	Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kes dan Kader	150,000,000	139,565,000	93.04
4	Survey Pemantauan Status Gizi	73,000,000	72,900,000	99.86
<b>XI</b>	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>672,500,000</b>	<b>659,178,880</b>	<b>98.02</b>
1	Surveilan Kualitas Air	55,000,000	50,756,780	92.29
2	Pansimas Komponen B	25,000,000	24,636,000	98.54
3	Persiapan Pelaksanaan Kabupaten Sehat	592,500,000	583,786,100	98.53
<b>X</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>702,090,000</b>	<b>687,503,100</b>	<b>97.92</b>
2	Pelayanan pencegahan penang peny menular	70,000,000	65,465,000	93.52
3	Peningkatan imunisasi	73,000,000	70,488,100	96.56
4	Peningkatan surveilance dan epidemiologi/wabah	46,910,000	44,891,000	95.70
5	Pengobatan Massal Filariasis	462,180,000	456,935,000	98.87
6	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	50,000,000	49,724,000	99.45
<b>XIII</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>251,265,000</b>	<b>186,023,300</b>	<b>74.03</b>
1	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	251,265,000	186,023,300	74.03
<b>XII</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya</b>	<b>3,591,680,000</b>	<b>3,268,243,500</b>	<b>90.99</b>
1	Pengadaan sarana & prasarana puskesmas	3,591,680,000	3,268,243,500	90.99
<b>XIII</b>	<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>3,169,733,000</b>	<b>3,158,082,890</b>	<b>99.63</b>
1	Pengem Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato(JKS Sakato)	3,169,733,000	3,158,082,890	99.63
<b>XIV</b>	<b>Program Peningkatan Kesehatan Lansia</b>	<b>74,000,000</b>	<b>73,455,050</b>	<b>99.26</b>
1	Pelayanan kesehatan lansia	74,000,000	73,455,050	99.26
<b>XV</b>	<b>Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan</b>	<b>10,000,000</b>	<b>9,330,000</b>	<b>93.30</b>
1	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	10,000,000	9,330,000	93.30

<b>XVI</b>	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	<b>340,900,000</b>	<b>338,534,000</b>	<b>99.31</b>
1	Peny. Kes bagi ibu hamil dri keluarga kurang mampu	50,000,000	48,850,000	<b>97.70</b>
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KB Kes-KSI)	150,900,000	150,870,000	<b>99.98</b>
3	Penjaringan kesehatan anak sekolah dan remaja	75,000,000	74,990,000	<b>99.99</b>
4	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan tentang Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	40,000,000	39,360,000	<b>98.40</b>
5	Rakor Pelayanan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (KTA/P)	25,000,000	24,464,000	<b>97.86</b>
<b>XVII</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3,997,136,500</b>	<b>3,500,108,069</b>	<b>87.57</b>
1	Operasional Puskesmas Anduring	144,000,000	141,034,787	<b>97.94</b>
2	Operasional Puskesmas Batu Basa	171,000,000	168,968,915	<b>98.81</b>
3	Operasional Puskesmas Gasan Gadang	121,500,000	119,413,121	<b>98.28</b>
4	Operasional Puskesmas Ketaping	129,600,000	117,442,000	<b>90.62</b>
5	Operasional Puskesmas Kampung Dalam	157,500,000	141,101,721	<b>89.59</b>
6	Operasional Puskesmas Kampung Guci	108,900,000	97,387,023	<b>89.43</b>
7	Operasional Puskesmas Koto Bangko	130,500,000	125,988,800	<b>96.54</b>
8	Operasional Puskesmas Kayu Tanam	157,500,000	139,102,956	<b>88.32</b>
9	Operasional Puskesmas Limau purut	117,000,000	91,516,673	<b>78.22</b>
10	Operasional Puskesmas Lubuk Alung	166,500,000	156,472,350	<b>93.98</b>
11	Operasional Puskesmas Padang Alai	157,500,000	141,947,621	<b>90.13</b>
12	Operasional Puskesmas Padang Sago	118,800,000	94,597,873	<b>79.63</b>
13	Operasional Puskesmas Pakandangan	135,900,000	134,876,909	<b>99.25</b>
14	Operasional Puskesmas Pasar Usang	166,500,000	127,241,826	<b>76.42</b>
15	Operasional Puskesmas Patamuan	115,200,000	113,624,116	<b>98.63</b>
16	Operasional Puskesmas Sungai Geringging	153,000,000	151,163,558	<b>98.80</b>
17	Operasional Puskesmas Sungai Limau	175,500,000	126,303,854	<b>71.97</b>
18	Operasional Puskesmas Sungai Sariak	163,800,000	150,182,271	<b>91.69</b>
19	Operasional Puskesmas Sicincin	161,100,000	156,900,360	<b>97.39</b>
20	Operasional Puskesmas Sikabu	155,700,000	115,455,295	<b>74.15</b>
21	Operasional Puskesmas Sintuk	143,100,000	141,653,000	<b>98.99</b>
22	Operasional Puskesmas Ulakan	134,100,000	104,882,097	<b>78.21</b>
23	Operasional Puskesmas Pauh Kamar	172,800,000	156,335,737	<b>90.47</b>
24	Operasional Puskesmas Ampalu	117,000,000	113,879,050	<b>97.33</b>
25	Operasional Puskesmas Sikucur	126,000,000	120,259,100	<b>95.44</b>
26	Operasional Instalasi Farmasi	253,136,500	252,377,056	<b>99.70</b>
27	Operasional Laboratorium Daerah	144,000,000	139,812,500	<b>97.09</b>
<b>XVII</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>19,196,471,795</b>	<b>679,017,300</b>	<b>3.54</b>
1	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Kapitasi) Pusk Anduring	236,349,000	-	<b>0.00</b>

	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Anduring	8,500,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Anduring (Silva Jan s.d April 2014)	15,636,000	6,120,000	<b>39.14</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Anduring (Silva Mei s.d Desember 2014)	35,088,700		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pus Anduring (Non Kapitasi tahun 2014)	14,400,000	10,071,600	<b>69.94</b>
2	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Batu Basa	677,731,500	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Batu Basa	27,500,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Batu Basa (Silva Jan s.d April 2014)	79,910,700	14,464,800	<b>18.10</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Batu Basa (Silva Mei s.d Desember 2014)	100,099,300		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Batu Basa (Non Kapitasi tahun 2014)	21,375,000	5,460,000	<b>25.54</b>
3	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Gasan Gadang	434,137,500	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Gasan Gadang	15,235,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Gasan Gadang (Silva Jan s.d April 2014)	102,762,900	16,408,800	<b>15.97</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Gasan Gadang (Silva Mei s.d Desember 2014)	112,498,750		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Gasan gadang (Non Kapitasi tahun 2014)	12,600,000	8,820,000	<b>70.00</b>
4	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ketaping	321,736,000	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Ketaping	9,000,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ketaping (Silva Jan s.d April 2014)	88,031,000	22,712,000	<b>25.80</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ketaping (Silva Mei s.d Desember 2014)	63,262,450		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pus Ketaping (Non Kapitasi tahun 2014)	4,800,000		<b>0.00</b>
5	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Dalam	524,550,000	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Kampung Dalam	24,000,000	5,339,600	<b>22.25</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Dalam (Silva Jan s.d April 2014)	118,030,000	23,552,000	<b>19.95</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Dalam (Silva Mei s.d Desember 2014)	76,230,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Dalam (Non Kapitasi tahun 2014)	20,300,000	14,201,600	<b>69.96</b>
6	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Guci	212,323,500	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Kampung Guci	600,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Guci (Silva Jan s.d April 2014)	49,586,400	7,574,400	<b>15.28</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Guci (Silva Mei s.d Desember 2014)	51,724,350		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kampung Guci (Non Kapitasi tahun 2014)	600,000		<b>0.00</b>
7	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Koto Bangko	292,544,500	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Koto Bangko	7,790,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Koto Bangko (Silva Jan s.d April 2014)	49,107,000	6,072,000	<b>12.36</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Koto Bangko (Silva Mei s.d Desember 2014)	47,082,500		<b>0.00</b>
8	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kayu Tanam	641,422,000	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Kayu Tanam	19,475,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kayu Tanam (Silva Jan s.d April 2014)	128,692,800	23,107,200	<b>17.96</b>

	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kayu Tanam (Silva Mei s.d Desember 2014)	186,904,250		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Kayu Tanam (Non Kapitasi tahun 2014)	19,475,000	13,632,500	<b>70.00</b>
9	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Limau purut	275,820,000	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Limau Purut	2,600,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Limau Purut (Silva Jan s.d April 2014)	61,326,000	9,840,000	<b>16.05</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Limau Purut (Silva Mei s.d Desember 2014)	78,110,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Limau Purut (Non Kapitasi tahun 2014)	8,400,000		<b>0.00</b>
10	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Lubuk Alung	1,224,641,800	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Lubuk Alung	16,290,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Lubuk Alung (Silva Jan s.d April 2014)	211,058,000	48,057,600	<b>22.77</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Lubuk Alung (Silva Mei s.d Desember 2014)	221,459,462		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Lubuk Alung (Non Kapitasi tahun 2014)	16,375,000		<b>0.00</b>
11	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Alai	108,976,011	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Padang Alai	5,400,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Alai (Silva Jan s.d April 2014)	22,137,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Alai (Silva Mei s.d Desember 2014)	16,779,000		<b>0.00</b>
12	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Sago	308,665,000	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Padang Sago	8,200,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Sago (Silva Jan s.d April 2014)	40,836,000	11,624,000	<b>28.47</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Padang Sago (Silva Mei s.d Desember 2014)	47,197,000		<b>0.00</b>
13	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pakandangan	537,738,000	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Pakandangan	15,000,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pakandangan (Silva Jan s.d April 2014)	107,446,000	24,080,000	<b>22.41</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pakandangan (Silva Mei s.d Desember 2014)	90,633,100		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pakandangan (Non Kapitasi tahun 2014)	12,746,000	8,922,200	<b>70.00</b>
14	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pasar Usang	795,822,000	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Pasar Usang	35,000,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pasar Usang (Silva Jan s.d April 2014)	191,856,000	34,348,800	<b>17.90</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pasar Usang (Silva Mei s.d Desember 2014)	207,585,400		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pasar Usang (Non Kapitasi tahun 2014)	35,875,000	25,112,500	<b>70.00</b>
15	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Patamuan	661,855,000	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Patamuan	7,900,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Patamuan (Silva Jan s.d April 2014)	152,591,000	21,584,000	<b>14.15</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Patamuan (Silva Mei s.d Desember 2014)	109,399,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Patamun (Non Kapitasi tahun 2014)	10,800,000	7,560,000	<b>70.00</b>
16	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Geringging	539,205,000	-	<b>0.00</b>

	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Sei Geringging	12,500,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Geringging (Silva Jan s.d April 2014)	42,021,500	16,408,000	<b>39.05</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Geringging (Silva Mei s.d Desember 2014)	37,656,000		<b>0.00</b>
17	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Limau	1,276,839,500	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Sei Limau	32,000,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Limau (Silva Jan s.d April 2014)	115,670,600	28,377,600	<b>24.53</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Limau (Silva Mei s.d Desember 2014)	160,352,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sei Limau (Non Kapitasi tahun 2014)	57,950,000		<b>0.00</b>
18	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Sariak	762,170,000	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Sungai Sariak	32,200,000	17,227,000	<b>53.50</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Sariak (Silva Jan s.d April 2014)	187,940,000	31,472,000	<b>16.75</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Sariak (Silva Mei s.d Desember 2014)	177,145,399		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sungai Sariak (Non Kapitasi tahun 2014)	30,475,000	21,332,500	<b>70.00</b>
19	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sicincin	416,231,800	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Sicincin	9,575,000	6,566,000	<b>68.57</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sicincin (Silva Jan s.d April 2014)	55,129,400	18,192,000	<b>33.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sicincin (Silva Mei s.d Desember 2014)	24,169,746		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sicincin (Non Kapitasi tahun 2014)	9,575,000	6,702,500	<b>70.00</b>
20	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikabu	93,290,000	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Sikabu	3,400,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikabu (Silva Jan s.d April 2014)	11,280,300	4,512,000	<b>40.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikabu (Silva Mei s.d Desember 2014)	19,853,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikabu (Non Kapitasi tahun 2014)	2,400,000		<b>0.00</b>
21	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sintuk	613,190,000	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Sintuk	25,000,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sintuk (Silva Jan s.d April 2014)	103,581,600	11,760,000	<b>11.35</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sintuk (Silva Mei s.d Desember 2014)	121,107,000		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sintuk (Non Kapitasi tahun 2015)	19,800,000	13,860,000	<b>70.00</b>
22	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ulakan	695,074,500	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Ulakan	12,000,000	2,520,000	<b>21.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ulakan (Silva Jan s.d April 2014)	162,460,800	24,199,200	<b>14.90</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ulakan (Silva Mei s.d Desember 2014)	158,936,100		<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ulakan (Non Kapitasi tahun 2014)	13,800,000	9,660,000	<b>70.00</b>
23	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pauh Kamar	1,160,610,000	-	<b>0.00</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Pauh Kamar	24,500,000	17,552,500	<b>71.64</b>
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pauh Kamar (Silva Jan s.d April 2014)	233,044,127	53,462,400	<b>22.94</b>

	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Pauh Kambar (Silva Mei s.d Desember 2014)	342,721,000		0.00
24	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ampalu	377,425,000	-	0.00
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Ampalu	8,000,000		0.00
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ampalu (Silva Jan s.d April 2014)	92,815,000	17,656,000	19.02
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Ampalu (Silva Mei s.d Desember 2014)	68,156,000		0.00
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pus Ampalu (Non Kapitasi tahun 2014)	5,400,000		0.00
25	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikucur	269,406,000	-	0.00
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN (Non Kapitasi) Pusk Sikucur	6,800,000		0.00
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikucur (Silva Jan s.d April 2014)	22,230,000	8,892,000	40.00
	Peningkatan Pelayanan Kes. JKN Pusk Sikucur (Silva Mei s.d Desember 2014)	53,777,550		0.00
		<b>38,353,226,295</b>	<b>18,431,825,397</b>	48.06

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Urusan Kesehatan mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 8, dengan tingkat pencapaian masing-masingnya sebagai berikut :

### Tingkat Pencapaian SPM Kesehatan/ IKK Tahun 2015

No	Indikator SPM/ IKK	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	75	82,31
2.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	89	84,02
3.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95	70,3
4.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100
5.	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	83	83,9
6.	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100
7.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	80	65,8
8.	Cakupan kunjungan bayi	89	85,68

#### 1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama}} \times 100\% = \frac{1513}{1858} \times 100\% = 82,31\%$$

Pencapaian cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani secara definitive oleh tenaga kesehatan yang kompeten sebesar 82,31 %. Bila

dibandingkan target kinerja SKPD Dinas Kesehatan tahun 2015 yang harus dicapai yaitu sebesar 75%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sudah mulai baik, dengan perkataan lain kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan secara professional kepada ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi harus lebih ditingkatkan. Karena masih ada ibu hamil, nifas dan ibu bersalin dengan komplikasi yang belum tertangani sampai pada pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan.

Disisi lain masih kurangnya pemahaman ibu hamil, bersalin dan nifas tentang pentingnya penanganan kasus komplikasi kehamilan oleh tenaga kesehatan. Disamping itu juga karena sarana peralatan dan pengalaman tenaga bides yang masih belum memadai.

Solusi yang perlu diambil adalah peningkatan upaya penyuluhan kepada masyarakat dan peningkatan sarana peralatan penanganan kehamilan standar di setiap polindes/ pustu dan puskesmas. Peningkatan kemampuan tenaga bida desa terhadap penanganan kasus bumil resti/ komplikasi melalui pelatihan dan pertemuan berkala dengan memberdayakan bidan koordinator.

2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah}} \times 100\% = \frac{7370}{8772} \times 100\% = 84,02\%$$

Kerja dalam kurun waktu yg sama

Sasaran kinerja diatas terealisasi : 84,02 % dari target 89 % yang telah ditetapkan di dalam SPM. Berdasarkan data tahun 2015 dari 8.772 sasaran ibu bersalin sebanyak 7.370 orang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Artinya sisanya masih melakukan persalinan oleh tenaga non kesehatan yang belum memiliki kompetensi kebidanan seperti dukun, dan lain-lain.

Masalah yang dihadapi : Banyaknya persalinan yang dilakukan di tenaga non kesehatan (dukun) karena persalinan yang sudah dilakukan selama bertahun tahun dan dikerjakan secara turun menurun sehingga kepercayaan masyarakat sangat tinggi kepada tenaga non kesehatan tersebut.

Solusi yang perlu diambil : peningkatan upaya penyuluhan kepada masyarakat dan peningkatan upaya kunjungan rumah dan penjangkaran dan monitoring oleh tenaga kesehatan baik oleh tenaga kesehatan puskesmas/ bides. Peningkatan upaya kemitraan dukun dengan dokter/ bides setempat.

3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100\% = \frac{312}{444} \times 100\% = 70,3\%$$

Sasaran kinerja diatas terealisasi : 70,3 % dari target 95 % yang telah ditetapkan di dalam SPM. Berdasarkan data tahun 2015 dari 444 desa/korong baru 312 desa/korong yang telah mencapai target UCI untuk antigen yang dihitung yaitu 70,3 %.

Masalah yang dihadapi : masih kurangnya pengetahuan masyarakat memahami pentingnya imunisasi bagi anaknya, tingginya estimasi sasaran bayi, kelahiran rendah sehingga persentase cakupan akan menjadi rendah, sasaran banyak yang pulang ke kampung atau tempat asal mereka untuk melahirkan, setelah anaknya berumur lebih kurang 6 bulan kembali lagi ke tempat mereka sehingga imunisasi anaknya tidak lengkap mengakibatkan cakupan juga rendah.

Solusi yang perlu diambil : meningkatkan pengetahuan semua petugas pelaksana imunisasi dilapangan/posyandu dengan cara : Pelatihan, OJT (On Job Training) dan menyediakan media penyuluhan serta melakukan penyuluhan bagi masyarakat tentang pentingnya imunisasi bagi anaknya.

4. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan  
Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satwil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}} \times 100\% = \frac{41}{41} \times 100\% = 100\%$$

Sasaran kinerja diatas terealisasi : 100 % (dengan tingkat persentase pencapaian 100,00%) dari target 100 % yang telah ditetapkan di dalam SPM. Hal ini diperoleh berdasarkan data Jumlah kasus balita gizi buruk, semua balita mendapat perawatan baik dirawat dirumah sakit maupun rawat jalan.

Masalah yang dihadapi : dari 41 kasus gizi buruk yang ditemukan terdapat 41 orang balita dengan penyakit penyerta yang harus mendapatkan perawatan rujukan di Rumah Sakit. Bila ditemukan kasus gizi buruk maka dilakukan dengan mengunjungi balita yang teridentifikasi gizi buruk bersama program terkait di Puskesmas yang bersangkutan dan melakukan pengukuran kembali kemudian mengkaji penyebab terjadinya kasus gizi buruk pada balita tersebut. Jika keadaan balita tidak memungkinkan untuk dirawat jalan maka balita dirujuk di Rumah Sakit.

Program yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah : penimbangan di Posyandu, pemberian PMT pemulihan bagi balita gizi buruk dan gizi kurang, pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi petugas Puskesmas, pembentukan Pusat Pemulihan Gizi di Puskesmas Kampung Dalam.

Persoalan yang dihadapi :

1. Tidak semua kasus gizi buruk mau dirawat di Rumah sakit
2. Masih adanya kasus Gizi Buruk yang muncul akibat terlambat diketahui.
3. Kerjasama lintas sektor dalam penanganan kasus Gizi buruk belum optimal.

Solusi yang perlu diambil :

1. Perlu peningkatan cakupan penimbangan balita.
2. Perlu adanya penambahan Pusat pemulihan Gizi Buruk (PPG) di puskesmas, terutama di puskesmas – puskesmas rawatan.
3. Perlu adanya komitmen yang jelas dalam penanganan kasus Gizi Buruk dengan lintas sektor terkait. Kerjasama lintas sector seperti Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, Bazda dalam hal tindak lanjut penanganan kasus antara lain berupa pemberian bantuan pangan pada keluarga balita

5. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100\% = \frac{532}{634} \times 100\% = 83,9\%$$

Sasaran kinerja diatas terealisasi : 83,9 % dari target 83 % yang telah ditetapkan di dalam SPM. Berdasarkan data tahun 2015 dari 634 jumlah perkiraan penderit baru TBC BTA (+) baru sebanyak 634 penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 terjadi Peningkatan dari 77,4 % menjadi 83,9 %.

Masalah yang dihadapi : belum semua penderita baru terjaring sehingga ikut mempengaruhi penyebaran lebih lanjut kepada masyarakat lainnya

Solusi yang perlu diambil : peningkatan upaya penemuan penderita baru TBC BTA (+)

6. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100\% = \frac{172}{172} \times 100\% = 100\%$$

Sasaran kinerja diatas terealisasi : 100% (dengan tingkat persentase pencapaian 101%) dari target 100 % yang telah ditetapkan di dalam SPM. Berdasarkan data tahun 2015 ditemukan sebanyak 172 kasus DBD, dan semua sudah mendapatkan penanganan secara standar.

Solusi yang perlu diambil : peningkatan upaya penyuluhan kepada masyarakat agar jika terjadi kasus DBD dengan ciri-cirinya agar sesegera dibawa dan diobati/ditangani di pusat pelayanan kesehatan/ puskesmas/ RS terdekat, perlunya melakukan pemeriksaan epidemilogi jentik-jentik secara berkala.

7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 (PPK-1)}}{\text{Jumlah seluruh Miskin di Kab/Kot}} \times 100\% = \frac{112.109}{184.087} \times 100\% = 65,8\%$$

Sasaran kinerja diatas terealisasi : 65,8 % dari target 80 % yang telah ditetapkan di dalam SPM. Berdasarkan data tahun 2015 dari 274.906 jiwa masyarakat miskin baru sebanyak 11.281 jiwa yang melakukan pengobatan/ pemeriksaan kesehatan di sarana pelayanan tingkat 1.

Pencapaian cakupan pelayanan kesehatan rujukan ini sangat dipengaruhi oleh faktor seperti diuraikan pada permasalahan sebagai berikut :

1. Belum semua diagnosa 144 diagnosa yang dapat dilayani di Puskesmas (PPK-1) sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Hal ini juga sangat ditentukan oleh :
  - a. Ketersediaan obat dimana belum sesuai dengan kebutuhan dalam melayani 144 diagnosa penyakit menurut Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
  - b. Belum semua Puskesmas memiliki laboratorium sederhana untuk pemeriksaan penunjang
  - c. Kurangnya tenaga dokter umum dan dokter gigi di Puskesmas dan disatu sisi walaupun tenaga dokter ada namun penempatan tenaga dokter belum terdistribusi secara merata.
2. Sistem Jaminan Kesehatan selama ini (Jamkesmas dan Jamkesda) belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga akses masyarakat mendapat pelayanan di PPK-1 (Puskesmas) belum baik.

Solusi yang perlu diambil :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya menempatkan tenaga dokter umum dan dokter gigi dari Puskesmas lain yang 2 tenaga dokter dan dimutasikan ke Puskesmas yang tidak ada dokter umum dan dokter giginya.
2. Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan R.I bahwa bagi Puskesmas yang tidak mempunyai Laboartorium Sederhana maka Puskesmas dapat membuat kerjasama dengan jejaring laboratorium yang ada diluar Puskesmas tersebut.
3. Pada Tahun 2014 telah dipupayakan perencanaan pengadaan obat sesuai dengan kebutuhan pelayanan pasien dengan 144 diagnosa.
4. Jamkesda melalui Jaminan Kesehatan Sakato bergabung dengan Jaminan Kesehatan Nasional pada Tahun 2014 sehingga peserta mendapatkan pelayanan komprehensif yaitu pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan medis.

8. Cakupan kunjungan bayi  
Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama}} \times 100\% = \frac{7158}{8.354} \times 100\% = 85,68\%$$

Sasaran kinerja diatas terealisasi : 85,68 % dari target 89 % yang telah ditetapkan di dalam SPM. Berdasarkan data tahun 2015 dari 8.354 jumlah bayi baru sebanyak 7.158 yang melakukan kunjungan/pemeriksaan kesehatan minimal 4 kali.

Masalah yang dihadapi : belum semua masyarakat membawa bayinya ke pusat pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan minimal 4 kali.

Solusi yang perlu diambil : peningkatan upaya penjangkauan dan kunjungan rumah bagi yang tidak bisa berkunjung ke pusat pelayanan oleh tenaga kesehatan ke lokasi-lokasi bayi melalui kegiatan kunjungan rumah terhadap bayi dan perkembangannya.

#### C. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2015 dapat dijelaskan seperti berikut ini :

- Alokasi belanja total sebesar Rp. 119.063.581.739,- dengan tingkat pencapaian realisasi keuangan dari total belanja sebesar 88,67% (Rp 105.575.897.803 ,-)
- Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 40.016.469.037,- dengan tingkat pencapaian realisasi sebesar 88,67% ( Rp.33.715.673.425,-)
- Alokasi belanja langsung (belanja program/kegiatan) sebesar Rp. 79.047.112.702,- dengan tingkat pencapaian realisasi sebesar 90,91% (Rp. 71.860.224.378,-)

#### 5. Proses Perencanaan Pembangunan

Tahapan proses perencanaan program/ kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2015 dimulai dari proses pengajuan rencana kerja (Renja 2015) yang telah diusulkan pada bulan Maret 2014. Renja 2015 menampung semua aspirasi usulan baik yang berasal dari pemegang program/ kegiatan yang ada di lingkup Dinas Kesehatan maupun aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui musrenbang. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengajuan dan pembahasan KUA/PPAS 2015 baik ditingkat eksekutif maupun legislatif. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan dan pembahasan RKA dan DPA kegiatan dan finalnya ditetapkan dalam bentuk perda tentang pengesahan APBD 2015.

b. Urusan Kesehatan oleh RSUD Parit Malintang

Program dan Kegiatan

a. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

Prosedur tetap (Protap) pelayanan kesehatan disusun sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan baik keperawatan maupun tindak medis. Setiap pasien yang dilayani, petugas berpedoman kepada protap yang sudah disusun. Protap sudah disusun dalam bentuk dokumen, terdiri dari protap Dokter Spesialis, protap keperawatan, Protap Alat kesehatan dan fisioterapi. Protap sudah digunakan sebagai pedoman pelayanan bagi petugas. Selain itu protap dinding juga dibikin dan dipajang di ruang masing-masing pelayanan.

2. Kegiatan Pelayanan siaga dan tindak medis.

Siaga pelayanan pasien 24 jam setiap hari dalam 1 tahun, diperlukan tambahan tenaga dokter spesialis anak dan tenaga penata anestesi untuk siaga pelayanan di kamar operasi secara part time. Penambahan tenaga tersebut dapat memenuhi pelayanan spesialisasi 4 palyan spesialis dasar yaitu spesialisasi anak, obgyn, penyakit dalam, dan spesilisasi bedah.

Kegiatan penetapan kelas rumah sakit telah berhasil dicapai dengan Kelas C. Surat Keputusan Penetapan Kelas C dari Kementerian Republik Indonesia, Kepmenkes Nomor HK.03.05/I/153/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Sejalan dengan itu rumah sakit telah diregistrasi di Kementerian Kesehatan RI dengan Nomor 1306056.

Implikasi penetapan kelas dan registrasi tersebut, RSUD Padang Pariaman akan dapat memperoleh sumber dana APBN seperti dana TP, DAK dan lainnya dari pemerintah. Sumber dana ini akan dipergunakan untuk pembangunan gedung rawat jalan , rawat inap dan gedung Unit Transfusi darah yang permanen, pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran dan administrasi dan manajemen.

Disamping itu, semua pelayanan kesehatan telah terjalin perjanjian kerjasama dengan pasien jamkesmas dengan Kementerian Kesehatan dan askes PNS. RSUD Padang Pariaman telah melayani pasien jamkesmas yang berasal pasien rujukan dari Puskesmas-Puskesmas diwilayah kerja Kabupaten Padang Pariaman.

Program tersebut diatas dapat mendukung pencapaian "Terciptanya pelayanan rumah sakit yang bermutu dan profesional kepada masyarakat".

b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat.

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat belum banyak dilakukan karna dana belum memadai. Pengadaan plank informasi rumah sakit dan leaflet-leaflet sudah dibuat serta dipasang di area RSUD Padang Pariaman. Untuk promosi Rumah Sakit melalui media surat kabar dan media televisi telah dilaksanakan, hal ini untuk membantu penyebarluasan infomasi tentang pelayanan di RSUD Padang Pariaman..

Ukuran realisasi 100% dengan capaian 95,0 %, dinilai atas tersedianya dokumen profil, brosur, leaflet, dan plank informasi RS serta terlaksananya promosi melalui koran dan media televisi.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan untuk mencapai target output pelatihan keahlian penanggulangan gawat darurat medik, tindak medis ICU, bedah umum/obgyn, bedah anak dan mata, diklat PBJ dan keahlian perencanaan.

Ukuran realisasi 100% dengan persentase capaian masih rendah. Dinilai atas diklat yang diikuti oleh PNS dan dibuktikan dengan sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran.

a. Program pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata.

1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana

Dinilai atas penambahan pembangunan sarana prasarana seperti Pembangunan Ruang Perawatan Kelas III adalah untuk peningkatan pelayanan bagi pasien rawat inap serta pasien merasa kondusif selama menjalani perawatan. Pembangunan Gedung Kantor dapat dimanfaatkan bagi petugas agar proses administrasi rumah sakit berjalan dengan lancar.

Selain itu telah dibangun gedung pemulasaran jenazah dapat dimanfaatkan untuk penyimpanan jenazah serta untuk proses indentifikasi dan autopsi jenazah.

c). Capaian sasaran kinerja " Meningkatkan pelayanan gizi"

1) Sasaran kinerja diukur dengan "ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien.

Terealisasi 90% dari target 90% yang ditetapkan dalam renstra RSUD Padang Pariaman 2010-2015 untuk pelaksanaan 2015. Hal ini berarti tingkat persentase capaian adalah 100%.

2) Program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah :

Program Pengadaan,Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/Rumah Sakit Paru/RS Mata.

1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan RT RS (dapur,Ruang pasien,Loundry,Ruang Tunggu dll)

Tersedianya perlengkapan dapur, dan perlengkapan rumah sakit. Ukuran realisasi 100% (capaian 100%) dinilai atas perbandingan antara realisasi barang yang dibeli dengan rencana pengadaan alat masak dan perlengkapan rumah sakit.

2. Kegiatan Pengadaan bahan-bahan logistik RS

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk petugas jaga dan pasien yang dirawat. Ukuran realisasi 100% dengan persentase capaian 100%, dinilai dari perbandingan antara bahan-bahan logistik rencana pengadaan/dibeli dengan realisasi fisik.

d). Capaian sasaran kinerja " Meningkatkan pengelolaan RS yang aman dan bersinergis dengan lingkungan masyarakat"

1). Sasaran kinerja diukur dengan persentase limbah cair dan padat Rs yang memenuhi baku mutu.

2). Program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah :

a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/Rumah Sakit Paru/RS Mata.

1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah  
Instalasi pengolahan limbah ada 2 buah yaitu incenerator dan pengolahan air limbah. Incenerator dipakai untuk pembakar sampah medis. Ukuran realisasi 100%, dengan persentase capaian 100% dinilai atas perbandingan sampah yang ada dengan sampah yang dibakar. Air limbah yang diolah dinilai dari hasil pemeriksaan sampel bakteri dan kimia yang memenuhi standar baku mutu. Sampel diperiksa di laboratorium BLK Padang.

e). Capaian Sasaran kinerja " Meningkatkan pemanfaatan tempat tidur RS

1). Sasaran kinerja diatas diukur dengan angka pemanfaatan tempat tidur. Terealisasi 19,75 % dengan tingkat persentase pencapaian 30,3 % dari target 65% yang ditetapkan dalam renstra RSUD Padang Pariaman tahun 2010-2015 untuk pelaksanaan tahun 2015 yang lalu.

2). Program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah :

a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS paru-Paru/RS mata.

1. Kegiatan Pengadaan obat-obatan RS

Jumlah obat dan bahan kedokteran habis pakai, bahan kimia yang dibeli dengan realisasi 100%. Hal ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan pasien rawat jalan dan rawat inap tahun 2015.

2. Kegiatan Pengadaan gas oksigen, gas elpiji dan gas N2O

Terlaksananya kegiatan pengadaan gas oksigen, gas elpiji dan N2O. Ukuran realisasi 100% dengan capaian 100%, dinilai atas perbandingan antara gas oksigen, gas elpiji dan N2O yang dibeli dengan rencana kebutuhannya menurut asumsi angka kejadian kasus tahun lalu.

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan ini menyangkut penyusunan rencana dan anggaran, anggaran perubahan dan LAKIP. Ukuran realisasi 100% (capaian 100%) dinilai atas perbandingan antara rencana dokumen perencanaan yaitu 5 dokumen dengan realisasi dokumen yang terbit.

Proses perencanaan yang baik akan menghasilkan keluaran (out put) yang berguna untuk operasional dan pengembangan rumah sakit. Pada tahun 2013 yang lalu, diperoleh dana belanja langsung untuk kegiatan sebesar Rp. 15.735.741.200,-

dengan realisasi Rp. 14.000.354.744,- (89,0 %). Kegiatan tersebut yang mendukung pencapaian pemanfaatan tempat tidur (BOR) karena operasional rumah sakit sangat diperlukan dukungan dana untuk menghasilkan out put dan out come pelayanan kesehatan masyarakat.

#### Susunan Kepegawaian dan Ketenagaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola RSUD Kab. Padang Pariaman di dukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Gambaran Susunan Kepegawaian RSUD Padang Pariaman Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2015

No	Jabatan Struktural	Jumlah	Nama pejabat
1	Direktur	1	Dr.Hj. Efriyeni
2	Kepala Bagian TU	1	Maswandi SE.MM
3	Ka.Sub Bag.Umum & Kepegawaian	1	Nurhayati,SE
4	Ka. Sub Bag Perencanaan & Pelaporan	1	Asriadi H. ST.MM
5	Ka.Bidang Keuangan	1	Aldi Muarpen SE, Msi
6	Kasi Pengelolaan Keuangan	1	Suryadi,SE
7	Kasi Pembukuan	1	Yessy Syamsul, SE
8	Ka. Bidang Pelayanan Medis	1	Dr. Herlina Nasution
9	Kasi Pelayanan Medis	1	Dr.Hj.Elfi Yulfienti
10	Kasi Keperawatan	1	Hj. Irnawilis,SKep.
11	Ka. Bidang Penunjang Medis	1	Sy.N Zarmini,S.Si,Apt.MKM
12	Kasi Penunjang Medis	1	Nurhayati, S.Sit, MARS
13	Kasi Sarana dan Prasarana	1	H. asriel Nazwar
	Jumlah	13	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian RSUD Padang Pariaman 2015

Gambaran Tenaga Kesehatan RSUD Padang Pariaman Berdasarkan Tingkat dan Jenis Kepegawaian Tahun 2015

No	Jenis Pendidikan	STATUS TENAGA				TOTAL
		PNS	HONDA	KONTRAK	PTT	
	Dokter Spesialis	11	-	1	-	12
1.	Spesialis Bedah	4	-	-	-	2
2.	Spesialis Obgyn	2	-	-	-	2
3.	Spesialis Mata	1	-	-	-	1

4.	Spesialis Patologi Klinik	2	-	-	-	2
5.	Spesialis Penyakit Dalam	2	-	-	-	2
6.	Spesialis Anak	-	-	1	-	1
7.	Spesialis Kulit Kelamin	1	-	-	-	1
8.	Spesialis Orthopedi	1	-	-	-	1
	<b>Pasca Sarjana</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
9.	S2 Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	1
10.	S2 Keperawatan	1	-	-	-	1
11.	S2 Umum	4	-	-	-	4
12.	S2 Manajemen RS	1	-	-	-	1
	<b>Sarjana</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>56</b>
13.	S1 Kedokteran	11	-	-	-	11
14.	S1 Kedokteran Gigi	5	-	-	-	5
15.	S1 Keperawatan+Ners	20	-	-	-	20
16.	S1 Kesehatan Masyarakat	6	-	-	-	6
17.	S1 Farmasi	2	-	2	-	4
18.	S1 Gizi	1	-	-	-	1
19.	D.IV Bidan	2	-	-	-	1
20.	S1 Non Kesehatan	2	-	-	-	2
	<b>Akademi</b>	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>89</b>
20.	D.III Keperawatan	20	-	-	-	20
21.	D.III Kebidanan	13	-	-	-	13
22.	D.III Farmasi	-	-	4	-	4
23.	D.III Gizi	1	-	-	-	1
24.	D.III Kesling	2	-	-	-	2
25.	D.III Fisioterapi	2	-	-	-	2
26.	D.III ARO	1	-	-	-	1
27.	D.III ATEM	1	-	2	-	3
28.	D.III Perawat Gigi	4	-	-	-	4
29.	D.III Rekam Medik	3	-	4	-	7
30.	D.III Elektronik	1	-	-	-	1
31.	D.III Analisis	3	-	3	-	6
32.	D.III Radiologi	2	-	4	-	6
	<b>SLTA/SEDERAJAT</b>			<b>21</b>		<b>21</b>
33.	Sopir	-	-	6	-	6
34.	Satpam	-	-	6	-	6
35.	Tukang Cuci	-	-	2	-	2
36.	Tukang Masak	-	-	4	-	4
37.	Pramusaji	-	-	3	-	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>150</b>		<b>36</b>		<b>186</b>

Sumber : Sub Bag Kepegawaian RSUD Padang Pariaman 2015

## Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dilakukan secara kontinyu melalui koordinasi lintas program serta lintas sektoral dengan berpedoman kepada RPJMD serta Renstra SKPD.

## Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Saat ini kondisi sarana dan prasarana RSUD Padang Pariaman dapat dikatakan memadai, yang dibuktikan dengan telah terealisasinya Sertifikasi Rumah Sakit dengan Sertifikasi Tipe C serta Registrasi RSUD Padang Pariaman di Kementerian Kesehatan RI. Namun untuk menuju pelayanan prima dan akreditasi Rumah Sakit, RSUD Padang Pariaman masih harus berbenah diri dengan meningkatkan sarana dan prasarana dengan tanpa melupakan perawatan rutin dari sarana dan prasarana yang sudah ada.

## Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan

1. Masih kurang tenaga yang terampil dan profesional dalam pelayanan di RSUD Padang Pariaman
2. Masih kurangnya dana operasional pelayanan di RSUD Padang Pariaman
3. Kondisi bangunan RSUD Padang Pariaman yang masih mengalami kerusakan pasca gempa, yang belum diperbaiki secara maksimal
4. Masih kurangnya ruang rawat inap kelas I,II,III.

### Solusi

1. Perlunya diadakan bimbingan teknis, pelatihan serta magang secara kontinyu bagi tenaga fungsional di RSUD Padang Pariaman. Dengan cara melakukan inhouse training di RSUD Padang Pariaman, serta mengikuti pelatihan yang diadakan instansi yang berkompeten.
2. Demi meningkatkan mutu pelayanan, RSUD Padang Pariaman membutuhkan dana operasional yang cukup besar, mengingat sebagai pusat rujukan dalam pelayanan kesehatan tingkat lanjut RSUD Padang Pariaman.
3. Dalam menjamin pelayanan yang berkualitas dan prima, kondisi bangunan RSUD Padang Pariaman menjadi modal dasar dalam menjangkau kepercayaan masyarakat, mengingat sampai saat ini masih terdapat kerusakan di beberapa bagian gedung yang mengakibatkan keluhan baik bagi pasien, keluarga pasien serta petugas rumah sakit ( WC tersumbat, air yang tidak lancar, plafon yang bocor,dll). Oleh sebab itu dimintakan bantuan kepada instansi terkait untuk dapat memeriksa/audit bangunan gedung RSUD Padang Pariaman.
4. Melakukan pembangunan lanjutan secara berkesinambungan

## Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

1. RSUD Padang Pariaman telah Teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI
2. RSUD Padang Pariaman telah mempunyai sertifikasi RS Tipe C
3. RSUD Padang Pariaman telah melayani pasien BPJS
4. RSUD Padang Pariaman telah mempunyai Gudang Kantor sebagai bentuk dari upaya memberi kenyamanan petugas dalam bekerja sehingga layanan administrasi rumah sakit dapat terlayani secara maksimal.
5. RSUD Padang Pariaman telah mendapat alokasi Dana DAK dan Dana APBN- TP Bidang Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Kesehatan RI.

### 3. Urusan Lingkungan Hidup

#### a. Urusan Lingkungan Hidup Yang Dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup

No.	Program dan Kegiatan		Anggaran dan Realisasi			Capaian Program dan Kegiatan
	Uraian		Anggaran	Realisasi	%	
A	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahaan		621.084.765	566.784.015	91,26	91,26
	1	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahaan (DAK dan pendamping).	411.849.725	365.722.100	88,80	88,80
	2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahaan	60.000.000	58.727.625	97,88	97,88
	3	Gerakan Sumbar Bersih	10.000.000	9.363.400	93,63	93,63
	4	Pembangunan Biodigester (DAK dan Pendamping)	139.235.040	132.970.890	95,50	95,50
B	Program pengendalian pencemaran perusakan lingkungan hidup		82.000.000	80.512.300	98,19	98,19
	1	Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sosialisasi Peraturan Per-UU-an tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)	17.000.000	16.960.000	99,76	100
	2	Pemantauan kualitas lingkungan	30.000.000	30.679.600	95,60	95,60
	3	Pengkajian Dampak Lingkungan	27.600.000	27.540.000	99,78	100
	4	Ranperda Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib UKL-UPL dan SPPL	25.000.000	24.890.000	99,56	100
C	Program peningkatan pengendalian polusi		25.000.000	23.708.250	94,83	94,83
	1	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	25.000.000	23.708.250	94,83	94,83
D	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam		50.000.000	47.951.136	95,90	95,90

	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangann SDA	50.000.000	47.951.136	95,90	95,90
E	Program Perlindungan konservasi sumber daya alam		672.141.768	636.690.811	94,73	94,73
	1	Pantai dan Laut lestari	20.600.000	19.812.686	96,18	96,18
	2	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem (DAK dan Pendamping)	358.798.768	344.275.125	95,95	95,95
	3	Pembangunan Turap (DAK dan Pendamping)	282.743.000	272.603.000	96,41	96,41
F	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		269.780.727	259.690.102	96,26	96,26
	1	Penataan Ruang Terbuka Hijau (DAK dan Pendamping)	219.780.727	211.117.602	96,06	96,06
	2	Pemeliharaan RTH	50.000.000	48.572.500	97,13	100
G	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup		158.650.000	155.463.821	97,99	100
	1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	102.800.000	100.845.190	98,10	100
	2	Pengembangan data dan informasi lingkungan (SLHD)	44.350.000	44.245.000	99,76	100
	3	Penyusunan buku kuisiner Menuju Indonesia Hijau (MIH)	11.500.000	10.373.631	90,21	90,21
H	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		33.000.000	31.696.000	96,05	96,05
	1	Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan	33.000.000	31.696.000	96,05	96,05
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		202.400.000	180.621.620	89,24	89,24
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.500.000	19.177.344	98,35	100
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	20.000.000	4.154.616	20,77	20,77
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	44.900.000	44.860.000	99,91	100
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27.000.000	23.964.800	88,76	88,76
	5	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.995.000	99,90	100
	6	Penyediaan Rumah Tangga	11.500.000	11.481.000	99,83	100
	7	Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang2an	4.500.000	4.140.000	92,00	100

	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000	7.919.110	79,19	79,19
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah	60.000.000	59.929.750	99,88	100
J	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		25.000.000	24.311.444	97,25	100
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000	24.311.444	97,25	100
K	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		161.000.000	136.072.898	84,52	84,52
	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	61.000.000	55.970.264	91,75	91,75
	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	2.609.700	26,10	26,10
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	75.000.000	71.174.934	94,90	94,90
	4	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000	6.318.000	42,12	42,12
		Total	2.307.961.260	2.150.796.124	93,19	93,19

## 1. Permasalahan dan Solusi

Tidak terlaksananya kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dikarenakan anggaran yang tersedia tidak dapat memenuhi pembuatan sebuah peta tentang daerah/lokasi yang telah dilakukan pengujian kualitas tanah yang diindikasikan mengalami penurunan produksi biomassa. Untuk tahun 2016 kegiatan tersebut juga tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

b. Urusan Lingkungan Hidup Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pekerjaan Umum

No	Urusan Wajib	B. Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)			Total Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	0	0	242.250.000	0	242.250.000	239.120.000
2	Pemeliharaan Median dan Kebersihan Taman	0	0	160.000.000	20.000.000	180.000.000	179.370.000
	JUMLAH	0	0	402.250.000	20.000.000	422.250.000	418.490.500

Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 4 (empat) dengan tingkat Capaian sebagai berikut :

a. Penanganan Sampah

$$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani (m3)}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100 \% = \frac{3.905 \text{ M3}}{7.585 \text{ M3}} \times 100 = 51,48 \%$$

b. Kebersihan

$$\frac{\text{Jumlah pasar tradisional tergolong baik}}{\text{Jumlah pasar tradisional}} \times 100 \% = \frac{7}{24} \times 100 = 29,17 \%$$

c. TPS per satuan Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Daya Tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \% = \frac{3.120 \text{ M3}}{403.530} \times 100 = 0,77 \%$$

Pegawai Pengelola Bidang Lingkungan Hidup

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
2	Golongan III.d	1
3	Golongan III.b	1
4	Golongan III.a	2
5	Golongan I.c	1
6	Golongan I.b	1
JUMLAH		6

4. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Decosentrasi pelaksanaan urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)			Total Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	Pekerjaan Umum	12.408.049.543,15	902.215.000	22.312.233.450	152.552.709.700	188.175.207.693,15	171.313.232.760
2	Perumahan	0	3.500.000	11.500.000	100.000.000	115.000.000	112.645.000
3	Tata Ruang	0	18.317.350	49.200.000	550.000.000	617.517.350	603.073.350
4	Lingkungan Hidup	0	0	402.250.000	20.000.000	422.250.000	418.490.000
	JUMLAH	12.408.049.543,15	924.032.350	22.775.183.450	153.222.709.700	189.329.975.043,15	172.447.441.110

Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 3 (empat) dengan tingkat Capaian sebagai berikut :

a. Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik                      880.464 Km

Panjang seluruh jalan Kabupate                      x 100 % = 2.072.400 Km x 100 = 42,49 %

b. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik                      16.647,15 Ha

Luas Irigasi Kabupaten                      x 100 % = 25.611,00 Ha x 100 = 65 %

c. Rumah Tangga Ber Sanitasi

Jumlah Rumah Tangga ber Sanitasi

50.010 RT

Jumlah Total Rumah Tangga  
%

x 100 % = 78.095 RT x 100 = 64.03

Tabel II.3

Komposisi Pegawai Pengelola Bidang Pekerjaan Umum

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Golongan IV.c	1
2	Golongan IV.b	1
3	Golongan III.d	9
4	Golongan III.c	18
5	Golongan III.b	63
6	Golongan III.a	23
7	Golongan II.d	8
8	Golongan II.c	2
9	Golongan II.b	31
10	Golongan II.a	7
11	Golongan I.d	4
12	Golongan I.c	5
13	Golongan I.b	5
JUMLAH		177

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

No	Urusan Wajib	B. Tdk. Lsg (Rp)	Belanja Langsung (Rp)			Total Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	1.145.500.000	527.598.800	0	1.673.098.800	1.384.765.917
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	111.500.000	1.583.550.000	16.815.232.000	18.510.282.000	11.633.221.602
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	0	0	48.200.000	0	48.200.000	47.000.000
4	Program Peningkatan Kapasitas	0	0	32.800.000	0	32.800.000	27.348.400

	Sumber Daya Aparatur						
5	Program pening. Pengb. Sistem P. Capaian Kinerja dan Keuangan	0	21.500.000	70.500.000	0	92.000.000	91.666.400
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	0	93.800.000	358.444.000	47.123.700.000	47.575.944.000	45.038.697.150
7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Go rong-gorong	0	9.000.000	69.150.000	5.028.000.000	5.106.150.000	4.502.417.072
8	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	79.000.000	267.000.000	44.565.644.000	44.911.644.000	44.865.889.542
9	Program Pembangunan Sistem Informasi/D ata Base Jalan dan Jembatan	0	10.640.000	76.360.000	0	87.000.000	86.144.659
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamarg aan	0	57.865.000	2.519.835.000	0	2.577.700.000	2.555.937.632
11	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	0	58.900.000	787.000.000	25.309.521.900	26.15.421.900	25.356.625.810
12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	0	81.710.000	302.300.000	8.464.737.800	8.848.747.800	8.085.111.192
13	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Sembuh	0	51.700.000	3.597.398.000	5.055.000.000	8.704.098.000	4.130.376.514
14	Program Pembangunan	0	10.000.000	45.000.000	6.351.924.000	6.406.924.000	6.322.825.460

	Infrastruktur Pedesaan						
15	Program Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan	0	140.200.000	4.988.692.650	100.000.000	5.229.162.650	4.837.074.940
16	Program Peng. Kinerja Peng. Persampahan	0	0	402.250.000	20.000.000	422.250.000	418.490.000
	jumlah	0	1.871.315.000	15.628.148.450	158.881.959.700	176.381.423.150	159.383.592.290

## 5. Urusan Tata Ruang

Urusan Decosentrasi pelaksanaan urusan wajib Bidang Tata Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

### Rekapitulasi Anggaran Belanja dan Realisasi Urusan Wajib Bidang Tata Ruang tahun 2015.

No	Urusan Wajib	B. Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)			Total Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	SKPD Pelaksana
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
1	Operasional Pengendalian Tata Ruang	0	3.700.000	28.000.000	0	31.700.000	30.765.000	97,05	Dinas PU
2	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tiram	0	11.317.350	24.500.000	550.000.000	585.817.350	572.308.350	97,69	Dinas PU
	JUMLAH	0	15.017.350	52.500.000	550.000.000	617.517.350	603.073.350	97,66	Dinas PU

## Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

### Tata Ruang

Tata Ruang mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 2 (dua) dengan tingkat Capaian sebagai berikut :

- a. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HBG

Luas Ruang terbuka hijau

Luas Wilayah ber HPL/HBG x 100 % =

Tabel II.7  
Pegawai Pengelola Bidang Tata Ruang

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
2	Golongan III.c	1
3	Golongan III.a	2
4	Golongan I.b	1
JUMLAH		4

## 6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Tugas pokok dan fungsi dari badan ini adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang perencanaan dan statistik daerah. Untuk tahun 2015, serapan anggaran sebesar Rp. 2.663.131.198 dari Rp. 3.147.501.000 atau sebesar 84,61 % dengan rincian per Program dan kegiatan sebagai berikut :

### 1. Program dan Kegiatan :

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI KEUANGAN		CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN
		Rp	%	
2	3	8	9	7
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	373.095.000,00	321.494.100,00	86%	
1 Penyediaan jasa surat menyurat	40.000.000,00	35.644.200,00	89,11%	100%
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	115.000.000,00	104.600.000,00	90,96%	100%
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.000.000,00	18.592.500,00	74,37%	100%
4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.000.000,00	13.681.000,00	76,01%	100%
5 Penyediaan makanan dan minuman	32.095.000,00	23.242.700,00	72,42%	100%
6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125.000.000,00	111.433.700,00	89,15%	100%
7 Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	18.000.000,00	14.300.000,00	79,44%	100%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	372.600.000,00	343.786.212,00	92%	
1 Pengadaan peralatan gedung kantor	211.800.000,00	203.802.855,00	96,22%	100%
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.600.000,00	23.498.540,00	99,57%	100%
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	112.000.000,00	99.034.136,00	88,42%	100%
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.200.000,00	17.450.681,00	69,25%	100%
III Program peningkatan disiplin aparatur	16.000.000,00	16.000.000,00	100%	
1 Pengadaan mesin/kartu absensi	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	100%
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	100%
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000,00	30.203.000,00	43%	
1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	70.000.000,00	30.203.000,00	43,15%	100%
V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.000.000,00	31.128.900,00	78%	
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	40.000.000,00	31.128.900,00	77,82%	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI KEUANGAN		CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN
		Rp	%	
2	3	8	9	7
VI Program Perencanaan Tata Ruang	440.189.500,00	350.505.700,00	80%	
1 Peninjauan Kembali Perda nomor 05 tahun 2011 tentang RTRW	273.200.000,00	225.283.900,00	82,46%	100%
2 Paralel Finansial WISM	82.989.500,00	79.977.400,00	96,37%	100%
3 koordinasi Perencanaan bidang Fisik dan Prasarana	84.000.000,00	45.244.400,00	53,86%	100%
VII Program pengembangan data/informasi	181.435.000,00	154.133.666,00	85%	
1 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Padang Pariaman Tahun 2015	81.435.000,00	65.371.466,00	80,27%	100%
2 Penyusunan Data Pokok Pembangunan Daerah	100.000.000,00	88.762.200,00	88,76%	100%
VII Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	25.000.000,00	18.595.000,00	74%	
1 Operasional Penunjang Kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan Kab. Padang Pariaman <sup>^</sup> )	25.000.000,00	18.595.000,00	74,38%	100%
IX Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	80.000.000,00	50.756.400,00	63%	
1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	80.000.000,00	50.756.400,00	63,45%	100%
X Program perencanaan pembangunan daerah	816.321.000,00	693.062.242,00	85%	
1 Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	147.500.000,00	133.700.142,00	90,64%	100%
2 Penyusunan KUA dan PPAS	186.880.000,00	159.929.500,00	85,58%	100%
3 Progres Pelaksanaan RPJMD dan RKPd	81.110.000,00	54.977.500,00	67,78%	100%
4 Penyusunan rancangan RPJMD	159.000.000,00	112.511.100,00	70,76%	100%
5 Penyusunan rancangan RKPd	80.000.000,00	70.113.000,00	87,64%	100%
6 Penyelenggaraan musrenbang RKPd	161.831.000,00	161.831.000,00	100,00%	100%
XI Program perencanaan pembangunan ekonomi	195.000.000,00	181.751.850,00	93%	
1 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	80.000.000,00	78.701.550,00	98,38%	100%
2 Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tertinggal <sup>^</sup> )	55.000.000,00	50.595.850,00	91,99%	100%
3 Studi Potensi Usaha Kecil/Menengah	60.000.000,00	52.454.450,00	87,42%	100%
XII Program perencanaan sosial dan budaya	233.440.000,00	206.355.906,00	88%	
1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	80.000.000,00	70.314.622,00	87,89%	100%
2 Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat <sup>^</sup> )	53.440.000,00	48.016.500,00	89,85%	100%
3 Pemantauan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Padang Pariaman <sup>^</sup> )	50.000.000,00	45.895.000,00	91,79%	100%
4 Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan dan Permasalahan Sosial di Daerah <sup>^</sup> )	50.000.000,00	42.129.784,00	84,26%	100%
XII Program Penelitian	35.000.000,00	30.112.650,00	86%	
1 Jaringan Penelitian Kabupaten Padang Pariaman	35.000.000,00	30.112.650,00	86,04%	100%
XI Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	139.420.500,00	123.102.400,00	88%	
1 Penyusunan Review Dokumen RPIJM 2014-2018	40.000.000,00	27.194.400,00	67,99%	100%
2 WISMP APL II	99.420.500,00	95.908.000,00	96,47%	100%
XV Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan <sup>^</sup>	80.000.000,00	76.779.172,00	96%	
1 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan REncana Pembangunan Daerah	80.000.000,00	76.779.172,00	95,97%	100%
XV Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Bidang Fisik	50.000.000,00	35.364.000,00	71%	

	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI KEUANGAN		CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN
			Rp	%	
	2	3	8	9	7
1	Penanganan Lahan Kritis dan Sumberdaya air berbasis masyarakat	50.000.000,00	35.364.000,00	70,73%	100%
		3.147.501.000	2.663.131.198	84,61%	100%

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Penilaian urusan Perencanaan Pembangunan dari aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 4 (empat) indikator, dengan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana tabel berikut :

NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	32	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	Ada	Sudah tercapai di tahun 2011
		33	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	ada	Ada	Sudah tercapai di tahun 2011
		34	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	Ada	
		35	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd	Jumlah Program yang ada di RPJMD/Jumlah Program pada RKPd	89 %	
2	STATISTIK	74	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	Ada	Sudah menjadi kewenangan BPS secara utuh
		75	Buku " PDRB Kabupaten "	ada	Ada	Sudah menjadi kewenangan BPS secara utuh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan urusan wajib pemerintahan dengan menekankan pada perencanaan pembangunan dan statistik seperti yang digambarkan pada tabel di atas. Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk Indikator Kinerja Kunci Urusan Perencanaan :
  - a. Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  
Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025. Penyusunan Dokumen ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2010 yang lalu dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dari kegiatan tersebut telah tersusun draft/rancangan RPJPD untuk dibahas menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan kemudian telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2010, tentang RPJPD Tahun 2005-2025, sehingga capaian kinerja mencapai 100 %.
  - b. Adanya Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah  
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010 . Di samping itu, dengan telah berjalannya 5 (lima) tahun anggaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, telah dilakukan pula kegiatan evaluasi pelaksanaan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai penilaian capaian kinerja per tahun.  
Di samping itu, dengan telah berakhirnya masa kepemimpinan Bupati Padang Pariaman dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2010, maka Pemerintah Kabupaten Padang pariaman telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2011 (sehingga capaian kinerja mencapai 100%). Kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi dana sebesar Rp. 195.234.204,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat rupiah) atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen).
  - c. Tersedianya Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menerbitkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 17 Tahun 2015, tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016. Kegiatan penyusunan RKPD ini didukung dengan ketersediaan dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan terserap sebesar Rp. 70.113.000,- (tujuh puluh juta seratus tiga belas ribu rupiah) dengan capaian kinerja 87,64%.
  - d. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD  
Pada tahun 2014, untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar 81.110.000,- (delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 54.977.500,- (lima puluh empat juta sembilan

ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jumlah Program RPJMD sebanyak 208 program, sementara yang terakomodir pada RKPD Tahun 2015 sebanyak 194 program, dengan capaian sebesar 93%.

#### RINGKASAN BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH & SUSUNAN PERSONILNYA DALAM PELAKSANAAN URUSAN WAJIB

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu SKPD dari 46 SKPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Selanjutnya pada Bab III bagian kesatu paragraf 1 mengenai Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dimana pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada paragraf 2 peraturan ini, disebutkan juga bahwa tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### 5. DAFTAR JUMLAH PEGAWAI

#### 6. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### 7. MENURUT GOLONGAN RUANG DAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

#### 8. DALAM PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN DAERAH

#### 9.

Golongan Ruang	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
IV	4 orang	Strata 2 (S-2)	7 orang
III	23 orang	Strata 1 (S-1)/ D-IV	19 orang
II	2 orang	Sarjana Muda / D3	2 orang
I	-	SLTA	1 orang
		SLTP	-
		SD	-
<b>Total</b>	<b>29 orang</b>		<b>29 orang</b>

10. Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bappeda Tahun 2015

11.

12. Pada tahun 2015, jumlah seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah 29 orang dan terdapat dua jabatan yang tidak diisi yaitu jabatan Kasubid Pengembangan Dunia Usaha, Industri dan Pariwisata dan Kasubid Infrastruktur dan Prasarana Wilayah dikarenakan pejabat yang semula dilantik melaksanakan tugas belajar berdasarkan surat keputusan masing-masing. Diantara pejabat struktural yang ada, masih ada yang belum mengikuti pelatihan penjenjangan baik untuk III dan IV. Hal ini disebabkan karena belum adanya dukungan dana yang cukup untuk

pelatihan penjenjangan yang diadakan oleh instansi pelaksana. Sampai akhir tahun 2015, baru 8 orang pejabat struktural yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang mengikuti pelatihan dimaksud sesuai dengan tingkat eselonering yang diduduki.

#### 4. Proses Perencanaan Pembangunan

Secara umum, tahapan proses perencanaan yang dilakukan yang menjadi tanggung jawab Bappeda dapat dijelaskan sebagai berikut : proses perencanaan setiap tahunnya dimulai dengan pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang ini dilakukan bertahap mulai musrenbang di tingkat korong pada minggu pertama dan kedua Januari, minggu ketiga dan keempat di tingkat nagari, minggu keempat Januari sampai minggu kedua Februari di tingkat kecamatan. Setelah direkapitulasi dan dilakukan verifikasi secara administrasi dan ke lapangan melalui kegiatan koordinasi masing-masing bidang di Bappeda (bidang Sosbud, Ekonomi, Fispra, dan SPE) pada minggu ketiga dan empat Februari, terhadap hasil Musrenbang yang menjadi prioritas di masing-masing kecamatan, maka SKPD akan mengintegrasikan hasil tersebut ke dalam Rencana Kerja untuk tahun 2016 yang sebelumnya sudah disesuaikan dengan tema dan pagenda pembangunan tahun 2016 dan sebelum dilaksanakannya Forum SKPD pada minggu ketiga Maret. Sejalan dengan itu, karena Rencana Kerja tersebut adalah awak dari penyusunan RKPD, maka di awal tahun juga sudah dimulai penyusunan Rancangan Awal Draft RKPD yang nantinya akan difinalkan pada minggu pertama Mei setiap tahunnya, setelah dilakukan kompilasi terhadap hasil Musrenbang Kabupaten dan Provinsi, dan hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD antara rentang waktu minggu terakhir Maret sampai dengan minggu terkakhir April. Setelah RKPD tersusun, maka dalam kurun waktu tidak begitu lama, tepatnya di minggu kedua sampai dengan minggu keempat bulan Mei, Bappeda melalui ketua TAPD menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah dan KUA PPAS yang telah disetujui tersebut disampaikan ke DPRD pada minggu keduanya dan disepakati pada akhir bulan Juli. Dan selanjutnya secara beriringan, Bappeda juga akan mempersiapkan menyusun dokumen KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2015 yang nantinya akan disampaikan oleh Kepala Daerah ke DPRD pada minggu pertama Agustus dan ditetapkan menjadi Kesepakatan bersama pada minggu keduanya. Untuk sementara agenda proses perencanaan tahunan berakhir dan akan dilanjutkan ke dalam tahapan penyusunan RKA dan pembahasan APBD yang dikoordinir oleh DPPKA dan harus sudah diselesaikan pada akhir November.

## Permasalahan dan Solusi

### 1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan urusan perencanaan tersebut, bukannya tidak menghalangi hambatan dan kesulitan, melainkan dengan SDM yang secara kuantitas dan kualitas belum optimal, masih dapat dilakukan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam urusan perencanaan ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komitmen dari Pemerintah Pusat terhadap jadwal pelaksanaan Musrenbangnas dan penerbitan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penyusunan RKP dan APBD setiap tahunnya, sehingga asumsi-asumsi dasar yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sering tidak sesuai dengan seharusnya.
2. Masih adanya ego sektoral di SKPD sehingga sering ditemukan usulan Program dan Kegiatan yang seharusnya tidak ada karena bertentangan dengan ketersediaan program yang ada di RPJMD.
3. Data pendukung yang digunakan untuk perhitungan capaian kinerja yang dikeluarkan oleh BPS sering terlambat, sehingga capaian kinerja yang seharusnya bisa didapat di awal tahun, harus menunggu sampai rilis data secara resmi oleh BPS yang biasanya di akhir bulan Agustus.
4. SDM di Bappeda baik secara kuantitas dan kualitas masih kurang yang berdampak pada kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan lintas sektoral lainnya.
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
6. Sebagian besar pihak legislatif belum mengetahui proses dan alur perencanaan, sehingga jadwal dan tahapan serta proses perencanaan yang seharusnya sering terabaikan.

### Solusi :

Meskipun menghadapi berbagai persoalan dalam menjalankan fungsinya, Bappeda masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas yang diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal diantaranya melalui:

1. Koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian.Lembaga teknis terkait agar aturan dan regulasi terbaru mengenai perencanaan dapat diterbitkan sebelum proses perencanaan berlangsung.
2. Melakukan pendekatan yang lebih persuasif terhadap kesenjangan antara Bappeda dengan SKPD lainnya terkait pengusulan Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJMD.
3. Membentuk forum data agar data yang belum bisa dirilis secara resmi oleh BPS dapat kita keluarkan atas dasar kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan dengan stakeholders lainnya.
4. Optimalisasi terhadap peningkatan SDM di Bappeda maupun SKPD.

5. Pemanfaatan dan pengembangan aplikasi yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah seperti aplikasi e-Planning dan e-Musrenbang agar proses perencanaan lebih transparan dan mudah untuk dievaluasi sehingga pengelolaan data dapat lebih sistematis, akurat dan cepat dalam suatu sistem informasi.
6. Koordinasi yang lebih intensif antara eksekutif dengan legislatif agar terwujudnya keterpaduan pola pikir dan tindak dalam perencanaan dengan jalan memaksimalkan fungsi manajerial pimpinan dan penerapan standar operasional prosedur kerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

7. Urusan Perumahan

Urusan Decosentrasi pelaksanaan urusan wajib Bidang Perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rekapitulasi Anggaran Belanja dan Realisasi Urusan Wajib  
Bidang Perumahan tahun 2015.

No	Urusan Wajib	B. Tdk Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)			Total Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	0	7.000.000	88.000.000	0	95.000.000	94.813.300
2	Penyusunan Database Pemukiman Perumahan Kab.Pd.Pariaman	0	3.500.000	11.500.000	100.000.000	115.000.000	112.645.000
	JUMLAH	0	10.500.000	99.500.000	100.000.000	210.000.000	207.458.300

Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Perumahan

a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih                      48.419 RT

Jumlah seluruh Rumah Tangga                      x 100 % = 78.095 RT x 100 = 62 %

b. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh

Luas Wilayah                      x 100 % =

c. Rumah Layak Huni

Jumlah Rumah Layak Huni

67.669 RT

Jumlah seluruh Rumah di Wilayah Pemda x 100 % = 78.095 RT x 100 = 86,65 %

Pegawai Pengelola Bidang Perumahan

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
2	Golongan III.b	2
3	Golongan III.a	1
4	Golongan II.c	1
5	Golongan II.b	3
JUMLAH		7

8. Urusan Pemuda dan Olah Raga

1. Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Capaian Program/ Kegiatan
	<b><u>URUSAN WAJIB</u></b>				
I.	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				
	Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Kabupaten dan Provinsi	435.000.000,00	429.295.500,00	98,69	Terlaksananya kegiatan Paskibraka Tk. Kab dan Terpilihnya utusan Daerah untuk Paskibraka Tk Prop
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				
	Hari Olah Raga Nasional ( HAORNAS )	30.000.000,00	27.287.500,00	90,96	Pelaksanaan kegiatan lomba
	Senam Kesegaran Jasmani	25.000.000,00	23.302.000,00	93,21	Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani untuk Aparatur Sipil Negara

	Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( POPDA )	35.000.000,00	32.850.000,00	93,86	Terciptanya pembinaan olahraga bagi pelajar
	Kejuaraan Atletik di Tk. Daerah ( Kejurda ) Pelajar	29.931.000,00	29.755.000,00	99,41	Atlet-atlet Cab. Atletik yang berprestasi di Kab. Pd.Prm
	Liga Pelajar Daerah	150.000.000,00	149.710.000,00	99,81	Atlet-atlet cab.sepak bola yang berprestasi di Kab. Pd.Prm
	Bonus Atlet, Pelatih dan Official	3.000.000.000,00	2.903.729.000,00	96,79	Bonus untuk Atlet, Pelatih dan Official berprestasi di Porprov
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				
	Pengadaan Sarana Olah Raga Daerah	100.000.000,00	99.669.900,00	99,67	Penyediaan sarana dan prasarana alat-alat olahraga
	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	1.253.197.000	1.165.464.029	93	
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	65.000.000,00	64.894.271,00	99,84	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat sesuai kebutuhan selama 1 tahun
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.800.000,00	20.135.255,00	88,31	Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi dan listrik selama 1 tahun
	Penyediaan Jasa Adm. Keu	92.000.000,00	82.350.000,00	89,51	Terbayarnya honor pengelola keuangan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.000.000,00	19.974.870,00	99,87	Tersedianya Alat-alat Kebersihan selama 1 tahun dan Honor Cleaning Service
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	12.000.000,00	11.970.000,00	99,75	Tersedianya bahan bacaan
	Penyediaan Makanan Minuman	41.000.000,00	40.936.250,00	99,84	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat.
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	133.000.000,00	132.869.150,00	99,90	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Operasional UPT	56.000.000,00	28.117.550,00	50,21	Tersedianya operasional UPT
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	48.400.000,00	46.300.000,00	95,66	Tersedianya peralatan kantor
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan perlengkapan				Tersedianya

	gedung kantor	23.750.000,00	23.353.545,00	98,33	perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan
	Pengadaan Peralatan Kantor	3.300.000,00	3.203.181	97,07	
	Pengadaan Mebeleur	19.500.000,00	9.940.908,00	50,98	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26.000.000,00	25.990.383,00	99,96	Tersedianya pemeliharaan gedung ktr
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	152.850.000,00	150.750.649,00	98,63	Terawatnya mobil dinas sebanyak 3 unit, tersedianya BBM serta honor sopir 1 orang
	Pemeliharaan rutin/berkala Peraatan gedung kantor	15.000.000,00	14.996.686,00	99,98	Terawatnya perlengkapan gedung kantor
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	Pengadaan Mesin/kartu absensi	4.500.000,00	4.000.000,00	88,89	Tersedianya alat/mesin absensi
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	100	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25.000.000,00	24.943.000,00	99,77	Terkirimnya PNS mengikuti BinteK/Diklat Formal.
	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	29.730.650,00	99,10	Terselesaikannya Renja, RKA, DPA, LAKIP, LPPD, Lap. Evaluasi Kegiatan.
	Verifikasi Hibah Bansos	13.000.000,00	12.890.000,00	99,15	Terlaksananya verifikasi atas permintaan/pelaksanaan kegiatan hibah

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata PADA Tahun 2015 di Bidang Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan IKK yang menjadi Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib yakni Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta) namun yang ada di Kabupaten Padang Pariaman berupa Laga-laga sebanyak 104 (seratus empat) buah yang berada dikorong-korong.

Adapun jumlah Lapangan Olahraga yang ada di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 259 ( dua ratus lima puluh sembilan ) buah dengan uraian sebagai berikut :

1. Lapangan sepakbola : 55 lapangan
2. Lapangan basket : -
3. Lapangan Volley : 66 lapangan
4. Lapangan Bulu Tangkis : 76 lapangan
5. Kolam Renang : -
6. Lapangan Futsal : 5 lapangan
7. Lapangan Takraw : 57 lapangan

### 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

#### b. Urusan Wajib

- Bidang Kepemudaan Olahraga serta Sekretariat sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI MENURUT					
No	Golongan		Pendidikan		Ket
1	I		SD		
2	II		SMP		
3	III		SMA		
4	IV		D-3		
			S.1		
			S.2		
	Jumlah		Jumlah		

### 4. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran yang sangat strategis, untuk itu tuntutan akan profesionalitas, akuntabilitas dan efektivitas kerja pemerintahan menjadi bentuk yang tidak dapat dielakan dalam mekanisme kerjanya, sehubungan dengan hal itu kaidah normatif pemerintahan tersebut menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme Pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman.

Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pendukungnya. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia sampai saat ini yaitu:

No	NAMA BARANG	Jumlah (unit)
1	MEJA KERJA ESELON II	1
2	MEJA KERJA ESELON III	4
3	MEJA KERJA ESELON IV	17
4	FILLING KABINET	18
5	KOMPUTER PC	6
6	KURSI KERJA ESELON II	1
7	KURSI KERJA ESELON III	2
8	KURSI KERJA ESELON IV	4
9	INFOCUS + ATTACHMENT	1
10	LEMARI BESI	1
11	MESINKETIK MANUAL	1
12	AC	6
13	LAP TOP	6
14	CAMERA + ATTACHMENT	1
15	KURSI PUTAR	19
16	MEJA ½ BIRO	8
17	KIPAS ANGIN	1
18	PRINTER	8
19	KURSI TAMU	4
20	LEMARI KAYU	2
21	UPS	2
22	LEMARI KACA	2
23	KURSI LIPAT	2
24	PROYEKTOR + ATTACHMENT	1
25	FACSIMILE	1
26	TELEVISI	1

## 9. Urusan Penanaman Modal

### 1. Alokasi dan realisasi program/kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Capaian Program/Kegiatan
I	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	104.500.000,-	103.013.000,-	98,58	100%
	Kegiatan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta penyelesaian konflik	35.500.000,-	35.352.000,-	99,58	100%
	Kegiatan Penjajakan Investasi dan promosi	29.000.000,-	28.690.000,-	98,931	100%
	Kegiatan Penyusunan bahan/materi investasi produk unggulan daerah	20.000.000,-	19.510.000,-	97,55	100%
	Kegiatan Pengolahan Data Penanaman Modal	20.000.000,-	19.461.000,-	97,31	100%
II	Program Peningkatan dan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	75.000.000,-	63.349.000,-	84,47	100%
	Kegiatan Penyederhanaan Prosedur perizinan dan peningkata pelayanan penanaman modal	75.000.000,-	63.349.000,-	84,47	100%

### 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

- Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)  
 $\{(Realisasi\ investasi\ tahun\ 2015 - realisasi\ investasi\ tahun\ 2014)/realisasi\ tahun\ 2014)\} \times 100\%$   
 $\{(68,434 - 58,979\ M / 58,979)\} \times 100\% = 16,03\%$   
 Realisasi nilai investasi PMDN pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 16,03%. Ini disebabkan karena beberapa perusahaan melakukan penambahan investasi/modal serta beberapa perusahaan yang sudah banyak memproduksi
- Koperasi Aktif  
 Jumlah koperasi aktif/jumlah seluruh koperasi x 100%  
 $(185/245) \times 100\% = 75,51\%$

### 3. Ringkasan SKPD pelaksanaan urusan Penanaman Modal dan susunan personilnya

No	Jumlah Pegawai Menurut		Keterangan
	Golongan	Pendidikan	
	I	-	SD
	II	-	SMP
	III	4	SLTA
	IV	1	D-3
			S.1
			S.2
			S.3
	Jumlah	5	5

## Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

- Masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
- Terbatasnya jumlah SDM dalam pelayanan perizinan bidang penanaman modal dan SPIPISE
- Terbatasnya SDM yang memiliki sertifikat bidang Penanaman Modal
- Masih kurangnya pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap investor/perusahaan yang telah ada (PMA/PMDN)
- Belum disusunnya Master Plan atau Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai pedoman pelaksanaan penanaman modal di Padang Pariaman

### b. Solusi

- Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang penanaman modal yang diadakan oleh BKPM RI maupun BKPM Propinsi Sumatera Barat
- Dalam upaya meningkatkan kesadaran perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per triwulan (untuk izin prinsip PM) maupun per semester (untuk izin Usaha PM), perlu diberikan peringatan maupun punishment kepada PMA/PMDN yang tidak menyampaikan LKPM.  
Dan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN perlu didukung dengan kendaraan dinas yang representatif .
- Perlu dibuat Perbub Penanaman Modal sebagai petunjuk teknis Perda No.30 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Padang Pariaman, dan Standar Pelayanan bidang Penanaman Modal serta RUPM di Padang Pariaman

## 10. Urusan Koperasi dan UKM

### 1. Alokasi dan Realisasi Program/ Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	547,875,000	534,744,321	97.60%	Outcome : Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40,000,000	39,011,457	97.53%	Tersedianya sarana dan jasa pendukung surat menyurat kantor 1 tahun
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	75,000,000	66,258,695	88.34%	Tersedianya komunikasi, air dan listrik kantor 1 tahun

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
	Daya Air dan Listrik				
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	146,775,000	146,731,200	99.97%	Terlaksananya pembayaran honorarium PA, KPA, Bendahara, PPTK 1 tahun
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,600,000	18,598,670	99.99%	Terpeliharanya kebersihan kantor 1 tahun
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,500,000	5,814,000	77.52%	Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah 1 tahun
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	35,000,000	34,938,300	99.82%	Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu kantor 1 tahun
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	125,000,000	124,979,999	99.98%	Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 1 tahun
8	Operasional UPT Kompetensi Kakao	20,000,000	19,960,000	99.80%	Tersedianya biaya operasional 1 tahun
9	Operasional UPT Pasar	20,000,000	19,107,000	95.54%	Tersedianya biaya operasional 1 tahun
10	Operasional UPT Promosi	20,000,000	19,500,000	97.50%	Tersedianya biaya operasional 1 tahun
11	Operasional UPT Klinik Konsultasi Bisnis	20,000,000	19,935,000	99.68%	Tersedianya biaya operasional 1 tahun
12	Operasional UPT Metrologi	20,000,000	19,910,000	99.55%	Tersedianya biaya operasional 1 tahun
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	196,838,000	186,240,305	94.62%	Outcome : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	56,838,000	56,456,404	99.33%	Terlaksananya pengadaan PC, Lemari besi, lemari rak dan filling cabinet 1 paket
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25,000,000	24,869,091	99.48%	Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100,000,000	89,983,000	89.98%	Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional kantor dan BBM operasional 1 tahun
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15,000,000	14,931,810	99.55%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 tahun
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14,600,000	14,305,585	97.98%	Outcome : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	4,000,000	3,755,455	93.89%	Tersedianya mesin absensi pegawai untuk menunjang kinerja pegawai
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	10,600,000	10,550,130	99.53%	Tersedianya pengadaan pakaian dinas aparatur
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,000,000	24,986,700	99.95%	Outcome : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	25,000,000	24,986,700	99.95%	Output : Terkirimnya aparatur untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan sosialisasi

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
	undangan				
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	55,000,000	29,116,100	52.94%	Outcome : Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000	27,516,100	91.72%	Output : Tersusunnya LAKIP, LPPD, RENJA, RKA, DPA
2	Penyusunan Profil Koperindag ESDM	25,000,000	1,600,000	6.40%	Output : Tersedia dan terkelolanya Penyusunan Profil SKPD melalui Website
VI	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	40,000,000	39,636,900	99.09%	Outcome : Bertambahnya jumlah UKM yang memperoleh sosialisasi dan pembinaan
1	Sosialisasi Program Kemitraan dan Perkuatan Modal KUMKM	40,000,000	39,636,900	99.09%	Output : Terlaksananya sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012 dan UU no. 20 Tahun 2008 tentang UMKM kepada pengurus koperasi/ anggota koperasi/ UKM 100orang
VII	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	84,350,000	82,937,415	98.33%	Meningkatnya persentase koperasi yang mampu membuat laporan secara mandiri dan benar 40% , kemitraan koperasi dengan lembaga lainnya dan pemanfaatan fasilitas KKB
VII	Pelatihan kewirausahaan bagi koperasi dan UKM	39,350,000	38,006,715	96.59%	Meningkatnya jiwa kewirausahaan dan daya saing melalui pelatihan kewirausahaan bagi pengurus/ anggota koperasi dan LKM 100 orang
1	Pelatihan akuntansi perkoperasian bagi pengurus koperasi dan LKM Non Koperasi	45,000,000	44,930,700	99.85%	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi melalui diklat perkoperasian bagi pengurus koperasi dan LKM Non Koperasi 40
VIII	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	86,500,000	84,277,880	97.43%	Meningkatnya volume usaha koperasi -12%
1	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM	37,500,000	36,156,300	96.42%	Meningkatnya pengawasan dana pemerintah yang berada pada koperasi dan UKM
2	Pembinaan dan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam	49,000,000	48,121,580	98.21%	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi melalui penilaian kesehatan simpan pinjam dan unit simpan pinjam 47 unit KSP
IX	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	33,000,000	31,722,050	96.13%	Outcome : Meningkatnya struktur kelembagaan koperasi

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
	Koperasi				
1	Pemberdayaan koperasi	33,000,000	31,722,050	96.13%	Output : Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi melalui pengaktifan kembali koperasi tidak aktif 4 Koperasi

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Urusan koperasi dan UKM mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 2 (dua), dengan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

### a. Koperasi Aktif

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 = (185/245) \times 100\% = 75,51\%$$

Dari 245 unit koperasi yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman terdapat sejumlah 185 unit koperasi yang aktif sehingga capaian kinerja untuk indikator Koperasi Aktif sebesar 75,51%. Tahun 2015 dilaksanakan pengaktifan koperasi yang tidak aktif sebanyak 4 koperasi dari target 10 koperasi dan bertambahnya koperasi baru sebanyak 7 koperasi. Tingkat pencapaian ini ikut dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- Sulitnya menghubungi pengurus koperasi yang tidak aktif
- Pembinaan lapangan ke koperasi yang dilakukan oleh personil dinas terkendala dengan sarana operasional dan keuangan
- Kurangnya partisipasi anggota dalam perkoperasian
- Kurangnya permodalan koperasi, manajemen pengelolaan dan SDM pengurus koperasi
- Keterbatasan anggaran pembinaan dan masih kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan kepada Koperasi. Pembinaan yang harus dilakukan untuk koperasi mencakup 3 hal yaitu dari segi kelembagaan, usaha dan permodalan.

### b. Usaha Mikro dan Kecil

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100 = (11.092/11.250) \times 100\% = 98,60\%$$

Dari sebanyak 11.250 unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Padang Pariaman terdapat sejumlah 11.092 unit usaha mikro dan kecil (UMK) sehingga capaian kinerja untuk indikator Usaha Mikro Kecil sebesar 98,6%. Tingkat pencapaian sebesar 98,6% karena : rendahnya daya saing produk UMKM yang dihasilkan, masih kurangnya pembinaan yang mampu dilakukan oleh Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Padang Pariaman melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan. Karena untuk dapat meningkatkan usaha mikro dan kecil itu lebih berkembang sehingga dapat menjadi usaha kecil dan menengah, selain pembinaan terhadap kelembagaan, usaha dan SDM juga diperlukan bantuan permodalan.

3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Wajib: Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Pariaman.

No	Jumlah Pegawai Menurut				Ket.
	Golongan		Pendidikan		
1	Golongan IV c		SD	-	
2	Golongan IV b	2	SLTP	-	
3	Golongan IV a	8	SLTA/Sederajat	19	
4	Golongan III d	14	Diploma III	2	
5	Golongan III c	10	S1 (Sarjana)	19	
6	Golongan III b	8	S2 (Magister)	10	
7	Golongan III a	2	S3 (Doktor)	-	
8	Golongan II d	2			
9	Golongan II c	1			
10	Golongan II b	2			
11	Golongan II a	1			
	Jumlah	50		50	

4. Proses Perencanaan Pembangunan :

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas dimaksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renja SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

a) Kelembagaan

- Masih banyak pembagian kerja masing-masing pengurus dan pengawas belum berjalan menurut tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan.
- Partisipasi anggota baik terhadap kemajuan koperasi maupun pengembalian pinjaman sangat rendah

b) Masih banyak koperasi melaksanakan RAT tidak tepat waktu.

c) Kurangnya pembinaan dari lembaga penyalur pinjaman /perbankan.

d) Lambannya usaha koperasi.

e) Masih rendahnya permodalan dari anggota, pihak ketiga dan bunga pinjaman dari bank yang masih tinggi.

f) Rendahnya SDM Pengurus.

g) Rendahnya daya saing produk UMKM yang dihasilkan

h) Masih kurangnya promosi yang dilakukan terhadap produk-produk unggulan Kab. Padang Pariaman yang dihasilkan oleh UKM yang ada di daerah.

i) Masih kurangnya SDM Aparat Pembina dan jumlah personil yang ada di Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Pariaman.

## Solusi

- a) Diharapkan pengurus dapat melaksanakan tugas sesuai aturan perkoperasian dan pembagian masing-masing tugas yang telah disepakati.
- b) Pengurus mendorong anggota untuk berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha dan secara bersama memotivasi anggota lain agar dapat mengembalikan/angsuran pinjaman pada koperasi.
- c) Diharapkan pengurus melaksanakan RAT tepat pada waktunya.
- d) Sebaiknya pengurus/pengelola koperasi fokus untuk mengembangkan koperasi.
- e) Perlu melakukan peningkatan SDM Pengurus melalui keterlibatan dalam pelatihan kelembagaan usaha dan permodalan koperasi dan KUD serta pelatihan lainnya.
- f) Memfasilitasi dan melibatkan UKM dalam promosi-promosi yang dilakukan.
- g) Peningkatan profesional berusaha UKM
- h) Mengikutsertakan aparat pembina dalam pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuannya tentang perkoperasian dan membentuk suatu UPTD dengan personil-personil aparat pembina yang ditempatkan di kecamatan sehingga pembinaan lebih efektif.

## 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

### 1. Alokasi dan Realisasi Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Capaian Program/Kegiatan
I	Progrm Pelayanan Administrasi Perkantoran:	622.681500	622.681500	96,25	
	1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	163.163.500	162.477.019	99,58	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat sesuai kebutuhan selama 1 tahun
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	192.740.000	179.912.447	93,34	Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi dan listrik selama 1 tahun
	3. Penyediaan Jasa Adm. Keu	69.300.000,-	69.300.000,-	100,00	Terbayarnya honor pengelola keuangan sebanyak 16 orang
	4. Penyediaan Js.Kebersihan Ktr	48.200.000,-	44.134.743,-	91,57	Terpenuhinya belanja alat-alat kebersihan selama 1 tahun.
	5. Penyediaan Brg Cetakan dan Penggandaan	21.578.000,-	21.540.320,-	99,83	Terpenuhinya cetakan dan penggandaan selama 1 tahun.
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	9.500.000,-	8.827.500,-	92,92	Tersedianya bahan bacaan sebanyak 6 jenis.
	7. Penyediaan Makanan Minuman	17.500.000,-	13.834.850,-	79,06	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat.
	8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.700.000,-	99.272.950,-	98,58	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

II	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:	330.539.500,-	315.974.561	95,59	Tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan dinas Tersedia dan terlaksananya pemeliharaan gedung ktr Terawatnya mobil dinas sebanyak 3 unit serta tersedianya BBM Terawatnya perlengkapan gedung kantor
	1.Pengadaan Peralatan Kantor	134.539.500,-	131.638.358	97,84	
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	36.000.000,-	32.915.692	91,43	
	3.Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional	130.000.000,-	121.451.116	93,42	
4.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.000.000,-	29.969.395	99,90		
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur:	6.000.000,-	5.964.545,-	99,41	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan.
	1.Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,-	5.964.545,-	99,41	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:	20.000.000,-	19.744.00,-	98,72	Terkirimnya PNS Dukcapil mengikuti Diklat Formal.
	1.Pendidikan & Pelatihan Formal	20.000.000,-	19.744.00,-	98,72	
V	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:	38.500.000,-	34.989.027,-	90,88	Terselesainya Renja, RKA, DPA, LAKIP, LPPD, Lap. Evaluasi Kegiatan.
	1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.500.000,-	34.989.027,-	90,88	
VI	Penataan Administrasi Kependudukan :	412.995.000,-	405.171.343,-	98,11	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan Terusunnya Perda tentang Administrasi Kependudukan Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Pelayanan Prima melalui Outbond dan Revolusi Mental sebanyak 45 orang Terlaksananya pengawasan Sist.Inf dan Database Kpddk ke kecamatan. Terlayannya masyarakat secara prima di dinas serta tersedianya honor operator sebanyak 13 orang Tertatanya arsip adm. Dukcapil ± 50 perhari Terlayannya dan terbantunya masyarakat yang membutuhkan
	1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara Terpadu	22.896.000,-	21.505.288,-	93,93	
	2. Penyusunan Kebijakan Kependudukan	15.000.000,-	11.790.000,-	78,60	
	3. Pelatihan dan Sosialisasi Kebij. Administrasi Kependudukan	68.399.000,-	67.739.880,-	99,04	
	4.Pengawasan Sistem & Peralatan SIAK & KTP EL serta Pelayanan Pengaduan Masyarakat	4.300.000,-	4.130.000,-	96,05	
	5.Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil	185.700.000,-	185.670.000,-	99,98	
	6.Penataan arsip Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15.200.000,-	14.991.000,-	98,63	
7.Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	30.500.000,-	30.185.000,-	98,97		

	&Pencatatan Sipil				akta secara langsung di 17 kecamatan serta tersedianya honor petugas nagari pada penerbitan Akta Kematian Tersedianya Buku Induk Penduduk (BIP) pada 6 (enam) Nagari
	8.Penciptaan Buku dan Form Dokumen Kependudukan	21.000.000,-	20.980.000,-	99,90	

## 2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Kepemilikan KTP :
- b. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk :
- c. Penerapan KTP Nasional sudah berbasis NIK.

(Sesuai dengan indikator pada Format Lampiran III.3 Suplemen LPPD)

## 3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Wajib dan Susunan Personilnya :

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional :

### Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	5
2	Strata 1 (S-1)	13
3	Sarjana Muda / D3	2
4	SLTA	6
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah	26 orang

### Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	18
3	II	3
4	I	-
5	PTT	1
	Jumlah	26 orang

### Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	10
4	Pelaksana	
5	Staf	11
	Jumlah	26 orang

#### 4. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas dimaksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun unit organisasi publik, meliputi (1) lembaga negara dan lembaga daerah, (2) departemen/nondepartemen dan dinas/nondinas daerah. Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga

perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

## 5. Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan :

- j) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional.
- k) Masih kurangnya SDM, terutama PNS tenaga teknis ( Operator KK, KTP dan Akta Capil ) dan Teknisi.
- l) Keterbatasan ruangan, terutama tempat penyimpanan arsip, dokumen serta persediaan barang.

### Solusi

- i) Melengkapi sarana dan prasarana penunjang operasional, sehingga diharapkan pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dapat ditingkatkan.
- j) Melaksanakan/mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan.
- k) Mengajukan pemakaian kantor SKPD lain yang berdekatan jaraknya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## 12. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman, dengan uraian program dan kegiatan sebagai berikut :

### 1. Alokasi dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Capaian Program/ Kegiatan
I	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	185.000.000	178.931.400		
1.	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja	100.000.000	93.941.400	93,9	Terbantunya pencari kerja sebanyak 16 orang berupa peralatan memasak
2.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	85.000.000	84.990.000	99,9	Telah terlatihnya pencari kerja sebanyak 32 orang pencari kerja dengan jurusan

					pengolahan hasil pertanian dan jurusan menjahit
II	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	119.500.000	119.210.000	99,8	
3.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Bursa Kerja Online	50.000.000	49.980.000	99,96	Penerbitan kartu AK 1 sebanyak 2.700 pencari kerja
4.	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	29.500.000	29.320.000	99,4	Terlaksananya pemagangan calon pencari kerja sebanyak 16 orang pada bengkel-bengkel yang ada di Kabupaten Padang Priaman
5.	Sosialisasi dan Penyuluhan Pengembangan Kesempatan Kerja dan Pra Seleksi Calon Peserta Magang	40.000.000	39.910.000	99,8	Terlaksananya sosialisasi pemagangan ke luar negeri kepada pencari kerja sebanyak 500 orang
III	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	103.000.000	101.839.650		
6.	Pembinaan Hubungan Industrial, Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	60.000.000	58.893.000	98	Terlaksananya sosialisasi PP no. 78 tahun 2015 tentang pengupahan kepada 5 Perusahaan, dan survei kebutuhan hidup layak ( KHL ) Kabupaten kepada 16 Pasar Terbentuknya UMK ( Rp. 1814.700 )
7.	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan Jasa Pekerja dan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Luar Negeri	43.000.000	42.946.650	99,9	Terbina dan terawasinya perusahaan sebanyak 23 perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Tenaga kerja

Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 2 (dua), dengan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

- a) Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh sebanyak 90 % dimana Jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif 4.989 orang dibagi Jumlah pekerja /buruh sebanyak 5.503 orang di kali 100 persen.
- b) Pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 2,8 % dimana Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pencari kerja sebanyak 78 orang dibagi jumlah pencari kerja yang mendaftar sebanyak 2.700 orang dibagi 100 %.

### 3. Susunan Personil Urusan Tenaga Kerja

No.	Jumlah Pegawai Menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
1.	I	0	SD	0	
2.	II	1	SMP	0	
3.	III	19	SMA	1	
4.	IV	6	D-3/D1	1	
5.			S.1	9	
6.			S.2	1	

### 4. Proses Perencanaan Pembangunan Urusan Tenaga Kerja

Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2013 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2011 – 2015 untuk tahun kedua (2015). Berdasarkan Renstra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) Dinas kemudian diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA). Implementasi dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 01 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 36 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015.

Adapun Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

- a. Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, produktifitas dan berdaya saing tinggi dengan pelatihan keterampilan berorientasi penempatan dan kemandirian tenaga kerja
- b. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis
- c. Meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi

Sesuai dengan Renstra, dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tenaga Kerja tahun 2015 ditetapkan 21 sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang Kesejahteraan Tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi.

- b. Meningkatkan Administrasi Perkantoran.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
- d. Meningkatkan disiplin aparatur
- e. Meningkatkan kapasitas SDM
- f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan.
- g. Tumbuh kembangnya kemampuan berusaha untuk mengurangi ketergantungan.
- h. Terlaksananya pemutakhiran data Potensi Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja.
- i. Meningkatnya keterampilan pencari kerja.
- j. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja.
- k. Meningkatnya pelaksanaan Undang - Undang Ketenagakerjaan.
- l. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
- m. Melaksanakan penyediaan Tenaga Kerja dan menginventaris lowongan pekerjaan,
- b. penempatan Tenaga Kerja

Pencapaian sasaran pembangunan tenaga kerja dimaksud sejalan dengan pencapaian target RPJMD urusan Tenaga Kerja, dengan indikator RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 adalah :

- a. Meningkatkan kinerja aparatur dan organisasi
- b. Tersedianya dana kegiatan yang memadai
- c. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat
- d. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
- e. Terciptanya kualitas dan produktifitas tenaga kerja untuk menghadapi pasar kerja dalam dan luar negeri
- f. Ditaatinya peraturan per-undang-undangan dibidang ketenagakerjaan

#### 5. Permasalahan dan Solusi Urusan Tenaga Kerja

- a. Permasalahan :
  - Rendahnya masyarakat memanfaatkan keterampilan yang ada di UPTD Kabupaten.
- b. Solusi
  - a. Tetap memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di UPTD LLK.

### 13. Urusan Ketahanan Pangan

#### 1. Alokasi dan Realisasi Program / Kegiatan

No	Program /Kegiatan	Total Belanja	Realisasi Belanja	Persentase (%)	Realisasi Kegiatan
I	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)				
1	Penangan Daerah Rawan Pangan	35.000.000	28.415.000	81,19	100 %
2	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	45.000.000	40.172.000	89,27	100%
3	Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Pangan	200.000.000	188.076.897	94.04	100%
4	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	67.500.000	62.248.910	92,22	100%
5	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	50.000.000	44.398.000	97,58	100%
6	Pembinaan Distribusi, Akses dan Harga Pangan	45.500.000	48.630.000	97,26	100%
7	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	100.000.000	97.089.187	97,09	100%

#### 2. Susunan Personil Urusan Ketahanan Pangan

#### KOMPOSIS PNS BP3KKP KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH MENURUT KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Strata 2	2	2	4
2	Strata 1	23	20	43
3	D.I – III	16	5	21
4	SLTA	8	7	15
5	SLTP	0	0	0
	JUMLAH	45	31	93

Ditinjau dari golongannya, komposisi PNS di lingkungan BP3KKP Kabupaten Padang Pariaman adalah :

**KOMPOSISI PNS BP3KKP KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2015**

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	14
2	GOLONGAN III	66
3	GOLONGAN II	3
4	GOLONGAN I	0
	JUMLAH	83

5. Permasalahan dan Solusi

Secara umum Pelaksanaan Kegiatan DAK Tahun Anggaran 2015 sudah dapat terlaksana dengan baik, baik pengadaan Barang dan Jasa, Pembangunan fisik maupun proses pembayarannya. Namun terjadi sedikit permasalahan yang tidak terlalu presinpil yaitu terjadinya keterlambatan pembayaran dana konsultan perencanaan. Hal ini disebabkan karena terjadinya kesalahan memasukan rekening Belanja Kegiatan, semula dimasukan ke rekening Kegiatan Administrasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan, seharusnya belanja ini terletak pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pendampingan DAK Belanja Modal Gedung da Bangunan Gedung Kantor. Sehingga pembayaran menunggun Anggaran Perubahan. Adapaun sedikit keterlambatan pengajuan pembayaran pembangunan Fisik, karena adanya ketidak sesuaian pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor menurut dokumen kontrak, yang ditinjau langsung oleh Tim Komisi Teknis yang di SK kan oleh Kepala BP3KKP, sehingga kontraktor harus merubah dan menyesuaikan pekerjaan menurut yang telah diatur dalam kontrak.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Alokasi dan Realisasi Program/ Kegiatan

No	Program /Kegiatan	ANGGARAN		Realisasi	Capaian Program Kinerja
		Rp.	Rp.		
I	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				
1	Sosialisasi dan Pembinaan Perusahaan Pengelola Tenaga Kerja Perempuan	15,000,000	14,890,000	98.99261249	100%
2	Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan kejahatan seksual	20,000,000	19,768,000	98.98826386	100%
3	Pembinaan dan Penilaian Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	40,000,000	39,528,000	98.9880591	100%

4	P2WKSS	20,000,000	15,993,000	98.74945289	100%
5	Pemberdayaan Organisasi Kewanitaan	50,000,000	44,975,000	98.88827126	100%
II	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak				
1	Sosialisasi dan Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	43,950,000	43,796,000	98.9964837	100%
2	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	77,900,000	75,348,150	98.96613255	100%

### Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebanyak 5 ( lima ), dengan tingkat pencapaian standar Pelayanan minimal sebagai berikut:

- a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah  
 Dari 4.974 orang Perempuan yang bekerja di lembaga Pemerintah yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan jumlah pekerja Perempuan di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 63.041 orang sehingga capaian kinerja 8 % tingkat capaian ini kecil karena dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan akan tetapi jika dibandingkan dengan pegawai di Lingkup Pemda Kabupaten Padang Pariaman Nominasi terbesar pekerja Perempuan tingkat pencapaiannya yakni sebesar 64,89 %.
- b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif ( 2015 5.0 %)  
 Dari 2 orang jumlah Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif PKK di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, 100 % aktif seluruhnya.
- c. Jumlah Kasus KDRT yang ditangani. ( 188 kasus 2015)
- d. Terfasilitasinya Kelembagaan P2TP2A ( 240 kasus 2015)
- e. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. ( 240 Kasus )

### Susunan Personil Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Jumlah Pegawai Menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
	I	-	SD	-	
	II	-	SMP	-	
	III	3	SLTA	1	
	IV	1	S1	2	
			S.2	1	

## Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2014 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2011 – 2015 untuk tahun kelima (2015). Berdasarkan Renstra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) Badan kemudian diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA). Implementasi dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 01 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 36 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014.

Adapun Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

- a. Pemanjapan kelembagaan dalam pengembangan partisipasi,keswadayaan masyarakat,serta nilai-nilai social budaya masyarakat dalam pembangunan.
- b. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- c. Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- d. Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan terhadap kaum perempuan dan perkembangan anak.
- e. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dan ketahanan keluarga untuk mencapai keluarga sehat dan sejahtera.

Sesuai dengan Renstra, dalam penyusunan perencanaan pembangunan Badan Pemberdayaan masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana kabupaten Padang partiaman tahun 2015 ditetapkan 14 sasaran yaitu :

- a. Berperannya lembaga kemasyarakatan dalam mengembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.
- b. Tumbuhkembangnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis dalam pengelolaan pembangunan.
- c. Terbangunnya kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga.
- d. Terwujudnya penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Terbangunnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi tepat guna yang dengan sesuai kebutuhan masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif.

- f. Terbangunnya kemampuan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup.
- g. Terwujudnya kemampuan masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pemenuhan hak-hak perempuan.
- h. Terwujudnya jaminan pertumbuhan anak yang berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
- i. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterlibatan kaum perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- j. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterlibatan kaum perempuan dalam perlindungan hak anak untuk mempertinggi kualitas hidup.
- k. Berperannya lembaga kemasyarakatan dalam mengembangkan ketahanan keluarga untuk mencapai keluarga sehat dan sejahtera.
- l. Terbangunnya sarana dan prasarana untuk mendukung program keluarga berencana.
- m. Berkembangnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan program keluarga berencana

Pencapaian sasaran pembangunan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana dimaksud sejalan dengan pencapaian target RPJMD urusan pilihan Badan Pemberdayaan masyarakat dengan indikator RPJMD yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 adalah :

- b) Swadaya masyarakat terhadap program Pemberdayaan masyarakat
- c) Persentase Peran Swasta dan Masyarakat Dalam Pembangunan .
- d) Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan TTG pada Masyarakat.
- e) Meningkatnya prosentase lembaga keuangan mikro nagari/usaha ekonomi simpan pinjam yang berfungsi dengan baik.
- f) Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- g) Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi.
- h) Persentase ketersediaan Rencana Kerja SKPD.
- i) Persentase Laporan Tepat Waktu

Permasalahan dan Solusi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman.

Permasalahan :

1. Dalam peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan isu strategis yang muncul adalah meningkatnya kasus KDRT dalam rumah tangga ibarat gunung es pelaporan KDRT bagi korban baru setelah dilaksanakannya sosialisasi Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga . Dengan dianggarkannya fasilitasi KDRT tiap tahun, diharapkan kasus KDRT akan menurun dengan eksisnya lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) akan mengurangi jumlah pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

2. Keterbatasan dana untuk melaksanakan program khususnya penanggulangan kemiskinan.
3. Penempatan pejabat tidak sesuai dengan basic ilmu dan pengalaman.
4. Masih rendahnya kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi computer untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Kurangnya sarana pendukung berupa fasilitas mobiler kantor kendaraan operasional dan jumlah personil yang membantu melaksanakan kegiatan.

Solusi :

1. Perlu menambah anggaran fasilitasi KDRT tiap tahun, diharapkan kasus KDRT akan menurun dengan eksisnya lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) akan mengurangi jumlah pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. Perlu dilakukan koordinasi yang intensif kepada pemerintah pusat didalam mengajukan / mengusulkan program lanjutan sebagaimana dimaksud di atas.
3. Perlu pemenuhan sarana dan prasarana kantor serta penambahan jumlah personil dalam mendukung pelaksanaan program dimaksud.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial  
Alokasi dan Realisasi Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Capaian Program/Kegiatan
I	Program KB				
1	Pelayanan KIE	11.040.000.000	39.959.000	99,9	100 %
2	Jambore Saka Kencana	35.000.000	35.000.000	100	100 %
3	Pelayanan TMKK-dan kesatuan gerak PKK-KB KES dan Bhakti IBI	75.000.000	74.980.000	99,97	100 %
4	Operasional Tim KB Keliling	211.800.000	211.753.400	99,98	100 %
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang KB (DAK)	1.188.140.000	1.148.190.159	96,64	100 %
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang KB (Pendamping DAK)	124.814.000	116.969.016	93,71	100 %
II	Program Kesehatan Reproduksi Remaja				
1	Advokasi dan KIE ttg Kesehatan Reproduksi remaja ( KRR )	30.000.000	29.472.500	98,24	100 %
III	Program Pelayanan Kontrasepsi				
1	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	44.000.000	43.719.000	99,36	100 %
IV	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri				
1	Temu Kader IMP-PKK Tk. Kab. Porp. Nasional	50.000.000	49.751.000,-	99,50	100 %
2	Peringatan Hari Keluarga Nasional	55.000.000	54.960.700	99,93	100 %
V	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				

1	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	40.000.000	39.940.400	99,85	100 %
2	Pelatihan kader kelompok bina keluarga	40.000.000	39.824.600	99,56	100 %
VI	Program Pembinaan dan Evaluasi kepada petugas lapangan				
1	Pergerakan lini lapangan	91.500.000	88.340.291	96,55	100 %
2	Pengolahan sistem Infomasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) dan peningkatan kualitas data basis	40.000.000	39.803.234	99,51	100 %
3	Kebijakan Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (BINDU)	40.000.000	39.942.500	99,86	100 %
VII	Program Pengendalian Kependudukan				
1	Grand Design Kependudukan	19.300.000	17.571.200	91,04	100 %
2	Orientasi bagi tenaga Pengelola Analisis Dampak Kependudukan	40.000.000	39.382.000	98,46	100 %
3	Penyusunan Parameter Kependudukan	25.000.000	24.508.800	98,04	100 %

#### Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan KB, KS dan Kependudukan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai Indikator kinerja Kunci (IKK) sebanyak 4 ( empat ), dengan tingkat pencapaian standar Pelayanan minimal sebagai berikut:

- a. Rasio Akseptor KB ( % )
- b. Jumlah PPKBD yang dibina
- c. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
- d. Cakupan Peserta KB aktif ( % )

Keempat Indikator capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini

#### Susunan Personil Urusan KB/KS

No.	Jumlah Pegawai Menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
	I	-	SLTP	1	
	II	9	SLTA	31	
	III	48	DII	5	
	IV	18	S1	27	
			S.2	10	

#### Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2020 untuk tahun pertama (2015) BKKBD berdiri. Berdasarkan Renstra 2015 – 2020 disusun Rencana Kerja (Renja) BKKBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) Badan kemudian diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA). Implementasi dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 14 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 36 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014.

Permasalahan dan Solusi Urusan KB/KS Kabupaten Padang Pariaman.  
Permasalahan dan Solusi

#### 1. Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan yang terjadi secara umum, dengan berpisahnya Lembaga Teknis Daerah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBD) dari Lembaga Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) pada bulan Februari tahun 2015, sebagaimana di atur dalam Perda No. 14 tahun 2014, maka saat ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan lembaga teknis daerah yang mengelola satu (1 ) urusan wajib di bawah BKKBN Pusat. Untuk menjalankan ketiga urusan wajib tersebut, BKKBD mengelola 12 Program yang terdiri dari 40 Kegiatan termasuk di dalamnya Program Nasional.

Oleh karena banyaknya jumlah program dan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, menjadi keharusan bagi BKKBD untuk kedepannya mampu melaksanakan Efektifitas dan Efisiensi sesuai dengan standart Good Governance. Namun dengan berjalannya 1 (satu) tahun anggaran, sudah dapat menjadi evaluasi bagi BKKBD untuk melihat kendala, permasalahan dan tantangan yang ada sebagai langkah pengambilan kebijakan dan antisipasi permasalahan yang timbul dimasa yang akan datang.

Jika dilihat dari beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan atau kendala yang terjadi dapat dikelompokkan pada point berikut :

#### 1. Anggaran dan kebijakan

Masih permasalahan klasik yang biasanya, mungkin terjadi disetiap SKPD manapun yaitu kesediaan anggaran yang tidak memadai untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan, bahkan terkadang keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam setiap pengambilan kebijakan yang akan dilakukan.

Untuk Biaya Operasional UPTD KB sebanyak 17 Kecamatan hanya sebesar Rp. 170.000.000,- untuk selama 1 (satu) anggaran, artinya untuk setiap UPT KB Kecamatan hanya memperoleh anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- yang di gunakan selama empat triwulan. Dengan tugas pelayanan dan pendataan yang dilakukan oleh UPT BKKBD di lapangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk meraih akseptor KB di lapangan dan memberikan pelayanan KB, bisa kita bayangkan dengan jumlah anggaran sebesar ini, bagaimana kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh PPLKB kepada masyarakat /akseptor KB.

## 2. Kualitas SDM dan Kuantitas Aparatur

kendala yang sering muncul adalah keterbatasan jumlah pegawai yang ada, belum dapat membantu kelancaran operasional kegiatan pejabat pelaksana teknis. Pada Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan (UPT BKKBDKB), jumlah personil di tiap Kecamatan (17 Kecamatan) rata-rata berjumlah 4 (empat) orang, bahkan ada yang hanya 2 (dua) orang yaitu Kepala UPTB dan Ka. TU UPTB saja, sementara jumlah PLKB dan PPLKB sangat kurang, ini perlu menjadi perhatian bagi Pimpinan Kepala Daerah melalui Dinas/Lembaga Teknis terkait untuk melakukan proses rekrutmen pegawai secepatnya. Ini merupakan perhatian yang sangat penting dan mendasar, dikarenakan UPT KB merupakan pelaksana teknis di Kecamatan, adalah sebagai ujung tombak dari kesuksesan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan urusan wajib bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

B. Honor kader KB dilapangan hanya Rp 20.000/ bln. Oleh karena itu kurangnya motivasi bagi kader kb dilapangan sebanyak 1029 orang untuk bekerja. Perlu perhatian bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan honor kader Kb tersebut untuk kelancaran program kb dilapangan

## 16. Urusan Perhubungan

### 1. Alokasi dan Realisasi Program /Kegiatan Tahun 2015

PROGRAM & KEGIATAN ( PERUBAHAN ANGGARAN 2014)	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	(%)
2	3	4	5
PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	838,978,000	814,385,521	97.07
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60,000,000	59,998,172	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,708,000	20,984,449	75.73
Penyediaan Jasa Adm Keuangan	105,900,000	94,800,000	89.52
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25,000,000	24,986,900	99.95
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	13,000,000	13,000,000	100.00
Penyediaan Makanan dan Minuman	40,000,000	39,985,000	99.96
Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	116,000,000	115,989,500	99.99
Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	417,200,000	410,800,000	98.47
Operasional parkir, truk,terminal Wilayah I	19,170,000	19,170,000	100.00
Operasional parkir, truk,terminal Wilayah II	15,000,000	14,671,500	97.81
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	219.400.000	215.901.498	98.41
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	39.400.000	39.270.000	99.67
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	150.000.000	146.633.668	97.76
Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan Gedung Kantor	30.000.000	29.997830	99.99
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	74,551,950	74,551,950	100.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	74,551,950	74,551,950	100.00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	47,789,240	47,774,250	99.97

Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47,789,240	47,774,250	99.97
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40,000,000	39,969,750	99.92
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Keuangan	40,000,000	39,969,750	99.92
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	189,000,000	188,658,913	99.82
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	5,000,000	4,980,000	99.60
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	17,000,000	16,965,913	99.80
Peningkatan sarana Perkeretaapian	82,000,000	81,886,500	99.86
Pendataan penerbangan dan jumlah penumpang pesawat	35,000,000	35.000.000	100.00
Pendataan dan pemberian izin berlayar pada kapal di bawah 7 GT	50,000,000	49,826,500	99.65
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100,000,000	99,598,820	99.60
Pemeliharaan terminal dan lokasi perpakiran UPT wilayah I	-	-	-
Pemeliharaan terminal dan lokasi perpakiran UPT wilayah II	-	-	-
Pemeliharaan traffic light	75,000,000	74,607,500	99.48
Pemeliharaan dan perawatan rambu-rambu	25,000,000	24,991,320	99.97
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	934,356,500	930,532,550	99.59
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya	125,000,000	124,845,000	99.88
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	15,000,000	14,939,000	99.59
Survey load factor	20,000,000	19,812,350	99.06
Kegiatan Cetak Buku dan Plat Keur, sticker samping	85,000,000	84,913,700	99.90
Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	15,000,000	14,950,000	99.67
Sosialisasi tentang keselamatan dan keamanan berlalu lintas di jalan raya	30,000,000	29,955,000	99.85

DAK Keselamatan Transportasi Darat	560,310,000	558,310,000	99.64
Pendamping DAK Keselamatan Transportasi Darat	84,046,500	82,807,500	98.53
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	810,000,000	605,076,200	74.70
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	350,000,000	149,475,000	42.71
Pengadaan Marka	250,000,000	248,165,000	99.27
Pengadaan pagar pengaman jalan	150,000,000	148,550,000	99.03
Pengadaan Road Barrier dan Traffic Con	20,000,000	19,444,800	97.22
Pengamanan Angkutan Lebaran dan Tahun Baru	20,000,000	19,803,000	99.02
Dukungan Pengamanan Tour De Singkarak	20,000,000	19,638,400	98.19
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	40,000,000	39,878,137	99.70
Pengendalian pengujian kendaraan bermotor	40,000,000	39,878,137	99.70
JUMLAH	3,294,075,690	3,056,327,589	92.78

#### TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- Pencapaian IKK Angkutan Darat = Jumlah Angkutan Darat / Jumlah Penumpang Angkutan Darat  
= 482/450.751 x 100 % = 0.10.

\*\* SPM Perhubungan telah ada SPM :  
Kementerian Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 dan SPM Kementerian Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010.

3. Ringkasan skpd pelaksana urusan wajib perhubungan dan susunan personilnya :

NO	JUMLAH PEGAWAI MENURUT				KETERANGAN
	GOLONGAN		PENDIDIKAN		
1	2	3	4	5	6
	I (GOL.I)	1 (satu) orang	SMA Paket C	1	Orang
	II (GOL. II)	18 orang	SMA	15	
	III (GOL. III)	23 (dua puluh tiga ) orang	S2	2	
			S1	7	
			DIII	1	
			STM /SMA Sederajat	9	
	IV. (GOLONGAN IV)	4 (empat) orang	Pasca Sarjana (S2)	2	
			S1	2	

#### PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan utama yang sedang dihadapi Urusan Perhubungan.

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman belum adanya terminal truk yang representative . Selama ini terminal yang ada adalah terminal penumpang sicincin, sungai limau yang selama ini dikategorikan type C, sebenarnya belum dapat dikategorikan tipe C dengan alasan belum memenuhi persyaratan terminal penumpang type C . Terminal yang dikategorikan type C mempunyai syarat sebagai berikut :  
Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Terminal Tipe C adalah terminal penumpang yang berada setingkat dibawah terminal tipe B. Syarat lokasi terminal ini terletak di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II dan dalam jaringan trayek angkutan pedesaan. Selain itu, terminal ini harus terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi III A. Terminal ini juga harus mempunyai jalan akses masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas sekitar terminal. Dan mempunyai fasilitas utama dan penunjang.
2. Belum adanya terminal truk di Kabupaten Padang Pariaman, terutama pada jalan Padang – Kayu Tanam – Padang Panjang dan Jalan Padang – Pariaman- Sei Limau.  
Untuk tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman tidak ada masalah yang signifikan, baik

secara sarana dan SDM .semua kegiatan telah tercantum dalam program dan kegiatan.

**SOLUSI :**

Untuk mengatasi permasalahan terutama transportasi di Kabupaten Padang Pariaman Diharapkan untuk tahun mendatang agar di Padang Pariaman mempunyai terminal Bus/ Angdes dan terminal truk yang representatif.

**17. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Program urusan perhubungan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

PROGRAM & KEGIATAN ( PERUBAHAN ANGGARAN 2014)	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	(%)	CAPAIAN PROGRAM
1	2	3	4	5
PROG. PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI	250.000.000	247.940.000	99.18	
Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian lembaga KIM	44.000.000	43.960.000	99.91	
Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	45.000.000	44.380.000	98.62	
Pengawasan dan Penertiban Jaringan Telekomunikasi	161.000.000	159.600.000	99.13	
<b>JUMLAH</b>	<b>3.544.075.690</b>	<b>3.304.267.589</b>	<b>93.23</b>	

**Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

\* Penjabaran dari pencapaian indicator kinerja

**Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Urusan Komunikasi dan Informatika mempunyai Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) sebanyak 2 ( dua ) buah, dengan tingkat pencapaian standar pelayanan minimal sebagai berikut :

a. Komunikasi dan Informatika

- a.1 Web site milik pemerintah daerah , ada terletak di PDE
- 2.Pameran/ Expo,

Dari 2 Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) yang dibebankan kepada SKPD Kominfo untuk website dan pameran/ Expo belum ada di SKPD Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga tingkat pencapaian indicator kinerja tidak tercapai di bidang Kominfo pada Dinas Perhubungan Kominfo. Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang ada hanya bidang BINWASDAL ( Bidang Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian. Untuk tahun 2015 Kabupaten Padang Pariaman ada mengadakan pameran / Expo anantara lain oleh Koperindag kali , pertanian 1 x dan BP3KP 2 kali STM /SMA Sederajat .

C.2.3 Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dan Susunan Personilnya.

1	GOLONGAN		PENDIDIKAN		6
	2	3	4	5	
	II (GOL.II )	02 orang	SMA	3	ORANG
	III	5 orang	S1	1	
			STM /SMA Sederajat	3	
	IV. (GOL.IV)	1orang	STM /SMA Sederajat	1	

#### 4. Proses perencanaan pembangunan

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas dimaksud adalah berupa Renstra, DPA, RKA.

#### 5. Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan :

Permasalahan pada bidang Kominfo sehubungan dengan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015, amaka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 21 tentang retribusi tahun 2012 pengendalian menara Telekomunikasi tidak lagi mempunyai hukum yang mengikatnya. Akibatnya untuk tahun 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat memungut retribusi menara Telekomunikasi sebelum dilakukan perubahan terhadap PERDA , dana Pemda akan kehilangan PAD dari sector Telekomunikasi lebih kurang Rp. 800.000,-Diakhir tahun 2015 Dinas Perhubungan Kominfo bekerjasama dengan SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika , bekerjasama dengan SKPD terkait telah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda nomor 21 tahun 2012 dimaksud, namun rancangan kembali Perda tersebut ditunda penetapannya oleh DPRD dan melanjutkan kembali pembahasannya pada masa sidang di tahun 2016.

## 18. Urusan Pertanahan

### 2. Alokasi dan Realisasi Program/Kegiatan

NO	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi ( Rp )	Persentase (%)	Capaian Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6
	<u>BAGIAN PERTANAHAN</u>				
I	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2,080,000,000			
1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1,450,000,000	783,211,000	54.01%	3 Kegiatan
2	Inventarisasi dan Pensertifikatan Tanah Pemda	369,000,000	74,224,300	20.11%	4 Sertifikat
3	Operasional Pengadaan dan Pembebasan Tanah	261,000,000	152,746,150	58.52%	1 Tahun
II	Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	70,000,000			
1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan	70,000,000	7,500,000	10.71%	3 Konflik
III	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Hukum Bidang Pertanahan	50,000,000			
1	Bimbingan Teknis Tata Cara Penerapan Peraturan Perundang Undangan Tentang Pertanahan	50,000,000	47,446,350	94.89%	1 Tahun
JUMLAH		2,200,000,000	1,065,127,800	48.41%	

### 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA
1	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di suatu daerah (18.645)}}{\text{Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah (35.858)}} \times 100 \%$	51%
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan (3 Kasus)}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar (4 Kasus)}} \times 100 \%$	75%
3	Penyelesaian Ijin Lokasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi (6 Ijin)}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi (6 Ijin)}} \times 100 \%$	86%

Jumlah kasus tanah negara yang terdaftar sebanyak 4 kasus diantaranya: Jalur dua Padang by Pass, rel kereta api Duku, normalisasi batang Kalampayan, dan normalisasi sungai batang Naras di Cimpago. Dari keempat kasus tersebut sampai akhir tahun anggaran 2015 hanya kasus jalur dua Padang by Pass yang belum terselesaikan secara penuh.

Sementara itu, untuk permohonan ijin lokasi terdapat 7 permohonan ijin lokasi yaitu: MAN Insan Cendekia, normalisasi batang Naras, normalisasi batang Sarik Malai, normalisasi Batang Kalampayan, SMA 1 Patamuan, Akademi komunitas Pilubang, balai benih ikan model. Dari 7 permohonan ijin lokasi tersebut hanya MAN Insan Cendekia yang belum terselesaikan sampai habisnya tahun anggaran 2015.

#### 4. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Pertanahan dan Susunan Personilnya

No	Jumlah Pegawai menurut				Ket.
	Golongan		Pendidikan		
1	I		SD	-	
2	II	2	SMP	-	
3	III	3	SLTA	3	
4	IV	1	D-3	1	
			S.1	1	
5			S.2	1	
6			S.3		
	Jumlah	6		6	

#### 5. Proses Perencanaan Pembangunan (Sasaran & Tujuan Bagian Pertanahan di Dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman)

Adapun hasil rumusan tujuan bagian Pertanahan yang ditetapkan berdasarkan misi di lingkungan Sekretariat Daerah adalah:

NO	MISI	TUJUAN
1	Mendorong terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	i. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ii. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan ii. Pengembangan sistem informasi pertanahan

Berdasarkan rumusan tujuan bagian pertanahan diatas, maka ditetapkanlah rumusan sasaran bagian pertanahan dengan menggunakan indikator kinerja yang merujuk kepada indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu satu tahun

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran-sasaran bagian pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KERJA
1	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan
2	Inventaris dan persertifikatan tanah	Persentase luas lahan pemda yang bersertifikat
3	Terselesainya konflik-konflik pertanahan	Terlaksananya fasilitas penyelesaian konflik pertanahan
4	Tersusunya tanah Pemda	Terlaksananya penyusunan data e-pertanahan

#### 6. Permasalahan dan Solusi Bagian Pertanahan Tahun Anggaran 2015

1. Tidak terlaksananya pembayaran ganti rugi tanaman dalam kawasan kantor ibu kota Kabupaten Padang Pariaman disebabkan oleh adanya pemilik yang berjumlah 12 orang belum mau menerima ganti rugi karena menuntut janji yang telah disepakati antara pemerintah, ninik mamak dan masyarakat.
2. Sangat sedikitnya pihak Dinas, Badan dan Kantor yang menyampaikan dokumen untuk kelengkapan persyaratan pengurusan sertifikat tanah Pemda ke BPN seperti sekolah, kantor, puskesmas.
3. Ganti rugi yang tidak cocok dengan keinginan masyarakat
4. Polemik internal keluarga pemilik tanah
5. Pemilik tanah yang domisilinya berpencar-pencar
6. Banyaknya prvokator yang memperkeruh suasana

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1) Alokasi dan Realisasi Program/Kegiatan

2) Program dan kegiatan serta alokasi anggaran untuk mencapai prioritas urusan wajib yang dilaksanakan selama tahun 2015 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, meliputi:

No	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%	Capaian Program dan Kegiatan
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.000.000.00	44.975.000.00	25.000.00	99.94	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Kantor selama 12 bulan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.500.000.00	15.351.229.00	9.148.771.00	62.66	Terpenuhinya pembayaran telepon dan listrik selama 12 bulan
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	38.100.000.00	38.100.000.00	0.00	100.00	Meningkatnya Kinerja keuangan yang akuntabel selama 12 bulan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000.00	18.000.000.00	0.00	100.00	Meningkatnya suasana kerja yang nyaman serta tersedianya peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000.00	7.300.000.00	2.700.000.00	73.00	Meningkatnya wawasan karyawan/karyawati selama 12 bulan
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	27.500.000.00	27.499.800.00	200.00	100.00	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat/tamu selama 12 bulan
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	107.100.000.00	99.959.368.00	7.140.632.00	93.33	Adanya koordinasi dari tingkat Kabupaten, dinas instansi terkait di Wilayah Kabupaten selama 12 bulan
8	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran*)	39.200.000.00	38.200.000.00	1.000.000.00	97.45	Meningkatnya kinerja Tenaga Swakelola selama 12 bulan
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>						
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	18.000.000.00	16.500.000.00	1.500.000.00	91.67	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor sebanyak 4 unit
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000.00	7.900.070.00	7.099.930.00	52.67	Terpeliharanya gedung kantor dalam meningkatkan kenyamanan dalam bekerja selama 12 bulan

11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	81.250.000.00	75.955.525.00	5.294.475.00	93.48	Terpenuhinya jasa service, belanja penggantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas selama 12 bulan
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	18.000.000.00	16.798.605.00	1.201.395.00	93.33	Terpeliharanya perlengkapan kantor secara rutin /berkala SKPD selama 12 bulan
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>						
13	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	4.000.000.00	3.800.000.00	200.000.00	95.00	Meningkatnya Disiplin Pegawai
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	2.600.000.00	2.600.000.00	0.00	100.00	Terpenuhinya keseragaman Pakaian Dinas untuk PNS
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>						
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	20.000.000.00	19.697.876.00	302.124.00	98.49	Tersedianya sumber Daya Manusia (SDM) yang Cakap dan handal selama 12 bulan
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>						
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000.00	27.197.650.00	2.802.350.00	90.66	Tersedianya laporan LAKIP, LPPD, Renstra, RKA, DPA, keuangan semesteran pada SKPD selama 12 bulan
<b>PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>						
17	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	25.691.000.00	25.611.000.00	80.000.00	99.69	Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan terhadap Guru PKn sebanyak 60 Orang
18	Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Peningkatan Penanganan Kantrantibmas di Daerah)	180.800.000.00	139.889.000.00	40.911.000.00	77.37	Terpeliharanya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di daerah selama 12 bulan
19	Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah	137.720.000.00	85.488.779.00	52.231.221.00	62.07	Terpantaunya Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah se-Kab. Padang Pariaman selama 12 bulan
20	Peningkatan Ketahanan Bangsa bagi Generasi Muda	108.700.000.00	108.240.000.00	460.000.00	99.58	Meningkatnya Pemahaman Ketahanan Bangsa bagi siswa SLTA dan SLTP Se - Kab. Padang Pariaman melalui kegiatan Lomba PBB yang diikuti sebanyak 25 SLTA dan 34 SLTP
21	Kemah Bhakti Peningkatan Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan	142.480.000.00	142.125.000.00	355.000.00	99.75	Meningkatnya Pemahaman Siswa terhadap Pematapan Ketahanan Empat Pilar Kebangsaan

						dengan diikuti sebanyak 180 murid SLTP
22	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	200.600.000.00	0.00	200.600.000.00	0.00	Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah
<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</b>						
23	Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Parpol	35.000.000.00	28.386.000.00	6.614.000.00	81.10	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bantuan Dana Parpol untuk Tahun 2015 sebanyak 11 parpol dan terealisasi hanya sebanyak 9 Parpol
24	Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	18.825.000.00	18.529.000.00	296.000.00	98.43	Meningkatnya Pengetahuan Pengurus Parpol tentang Bantuan Keuangan Parpol sebanyak 22 orang
25	Pendidikan Politik Masyarakat dan Sosialisasi Undang - Undang Politik	27.137.000.00	26.947.000.00	190.000.00	99.30	Meningkatnya Pengetahuan Politik terhadap Tokoh Masyarakat dan Ormas sebanyak 80 orang
26	Updating Data - Data, Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Ormas dan LSM	25.000.0000.00	22.865.000.00	2.135.000,00	91.46	Terpantaunya dan terdatanya Keberadaan Ormas dan LSM di Kabupaten Padang Pariaman selama 12 bulan
27	Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	37.300.000.00	37.251.250.00	48.750.00	99.87	Terseleenggaranya Pemilu yang aman dan damai di 17 Kecamatan
28	Sosialisasi Regulasi Ormas dan Pembinaan Ormas se - Kab. Padang Pariaman	21.250.000.00	20.880.000.00	370.000.00	98.26	Meningkatnya Pemahaman Anggota Ormas dalam Kepengurusan Ormas sebanyak 50 orang
29	Tim Koordinasi dan Monitoring Pemilu Kepala Daerah Propinsi dan Kab. Tahun 2015	51.350.000.00	51.245.000.00	105.000.00	99.80	Terpantaunya pelaksanaan Pemilu Kda yang demokratis, aman dan damai di 17 Kecamatan
30	Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula	66.675.000.00	61.953.900.00	4.721.100.00	92.92	Meningkatnya Pengetahuan dan partisipasi pemilih pemula tentang Politik sebanyak 200 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.576.778.000.00</b>	<b>1.229.246.052.00</b>	<b>347.531.948.00</b>	<b>77.96</b>	

### 3) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

N o	Urusan	N o	IKK	Rumus/Persamaan	Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7
<b>URUSAN WAJIB</b>						
19	Kesbangpol	6 2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	6 Keg	
		6 3	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2 Keg	

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan wajib Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah terdiri dari 6 (enam) Kegiatan, yaitu :
  - Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu.
  - Tim Koordinasi dan Monitoring Pemilu Kepala Daerah Propinsi dan Kabupaten Tahun 2015.
  - Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula.
  - Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik.
  - Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol
  - Pendidikan Politik Masyarakat dan Sosialisasi Undang - Undang Politik.
- b. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu :
  - Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM
  - Sosialisasi Regulasi Ormas dan Pembinaan Ormas se - Kabupaten Padang Pariaman

### 1) Ringkasan SKPD Pelaksanaan Urusan Wajib dan Susunan Personilnya :

No.	Jumlah Pegawai Menurut				Keterangan
	Golongan		Pendidikan		
	I	1	SD	-	
	II	3	SLTP	1	
	III	5	SLTA	4	
	IV	2	D-3	1	
			S.1	3	
			S.2	2	
			S.3	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>11 orang</b>		<b>11 orang</b>	

## 2) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas dimaksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD.

### a. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan stratejik dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dimasing-masing unit kerja.
2. Memberikan arah dan pedoman pada aparatur dan seluruh unsur-unsur masyarakat dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

### b. Prioritas SKPD

Pada bagian ini akan diuraikan tentang tujuan pembangunan, sasaran program pada tahun 2015 dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.

### TUJUAN PEMBANGUNAN 2015

Tujuan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Terciptanya akuntabilitas dan kinerja bagi aparatur.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Memberikan arah agar terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman.

### SASARAN PROGRAM 2015

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, berdasarkan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, maka dirumuskan sasaran strategik yang diharapkan tercapai melalui program yang akan dilaksanakan, yaitu :

- 1) Terciptanya stabilitas sosial politik yang mantap dan terkendali.
- 2) Terciptanya hubungan yang harmonis Pemerintah Daerah dengan segenap kekuatan sosial politik dan lembaga kemasyarakatan.
- 3) Meningkatkan kehidupan yang demokratis.
- 4) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
- 5) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
- 6) Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang prima.
- 7) Meningkatnya sarana dan prasana aparatur.
- 8) Meningkatnya monitoring dan evaluasi.
  
- 9) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih rendahnya kemampuan SDM baik tenaga Administrasi maupun Operasional disebabkan banyak Pegawai yang latar belakang Pendidikan Formal SLTA dan Pegawai mengikuti Pendidikan jenjang karir ini juga disebabkan terbatasnya anggaran Pendidikan Formal.
- 2) Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dan telah banyaknya yang rusak tidak dapat mencapai hasil yang di harapkan ini disebabkan sebagian dari Sarana dan Prasarana sangat kurang dan kondisi yang rusak dan untuk mengoperasionalkan membutuhkan dana yang besar.
- 3) Terbatasnya biaya Operasional menyebabkan kurang lancarnya kegiatan yang kita harapkan.

b. Solusi

- 1) Untuk meningkatkan kemampuan SDM personil telah diupayakan melalui pelatihan dan pembinaan kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan formal.
- 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki, dan secara bertahap telah diupayakan melalui pengadaan setiap tahun.
- 3) Diupayakan secara terus menerus peningkatan biaya operasional dan pemeliharaan untuk kelancaran tugas sehari-hari.
- 4) Diperlukan dukungan yang lebih konkrit baik itu dari pihak legislatif dan masing-masing instansi terkait serta masyarakat agar tujuan pembangunan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kemampuan baik ekonomi, sosial dan budaya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan baik dan berkesinambungan.
- 5) Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM masyarakat terutama masyarakat nagari serta lembaga – lembaga yang ada di nagari diperlukan koordinasi yang terpadu dari semua unsur lembaga pemerintahan di daerah.

Dari keseluruhan kegiatan tersebut diatas pada umumnya masalah yang ada adalah sama yaitu minimnya ketersediaan anggaran sehingga pencapaian sasaran tidak maksimal. Disamping itu oleh karena sedikitnya anggaran maka koordinasi dengan instansi vertikal juga tidak berjalan dengan baik dan lancar.

Namun demikian, untuk terlaksanannya kegiatan ini dengan baik maka solusi yang dilakukan adalah mengurangi volume kegiatan dan koordinasi yang dilakukan baru sebatas hal-hal yang urgent dan penting saja.

b. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Capaian Program/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	456.935.000	439.018.486	96,08	Terlaksananya Kegiatan Kantor
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	39.998.200	100,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	46.542.375	93,08	
3	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	100.000.000	90.674.500	90,67	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.200.000	25.199.750	100,00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per U-U	10.000.000	9.902.000	99,02	
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	26.695.000	26.674.500	99,92	
7	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	114.040.000	113.946.250	99,92	
8	Operasionalisasi & Pengembangan UPT Damkar&Kebencanaan Wil. I	45.500.000	43.751.515	96,16	
9	Operasionalisasi & Pengembangan UPT Damkar&Kebencanaan Wil. II	45.500.000	42.329.396	93,03	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	525.455.000	511.227.244	97,29	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	37.000.000	36.870.000	99,65	
2	Pengadaan Mebeleur	50.000.000	49.805.000	99,61	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.000.000	12.983.000	99,87	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	100.800.000	100.720.844	99,92	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	13.500.000	13.475.000	99,81	
6	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	28.795.000	28.757.900	99,87	
7	Pembuatan Software Database Rehabilitasi Rekontruksi Pasca Bencana Kab Pd Pariaman	150.000.000	139.859.500	93,24	
8	Perencanaan Pembangunan Jalan Evakuasi	132.360.000	128.756.000	97,28	

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	56.600.000	56.600.000	100,00	Meningkatnya kualitas SDM pegawai
1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	3.000.000	3.000.000	100,00	
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Alat Kantor	3.000.000	3.000.000	100,00	
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	4.800.000	4.800.000	100,00	
4	Belanja pakaian Dinas Harian	4.800.000	4.800.000	100,00	
5	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	48.800.000	48.800.000	100,00	
6	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pemadam Kebakaran	48.800.000	48.800.000	100,00	
IV	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	116.205.000	115.821.100	99,67	Peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Seminar
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	19.994.400	99,97	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	96.205.000	95.826.700	99,61	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.600.000	25.570.637	78,44	Terlaksananya pelaporan kegiatan dan keuangan tepat waktu
	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.600.000	25.570.637	78,44	
VI	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Benc. Alam	1.551.750.000	1.502.958.434	96,86	Terlaksananya penanggulangan pra bencana dan tanggap darurat bencana
1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Benc Alam	60.000.000	59.886.400	99,81	
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	48.000.000	47.857.400	99,70	
3	Konsolidasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	39.000.000	26.137.250	67,02	
4	Operasional dan Kesiagaan Posko Penanggulangan Bencana	131.300.000	130.685.000	99,53	
5	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi Kebencanaan	50.000.000	49.996.000	99,99	
6	Pengadaan Alat Komunikasi Bencana	33.000.000	31.716.000	96,11	
7	Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana	50.000.000	43.571.500	87,14	

8	Pemeliharaan Peralatan Penyelamatan Darurat Bencana	26.750.000	25.549.000	95,51	
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat	175.150.000	170.983.000	97,62	
10	Sosialisasi dan Simulasi Mitigasi Bencana	50.000.000	49.741.000	99,48	
11	Penyusunan SOP Penanganan Tanggap Darurat Bencana Gempa Dan Tsunami	19.500.000	16.990.200	87,13	
12	Koordinasi Penanggulangan Darurat Bencana	27.160.000	20.773.000	76,48	
13	Pengelolaan dan Pemeliharaan Gudang Logistik	61.800.000	61.795.000	99,99	
14	Penyediaan dan Pendistribusian Logistik Kebencanaan	190.050.000	188.510.000	99,19	
15	Penyusunan Protap Penyediaan dan Penyaluran Logistik	16.000.000	13.420.000	83,88	
16	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	574.040.000	565.347.684	98,49	
VII	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.794.245.000	1.750.399.226	97,56	Terlaksananya penanggulangan bencana kebakaran
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	338.960.000	328.823.042	97,01	
2	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1.415.785.000	1.389.239.184	98,13	
3	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	25.000.000	24.918.000	99,67	
4	Penyusunan Perda Penanggulangan Bahaya Kebakaran	14.500.000	7.419.000	51,17	
VIII	Program Penanggulangan Pasca Bencana Alam	88.000.000	79.417.750	90,25	Terlaksananya penanggulangan pasca bencana
1	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Bangunan Aman Bencana	34.000.000	31.237.000	91,87	
2	Sosialisasi Aplikasi Kajian DaLa dan HRNA dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	20.000.000	18.459.750	92,30	
3	Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	34.000.000	29.721.000	87,41	

## Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Wajib/Pilihan dan Susunan Personilnya

No.	Jumlah Pegawai Menurut				Ket.
	Golongan		Pendidikan		
	I	0	SD	0	
	II	3	SMP	0	
	III	17	SLTA	5	
	IV	4	D-3	4	
			S.1	10	
			S.2	5	
			S.3	0	
	Jumlah	24		24	

### C. Permasalahan dan Solusinya

Sebagaimana telah dikemukakan dari awal laporan ini walaupun SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah ada sejak tahun 2010 yang lalu namun kekurangan-kekurangan yang dari awal sampai sekarang masih belum sepenuhnya dapat diatasi, hal ini dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut:

#### Di bidang Sekretariat

- Masih kurangnya pegawai/tenaga atau staf .
- Masih kurangnya Penyimpanan Arsip .
- Belum tersedianya gedung yang nyaman karena masih menempati gedung yang belum permanen sehingga selain mengganggu kenyamanan kelancaran tugas pegawai.
- Masih minimnya SDM anggota Barisan Pemadam Kebakaran terlatih dalam satuan tugas pemadam kebakaran.
- Masih minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan evakuasi korban kebakaran.

#### Di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Kurangnya anggaran yang tersedia untuk melakukan simulasi tsunami di wilayah yang terancam bencana tsunami
- jalur evakuasi dan tangga evakuasi belum memadai
- Masih minimnya jumlah sirine peringatan dini tsunami di wilayah pantai

#### Di bidang Kedaruratan dan Logistik

- Kurangnya ketersediaan dana untuk penanggulangan bencana dalam kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang ditimpa bencana seperti sandang, pangan dan papan terutama bagi keluarga yang ditimpa bencana kebakaran.

- Tingginya angka bencana terhitung dari 1 Januari s/d 31 Desember 2015 di Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah **138** Kejadian sedangkan yang menerima bantuan hanya 106 kepala keluarga saja.

Dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Belum

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menambah kebutuhan personil pada BPBD, baik melalui perekrutan personil baru maupun pengalihan dari SKPD lain.
2. Mengoptimalkan alokasi anggaran sesuai dengan beban tugas dan kebutuhan BPBD dalam Upaya Penanggulangan Bencana
3. Mengadakan pelatihan bagi personil untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
4. Menyediakan peralatan yang memadai untuk penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran

## 20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

### 1. Alokasi dan Realisasi Program/Kegiatan

NO	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi ( Rp )	Realisasi (%)	Capaian Program Dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6
	<u>BAGIAN KEUANGAN</u>				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,270,814,000			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40,000,000	39,982,650	99.96%	1 Tahun
2	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	304,114,000	301,010,000	98.98%	59 Orang
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000	14,781,300	98.54%	1 Tahun
4	Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	611,700,000	611,427,829	99.96%	1 Tahun
5	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	300,000,000	236,400,000	78.80%	22 Orang
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250,000,000			
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	250,000,000	249,989,683	99.996%	1 Tahun

III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150,000,000			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000	106,128,500	70.75%	1 Tahun
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60,000,000			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60,000,000	49,156,100	81.93%	5 Dokumen
V	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	80,000,000			
1	Penyusunan Laporan Semester dan Laporan Keuangan	32,000,000	31,717,866	99.12%	2 Dokumen
2	Verifikasi Pertanggungjawaban dan Perbendaharaan	28,000,000	25,673,000	91.69%	1 Tahun
3	Penatausahaan Gaji	20,000,000	11,659,000	58.30%	1 Tahun
JUMLAH		1,810,814,000	1,677,925,928	92.66%	
<u>BAGIAN UMUM DAN PROTOKOLER</u>					
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,270,839,513			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	67,000,000	65,422,650	97.65%	1 Tahun
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	985,000,000	973,624,004	98.85%	98.85%
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	995,000,000	981,788,660	98.67%	98.67%
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	267,000,000	266,414,720	99.78%	99.78%
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	50,000,000	49,959,500	99.92%	99.92%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115,000,000	114,853,116	99.87%	99.87%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90,000,000	86,105,504	95.67%	95.67%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	1,501,839,513	1,488,093,550	99.08%	99.08%
10	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	200,000,000	199,811,350	99.91%	99.91%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,026,000,000			
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	375,000,000	358,434,550	95.58%	95.58%

2	Pengadaan Mobeleur	115,000,000	113,060,750	98.31%	98.31%
3	Pengadaan Peralatan Kerja	166,000,000	156,205,045	94.10%	94.10%
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	300,000,000	296,191,267	98.73%	98.73%
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	1,000,000,000	989,163,132	98.92%	98.92%
6	Pemeliharaan dan Perawatan Taman Kantor Bupati	70,000,000	69,930,700	99.90%	99.90%
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,000,000			
1	Pelatihan Keprotokoleran	40,000,000	35,059,300	87.65%	50 Orang
IV	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	2,268,500,000			
1	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri	300,000,000	276,795,860	92.27%	92.27%
2	Penunjang Operasional KDH / WKDH	1,968,500,000	1,758,920,362	89.35%	89.35%
V	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	450,000,000			
1	Pengaturan Keprotokolan Daerah	450,000,000	440,918,905	97.98%	97.98%
VI	Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik	172,000,000			
1	Pelaksanaan Hari Hari Besar Nasional	172,000,000	164,862,300	95.85%	95.85%
JUMLAH		9,227,339,513	8,885,615,225	96.30%	
	<b><u>BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</u></b>				
I	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	150,000,000			
1	Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa Bersubsidi	120,000,000	80,755,938	67.30%	70%
2	Pemantauan dan pengendalian inflasi daerah	30,000,000	14,094,665	46.98%	50%
II	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	24,000,000			
1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	24,000,000	12,847,583	53.53%	50%

III	Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	60,000,000			
1	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	43,000,000	29,212,100	67.94%	70%
2	Pengawasan dan Pembinaan BUMD	17,000,000	10,935,494	64.33%	2 BUMD
IV	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	75,000,000			
1	Penyusunan Standar Satuan Harga	75,000,000	50,365,347	67.15%	70%
V	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	405,000,000			
1	Pembinaan Administrasi Pembangunan	108,500,000	90,495,903	83.41%	90%
2	Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	111,500,000	102,165,300	91.63%	100%
3	Pelaksanaan ULP	185,000,000	179,409,320	96.98%	100%
VI	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	91,000,000			
1	Koordinasi Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan	91,000,000	87,058,300	95.67%	4 Event
VII	Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan	65,000,000			
1	Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Pembangunan	65,000,000	58,290,105	89.68%	6 Buku
JUMLAH		870,000,000	715,630,055	82.26%	
-					
<u>BAGIAN HUMAS</u>					
I	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	167,500,000			
1	Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID)	25,000,000	22,522,800	90.09%	1 Tahun
2	Pembuatan Naskah Pidato Pemerintah Daerah	20,000,000	16,139,000	80.70%	1 Tahun
3	Pembuatan Varia Pembangunan Padang Pariaman	122,500,000	119,756,300	97.76%	3 Edisi

II	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	210,000,000			
1	Pembuatan Buku Kinerja Padang Pariaman Tahun 2010 - 2015	210,000,000	206,737,000	98.45%	1000 Eksemplar
III	Program Kerja Sama Informasi dengan Mas Media	1,832,000,000			
1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	805,000,000	803,700,550	99.84%	35 Media
2	Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	242,000,000	241,591,826	99.83%	1 Tahun
3	Kerjasama Dengan Media Masa	785,000,000	781,776,265	99.59%	35 Media
IV	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	594,000,000			
1	Pengelolaan Kliping Digital	43,000,000	33,986,000	79.04%	60 Buku
2	Pengelolaan Media Center	14,000,000	12,242,900	87.45%	1 Tahun
3	Diseminasi Informasi Pembangunan yang Menyeluruh	497,000,000	428,023,987	86.12%	1 Tahun
4	Unit Pengaduan Masyarakat	40,000,000	27,510,950	68.78%	1 Tahun
JUMLAH		2,803,500,000	2,693,987,578	96.09%	
	-				
	<u>BAGIAN ORGANISASI</u>				
I	Program Perencanaan pembangunan daerah	15,000,000			
1	Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	15,000,000	14,465,200	96.43%	1 Dokumen
II	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	65,000,000			
1	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	25,000,000	21,033,023	84.13%	15 Bidang
2	Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	40,000,000	38,363,150	95.91%	1 Dokumen
III	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	86,000,000			
1	Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah	45,000,000	33,410,400	74.25%	80%
2	Restrukturisasi/Penataan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Pada Pemda	26,000,000	17,414,800	66.98%	2 SKPD
3	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	15,000,000	13,912,000	92.75%	230 Orang

IV	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	467,443,000			
1	Workshop Evaluasi SOP	50,000,000	44,796,877	89.59%	1 Kali
2	Pemantapan Aplikasi Sistem Analisa Jabatan	352,443,000	299,110,900	84.87%	95%
3	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	40,000,000	38,453,000	96.13%	5 unit
4	Bimtek Tata Naskah Dinas	25,000,000	22,401,500	89.61%	1 Kali
5	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-
JUMLAH		633,443,000	543,360,850	85.78%	
<b>BAGIAN KESRA</b>					
I	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	85,000,000			
1	Pembinaan UKS	85,000,000	81,823,072	96.26%	68 Sekolah
II	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	2,225,000,000			
1	Pembinaan dan Pelatihan Labai dan Rubiah	50,000,000	44,302,000	88.60%	120 Orang
2	Pelaksanaan Tabligh Akbar dan Wirid	40,000,000	36,890,150	92.23%	1500 Orang
3	Peningkatan Pelaksanaan Pesantren dan Safari Ramadhan	1,005,000,000	764,009,200	76.02%	75 Masjid/Mushollah
4	Pembinaan dan Fasilitas Pelaksanaan MTO	1,130,000,000	946,222,000	83.74%	8 Besar
5	Verifikasi dan Validasi Bansos Hibah Keagamaan	-	-	-	
III	Program Pengembangan Lembaga Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	400,900,000			
1	Pembinaan Lembaga Didikan Subuh	44,150,000	40,440,000	91.60%	Peringkat 18
2	Pembinaan Majelis Taklim	58,000,000	54,087,700	93.25%	90 Orang
3	Pembinaan Qori Qoriah Kab Padang Pariaman oleh LPTQ	75,000,000	67,568,000	90.09%	10 Besar
Be	Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kab.Padang Pariaman	173,750,000	95,267,839	54.83%	153 Orang
5	Peringatan Hari Hari Besar Islam (Pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha Kab.Padang Pariaman	50,000,000	37,468,000	74.94%	100%
IV	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	50,000,000			
1	Pembinaan Generasi Muda	50,000,000	49,410,000	98.82%	120 Orang
JUMLAH		2,760,900,000	2,217,487,961	80.32%	

	<b><u>BAGIAN HUKUM</u></b>				
I	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	363,250,000			
1	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang Undangan	188,250,000	159,398,806	84.67%	20 Perda
2	Publikasi Peraturan Perundang Undangan	100,000,000	64,769,000	64.77%	200 Buku
3	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	75,000,000	67,205,000	89.61%	2 Kali
II	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	321,200,000			
1	Penyelesaian Kasus di Dalam dan Luar Pengadilan	110,000,000	67,365,000	61.24%	4 Kasus
2	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	83,600,000	73,080,000	87.42%	4 Kali
3	Penyuluhan Hukum	101,600,000	98,825,000	97.27%	5 Kali
4	Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (RANHAM)	26,000,000	4,020,000	15.46%	1 Kali
JUMLAH		684,450,000	534,662,806	78.12%	
	<b><u>BAGIAN PUM</u></b>				
I	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH	285,650,000			
1	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	50,000,000	36,390,049	72.78%	1 Kali Rakor
2	Rapat Kerja Bupati dengan Camat Se Kabupaten Padang Pariaman	39,500,000	15,767,500	39.92%	1 Kali Rakor
3	Penyusunan Buku LPPD 2014	57,516,500	50,279,900	87.42%	LPPD Tepat Waktu
4	Koordinasi Penyusunan Buku LKPJ Tahun 2014	33,983,500	32,794,500	96.50%	LKPJ Tepat Waktu
5	Penyusunan Buku LPPD Akhir Masa Jabatan	41,750,000	37,898,400	90.77%	LPPD Tepat Waktu
6	Koordinasi Penyusunan Buku LKPJ Akhir Masa Jabatan	37,900,000	33,984,870	89.67%	LKPJ Tepat Waktu
7	Penyusunan Buku Memori Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah 2010 s/d 2015	25,000,000	14,032,000	56.13%	Tersusun Memori 1 Dokumen
II	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	82,000,000			
1	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Daerah	57,000,000	33,232,100	58.30%	2 Segmen
2	Pembakuan Nama Rupa Bumi	25,000,000	9,849,400	39.40%	Pengumpulan Data Rupa Bumi

III	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	109,500,000			
1	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan	24,500,000	16,673,700	68.06%	1 Kali Pembinaan
2	Lomba Kompetensi Camat	85,000,000	73,305,700	86.24%	3 Orang Camat Berprestasi
IV	Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik	84,850,000			
1	Pembinaan dan Pengawasan PATEN	84,850,000	74,635,200	87.96%	1 Kali Bimtek
JUMLAH		562,000,000	428,843,319	76.31%	
	-				
<b>BAGIAN PEMNAG</b>					
I	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH	100,000,000			
1	Raker Pemda dengan Wali Nagari	100,000,000	93,379,300	93.38%	2 Kali
II	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	73,600,000			
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Nagari	73,600,000	49,685,027	67.51%	1 Raperda
III	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	326,600,000			
1	Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengelolaan, Penyaluran dan Pengendalian Alokasi Dana Nagari	55,500,000	50,091,000	90.25%	5 Juknis/160 Buku
2	Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Bidang Keuangan Nagari	103,500,000	99,926,800	96.55%	2 Angkatan/120 Orang
3	Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang APB Nagari	42,800,000	31,998,000	74.76%	60 Pema APB
4	Pembinaan dan Penilaian KAN Terbaik	44,300,000	41,658,854	94.04%	3 KAN
5	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Nagari dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari	80,500,000	58,640,900	72.85%	2 Angkatan/120 Orang
IV	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari	117,000,000			
1	Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari dan Bamus Nagari	39,200,000	26,706,700	68.13%	23 Wali Nagari dan Bamus Nagari

2	Kegiatan Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari	77,800,000	70,921,000	91.16%	2 Paket
V	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Nagari	42,500,000			
1	Pemantapan Koordinasi Pemerintah Kab.Padang Pariaman dengan Masyarakat Perantau	42,500,000	39,377,927	92.65%	4 Pertemuan
JUMLAH		659,700,000	562,385,508	85.25%	
-					
<u>BAGIAN PDE</u>					
I	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	395,966,776			
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	322,666,776	320,208,774	99.24%	95%
2	Pengembangan Data Elektronik Daerah	73,300,000	66,103,800	90.18%	90%
II	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	50,383,224			
1	Pelatihan Teknologi Informasi	50,383,224	38,873,150	77.15%	40 Orang
III	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	84,650,000			
1	Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Jaringan	84,650,000	74,966,000	88.56%	88%
IV	Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan	94,000,000			
1	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	94,000,000	80,734,707	85.89%	100%
JUMLAH		625,000,000	580,886,431	92.94%	
-					
JUMLAH TOTAL		20,637,146,513	18,840,785,661	91.30%	

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Sistim Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	.....buah
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Ada/tidak*)

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Padang Pariaman menggunakan 14 indikator kepuasan dalam mengukur 5 unit layanan terhadap masyarakat yang meliputi Kantor Camat Batang Gasan, Kantor Camat IV Koto Aur Malintang, Kantor Camat Padang Sago, Kantor Camat VII Koto Sungai Sarik, dan Kantor Camat V Koto Timur.

Berdasarkan nilai interval konversi IKM, maka persepsi nilai IKM masing-masing unit pelayanan yang di survey berada pada interval 62,51-81,25. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan 5 Kantor Camat tersebut berada dalam kategori "Baik" dengan mutu pelayanan B.

## 3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dan Susunan Personilnya

No	Jumlah Pegawai menurut				Ket.
	Golongan		Pendidikan		
	I	1	SD	-	
	II	28	SMP	-	
	III	51	SLTA	34	
	IV	18	D-3	3	
			S.1	35	
			S.2	25	
			S.3	1	
	Jumlah	98		98	

## 4. Proses Perencanaan Pembangunan (Sasaran & Tujuan Bagian Keuangan umum dll di Dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, bahwa perencanaan pembangunan pada rencana kerja SKPD memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Janghka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen tersebut adalah RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan mempedomani rumusan tujuan RENSTRA Sekretariat Daerah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan visi dan misi, sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun hasil rumusan tujuan yang telah ditetapkan untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan berdasarkan misi di lingkungan Sekretariat Daerah adalah:

NO	MISI	TUJUAN
1	Mendorong terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perangkat daerah	1.1 Optimalisasi penyelenggaraan administrasi perangkat daerah 1.2 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib 1.3 Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur yang tepat sasaran 1.4 Terwujudnya peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH 1.5 Meningkatkan tata laksana dan kelembagaan daerah
2	Terwujudnya koordinasi perumusan kebijakan produk hukum daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah	2.1 Menciptakan hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif 2.2 Meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat
3	Mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui koordinasi, pembinaan, peningkatan perekonomian, serta pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan dan peranan wanita	1.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 1.2. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antar dan inter umat beragama, serta fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan
4	Terwujudnya pemerintahan nagari sebagai basis terendah yang mendukung kebijakan Pemda	b. Menciptakan nagari yang berprestasi dan mandiri

Berdasarkan rumusan tujuan tersebut untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan, maka ditetapkanlah rumusan sasaran dengan menggunakan indikator kinerja yang merujuk kepada indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran-sasaran untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya penataan dan pengembangan sistem pemerintahan umum	1. Persentase pemakaian pedoman dalam penyusunan anggaran
2	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kegiatan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Laporan berkala pembangunan yang tepat waktu 2. Implementasi LPSE di SKPD
3	Meningkatnya koordinasi yang efektif dan efisien	1. Persentase rumusan rapat yang dapat di implemetasikan
4	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan	1. Persentase pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan
5	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah oleh eksekutif dan legislatif	1. Terfasilitasinya penyelenggaraan kebijakan Kepala Daerah 2. Pemekaran nagari
6	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1. Proses dan waktu pendistribusian surat ke seluruh SKPD
7	Meningkatnya fungsi data administrasi perkantoran yang tertib	1. Ketersediaan tenaga teknis administrasi perkantoran yang kompeten 2. Ketersediaan program aplikasi administrasi perkantoran
8	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur yang tepat sasaran	1. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur tepat sasaran 2. Ketersedian biaya pemeliharaan tepat sasaran
9	Meningkatkan pelayanan dan penyediaan sarana, serta prsarana KDH/WKDH yang tepat sasaran	1. Ketersediaan sarana dan prasarana KDH/WKDH tepat sasaran
10	Meningkatnya ketertiban pengaturan keprotokoleran KDH/WKDH	1. Ketersediaan personil pengatur tata tempat, tata acara dan tata penghormatan yang kompeten
11	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah guna mewujudkan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Banyaknya SOTK yang di analisis 2. Banyaknya SOTK yang dihasilkan 3. Banyaknya SKPS yang menyusun SPM
12	Meningkatnya kualitas SDM apatarur	1. Banyaknya pegawai yang mengikuti diklat

13	Meningkatnya opini BPK terhadap laporan keuangan	1. Tertib administrasi keuangan
14	Terkelolanya keuangan daerah dengan baik	1. Tingkat kemampuan/kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan
15	Akuntabilitas administrasi keuangan	1. Tingkat kemampuan/kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan
16	Meningkatnya kualitas sistem informasi dan komunikasi	1. Meningkatnya kualitas sistem informasi dan komunikasi pemerintah 2. Meningkatnya koordinasi dengan media masa, pers, lembaga pemerintah dan non pemerintah
17	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang komunikasi, informasi dan telematika	1. Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi terhadap masyarakat 2. Meningkatnya kerjasama yang efektif dengan media masa, pers, lembaga pemerintah dan non pemerintah
18	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dan legislatif	1. Terfasilitasnya penyelenggaraan kebijakan kepala daerah 2. Terfasilitasnya penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama daerah
19	Meningkatnya kualitas sistem inforkom dan telematika pemerintah daerah	1. Kemudahan akses data daerah berbasis elektronik 2. Terdapatnya data potensi Kabupaten Padang Pariaman, serta konten-konten yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 3. Tersedianya perangkat FAX dan PABX beserta operasionalnya 4. Terlaksananya pelayanan on line kepada masyarakat terutama dalam pemberian ijin KTP/KK 5. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan, kecamatan dan nagari terhadap teknologi informasi
20	Meningkatnya efektifitas penerapan peraturan daerah	1. Persentase produk hukum daerah yang diterbitkan
21	Terpenuhinya produk hukum daerah yang mendukung kebijakan Pemda	1. Jumlah produk hukun yang dihasilkan
22	Meningkatnya kesadaran hukum dan pelayanan hukum di lingkungan pemerintah	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan
23	Meningkatnya pembinaan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat	1. Persentase rumah tangga sasaran miskin yang menerima raskin

		2. Jumlah usaha untuk kesejahteraan rakyat yang dikembangkan
24	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan	1. Meningkatnya syiar agama kepada masyarakat 2. Menurunnya perbuatan maksiat
25	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan keagamaan	1. Meningkatnya aktifitas rumah ibadah 2. Meningkatnya peringkat dalam MTQ tingkat Sumatera Barat 3. Meningkatnya jumlah masjid aktif
26	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat	1. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset nagari melalui Bimtek, inventarisasi, dan pendataan keuangan dan aset nagari sebagai sumber pendapatan asli nagari 2. Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan nagari melalui Bimtek, konsolidasi dan inventarisasi 3. Terlaksananya pengembangan nagari melalui koordinasi dan penetapan indikator keberhasilan pemerintahan nagari 4. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan nagari melalui TOT, Bimtek peningkatan kapasitas aparatur nagari 5. Meningkatnya perasn BAMUS melalui Bimtek, orientasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai wujud untuk menentukan tindakan prioritas. Program adalah rangkaian kegiatan utama yang dipaket berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2015.

5. Permasalahan dan Solusi SKPD Pelaksana Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015

#### A. Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Pembagian aliran kas tahun 2015 tidak sesuai dengan pelaksanaan/penggunaan seharusnya. Khusus untuk rapat kerja daerah UKS tingkat Kabupaten, pelaksanaannya pada triwulan II, namun beberapa anggaran belanja/mata anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Rakerda tertampung pada triwulan III dan IV

2. Keterlambatan pengiriman nama sekolah juara UKS Kecamatan yang akan dibina oleh TP UKS Kabupaten.
3. Untuk menyatukan dan mengumpulkan seluruh tim monitoring dan evaluasi UKS pada satu waktu yang sama merupakan kendala pada pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah.
4. Sekolah yang dikirimkan oleh kecamatan pada umumnya belum sekolah yang terpapar UKS dengan baik.
5. Untuk pembinaan sering terkendala transportasi, dimana bagian kesra hanya terdapat 1 kendaraan dinas.
6. Tidak adanya pelatihan rutin bagi guru/kepala sekolah pelaksana program UKS.
7. Kekurangan staf untuk melakukan pembinaan yang insentif ke sekolah-sekolah binaan UKS.

#### B. Bagian Organisasi dan PAN

1. Kekurangan staf, sarana komputer dan printer
2. Masih ada beberapa SKPD yang tidak menyerahkan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

#### C. Bagian Umum dan Protokoler

1. Tidak tersedianya uang lembur dalam kegiatan rutin
2. Terbatasnya anggaran dana kegiatan, seperti anggaran makan dan minum dan anggaran sewa tenda
3. Kekurangan tenaga yang membidangi administrasi dan akuntansi
4. Kekurangan tenaga teknisi terutama di bidang kelistrikan
5. Kekurangan sarana dan prasarana seperti komputer dan printer

#### D. Bagian Hukum

1. Hanya satu kali masa sidang, sehingga hanya 6 Raperda yang disahkan dari target 35 Raperda dalam 3 kali masa sidang
2. Banyaknya Raperda yang diajukan kepada DPRD masih ditunda pengesahannya
3. Kurangnya dukungan yang kongkrit dari pihak legislatif dan instansi terkait, serta masyarakat agar tujuan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi
4. Kurangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bagian hukum sekretariat daerah kab padang pariaman
5. Perlu ditingkatkan jumlah dana untuk penyuluhan hukum di seluruh nagari dan kecamatan, sehingga program peningkatan kesadaran hukum masyarakat tercapai dan masyarakat taat dan patuh terhadap hukum

6. Perlu ditingkatkannya jumlah dana untuk mengikuti pelatihan/Bimtek penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan dan bimtek kuasa hukum, serta pendidikan keahlian profesi advokat (PKPA)

#### E. Bagian PDE

1. Lamanya terjadi perubahan anggaran karena sebagian dari kegiatan adanya pergeseran anggaran di perubahan anggaran tersebut.
2. Secara umum bagian PDE tidak memiliki permasalahan yang berarti untuk tahun anggaran 2015

#### F. Bagian Humas

1. Belum tersedianya fasilitas yang memadai untuk sebuah layanan informasi, seperti fasilitas ruangan pojok informasi dan fasilitas jaringan internet dan lainnya
2. Kekurangan SDM Yang lebih memahami teknologi informasi, teknik pembuatan berita dan relis
3. Tenaga ahli dan tim pembuat pidato yang belum tersedia
4. Kekurangan anggaran yang masih minim menyebabkan banyaknya pengurangan kerjasama dengan media
5. Banyaknya iklan dan perwira yang langsung dibuat tanpa konfirmasi ke bagian Humas
6. Jaringan internet yang masih lelet dan lambat
7. Banyaknya pemalakan oleh masyarakat di lapangan

#### G. Bagian Pemerintahan Nagari

1. Kekeurangan staf, minimal melakukan penambahan staf 2 orang
2. Kekurangan sarana dan prasarana kantor seperti komputer, printer, laptop, proyektor, lemari, arsip, kursi dan meja
3. Tidak adanya kendaraan operasional untuk ke lapangan
4. Anggaran luar daerah luar provinsi yang sangat terbatas

#### H. Bagian Ekonomi Pembangunan

1. Keterlambatan turunnya uang persediaan (UP) untuk tahun anggaran 2015
2. Tidak maksimalnya koordinasi ke kecamatan
3. Terlambatnya pembentukan tim-tim teknis, sehingga kerja tidak maksimal

SEKRETARIAT DPRD :

Program dan kegiatan serta alokasi anggaran untuk mencapai prioritas urusan wajib yang dilaksanakan selama tahun 2014 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman meliputi:

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,920,236,750	3,686,544,452	74.93	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan persentase capaian 103.53%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	160,000,000	112,968,476	70.61	Tersedianya alat tulis, cetak, penggantian prangko materai selama 12 bulan dengan persentase capaian 100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222,800,000	114,933,741	51.59	Terbayarnya layanan telepon, air, listrik, faksimili dan internet selama 11 bulan dengan persentase capaian 91.67%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	352,600,000	219,786,000	62.33	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan Honor Sopir yang dibayar sebanyak 9 unit dengan persentase capaian 75.00%
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107,300,000	106,800,000	99.53	Pembayaran honor PA, KPA, PPK dan PPTK selama 12 bulan dengan persentase capaian 100%
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100,000,000	94,634,000	94.63	Terpeliharanya kebersihan kantor dan tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor selama 1 tahun dengan persentase capaian 100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,000,000	9,969,045	49.85	Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor selama 1 tahun dengan persentase capaian 100%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	200,000,000	138,479,500	69.24	Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD selama 1 tahun dengan persentase capaian 100%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	245,000,000	189,917,100	77.52	Tersedianya makanan dan Minuman rapat-rapat di Sekretariat DPRD dan Tamu DPRD/ Sekretariat DPRD serta jasa tenaga pramusaji selama 1 tahun dengan persentase capaian 100%
10	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	3,512,536,750	2,699,056,590	76.84	Terlaksananya konsultasi komisi / pansus ( 5 x ) / BK ( 2 x ) / Banggar ( 2 x ) / Balegda ( 2 x ) Bamus ( 2 x ) dan konsultasi-konsultasi Sekretariat. Sebanyak 11 kali dengan persentase capaian 84.62%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,170,250,000	3,036,020,095	95.77	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi dengan persentase capaian

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
					89.00%
1.	Pengadaan kendaraan dinas	194,250,000	188,540,000	97.06	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit dengan persentase capaian 100.00%
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1,591,000,000	1,512,827,300	95.09	Terlaksananya Pemeliharaan berkala Gedung kantor selama 1 tahun dengan persentase capaian 100.00%
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	135,000,000	119,962,665	88.86	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor selama 1 tahun dengan persentase capaian 100%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	65,000,000	60,446,130	92.99	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor selama 1 tahun dengan persentase capaian 100%
6.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	200,000,000	198,351,000	99.18	Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas dengan persentase capaian 100%
7.	Rehab gedung DPPKA Lama	210,000,000	198,295,000	94.43	Terlaksananya Rehab gedung DPPKA Lama dengan persentase capaian 100%
8.	Rehab gedung DPRD (lanjutan)	200,000,000	198,280,000	99.14	Terlaksananya Rehab gedung DPRD (lanjutan) dengan persentase capaian 100%
9.	Rehab Mushalla	100,000,000	98,414,000	98.41	Terlaksananya Rehab Mushalla dengan persentase capaian 100%
10.	Rehab Halaman Parkir	75,000,000	70,386,000	93.85	Terlaksananya Rehab Halaman Parkir dengan persentase capaian 100%
11.	Pembangunan Pagar Kantor DPRD/ ex Kantor Bupati	200,000,000	198,048,000	99.02	Terlaksananya Pembangunan Pagar Kantor DPRD/ ex Kantor Bupati dengan persentase capaian 100%
12.	Pembangunan Sarana Pendukung rumah Dinas/ Jabatan DPRD	200,000,000	192,470,000	96.24	Terlaksananya Pembangunan Sarana Pendukung rumah Dinas/ Jabatan DPRD dengan persentase capaian 100%
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	397,375,000	384,023,500	96.64	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi dengan persentase capaian 89.00%
1.	Pengadaan mesin/kartu absensi	4,000,000	4,000,000	100	Terlaksananya pengadaan mesin / kartu absensi sebanyak 1 unit dengan persentase capaian 100%
2.	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	393,375,000	380,023,500	96.61	Tersedianya bahan Pakaian Anggota DPRD sebanyak 4 stel dan Sekretariat DPRD 1 stel dengan persentase capaian 100%
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	275,000,000	187,434,300	68.16	Jumlah SKPD yang mengikuti Diklat teknis dengan persentase capaian 224%
1.	Bintek Implementasi Peraturan Perundang-	275,000,000	187,434,300	68.16	jumlah PNS yang mengikuti Bintek Implementasi peraturan undangan bagi sekretariat DPRD sebanyak

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
	Undangan				42 orang dengan persentase capaian 175%
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35,000,000	29,661,500	84.75	Jumlah Laporan Tepat waktu dengan persentase capaian 100%
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	35,000,000	29,661,500	84.75	Terlaksananya penyusunan laporan Capaian Kinerja SKPD dalam rangka penyusunan Renja,lakip, Renstra, LPPD dll dengan persentase capaian 100%
VI	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	9,345,207,869	7,471,275,934	79.95	Persentase Peningkatan pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan persentase capaian 85%
	1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1,205,041,800	1,065,002,700	88.38	Terlaksananya pembahasan Ranperda-ranperda di DPRD dengan persentase capaian 60%
	2. Hearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dengan Tokoh Masyarakat / Agama	134,000,000	2,824,500	2.11	jumlah aspirasi masyarakat yang terjaring dengan persentase capaian 20%
	3. Kegiatan Reses	244,380,000	-	-	jumlah Reses dapa Anggota DPRD yang dilaksanakan dengan persentase capaian 0%
	4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2,191,645,000	1,789,225,750	81.64	Terlaksananya Bintek dan Workshop anggota DPRD sebanyak 5 kali dengan persentase capaian 100%
	5. Rapat Kerja Komisi Bersama Mitra Kerja	71,500,000	40,909,600	57.22	Terlaksananya Rapat Alat Kelengkapan DPRD dan Rapat dengan Mitra Kerja selama 1 tahun dengan persentase capaian 85%
	6. Penyusunan Ranperda Hak Inisiatif Dewan	25,500,000	-	-	jumlah ranperda hak inisiatif yang dilaksanakan oleh DPRD dengan persentase capaian 0%
	7. Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Pemerintah Daerah	13,000,000	-	-	Terlaksananya Peninjauan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah dengan persentase capaian 0%
	8. Koord. Dengan Pemerintah Pusat dan Lembaga Tinggi lainnya	721,616,000	555,216,540	76.94	jumlah koordinasi dan konsultasi pimpinan, dalam rangka memenuhi undangan dari lembaga pusat dan lembaga tinggi lainnya selama 1 tahun dengan persentase capaian 90.54%
	9. Pembuatan Kalender dan Kartu Anggota DPRD dan Buku Agenda	55,000,000	46,640,000	84.80	Terlaksananya pembuatan Buku Kalender, kartu anggota DPRD dan buku agenda dengan persentase capaian 85%

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
10	Peliputan DPRD Kabupaten Padang Pariaman	133,000,000	33,700,000	25.34	Terlaksananya peliputan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD terkait dengan tupoksinya dengan persentase capaian 50%
11	Pembuatan Varia / majalah	44,180,000	-	-	jumlah majalah yang dicetak dengan persentase capaian 0%
12	Pengaturan protokoler Anggota DPRD	24,000,000	-	-	Terlaksananya agenda - agenda DPRD dengan baik dan lancar dengan persentase capaian 0%
13	Kunjungan Kerja Luar Daerah	2,861,242,150	2,603,729,050	91.00	Terlaksananya agenda kunker DPRD sebanyak 3 kali dengan persentase capaian 100%
14	Biaya Penyelenggaraan Jenazah Bagi Anggota DPRD yang Wafat	50,000,000	5,990,000	11.98	Terlaksananya Penyelenggaraan Jenazah Bagi Anggota DPRD yang Wafat sebanyak 1 kali dengan persentase capaian 30%
	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Daerah	-	-		
15	Fasilitasi Kegiatan DPRD	96,000,000	96,000,000	100	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi dan pimpinan DPRD sebanyak 8 fraksi dengan persentase capaian 100%
16	Pelantikan Anggota PAW Anggota DPRD Periode 2014 sampai dengan 2019	50,000,000	15,264,000	30.53	Terlaksananya Pelantikan Anggota PAW Anggota DPRD Periode 2014 – 2019 sebanyak 1 kali dengan persentase capaian 100%
	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	-	-		
17	Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	1,425,102,919	1,216,773,794	85.38	Tersedianya penunjang operasional pimpinan DPRD selama 1 tahun dengan persentase capaian 100%
VII	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	60,000,000	22,000,000	36.67	
1.	Pengadaan Website DPRD Kab. Padang Pariaman	60,000,000	22,000,000	36.67	Terlaksananya Pengadaan Website DPRD Kab. Padang Pariaman dengan persentase capaian 85%
JUMLAH		18,203,069,619	14,816,959,781	81.40	83.7%

### 1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pada Sekretariat DPRD tidak ada penjabaran dari pencapaian indikator kinerja yang terdapat pada format lampiran III.3. Namun terdapat indicator kinerja kunci sebagai berikut :

- a. Ranperda yang disetujui DPRD tahun 2015  
Rumus Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah RANPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015}}{\text{Jumlah RANPERDA yang diusulkan tahun 2015}} \times 100 = (6/17) \times 100\% = 35,29\%$$

Daftar Ranperda yang disetujui DPRD:

No.	Tanggal	Nomor Keputusan	Ranperda Yang Disetujui
1	27 Agustus 2015	07/KEP.D/DPRD/2015	1 Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014
2	12 Oktober 2015	14/KEP.D/DPRD/2015	2 Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015
3	30 November 2015	20/KEP.D/DPRD/2015	3 Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016
4	23 Desember 2015	21/KEP.D/DPRD/2015	4 Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
			5 Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
			6 Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pada Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman

Daftar Usulan Ranperda yang ditunda DPRD Tahun 2015

No.	Ranperda Yang Ditunda
1	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengukuhan Kembali 201 Desa Lama Yang Dibentuk Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Dan Mengganti Sebutan Desa Menjadi Nagari
2	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata ruang Kawasan Tiram
3	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada KUD Mina Sinar Laut
4	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok
5	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
6	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
7	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Menanam dan Memelihara Pohon
8	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Saiyo Sakato
9	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah
10	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pada Bank Nagari
11	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti  
Rumus Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD}}{\text{jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2015}} \times 100 = (25/25) \times 100\% = 100\%$$

Daftar Keputusan DPRD Tahun 2015 yang dihasilkan dan ditindaklanjuti Tahun 2015

No	Tanggal	Nomor Keputusan		Tentang
		Keputusan DPRD	Keputusan Pimpinan DPRD	
1	17 Juni 2015	01/KEP.D/DPRD/2015		Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Masalah Aset dan PDAM
2	17 Juni 2015	02/KEP.D/DPRD/2015		Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Kepegawaian Dan Belanja Kabupaten Padang Pariaman
3	17 Juni 2015	03/KEP.D/DPRD/2015		Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Masalah Pendapatan dan LKPJ Bupati Padang Pariaman
4	31 Juli 2015	04/KEP.D/DPRD/2015		Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Padang Pariaman Tahun 2014
5	31 Juli 2015	05/KEP.D/DPRD/2015		Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Padang Pariaman Tahun 2010-2015
6	27 Agustus 2015	06/KEP.D/DPRD/2015		Nota Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Padang Pariaman tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014
7	27 Agustus 2015	07/KEP.D/DPRD/2015		Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014
8	27 Agustus 2015	08/KEP.D/DPRD/2015		Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Masa Jabatan 2010-2015
9	01 Oktober 2015	09/KEP.D/DPRD/2015		Keputusan DPRD Tentang Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015
10	01 Oktober 2015	10/KEP.D/DPRD/2015		Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tentang Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun anggaran 2015
11	01 Oktober 2015	11/KEP.D/DPRD/2015		Keputusan DPRD Tentang PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015
12	01 Oktober 2015	12/KEP.D/DPRD/2015		Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tentang PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015

No	Tanggal	Nomor Keputusan		Tentang
		Keputusan DPRD	Keputusan Pimpinan DPRD	
13	12 Oktober 2015	13/KEP.D/DPRD/2015		Persetujuan Bersama Bupati Padang Pariaman dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015
14	12 Oktober 2015	14/KEP.D/DPRD/2015		Keputusan DPRD Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015
15	03 November 2015	15/KEP.D/DPRD/2015		Keputusan DPRD Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun anggaran 2016
16	03 November 2015	16/KEP.D/DPRD/2015		Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016
17	03 November 2015	17/KEP.D/DPRD/2015		Keputusan DPRD Tentang PPAS Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016
18	03 November 2015	18/KEP.D/DPRD/2015		Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tentang PPAS Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016
19	13 November 2015		01/KEP.P/DPRD/2015	Penyempurnaan Dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015
20	27 November 2015		02/KEP.P/DPRD/2015	Pendelegasian Pembahasan 14 (Empat Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015
21	30 November 2015	19/KEP.D/DPRD/2015		Keputusan DPRD Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016
22	30 November 2015	20/KEP.D/DPRD/2015		Persetujuan Bersama Bupati Padang Pariaman dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016

No	Tanggal	Nomor Keputusan		Tentang
		Keputusan DPRD	Keputusan Pimpinan DPRD	
23	23 Desember 2015	21/KEP.D/DPRD/2015		Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015
24	23 Desember 2015	22/KEP.D/DPRD/2015		Persetujuan Bersama Bupati Padang Pariaman dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015
25	30 Desember 2015		03/KEP.P/DPRD/2015	Penyempurnaan Dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016

## 2. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Wajib/Pilihan dan Susunan Personilnya

No	Jumlah Pegawai menurut				Ket.
	Golongan		Pendidikan		
1	I	1	SD	0	
2	II	6	SMP	2	
3	III	15	SLTA	9	
4	IV	5	D-3	0	
5			S.1	11	
6			S.2	5	
7			S.3	0	
Jumlah		27		27	

## 3. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan yang dilakukan didasarkan atas program dan kegiatan prioritas yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

## 4. Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan

#### I. Internal

- a. Kurangnya atau keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Hal ini sangat berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaan tugas dilapangan. sementara sarana dan prasarana yang dimiliki sangat minim. Diantara sarana yang paling dibutuhkan adalah sarana perkantoran yang kurang memadai. dan alat-alat kelengkapan DPRD.

- b. Kurangnya pegawai / tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas untuk pelaksanaan kegiatan. Dengan banyak dan luasnya cakupan kerja Sekretariat DPRD khususnya dalam memfasilitasi kelancaran kebutuhan untuk 40 orang Anggota DPRD menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan.
- c. Masih rendah kemampuan SDM aparatur yaitu tenaga administrasi maupun operasional. Hal ini disebabkan latar belakang pendidikan formal dibawah standar minimum, sedangkan untuk mengikuti pendidikan formal masih kurang disebabkan terbatasnya anggaran pendidikan formal.
- d. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai dan telah banyaknya yang rusak tidak dapat digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan sebagian dari sarana dan prasarana sangat kurang dan kondisi yang rusak dan untuk mengoperasikan banyak yang rusak, seperti mobil dinas untuk komisi yang membutuhkan dana yang cukup besar.

## II. Eksternal

- a. Kurang disiplinnya dari sebagian anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada rapat-rapat
- b. Kurang disiplinnya anggota DPRD dalam menjalankan agenda yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah DPRD.

### Solusi

- a. Untuk meningkatkan kemampuan SDM Anggota DPRD dan personil Sekretariat DPRD telah diupayakan melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan secara bertahap telah diupayakan melalui pengadaan setiap tahun.
- c. Harus ada penambahan tenaga sekretariat di Sekretariat DPRD.
- d. Diperlukan dukungan yang lebih kongkrit dari pihak Legislatif dan masing-masing instansi terkait serta masyarakat agar tujuan pembangunan dalam rangka peningkatan kemandirian dan kemampuan baik ekonomi, sosial dan budaya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan baik dan berkesinambungan.
- e. Diharapkan kepada anggota DPRD untuk disiplin dan konsekwen dalam menjalankan agenda rapat-rapat dan kegiatan yang telah ditetapkan.

## INSPEKTORAT KABUPATEN :

## Alokasi dan Realisasi Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Capaian Program/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Pekantoran	360.100.000	349.288.800	97,00	
	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.000.000	45.916.450	97,69	Tersedianya ATK, materai, penggandaan dan cetak
	2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	41.700.000	37.306.400	89,46	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	3. Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	7.500.000	3.620.750	48,28	Tersedianya biaya pengurusan STNK dan pajak kendaraan dinas
	4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	41.900.000	41.850.000	99,88	Tersedianya insentif pengelola keuangan
	5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	22.000.000	21.986.500	99,94	Tersedianya alat kebersihan dan tenaga kebersihan
	6. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000	20.000.000	100,00	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
	7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	5.000.000	3.853.000	77,06	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar
	8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000	39.897.500	99,74	Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu
	9. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	105.000.000	104.858.200	99,86	Tersedianya biaya untuk koordinasi dan konsultasi
	10. Kegiatan Penyediaan jasa pendukung perkantoran	30.000.000	30.000.000	100,00	Tersedianya insentif tenaga honorer
II	Program Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	426.000.000	423.447.975	99,40	
	1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	81.000.000	79.884.375	98,62	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (laptop dan printer)
	2. Kegiatan pemeliharaan	120.000.000	119.136.600	99,28	Tersedianya biaya pemeliharaan

	rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.000.000		98,87	kendaraan dinas dan BBM untuk kendaraan dinas/pribadi
	3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	200.000.000	24.717.000	99,86	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor
	4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		199.710.000		Menambah luas ruangan dan kenyamanan tempat kerja
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.000.000	12.000.000	92,31	
	1. Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi	4.000.000	3.000.000	75,00	Tersedianya mesin absensi (finger print)
	2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.000.000	9.000.000	100,00	Tersedianya pakaian dinas untuk seluruh PNS/PTT dan swakelola
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	198.750.000	195.889.700	98,57	
	1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.750.000	29.941.800	97,14	Tersedianya dokumen perencanaan
	2. Kegiatan Evaluasi Kinerja Administrasi Keuangan SKPD	105.000.000	104.838.100	99,85	Terlaksananya evaluasi administrasi dan keuangan SKPD
	3. Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD	35.000.000		99,69	Terevaluasinya SAKIP SKPD
	4. Review RKA SKPD	30.000.000	34.892.500	94,09	Terlaksananya review atas RKA SKPD
			28.227.300		

V	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.080.000.000	1.070.998.300	99,17	
	1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	420.000.000	419.873.200	99,97	Terlaksananya Program Kerja Pengawasan Tahunan
	2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	155.000.000	154.930.000	99,95	Terlaksananya penanganan kasus pengaduan
	3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	145.000.000	144.349.400	99,55	Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan
	4. Kegiatan Review Laporan Keuangan Pemda	100.000.000	96.267.000	96,27	Terlaksananya reviu atas laporan keuangan SKPD dan LKPD
	5. Audit Probity	60.000.000	59.854.700	99,76	Terlaksananya audit atas pengadaan barang
	6. Tindak Lanjut Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	200.000.000	195.724.000	97,86	Terlaksananya pembuatan buku analisa resiko dan rencana tindak pendalian di SKPD
V	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				
I	1. Kegiatan Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	400.000.000	399.178.700	99,79	Terikutinya diklat pemben-tukan auditor dan diklat teknis substantif bagi aparatur Inspektorat
VII	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	267.000.000	265.953.950	99,61	
	1. Pembinaan dan Pengawasan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	157.000.000	156.561.200	99,72	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan keuangan SKPD
	2. Sistem Hasil Pemeriksaan dalam Pelaporan Audit	110.000.000	109.392.750	99,45	Terlaksananya laporan hasil pemeriksaan melalui suatu system

## Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

	Uraian	Target	Realisasi	%	Sumber dana
A	Program Pelayanan Administrasi				
	1 Penyediaan Jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun	100	APBD
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	1 tahun	100	APBD
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	9 Unit	8 Unit	70	APBD
	4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	12 bln	12 bln	100	APBD
	5 Penyediaan jasa kebersihan Kantor	1 tahun	1 tahun	100	APBD
	6 Penyediaan perbaikan peralatan kerja	1 tahun	1 tahun	100	APBD
	7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	100	APBD
	8 Penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	1 tahun	100	APBD
	9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	1 tahun	100	APBD
	10 Penyediaan jasa pendukung Administrasi Perkantoran	12 bln	12 bln	100	APBD
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8 unit	12 unit	100	APBD
	2 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	1 tahun	100	APBD
	3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1 tahun	1 tahun	100	APBD
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	1 unit	1 unit	100	APBD
	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	45 stel	45 stel	100	APBD
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & keuangan				
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 dok	9 dok	100	APBD
	2 Evaluasi Kinerja Administrasi Keuangan SKPD	25 SKPD	25 SKPD	100	APBD
	3 Evaluasi LAKIP	12 LHE	12 LHE	100	APBD
	4 Review RKA SKPD	-	5 SKPD	100	APBD
E	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				
	1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	47 LHP	50 LHP	84	APBD
	2 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	1 tahun	1 tahun	100	APBD
	3 Tindak Lanjut Hasil Temuan pengawasan	1 tahun	1 tahun	100	APBD
	4 Review Laporan Keuangan Pemda	42 SKPD	42 SKPD	100	APBD
	5 Audit Probity	1 tahun	1 tahun	100	APBD
	6 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	36 SKPD/Unit Kerja	21 SKPD/Unit Kerja	58	APBD
F	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan				

	Sistem dan Prosedur Pengawasan				
1	Pembinaan dan Pengawasan Penatausahaan Keuangan dan Asset Daerah	1 tahun	1 tahun	100	APBD
2	Sistem Hasil Pemeriksaan dalam Pelaporan Audit	1 tahun	1 tahun	100	APBD

Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Wajib dan Susunan Personilnya :

No	Jumlah Pegawai menurut				Ket.
	Golongan		Pendidikan		
	I	-	SD	-	
	II	2	SMP	-	
	III	17	SLTA	4	
	IV	22	D-3	-	
			S.1	20	
			S.2	17	
			S.3	-	
	Jumlah	41		41	

#### Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman adalah mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2010-2015. Berdasarkan Renstra disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Dari Renja kemudian dibuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2015 kemudian dibuat DPA Inspektorat Tahun 2015.

#### Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- ✓ Personil yang ada untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan belum memadai dan perlu peningkatan SDM dibidang pengawasan melalui Pendidikan Fungsional Pengawasan pada setiap bidang. Jumlah tenaga fungsional yang ada di Inspektorat masih belum mencukupi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan. Sampai akhir tahun 2015 ini Inspektorat telah memiliki 21 orang tenaga fungsional terdiri dari :
  - Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sebanyak 7 orang dengan rincian : P2UPD Madya sebanyak 5 orang dan P2UPD muda sebanyak 2 orang.
  - Fungsional Auditor sebanyak 16 orang dengan rincian : Auditor Madya 6 orang, Auditor Muda sebanyak 2 orang dan Auditor Pertama sebanyak 6 orang.
- ✓ Sarana dan prasarana yang pendukung, belum memadai seperti kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 untuk operasional ke lapangan karena saat turun melaksanakan pengawasan tim Inspektorat terdiri dari 5 s.d 8 tim sedangkan kendaraan dinas roda 4 yang ada hanya sebanyak 3 unit, 1 unit digunakan untuk operasional Inspektur, 1 unit digunakan untuk operasional sekretaris dan 1 unit digunakan oleh sekretariat/tim pengawasan sehingga saat melaksanakan pengawasan, tim menggunakan kendaraan pribadinya untuk operasional ke lapangan.

- ✓ Masih lemahnya para Pimpinan SKPD/Unit Kerja yang telah diperiksa dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern dan masih ada Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan oleh masing-masing SKPD/unit kerja yang diperiksa.

Solusi :

- ✓ Jabatan fungsional yang ada di Inspektorat diangkat melalui inpassing bukan melalui pembentukan/penjenjangan sehingga untuk menunjang tugas pengawasan maka mengirimkan personil/aparatur Inspektorat untuk mengikuti Diklat penjenjangan fungsional dan Diklat Teknis substantif agar menambah kompetensinya dalam melaksanakan pengawasan.
- ✓ Diupayakan melalui permohonan untuk menambah kendaraan operasional melalui Pimpinan Daerah, DPRD maupun Panitia Anggaran. Pada pembahasan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2015 serta pembahasan KUA-PPAS Perubahan dan APBD-P Tahun 2015 telah diusahakan agar ada penambahan kendaraan dinas/operasional roda 4 namun sampai saat ini belum dapat dilakukan penambahan kendaraan operasional.
- ✓ Menyurati Pimpinan Unit Kerja agar temuan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan surat Sekdakab, Wakil Bupati dan Bupati, apabila Unit Kerja terkait tidak kunjung menyelesaikannya dilimpahkan penyelesaiannya kepada Tim MPP dan tim TP/TGR Kabupaten Padang Pariaman dan apabila diperlukan sesuai dengan arahan Kepala Daerah juga disampaikan kepada pihak Penyidik.
- ✓ Mengusahakan penambahan jumlah pegawai Inspektorat untuk memenuhi kebutuhan akan fungsional auditor dan fungsional P2UPD, namun hal ini belum terlaksana.

## DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

### 1. Alokasi dan Realisasi Program/Kegiatan

No	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%	Capaian Program dan Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180.177.500	179.581.340	596.160	99,67	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Kantor selama 12 bulan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.500.000	18.300.823	61.199.177	23,02	Terpenuhinya pembayaran telepon dan listrik selama 12 bulan
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /operasional	6.000.000	4.100.900	1.899.100	68,35	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	190.990.000	169.698.000	21.292.000	88,85	Meningkatnya Kinerja keuangan yang akuntabel selama 12 bulan
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	43.000.000	36.991.560	6.008.440	86,03	Meningkatnya suasana kerja yang nyaman serta tersedianya peralatan kebersihan kantor

						selama 12 bulan
6	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	32.979.250	20.750	99,94	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000	5.886.500	1.613.500	78,49	Meningkatnya wawasan karyawan/karyawati selama 12 bulan
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	55.000.000	54.757.450	242.550	99,56	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat/tamu selama 12 bulan
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	122.000.000	121.882.100	117.900	99,90	Adanya koordinasi dari tingkat Kabupaten, dinas instansi terkait di Wilayah Kabupaten selama 12 bulan
10	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran*)	216.400.000	196.400.000	20.000.000	90,76	Meningkatnya kinerja Tenaga Swakelola selama 12 bulan
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>						
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	742.240.000	677.553.280	64.686.720	91,28	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor sebanyak 4 unit
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	131.500.000	100.836.000	30.664.000	76,68	Terpeliharanya gedung kantor dalam meningkatkan kenyamanan dalam bekerja selama 12 bulan
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	115.000.000	108.196.221	6.803.779	94,08	Terpenuhinya jasa service, belanja penggantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas selama 12 bulan
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	22.000.000	21.888.773	111.227	99,49	Terpeliharanya perlengkapan kantor secara rutin /berkala SKPD selama 12 bulan
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>						
15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	26.200.000	16.008.300	10.191.700	61,10	Terpenuhinya keseragaman Pakaian Dinas untuk PNS
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>						
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	42.000.000	35.1400.000	6.860.000	83,67	Tersedianya sumber Daya Manusia (SDM) yang Cakap dan handal selama 12 bulan
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>						
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.200.000	31.370.750	4.829.250	86,66	Tersedianya laporan LAKIP, LPPD, Renstra, RKA, DPA, keuangan

						semesteran pada SKPD selama 12 bulan
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	32.900.000	26.633.940	6.266.060	80,95	
19	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	176.800.000	168.860.200	7.939.800	95,51	
20	Pengelolaan Keuangan SKPKD	55.000.000	53.804.409	1.195.591	97,83	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
21	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Restribusi	30.000.000	21.543.000	8.457.000	71,81	
22	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	193.000.000	142.509.600	50.490.400	73,84	
23	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	132.000.000	66.317.399	65.682.601	50,24	
24	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	102.000.000	61.674.900	40.325.100	60,47	
25	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	83.000.000	79.630.134	3.369.866	95,94	Meningkatnya
26	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	79.660.000	76.483.600	3.176.400	96,01	
27	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	43.240.000	39.116.801	4.123.199	90,46	
28	Verifikasi pertanggungjawaban dan Perbendaharaan	31.000.000	30.818.600	181.400	99,41	
29	Penata Usahaan Gaji	92.140.000	91.009.650	1.130.350	98,77	
30	Penunjang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda)	59.000.000	42.958.303	16.041.697	72,81	
31	Penyusunan Laporan Semesteran Aset/Barang Daerah	78.100.000	72.248.423	5.851.577	92,51	
32	Pelaksanaan Penerbitan SP2D	87.000.000	85.716.428	1.283.572	98,52	
33	Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah	112.000.000	111.497.103	502.897	99,55	
34	TP-TGR	23.000.000	18.429.400	4.570.600	80,13	
35	Implementasi Simda Barang Milik Daerah	160.475.000	152.681.400	7.793.600	95,14	
36	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	408.129.000	352.424.525	55.704.475	86,35	
37	Fasilitas Penerbitan DPA dan SPD	25.000.000	16.679.200	8.320.800	66,72	
38	Sosialisasi PBB dan BPHTB	50.575.200	50.575.200	-	100,00	
39	Kodefikasi dan	59.000.000	56.748.450	2.251.550	96,18	

	Pencekungan Aset					
40	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD untuk BPK dan bendahara	227.800.000	226.949.000	851.000	99,63	
41	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD	34.400.000	30.061.762	4.338.238	87,39	
42	Sosialisasi Cukai Tembakau	176.000.000	159.548.143	16.451.857	90,65	
43	Implementasi Simda Pendapatan	68.000.000	52.922.000	15.078.000	77,83	
44	Pemutakhiran Data ZNT, DBKB dan Materai Untuk Penilaian Objek Pajak Khusus	481.980.000	469.683.000	12.297.000	97,45	
45	Pendataan PBB	352.954.800	340.319.387	12.635.413	96,42	
46	Implementasi Aplikasi Persediaan	101.525.000	99.684.600	1.840.400	98,19	
47	Operasional Pemungutan PAD	176.000.000	171.348.658	4.651.342	97,36	
48	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	33.000.000	32.783.400	216.600	99,34	
49	Penyusunan Standar Biaya dan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD	53.000.000	33.795.900	19.204.100	63,77	
50	Pengalihan Potensi PAD	67.500.000	5.868.000	61.632.000	8,69	
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA						
51	Pengelolaan Dana Transfer, Dana Perimbangan dan Bagi hasil	138.000.000	110.128.250	27.871.750	79,80	
	JUMLAH	6.071.886.500	5.363.024.012	708.862.488	88,33	

## 2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan	Capaian Kinerja	Ket
2	3	4	5	6	7
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	62	Melakukan Perumusan Kebijakan Teknis dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan wewenang yang dimiliki	Jumlah Perda APBD yang ditetapkan pada 1 tahun/ jumlah Perbub APBD ditetapkan dalam 1 tahun	100	
	63	Pelayanan Penunjang untuk Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Keuangan meliputi Pelaksana Pendapatan, Pengelola asset Daearah, Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan.	Menunjukkan Jumlah Kegiatan Pendapatan Asli Daerah ( P A D) serta Menghimpun Aset Aset Daerah.	100	

Tingkatan Pencapaian Standar Pelayanan minimal Urusan Wajib DPPKA Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015 Dapat Dijelaskan

6. Pendistribusian Surat Masuk dan Surat Keluar Secara Optimal
7. Penerbitan SP2D terdiri dari
  - a. Belanja Uang Persediaan ( UP )
  - b. Belanja Langsung ( LS ) dan Tidak Langsung
  - c. Belanja Ganti Uang ( GU ),
  - d. Belanja Tambah Uang ( TU )
8. Mencetak Gaji
9. Laporan Keuangan Tepat Waktu
10. Penghapusan Barang Milik Daerah ( BMD ) ke SIMDA
11. Pembuatan SPP dan SPM dana Bantuan
12. Penyusunan APBD dan APBD Perubahan
13. Penerbitan SPD
14. Penyusunan Perbub Standar Biaya
15. Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA )
16. Verifikasi PBHTB untuk Penilaian Dikantor hanya satu hari, untuk penelitian lapangan membutuhkan 3 hari kerja
17. Pelayanan PBB seperti pendataan Baru Perubahan dan Perubahan Data Minilal selama 1 Minggu

Ringkasan SKPD Pelaksanaan Urusan Wajib dan Susunan Personilnya :

No.	Jumlah Pegawai Menurut				Keterangan
	Golongan		Pendidikan		
	I	-	SD	-	
	II	6	SLTP	-	
	III	30	SLTA	7	
	IV	7	D-3	5	
			S.1	19	
			S.2	12	
			S.3	-	
	JUMLAH	43 orang		43 orang	

3. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas dimaksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD.

c. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategik ini maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Padang Pariaman dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh

organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga akan memungkinkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Padang Pariaman untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan strategik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan strategik dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Padang Pariaman bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dimasing-masing unit kerja.
2. Memberikan arah dan pedoman pada aparatur dan seluruh unsur masyarakat dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

d. Prioritas SKPD

Pada bagian ini akan diuraikan tentang tujuan pembangunan, sasaran program pada tahun 2015 dari Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Padang Pariaman.

4) Permasalahan dan Solusi

c. Permasalahan

- 1) Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, untuk itu diperlukan biaya yang sangat besar sementara kemampuan dana sangat terbatas
  - 2) Terbatasnya biaya Operasional menyebabkan kurang lancarnya kegiatan yang kita harapkan.
  - 3) Pengelolaan Aset daerah belum terkelola secara optimal karena belum adanya kepastian hukum tentang kewenangan yang diberikan dan jumlah aparatur untuk pengelolaan aset ini sangat terbatas.

- 4) Kompleksitas permasalahan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Padang Pariaman yang membutuhkan penanganan dini dan komprehensif
- 5) Masih relative rendahnya SDM aparatur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabuapten Padang pariaman sehingga berbagai permasalahan DPPKA Kabupaten Padang Pariamn Penanganannya belum optimal dan menyeluruh.

d. Solusi

- 1) Untuk meningkatkan kemampuan SDM personil telah diupayakan melalui pelatihan dan pembinaan kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan formal.
- 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki, dan secara bertahap telah diupayakan melalui pengadaan setiap tahun.
- 3) Diupayakan secara terus menerus peningkatan biaya operasional dan pemeliharaan untuk kelancaran tugas sehari-hari.
- 4) Menyesuaikan kembali kebutuhan belanja daerah dengan memperhatikan ketentuan riil setiap unit kerja dalam rangka menunjang kelanjutan tugas pelayanan dalam bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 5) Meningkatkan peran inspektorat dan isntansi pengawasan lain dalam monitoring pelaksanaan pengelolaan Keuangan daerah.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ALOKASI DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	Capaian Program/Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	369.100.000	367.213.090	99	
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.000.000	38.347.500	98.33	Telah tersedia Atk, cetak dan penggandaan untuk tahun 2015 serta pengelolaan surat masuk dan keluar sepanjang tahun 2015, sebanyak 3729 buah surat
	2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	115.100.000	114.170.000	99.19	Telah dibayarkan honor jasa administrasi keuangan selama tahun 2015 ini untuk 25 orang
	3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000	29.799.000	99.33	Telah dibayarkan jasa pihak ketiga untuk kebersihan kantor, serta pembelian peralatan kebersihan kantor di tahun 2015
	4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	10.000.000	9.997.800	99.98	Telah dilakukan pembelian alat-alat listrik dan penerangan kantor dari bulan Januari s/d Desember 2015
	5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.930.000	99.30	Telah disediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap bulannya sepanjang tahun 2015

	6)	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000,	29.969.500,	99.90	Telah terlaksana pembayaran makan dan minuman untuk tahun 2015
	7)	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	135.000.000,	134.999.290,	100	Telah terlaksananya kegiatan untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama tahun 2015
2		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	404.385.557,	395.057.761,	98	
	1)	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	265.802.557,	258.408.000,	97.22	Telah dilaksanakan pengadaan peralatan kantor berupa: 1. Lemari besi 2 buah 2. PC (Komputer) 3 buah 3. Monitor 2 buah 4. LCD 2 buah 5. Stabilizer 1 buah 6. Laptop 1 buah 7. Scanner 2 buah 8. Printer 2 buah 9. Sound System 1 paket 10. Meja Rapat 1 set 11. Kursi 22 buah 12. Acer Proyektor 1 set 13. Microphone 1 set 14. Screen Letak 1 set
	2)	Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	10.000.000,	9.825.000,	98.25	Telah dilaksanakan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dari bulan Januari s/d Desember 2015
	3)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	128.583.000,	126.824.761,	98.63	Telah dilaksanakan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas berupa servis kendaraan, penggantian suku cadang, pembayaran bbm, sepanjang tahun 2015
3		Program peningkatan disiplin pegawai	16.000.000,	15.840.000,	99	
	1)	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	16.000.000,	15.840.000,	99	Telah tersedianya pakaian dinas sebanyak 45 orang PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dari 45 orang PNS yang ditargetkan
4		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas	130.000.000,	123.292.100,	96	
	1)	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	55.000.000,	54.902.400,	99.82	Telah diterbitkannya SK pensiun sebanyak 215 dokumen dari 200 dokumen yang ditargetkan, dengan rincian SK pensiun batas usia pensiun sebanyak 162 buah, SK pensiun Janda/Duda sebanyak 42 buah dan SK pensiun muda sebanyak 11 buah
	2)	Pemindahan Tugas PNS	75.000.000,	68.389.700,	91.19	Telah terlaksananya penerbitan ➤ rekomendasi melepas sebanyak 100 rek, sedangkan realisasinya adalah 75 rek. ➤ rekomendasi menerima sebanyak 100 rek, dan realisasinya adalah 74 rek ➤ SK penempatan pindah masuk sebanyak 75 SK, realisasinya 70 SK ➤ SK pindah dalam kabupaten sebanyak 200 SK, realisasinya sebanyak 123 SK ➤ SK yang berkaitan dengan pemerataan guru PNS ditargetkan sebanyak 500 orang, realisasinya hanya 124 orang.

5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.568.508.000	2.150.637.837	84	
	1) Diklat Prajabatan Gol. II dan III	1.559.426.000	1.219.563.520	78.21	Telah dilaksanakan diklat prajabatan untuk <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ CPNS Kategori II sebanyak 451 orang dari 548 orang yang ditargetkan, sedangkan sisanya untuk 97 orang direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2016.</li> <li>➢ CPNS Pelamar Umum sebanyak 30 orang dari 30 orang yang ditargetkan dengan rincian 21 orang CPNS Golongan II dan 9 orang CPNS Golongan III</li> </ul>
	2) Diklat PIM II	0	0	0	Tidak terlaksananya kegiatan ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak mendapat undangan dari Panitia Penyelenggara untuk mengikuti diklat ini, sehingga tidak ada pengiriman PNS Kabupaten Padang Pariaman untuk mengikutinya.
	3) Diklat PIM III	300.000.000	296.686.400	98.90	Telah dilakukan pengiriman Pejabat Eselon III untuk mengikuti Diklat PIM III bekerjasama dengan Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 10 orang dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten Padang Pariaman</li> <li>➢ 1 orang dengan pembiayaan dari APBN</li> </ul> <p>Telah lulus 11 orang Pejabat Eselon III yang mengikuti Diklat PIM III dari 11 orang pejabat yang mengikutinya.</p>
	4) Diklat PIM IV	679.082.000	613.827.917	90.39	Telah dilaksanakan Diklat PIM IV kerjasama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui BKD dedngan Pusdiklat Kementrian Dalam Negeri Regional Bukittinggi dan pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Padang Pariaman. Jumlah peserta 29 orang Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dari 29 orang yang ditargetkan. <p>Telah lulus 29 orang Pejabat Eselon IV yang mengikuti Diklat PIM IV dari 29 orang pejabat yang mengikutinya.</p>
	5) Diklat Penilik	0	0	0	Tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan belum adanya lembaga penyelenggara yang memiliki fasilitator berkompetensi di bidang penilik di wilayah Sumatera Barat. Sedangkan untuk mendatangkan fasilitator dari luar Sumatera Barat ataupun melaksanakan dengan pola kontribusi atau cost sharing, anggaran tidak mencukupi untuk melakukannya.
	6) Diklat Pengawas	0	0	0	Kegiatan dialihkan
	7) Kursus-kursus dan Diklat Singkat	30.000.000	20.560.000	68.53	Telah dilaksanakan pengiriman PNS BKD untuk mengikuti kegiatan diklat dan kursus singkat seperti bimtek, workshop dan jenis lainnya sebanyak 8 orang dari 5 orang yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan anggaran yang direncanakan melebihi dari realisasi pembiayaan untuk 5 orang.

6	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000	29.255.000	98	
	1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	29.255.000	98.46	Telah disusunnya 10 dokumen perencanaan dan pelaporan yaitu Renstra 2015, Renja 2016, Tapkin 2015, Tapkin Perubahan 2015, LAKIP 2015, LPPD 2015, RKA 2015, RKA Perubahan 2015, DPA 2015 dan DPA perubahan 2015.
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.281.850.000	1.202.497.246	89	
	1) Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	8.000.000	5.509.500	68.87	Telah ditangani 8 kasus pelanggaran disiplin PNS dari 30 kasus yang ditargetkan BKD pada tahun 2015. Jumlah kasus yang ditangani sesuai dengan jumlah pelanggaran disiplin PNS yang terjadi pada 2015 yaitu sebanyak 8 kasus.
	2) Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	177.050.000	151.910.050	85.80	Telah diberikan bantuan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar dan praja IPDN ikatan dinas sebanyak 34 orang dari 50 orang yang ditargetkan, dengan rincian 5 orang tugas belajar kerjasama Bappenas, 13 orang Ikatan Dinas (Praja IPDN), 11 orang tugas belajar kerjasama Kemenkes, 4 orang kerjasama dengan Kemenkominfo dan 1 orang kerjasama dengan BPKP.
	3) Penerimaan praja IPDN	28.600.000	0	0	Tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Pemerintah Pusat menyelenggarakan langsung penerimaan praja IPDN pada tahun 2015 dan peran Pemerintah Kabupaten dalam kegiatan ini hanya bersifat memfasilitasi jika dibutuhkan, seperti penyediaan tempat pelaksanaan, sedangkan anggaran kegiatan langsung dari APBN.
	4) Kenaikan Pangkat PNS Fungsional	55.000.000	54.396.600	98.90	Telah dilaksanakan kenaikan pangkat PNS fungsional dari tenaga kesehatan sebanyak 265 SK dari 300 SK yang ditargetkan pada tahun 2015. Realisasinya kurang dari target yang direncanakan karena guru-guru tidak ada yang naik pangkat tahun 2015 ini, dikarenakan untuk naik pangkat guru harus memiliki PKG (Penilaian Kinerja Guru) sesuai dengan PermenPANRB No. 16 Tahun 2009. PKG itu dimulai dari bulan Juli 2014 s/d Juni 2015, jadi tidak ada guru yang naik pangkat tahun 2015.
	5) Pengurusan Karpeg, Kartu Istri dan Kartu suami Pegawai	40.800.000	39.375.700	96.51	Telah dilaksanakan penerbitan Karpeg, Karis dan Karsu sebanyak 224 buah pada tahun 2015 dan 700 direncanakan penerbitannya pada tahun 2016.
	6) Penyelenggaraan Sidang MPP	24.300.000	21.625.550	88.99	Telah dilaksanakan 5 kali sidang MPP dari 12 kali sidang MPP yang ditargetkan pada tahun 2015. Karena Sidang MPP memutuskan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang bermasalah, izin belajar dan tugas belajar, dan perumusan kebijakan tentang manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah kabupaten Padang Pariaman. Dan realisasi pelaksanaan Sidang MPP ini kurang dari target, karena pelaksanaan sidang tergantung kepada Ketua MPP dan kelengkapan

					berkas-berkas yang akan di proses di MPP
7)	Pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PNS	89.400.000	87.969.850	98.40	Telah dilaksanakan 6 kali sidang Baperjakat, 3 kali pelantikan, 3 kali pengambilan sumpah PNS, 6 berita acara sidang, 595 orang pejabat yang dilantik dan 35 PNS yang disumpah ditambah 3 orang pegawai pindahan yang belum disumpah di daerah asalnya sehingga melaksanakan pengambilan sumpah di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2015 kegiatan ini menargetkan 12 kali sidang baperjakat, 12 kali pelantikan, 12 kali pengambilan sumpah, 12 berita acara sidang, dan 829 orang pejabat yang dilantik dan 35 PNS yang disumpah.
8)	Ujian Penyesuaian Ijazah	30.000.000	26.270.000	87.57	Telah dilaksanakan ujian dinas penyesuaian ijazah sebanyak 34 orang pada bulan April 2015 bekerjasama dengan Kanreg XII BKN Pekanbaru dari 40 orang yang ditargetkan.
9)	Validasi dan Dokumentasi Data Kepegawaian	265.000.000	263.472.400	99.42	Telah dilaksanakan kegiatan berupa update SAPK, Pengembangan Simpeg, Penyelesaian Konversi NIP dan KPE serta pelaksanaan program e-PUPNS.
10)	Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	27.500.000	26.925.000	97.91	Telah dilaksanakan pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 163 orang PNS yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dari 165 yang ditargetkan pada tahun 2015.
11)	Analisis Kebutuhan Formasi Kepegawaian	75.000.000	70.764.100	94.35	Telah dilaksanakan proses perbaikan entry data e formasi sebanyak 50 % dan sisanya sebanyak 50 % belum dapat dilaksanakan pada tahun 2015 karena terkendala anjab abk dan jaringan.
12)	Penetapan Pengangkatan Pertama Kali, Kenaikan Jenjang Karir dan Pemberhentian Jabatan Fungsional PNS	20.000.000	19.472.200	97.36	Telah dilaksanakan pengangkatan pertama kali, kenaikan jenjang karir, dan pemberhentian dari jabatan fungsional PNS sebanyak 169 orang dari 150 orang yang ditargetkan, dengan rincian penetapan pengangkatan pertama kali sebanyak 4 orang, kenaikan jenjang karir sebanyak 108 orang dan pemberhentian dari jabatan fungsional sebanyak 57 orang. Jumlah realisasinya melebihi dari target dikarenakan proses dalam jabatan fungsional tertentu tergantung pada sidang MPP, Baperjakat, dan berkas yang masuk.

13)	Peningkatan Status Kepegawaian	100.000.000	98.277.646	98.28	Telah dilaksanakan peningkatan status kepegawaian sebanyak 741 SK dari 608 SK yang ditargetkan, dengan rincian : - SK PTT = 113 orang - SK CPNS K1 = 8 orang - SK CPNS K2 = 539 orang - SK PNS Umum = 30 orang - SK CPNS Dokter = 16 orang - SK 100% K1 = 35 orang
14)	Pembinaan perkawinan dan perceraian PNS	15.000.000	14.804.700	98.70	Telah dilaksanakan kegiatan pembinaan perkawinan dan perceraian PNS sebanyak 20 kasus pada tahun 2015 dari target sebanyak 50 kasus. Kegiatan pembinaan perkawinan dan perceraian PNS masih kurang dari target yang direncanakan karena disesuaikan dengan jumlah kasus perkawinan dan perceraian PNS yang terjadi pada tahun 2015 sebanyak 20 kasus.
15)	Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS	55.000.000	52.822.000	96.04	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi disiplin PNS selama 12 bulan dan hasil monitoring dan evaluasi disiplin tersebut diperoleh informasi kehadiran PNS selama tahun 2015.
16)	Kenaikan Pangkat PNS Struktural, KGB dan Pencantuman gelar	50.000.000	49.586.200	99.17	Telah dilaksanakan Kenaikan pangkat PNS Struktural, KGB, dan pencantuman gelar sebanyak 438 SK dari 400 SK yang ditargetkan pada tahun 2015 dengan rincian kenaikan pangkat PNS struktural sebanyak 328 SK dan KGB sebanyak 110 SK sementara tidak ada pencatuman gelar selama tahun 2015.
17)	Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional	116.900.000	115.191.900	98.54	Telah dilaksanakan penghitungan angka kredit jabatan fungsional sebanyak 1500 PAK dari 2000 PAK PNS yang ditargetkan pada tahun 2015. 500 PAK PNS tidak dapat dilaksanakan karena guru-guru tidak ada yang naik pangkat pada tahun 2015 dikarenakan adanya aturan Permenpan nomor 16 Tahun 2009 yang mengharuskan guru-guru untuk mengikuti Penilaian Kinerja Guru (PKG), maka PAK Guru tidak bisa diterbitkan, sehingga kegiatan ini tidak terealisasi sesuai target.
18)	Bintek PP No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS	104.300.000	104.123.850	99.83	Telah dilaksanakan kegiatan bintek PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS sebanyak 73 orang dari 73 orang yang ditargetkan pada tahun 2015.
	JUMLAH	4.799.843.557	4.283.793.034	89.2	

3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Wajib dan Susunan Personilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Susunan Personil BKD

No.	JUMLAH PEGAWAI MENURUT				KETERANGAN
	GOLONGAN		PENDIDIKAN		
1.	I	0	SD	0	Jumlah personil BKD ini termasuk PNS Tubel
2.	II	19 orang	SMP	0	
3.	III	56 orang	SLTA	14 orang	
4.	IV	13 orang	D III	13 orang	
			D II	1 orang	
			S.1	48 orang	
			S.2	12 orang	
			S.3	0	
	JUMLAH	88 orang		88 orang	

Sumber : DUK BKD Tahun 2015

#### 4. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015. Program dan kegiatan yang disusun tersebut dalam rangka memberikan dukungan atas Misi II RPJMD Tahun 2010-2015 yaitu "Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu berbasis sinergitas antara pemerintah dan masyarakat." dengan prioritas penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran dari misi tersebut adalah meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan yang bersikap anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan, akuntabel serta beretika dan berwibawa. Beberapa program yang mendukung Misi II tersebut antara lain Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Pendidikan Kedinasan, dan Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas.

Sebagai bagian dari system perencanaan pembangunan, selanjutnya tingkat SKPD menyusun rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2015. Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis ini sebagai implementasi RPJMD tingkat SKPD. Isu-isu strategis ditingkat SKPD dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahap akhir, pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) oleh pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Renstra yang disusun memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi. Secara rinci gambaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010-2015 sebagai berikut:

1. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah “ Terwujudnya Profesionalisme Aparatur dan Prima dalam Pelayanan”

Visi tersebut memiliki 2 (dua) kunci pokok yakni :

- a) Profesionalisme Aparatur, maksudnya adalah suatu kondisi yang diharapkan dimana aparat diharapkan mampu mengemban tugas-tugas yang diberikan kepadanya, baik itu tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas-tugas kemasyarakatan, sehingga dimanapun ia berada akan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
- b) Prima dalam Pelayanan, maksudnya adalah Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan/pengguna jasa. Prima dalam pelayanan ada bila ada standar pelayanan yang terukur dengan jelas dan tegas

2. Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah

- a) Meningkatkan pembinaan dan pengelolaan aparatur  
Penjelasan makna :

Pembinaan dan pengelolaan aparatur bertujuan menanamkan rasa tanggung jawab kepada PNSD sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, menciptakan kesadaran PNS terhadap hak dan kewajiban, meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas, tersedianya PNS dalam kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, termotivasinya aparatur untuk berprestasi, mewujudkan konsistensi pejabat yang berwenang dalam penerapan hukum. BKD mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bupati di bidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas operasional tidak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri harus dilaksanakan bersama karena satu bidang dan bidang lainnya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Segala tugas dan tanggung jawab bupati dalam bidang kepegawaian dilaksanakan oleh BKD. Terutama menyangkut manajemen kepegawaian. Manajemen merupakan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen kepegawaian BKD melaksanakan POAC, sehingga dapat diwujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Kualitas sumber daya aparatur BKD merupakan kemampuan aparatur untuk memenuhi keinginan / kebutuhan pelanggan. Segala daya / kemampuan yang dimiliki oleh aparatur BKD, merupakan segala ketentuan / peraturan kepegawaian disamping itu juga harus ditingkatkan kinerja BKD yang dilakukan melalui upaya peningkatan sumber daya aparatur, peningkatan sarana dan prasarana, pendidikan dan latihan agar dapat memberikan pelayanan prima serta dengan pengawasan yang ketat dan terarah. Disamping itu BKD harus dapat membantu pengembangan pegawai melalui Diklat UP Grading (penataran), workshop (lokakarya), seminar, studi ke jenjang yang lebih tinggi.

b) Meningkatkan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian  
Penjelasan makna :

Perwujudan pemberian otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Salah satunya dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam mengelola kepegawaian daerahnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan daerah dalam mengelola kepegawaiannya tersebut dapat pula diwujudkan melalui penggunaan Sistem Informasi Manajemen berbasis Komputerisasi serta sumber daya manusia yang professional.

Sesuai dengan visi BKD terwujudnya Profesionalisme Aparatur dan Prima dalam pelayanan, maka BKD harus mampu memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik sehingga nantinya akan tercipta suasana kerja yang kondusif dan dapat memberikan kemudahan dan percepatan dalam segala urusan kepegawaian kepada PNS. Hal ini dapat diwujudkan melalui penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian serta didukung oleh Sumber daya manusia yang professional, sehingga tersedia data kepegawaian dengan cepat dan akurat yang nantinya memudahkan dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian misalnya Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Pensiun PNS, Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu dan lain-lain serta dalam hal pengambilan kebijakan kepegawaian oleh pimpinan.

BKD Kabupaten Padang Pariaman berupaya terus memberikan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik pada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Disamping menghimpun database pegawai, BKD juga melaksanakan penataan File PNS perorangan yaitu berupa penataan arsip pegawai mulai dari PNS tersebut diangkat.

## Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan:

1. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, diantaranya :
  - Ruang BKD masih tidak memadai dalam menunjang pekerjaan yang menjadi tupoksi BKD
  - Kurangnya Lemari penyimpanan dokumen- dokumen kepegawaian.
  - Sarana pendukung berupa komputer/laptop, printer dan kendaraan dinas yang masih kurang dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepegawaian di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Keterbatasan jumlah SDM BKD
3. Koordinasi antar bidang pada BKD dan antar SKPD belum maksimal
4. Masih rendahnya disiplin aparatur, walaupun sudah ada diberlakukan pemotongan tambahan penghasilan bagi PNS yang melanggar ketentuan disiplin masuk kerja.

### Solusi :

1. Dukungan ruangan yang memadai untuk menunjang pekerjaan, lemari penyimpanan dokumen- dokumen kepegawaian, komputer/laptop, printer dan mobil dinas dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepegawaian di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Menambah staf untuk BKD dan memperbantukan staf dari bidang lain untuk mengerjakan tugas di suatu bidang yang mendesak
3. Perlunya menerapkan rapat/pertemuan yang berdurasi singkat setiap minggu/ bulan agar lebih maksimalnya koordinasi antar bidang pada BKD.
4. Pengadaan Rapat kerja kepegawaian yang lebih intensif mengenai kepegawaian dalam rangka meningkatkan koordinasi antar SKPD.
5. Menerapkan aplikasi yang berbasis IT dalam rangka pelaksanaan disiplin PNS dalam rangka menghasilkan penilaian yang objektif tentang disiplin PNS, sehingga nantinya dapat menertibkan PNS yang tidak disiplin.
6. Menerapkan tidak hanya sistem punishment bagi yang melanggar disiplin tetapi juga reward bagi yang mematuhi aturan.

## 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### 1. Alokasi dan Realisasi Program/Kegiatan

No	Program /Kegiatan	ANGGARAN		Sisa	%	Realisasi	Capaian Program Kinerja
		Rp.	Rp.				
1	2	3	4		5		6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30,000,000	29,527,100	472,900	1.016015796	98.9839842	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,000,000	16,180,513	23,819,487	2.472109506	97.52789049	100%
3	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	120,100,000	113,449,000	6,651,000	1.058625462	98.94137454	100%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42,400,000	42,364,000	36,000	1.000849778	98.99915022	100%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,000,000	10,160,000	4,840,000	1.476377953	98.52362205	100%
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	31,000,000	26,475,000	4,525,000	1.170915958	98.82908404	100%
7	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	134,000,000	133,512,500	487,500	1.003651344	98.99634866	100%
				-			
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	109,500,000	108,563,500	936,500	1.008626288	98.99137371	100%
2	Pengadaan Meubiler	50,000,000	49,386,300	613,700	1.012426523	98.98757348	100%

3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	95,000,000	94,910,000	90,000	1.000948267	98.99905173	100%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	116,200,000	102,107,384	14,092,616	1.138017599	98.8619824	100%
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25,000,000	19,424,500	5,575,500	1.287034415	98.71296558	100%
				-			
III	Program Peningkatan disiplin aparatur			-			
1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	4,000,000	4,000,000	-	1	99	100%
2	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	5,000,000	4,992,000	8,000	1.001602564	98.99839744	100%
				-			
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-			
1	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25,000,000	24,848,300	151,700	1.006105045	98.99389495	100%
				-			
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35,000,000	32,531,000	2,469,000	1.075896837	98.92410316	100%
				-			
VI	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			-			
1	Pembinaan dan Pengawasan Konversi Minyak Tanah ke LPG	-					
2	Pembinaan dan Pelaksanaan TTG bagi Aparatur dan Masyarakat dan Gelar TTG Tk. Nasional	60,000,000	51,644,000	8,356,000	1.161800015	98.83819998	100%
3	Penyempurnaan Profil Nagari	50,000,000	43,341,000	6,659,000	1.153642048	98.84635795	100%
4	Operasional Tenaga Penyuluh Kesehatan	1,805,000,000	1,801,593,000	3,407,000	1.001891104	98.9981089	100%
5	Pembinaan Dasawisma	25,000,000	17,510,000	7,490,000	1.427755568	98.57224443	100%
6	Penguatan Kelembagaan TP-PKK dan Jambore PKK Tk. Kab. Dan Propinsi	80,000,000	71,966,150	8,033,850	1.111633733	98.88836627	100%
7	Pelaksanaan Program PKK Kabupaten (PKK)	670,000,000	659,363,464	10,636,536	1.016131522	98.98386848	100%
8	Pemetaan TTG dan Pembinaan/Biaya Operasional Pos Pelayanan TTG	30,000,000	25,181,000	4,819,000	1.191374449	98.80862555	100%
9	Pelaksanaan Jambore PKK, PNPM, KB, dan Pameran TTG	200,000,000	194,797,900	5,202,100	1.026705113	98.97329489	100%
10	Karya Bakti TNI	100,000,000	92,129,000	7,871,000	1.085434554	98.91456545	100%

				-			
VII	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			-			
1	PAP Kegiatan PNPM	213,000,000	167,381,060	45,618,940	1.272545412	98.72745459	100%
2	Pembinaan/Evaluasi Pokja Kredit Mikro Nagari	20,000,000	15,930,000	4,070,000	1.255492781	98.74450722	100%
3	Pembinaan Kelembagaan Pasar Nagari	15,000,000	14,706,000	294,000	1.01999184	98.98000816	100%
				-			
VIII	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			-			
1	Sosialisasi dan Pembinaan Perusahaan Pengelola Tenaga Kerja Perempuan	15,000,000	14,890,000	110,000	1.007387508	98.99261249	100%
2	Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan kejahatan seksual	20,000,000	19,768,000	232,000	1.011736139	98.98826386	100%
3	Pembinaan dan Penilaian Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	40,000,000	39,528,000	472,000	1.011940903	98.9880591	100%
4	P2WKSS	20,000,000	15,993,000	4,007,000	1.250547114	98.74945289	100%
5	Pemberdayaan Organisasi Kewanitaan	50,000,000	44,975,000	5,025,000	1.111728738	98.88827126	100%
6	Pemberdayaan Dharma Wanita (DW)	50,000,000	49,829,300	170,700	1.003425695	98.9965743	100%
				-			
IX	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa			-			
1	Pembinaan dan jaminan hidup SPMN	40,000,000	39,980,000	20,000	1.00050025	98.99949975	100%
2	Pelatihan dan Pembinaan LPM dan KPMN	30,000,000	25,399,000	4,601,000	1.181148864	98.81885114	100%
				-			
X	Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa			-			
1	Lomba Nagari Berprestasi	56,750,000	54,207,000	2,543,000	1.04691276	98.95308724	100%
2	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	55,000,000	48,617,700	6,382,300	1.131275235	98.86872476	100%
3	Pembinaan PMTAS	28,000,000	24,305,000	3,695,000	1.152026332	98.84797367	100%
4	Pembinaan dan fasilitas BP-SPMAS	60,000,000	51,437,000	8,563,000	1.166475494	98.83352451	100%
5	Pembinaan Kelompok UP2K	12,000,000	11,610,000	390,000	1.033591731	98.96640827	100%
				-			
XI	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak			-			

1	Sosialisasi dan Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	43,950,000	43,796,000	154,000	1.003516303	98.9964837	100%	
2	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	77,900,000	75,348,150	2,551,850	1.033867454	98.96613255	100%	
JUMLAH				4,703,300,000	11,531,061,035	6,827,761,035	0.407880939	99.59211906

### Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Indikator kinerja Kunci ( IKK ) sebanyak 2 (dua), dengan tingkat pencapaian standar Pelayanan minimal sebagai berikut:

a. PKK Aktif

Dari 53 orang jumlah PKK di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, 65 % aktif atau sebanyak 33 Orang .

b. Posyandu Aktif

Capaian kinerja untuk Indikator kinerja kunci Posyandu Aktif adalah 100%, dimana Jumlah Posyandu Aktif dengan jumlah 708 dari total jumlah posyandu yang ada sebanyak 708.

### Susunan Personil Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Jumlah Pegawai Menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
	I	-	SD	-	
	II	1	SMP	-	
	III	2	SLTA	1	
	IV	1	S1	2	
	IV		S.2	1	

## Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2011 – 2015 untuk tahun kelima (2015). Berdasarkan Renstra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) Badan kemudian diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA). Implementasi dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 01 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 36 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014.

Adapun Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

- Pemantapan kelembagaan dalam pengembangan partisipasi, keswadayaan masyarakat, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat dalam pembangunan.
- Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- Peningkatan kualitas hidup serta perlindungan terhadap kaum perempuan dan perkembangan anak.
- Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dan ketahanan keluarga untuk mencapai keluarga sehat dan sejahtera.

Sesuai dengan Renstra, dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2014 ditetapkan 14 sasaran yaitu :

- o Berperannya lembaga kemasyarakatan dalam mengembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.
- o Tumbuhkembangnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis dalam pengelolaan pembangunan.
- o Terbangunnya kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga.
- o Terwujudnya penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- o Terwujudnya upaya penanggulangan kemiskinan.
- o Terbangunnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif.
- o Terbangunnya kemampuan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup.
- o Terwujudnya kemampuan masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pemenuhan hak-hak perempuan.

- o Terwujudnya jaminan pertumbuhan anak yang berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
- o Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterlibatan kaum perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- o Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterlibatan kaum perempuan dalam perlindungan hak anak untuk mempertinggi kualitas hidup.

Pencapaian sasaran pembangunan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana dimaksud sejalan dengan pencapaian target RPJMD urusan pilihan Badan Pemberdayaan masyarakat dengan indikator RPJMD yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 adalah :

- a. Swadaya masyarakat terhadap program Pemberdayaan masyarakat
- b. Persentase Peran Swasta dan Masyarakat Dalam Pembangunan .
- c. Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan TTG pada Masyarakat.
- d. Meningkatnya prosentase lembaga keuangan mikro nagari/usaha ekonomi simpan pinjam yang berfungsi dengan baik.
- e. Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- f. Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi.
- g. Persentase ketersediaan Rencana Kerja SKPD.
- h. Persentase Laporan Tepat Waktu

Permasalahan dan Solusi Urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan :

1. Keterbatasan dana untuk melaksanakan program khususnya penanggulangan kemiskinan.
2. Keterbatasan jumlah pegawai yang ada, belum dapat membantu kelancaran operasional kegiatan pejabat pelaksana teknis kegiatan khususnya di perencanaan.
3. Penempatan pejabat tidak sesuai dengan basic ilmu dan pengalaman.
4. Masih rendahnya kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi komputer untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Solusi :

1. Perlu dilakukan koordinasi yang intensif kepada pemerintah pusat didalam mengajukan / mengusulkan program lanjutan sebagaimana dimaksud di atas.
2. Perlu pemenuhan sarana dan prasarana kantor serta penambahan jumlah personil dalam mendukung pelaksanaan program dimaksud.

## 22. Urusan Sosial

### Alokasi dan Realisasi Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Capaian Program/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	626.040.000	45.766.356		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.800.000	49.777.600	96	1 Tahun
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.000.000	57.995.349	74	12 Bulan
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	19.640.000	19.639.400	99,9	15 Unit
4	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	104.900.000	104.450.000	99,9	12 Bulan
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	48.000.000	42.604.825	88,8	1 Tahun
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000	17.343.325	87	1 Tahun
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	7.749.625	64,6	1 Tahun
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.700.000	50.195.000	93	12 Bulan
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanga-undangan	15.000.000	14.130.000	94,2	12 Bulan
10	Penyediaan Makan dan Minum	39.000.000	37.348.970	96	12 Bulan
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	111.000.000	109.664.350	99	12 Bulan
12	Operasional UPTD LLK	38.500.000	38.336.700	99,6	12 Bulan
13	Operasional UPTD LBK	34.500.000	31.038.500	90	12 Bulan
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	520.910.000	458.338.285		
14	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	10.000.000	9.990.700	99,9	1 Tahun
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	56.000.000	55.867.680	99,8	1 Paket
16	Pengadaan Mebeluer	30.000.000	29.710.000	99	1 unit
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	289.250.000	246.903.897	85	1 Tahun
18	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	135.660.000	125.856.707	92,77	12 Bulan
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.500.000	8.352.000		
19	Pengadaan mesin/kartu absensi	4.000.000	3.080.000	77,00	1 Set
20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12.600.000	12.432.250	98,67	1 set
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	53.300.000	53.300.000		
21	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.300.000	53.300.000	99	1 Tahun
V.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dlainnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) lainnya	300.050.000	270.422.300		
23	Bimbingan Lanjut Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ) Fakir Miskin	183.450.000	160.697.300	87,6	Terbantunya KK Miskin

					sebanyak 8 Kelompok ( 80 org ), berupa ternak sapi untuk pengembangan
24	Pendampingan Keluarga Harapan	116.600.000	109.725.000	94,1	Telah dilaksanakan pendampingan sebanyak 21 pendamping penerima PKH sebanyak 3.091 KK
VI.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				
25	Monitoring dan Pendistribusian Raskin	1.911.024.000	1.907.108.300	99,8	Telah tersalurkan bantuan Raskin sampai titik bagi kepada 21.794 KK pada 17 Kecamatan
VII.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	370.100.000	339.825.600	92	
26.	Pelayanan Psikologi bagi PMKS di Taruma Centre Termasuk bagi Korban Bencana	81.600.000	70.619.400	87	Terbantunya Lanjut Usia terlantar sebanyak 30 orang berupa sembako dan 10 eks kusta berupa ternak sapi
27.	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	86.700.000	83.691.500	96,5	Tersalurkannya bantuan logistik sebanyak 43 KK miskin yang mengalami bencana
28	Pelayanan Penyandang Masalah Sosial di Masyarakat	17.000.000	2.860.000	17	Telah terkirim sebanyak 2 orang WTS ke panti Andam Dewi Sukarami Solok
29	Pembinaan Panti Asuhan dan Yayasan	139.000.000	138.181.400	99	Terbantunya sebanyak 13 panti, atau 416 orang anak dan pengurus panti
30	Pembinaan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana ( TAGANA )	18.800.000	18.706.000	99,9	Terlatihnya TAGANA sebanyak 30 orang
31	Fasilitas Pembinaan Anak Cacat Melalui Forum Komunikasi Keluarga Dengan Anak Cacat ( FKKDAC )	14.000.000	13.980.000	99,9	Terbina dan tersalurkannya bantuan kepada anak cacat sebanyak 80

					org
32	Pembinaan Lanjut Usia ( Lansia ) Terlantar Melalui Komda Lansia	13.000.000	11.787.300	91	Terbina dan Terbantunya Lanjut Usia terlantar sebanyak 15 orang berupa sembako
VII I.	Program Pembinaan Anak Terlantar	45.750.000	43.868.000	96	
33	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	40.000.000	38.838.000	97,1	Terlatihnya Anak terlantar melalui LBK sebanya 15 orang dengan jenis keterampilan olahan pertanian ) prosesing )
34	Pemulangan dan Penanganan Anak , Orang dan Mayat Terlantar ke Daerah Asal	5.750.000	5.030.000	87,1	Terbantunya pemulangan orang terlantar sebanyak 2 orang dan 2 orang mayat terlantar
I X.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	56.500.000	54.617.000	97	Terlatihnya penyandang cacat mampu didik dan mampu latih sebanyak 15 orang
35	Pendidikan dan pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	56.500.000	54.617.000	97	Terlatihnya TAGANA sebanyak 30 orang
X	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	874.300.000	271.000.000	23	
36	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Khusus Eks Pejuang	57.500.000	57.130.000	99	Tersalurkannya uang saku eks pejuang sebanyak 200 orang diberikan pada saat tanggal 17 Agustus
37	Pemeliharaan TMP Kusuma Bangsa dan Tugu Perjuangan Lainnya	40.000.000	39.857.500	99,9	Terpelihara dan terbantunya rehabilitasi 2 buah TMP
38	Penilaian Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Organisasi Sosial ( ORSOS ), Berprestasi Tingkat Kabupaten	18.500.000	17.466.000	94	Didapatnya PSM, KT, dan orsos berprestasi Tingkat Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 3 lembaga
39	Penjangkauan Klien Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 )	19.000.000	11.800.000	62	Terbina dan Terbantunya penyelesaian klien sebanyak 17 orang melalui LK3

40	Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Kepemimpinan Manajemen Karang Taruna dan Musda/Penguohan Karang Taruna	50.000.000	35.218.950	70	Telah terbinanya pengurus Karang Taruna Kecamatan oleh Karang Taruna Kabupaten sebanyak 95 orang dan terbentuknya pengurus Karang Taruna Kabupaten
41	Pembinaan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM )	13.000.000	12.257.000	94,3	Telah terbinanya PSM Kab. Padang Pariaman sebanyak 30 orang
42	Pembinaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)	23.000.000	22.202.175	97	Terbantunan KK miskin hasil pembinaan Pengurus LKKS sebanyak 15 orang dan pemberian bantuan berupa sembako
43	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Bedah Rumah	653.300.000	2.440.000	0,4	Telah dilaksanakannya monitoring dan verifikasi rumah tidak layak huni calon penerima bantuan sebanyak 60 KK
XI	Program Database PMKS,PSKS,Potensi Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja	345.000.000	327.438.561		
44	Verifikasi Database Kemiskinan Kab. Padang Pariaman	345.000.000	327.438.561	95	Telah terlaksananya verifikasi data kemiskinan sebanyak 26.835 KK

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 3 (tiga), dengan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

- a. Panti Asuhan dan Panti Sosial Tresna Werdha (Panti Jompo) yang Aktif di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 13 buah melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelayanan sosial kepada penghuni Panti.
- b. Persentase penyandang baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 9,2 % dari Jumlah penyandang cacat fisik dan mental sebanyak 354 orang, serta lanjut usia tidak potensial sebanyak 169 orang yang telah menerima jaminan sosial dalam tahun 2015 sebanyak 523 orang per Jumlah penyandang cacat fisik dan mental sebanyak 1.811 orang serta lanjut usia tidak potensial sebanyak 3.875 orang yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam tahun 2015 sebanyak 5.686 orang dikalikan 100 persen.
- c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 84,98 % dari Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan bantuan sebanyak 54.158 KK/jiwa dibagi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 63.733 dibagi 100 %.

## 3. Susunan Personil Urusan Sosial

No.	Jumlah Pegawai Menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
1	I	1	SD	-	
2	II	17	SMP	-	
3	III	16	SLTA	14	
4	IV	3	D-3/D1	2	
5			S.1	6	
6			S.2	3	

## 4. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2011 – 2015 untuk tahun ketiga (2015). Berdasarkan Renstra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) Dinas kemudian diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA). Implementasi dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 01 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 36 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015.

Adapun Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

- a. Menciptakan aparatur yang berkualitas
- b. Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan dan penguatan basis sector usaha kecil menengah dan koperasi melalui sistem Kelompok Usaha Bersama ( KUBE )
- c. Mewujudkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
- d. Meningkatkan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) melalui pembinaan dan pemberian dan pemberian bantuan serta jaminan sosial

Sesuai dengan Renstra, dalam penyusunan perencanaan pembangunan Sosial tahun 2015 ditetapkan 21 sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang Kesejahteraan Sosial, sesuai dengan kualifikasi.
- b. Meningkatkan Administrasi Perkantoran.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
- d. Meningkatkan disiplin aparatur
- e. Meningkatkan kapasitas SDM
- f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan.
- g. Tumbuh kembangnya kemampuan berusaha untuk mengurangi ketergantungan.
- h. Lestarnya nilai – nilai kepeloporan,keperintisan dan kepahlawanan.
- i. Terlaksananya pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan data Potensi Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja.
- j. Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang tanggung jawabnya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- k. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
- l. Melaksanakan Pembinaan Pengumpulan Uang atau Barang dan Undian
- m. Melaksanakan pemberian Jaminan Sosial kepada Lanjut Usia dan Penyandang Cacat Berat
- n. Melaksanakan Pemberian Penganugrahan Tanda Kehormatan
- o. Melaksanakan Pengasuhan dan Pengangkatan Anak.
- p. Melaksanakan Perlindungan dan Jaminan Sosial Anak,Orang dan Mayat Terlantar.

Pencapaian sasaran pembangunan sosial dan tenaga kerja dimaksud sejalan dengan pencapaian target RPJMD urusan pilihan Sosial dengan indikator RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 adalah :

- a. Meningkatkan kinerja aparatur dan organisasi
- b. Tersedianya dana kegiatan yang memadai
- c. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat
- d. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

- e. Terciptanya kualitas dan produktifitas tenaga kerja untuk menghadapi pasar kerja dalam dan luar negeri
- f. Ditaatinya peraturan per-undang-undangan dibidang ketenagakerjaan
- g. Peningkatan pendapatan warga transmigrasi

5. Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial

a. Permasalahan :

- 1) Keterbatasan dana kegiatan penanganan Kemiskinan dan pengangguran serta Penyandang Masalah Sosial Lainnya.
- 2) Penempatan pejabat tidak sesuai dengan basic ilmu dan pengalaman.
- 3) Masih rendahnya kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi computer untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Rendahnya donatur masyarakat untuk Panti Asuhan dan Panti Sosial Tresna Werdha ( Panti Jompo ).
- 5) Masih rendahnya kemampuan Pengurus Organisasi Sosial dan Pengurus Panti dalam pengelolaan Panti.
- 6) Rendahnya masyarakat memanfaatkan keterampilan yang ada di UPTD Kabupaten.

b. Solusi

- 1) Perlu dana untuk penanganan Program Kemiskinan dan pengangguran serta Penyandang Masalah Sosial Lainnya
- 2) Penempatan pejabat disesuaikan dengan basic ilmu dan pengalaman.
- 3) Dialaksanakan secara rutin pelatihan penggunaan tehnologi peralatan computer kepada aparatur pemerintah.
- 4) Perlu memotivasi masyarakat untuk peduli dengan masalah sosial.
- 5) Perlu dana APBD untuk mengembangkan dan memajukan Panti Asuhan dan Panti Sosial Tresna Werdha ( Panti Jompo ).
- 6) Perlu melakukan peningkatan SDM Pengurus Organisasi Sosial dan Pengurus Panti tentang Manajemen dan Administrasi.
- 7) Dimanfaatkannyaerampilan yang ada di UPTD Kabupaten Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

23. Urusan Kebudayaan

5. Program dan Kegiatan

Program Pengembangan Nilai Budaya				
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama dibidang budaya	243.000.000,00	241.642.061,00	99,44	Terlaksananya kegiatan pelestarian adat budaya
Pembinaan Porbi	35.000.000,00	34.431.817,00	98,38	Terlaksananya Kegiatan Buru Babi
Program Pengelolaan Keragaman Budaya				

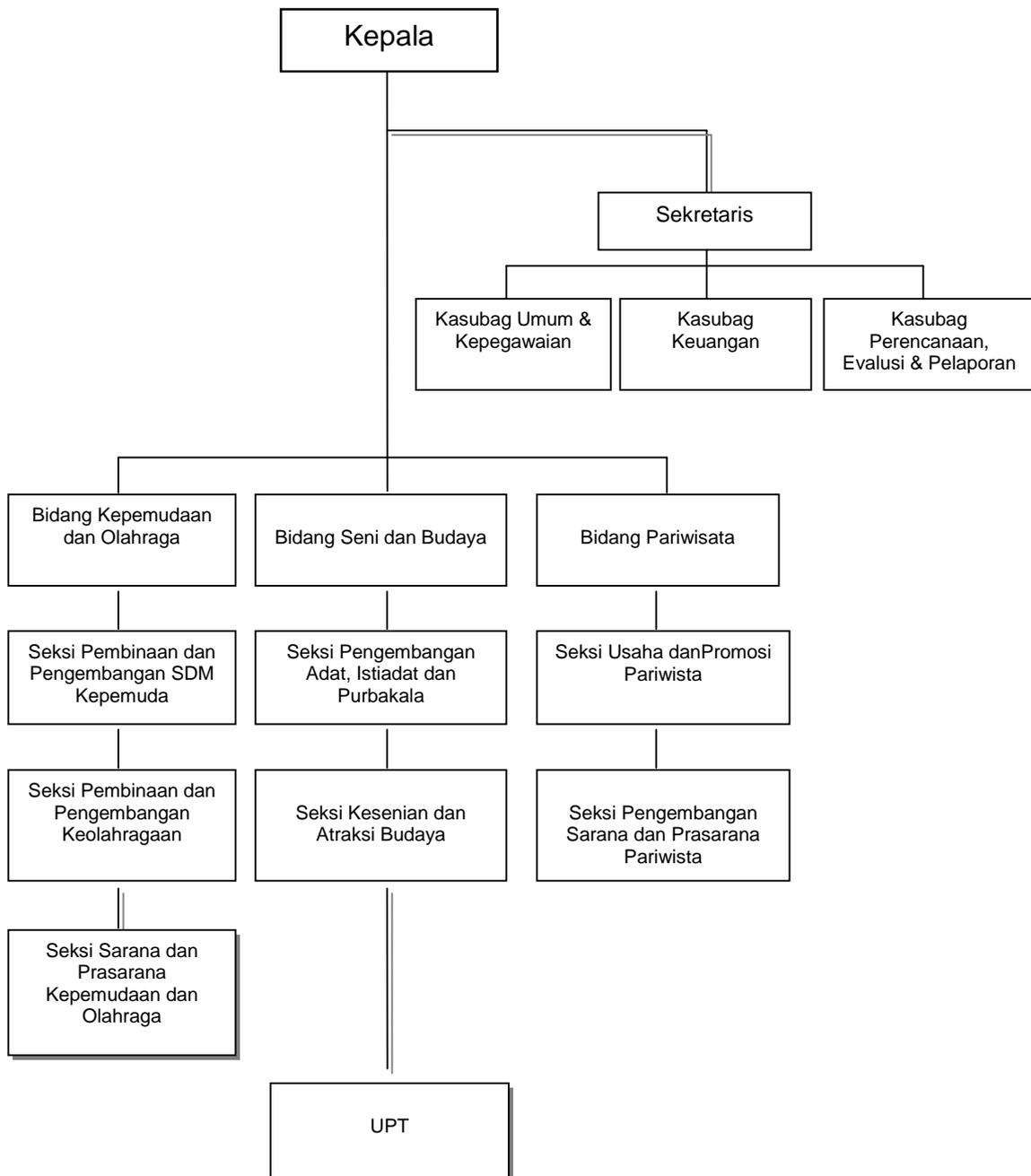
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	555.000.000,00	550.967.594,00	99,27	Pembinaan sanggar-sanggar kesenian dan kebudayaan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesenian	305.000.000,00	302.371.900,00	99,14	Penyediaan sarana dan prasarana kesenian
Inventarisasi Benda Cagar Budaya	20.000.000,00	19.811.800,00	99,06	Terinventarisasinya Cagar budaya

#### 6. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Bidang Budaya yang menjadi capaian kinerja adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diselenggarakan oleh Disporabudpar kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 3 Desember 2015 bertempat di Pentas Seni Objek Wisata Pantai Tiram yang diikuti oleh masyarakat umum dan sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada berjumlah 2 ( dua ) buah bertempat di Pantai Tiram Kecamatan Ulakan Tapakis dan Pantai Arta Kecamatan Sungai Limau. Benda situs dan cagar budaya yang dilestarikan dikabupaten Padang Pariaman berjumlah 20 ( dua puluh ) buah sementara situs yang dimiliki daerah yang belum dilestarikan berjumlah 50 ( lima puluh ) buah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Urusan Wajib (Struktur Organisasi)

Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata



## 8. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

JUMLAH PEGAWAI MENURUT					
No	Golongan		Pendidikan		Ket
1	I		SD		
2	II		SMP		
3	III		SMA		
4	IV		D-3		
			S.1		
			S.2		
	Jumlah		Jumlah		

### Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran yang sangat strategis, untuk itu tuntutan akan profesionalitas, akuntabilitas dan efektivitas kerja pemerintahan menjadi bentuk yang tidak dapat dielakan dalam mekanisme kerjanya, sehubungan dengan hal itu kaidah normatif pemerintahan tersebut menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme Pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman.

Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pendukungnya

### 24. Urusan Statistik

Urusan selanjutnya yang menjadi kewenangan Bappeda adalah urusan Statistik. Proporsi penyelenggaraan urusan statistik ini lebih rendah dibandingkan dengan urusan perencanaan. Hal ini dapat kita lihat dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Pada tahun 2015, dari Rp. 3.147.501.000,00 yang dialokasikan ke Bappeda, hanya sebesar Rp. 181.435.000,00 atau sebesar 6% yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator yang berkenaan dengan statistik daerah.

Dari alokasi anggaran untuk urusan statistik tersebut, dijabarkan melalui satu program dengan dua kegiatan. Dan dilaksanakan oleh 5 orang PNS.

Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi dari susunan personal dalam pelaksanaan urusan statistik tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
MENURUT GOLONGAN RUANG DAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL  
DALAM PELAKSANAAN URUSAN STATISTIK DAERAH

Golongan Ruang	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
III	4 orang	Strata 2 (S-2)	1 orang
II	1 orang	Strata 1 (S-1)/ D-IV SLTA	3 orang 1 orang
Total	5 orang		5 orang

Sumber : Daftar Urut Kependudukan (DUK) Bappeda Tahun 2015

Pada tahun 2015, jumlah seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah 29 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 5 orang yang dalam pelaksanaan urusan statistik yang terletak pada Bidang Sistem Pengendalian dan Evaluasi Bappeda. Personil tersebut, disamping melaksanakan urusan statistik, juga merencanakan urusan perencanaan umumnya.

Terdapat dua kegiatan untuk mendukung urusan ini diantaranya :

1. Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Padang Pariaman Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 meliputi pembuatan buku Profil Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 dan Input Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah pada portal Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada alamat <http://sipd.bangda.kemendagri.go.id> Sistem Informasi Pembangunan Daerah ( SIPD ) merupakan data pokok yang dapat dijadikan acuan dalam program penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta berguna untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. SIPD merupakan kegiatan yang harus melibatkan seluruh SKPD di daerah. Koordinasi antar instansi terkait sangat diperlukan sehingga apabila SKPD tidak bisa memberikan data yang dibutuhkan oleh Bappeda dalam penyusunan program pembangunan bisa mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Padang Pariaman Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 meliputi: Pembuatan buku Profil Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 yang berisikan potret pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, potensi pariwisata dan peluang investasi yang bisa dikembangkan di daerah ini.
2. Penyusunan Data Pokok Pembangunan Daerah  
Data pokok pembangunan adalah merupakan himpunan data data fakta wilayah yang diwujudkan dalam bentuk peta dan buku. Karenanyadisamping buku ini, juga dikeluarkan peta data pokok. Data dan informasi data pokok berisikan fakta wilayah dalam suatu batas administrasi wilayah yang mencakup aspek fisik, kependudukan, penggunaan dan penguasaan tanah,

potensi, tingkat perkembangan wilayah berikut dengan sarana dan prasarana. Informasi tersebut dihimpun menjadi satu kesatuan yang secara keseluruhan merupakan gambaran suatu wilayah administrasi.

2. Untuk Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik :

a. Buku Padang Pariaman Dalam Angka

Ini merupakan kegiatan berkelanjutan yang harus ada tiap tahunnya karena mengingat pentingnya data pembangunan kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional, data statistik yang diakui adalah data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2015, kegiatan fasilitasi yang selama ini dikerjasamakan dengan BPS tersebut, tidak dibenarkan lagi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh sebab itu, Buku Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2015 dapat juga direalisasikan karena memang menjadi tupoksi dan kewenangan tunggal dari BPS. Sehingga, untuk indikator tingkat pencapaian standar minimal urusan statistik di Bappeda Kabupaten Padang Pariaman sudah dapat dikatakan berhasil 100% tanpa dukungan dana dari APBD.

b. Buku PDRB Kabupaten

Sama halnya dengan Buku Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2015 juga dapat direalisasikan karena memang menjadi tupoksi dan kewenangan tunggal dari BPS. Sehingga, untuk indikator tingkat pencapaian standar minimal urusan statistik di Bappeda Kabupaten Padang Pariaman sudah dapat dikatakan berhasil 100% tanpa dukungan dana dari APBD.

Dalam melaksanakan urusan ini, banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurang maksimalnya koordinasi antar SKPD terkait demi kelancaran pelaksanaan penyusunan Buku Data Pokok Pembangunan Daerah di Pemda Padang Pariaman.
2. Keterbatasan SDM (tenaga operator) dalam penyusunan Buku Data Pokok Pembangunan Daerah di Bidang SPE.
3. Sering terlambatnya SKPD dalam memberikan data primer maupun data sekunder yang akan dijadikan sebagai data pokok .
4. Kurang terpenuhinya Data Pokok Pembangunan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman seperti data pada BUMN dan Instansi pertikal seperti data PT. PLN dan Kementerian Agama dll.
5. Kurang tersedianya data yang sesuai dengan tabel kebutuhan Buku Data Pokok dengan tabel yang ada di SKPD.
6. Masih banyaknya data Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka termasuk data Kota Pariaman (Data lama) atau data tidak pernah dilakukan peninjauan/keadaan kondisi terkini.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dipecahkan melalui alternatif pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Kerjasama yang baik antar Tim Penyusunan Data Pokok dan SKPD yang terlibat.
2. Perlu penambahan SDM (tenaga operator) dalam penyusunan Buku Data Pokok Pembangunan Daerah di Bidang SPE.
3. Kerjasama yang baik antar Bappeda dengan Instansi pertikal seperti Kemenag, BPS dan PT. PLN Rayon/Ranting yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Perlu adanya koordinasi penyesesuai dengan tabel kebutuhan Buku Data Pokok dengan tabel yang ada di SKPD.
5. Perlu adanya rapat bersama dengan Instansi pertikal untuk menyamakan data Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka kedepannya untuk berubah (Data lama) atau data tidak pernah dilakukan peninjauan/keadaan kondisi terkini ke data yang sebenarnya.

## 25. Urusan Kearsipan

### Alokasi dan Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.919.750,- dan telah terealisasi sebesar Rp.87.418.140 atau 98,31 % Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 Program ( 4 Kegiatan) dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
  - a. Kegiatan Pengumpulan Arsip dan Penataan Kearsipan di pemda padang pariaman
  - b. Kegiatan Pembinaan Kearsipan Ke SKPD di Kabupaten Padang Pariaman
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
  - a. Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Kab. Padang Pariaman

3. Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen arsip daerah  
 a. Pengadaan Sarana Pengolah dan Penyimpan arsip

No	Program dan Kegiatan		Anggaran dan Realisasi			
	Uraian	Capaian Program	Sumber dana	Anggaran	Realisasi	%
A.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan					
1.	Pengumpulan Arsip dan Penataan Kearsipan di Pemda Padang Pariaman	Jumlah arsip statis SKPD yang bernilai penting di kantor arsip daerah dan Terlaksananya Observasi arsip sejarah dan budaya di lingkungan kab. Padang pariaman Terlaksananya perdataan arsip statis SKPD untuk selanjutnya di simpan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Terlaksananya Penataan Kearsipan di Kantor Perpustakaan dan Arsip.	DAU	8.491.500,-	8.476.450,-	99,82
2.	Pembinaan Kearsipan Ke SKPD di Kab. Padang Pariaman	Terlaksananya Pembinaan dan Pendataan arsip dinamis di SKPD, kecamatan dan Nagari dan tertatanya arsip di depo arsip di 10 SKPD	DAU	15.000.000	13.513.440	90.09
B.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi					
1.	Sosialisasi/ Penyuluh kearsipan di lingkungan kab. Padang pariaman	Terlaksananya sosialisasi kearsipan untuk tenaga teknis kearsipan SKPD di lingkungan pemkab Padang pariaman	DAU	56.048.250,-	56.048.250,-	100,00
C.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah					
1.	Pengadaan Sarana Pengolah dan Penyimpan Arsip	Tersedianya sarana penyimpanan arsip ( Filling Cabinet ) untuk kecamatan	DAU	9.380.000,-	9.380.000,-	100,00

Tingkat Pencapaian standar Pelayanan Minimal

Seperti yang telah diketahui bahwa SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip merupakan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang mempunyai kewenangan dibidang urusan wajib pemerintahan yaitu bidang Kearsipan.

## Ringkasan SKPD Pelaksana urusan wajib dan susunan personilnya

No	Jumlah Pegawai Menurut				Keterangan
	Golongan		Pendidikan		
	I		SD		
	II	2 Orang	SMP		
	III	8 Orang	SLTA	3 Orang	
	IV	3 Orang	D3	2 Orang	
			S1	5 Orang	
			S2	3 Orang	
			S3		
	Jumlah	13 Orang		13 Orang	

### Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Dokumen Pelaksaaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Tertuang dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA) yang merupakan penjabaran dari renja dan renstra SKPD

### Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Permasalahan:

1. Tidak adanya tenaga arsiparis yang mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan dibidang Pengelolaan kearsipan, dimana seksi seksi yang membidangi kearsipan ini belum mempunyai staf dibidang kearsipan.
2. Pejabat struktural yang menduduki jabatan kasi pengolahan dan pembinaan kearsipan tidak memiliki latar belakang dibidang kearsipan.
3. Pejabat struktural yang menduduki jabatan kasi pembinaan pengkajian, dan pengembangan kearsipan tidak memiliki latar belakang dibidang kearsipan.
4. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang kearsipan seperti belum adanya depo arsip yang sesuai dengan stándar tata kelola kearsipan yang baku.
5. Kurangnya informasi mengenai sejarah lengkap tentang kabupaten Padang pariaman serta kurangnya pemeliharaan dan perhatian terhadap situs/cagar yang ada di wilayah kab. Padang Pariaman.
6. Belum Seimbangnya antara volumen arsip di kab. Padang pariaman dengan sarana penyimpanan kearsipan
7. Kurangnya perhatian pimpinan SKPD, Kecamatan dan Nagari terhadap Pendataan, penataan arsip dan kurangnya SDM Pengelola arsip
8. Kurangnya pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta adanya tugas rangkap dengan tugas lainnya.

Solusi :

1. Memberdayakan semua pegawai yang ada sembari menunggu adanya penempatan tambahan pegawai pada SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Menganggarkan penelusuran arsip sejarah dan budaya secara bertahap dan kompensasi bagi arsip bernilai guna tinggi yang diserahkan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip serta memutakhirkan data dengan cara koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

3. Menganggarkan pengadaan serana kearsipan serta memberikan pengertian dan pembinaan kepada SKPD, Kecamatan dan Nagari untuk bisa mengadakan sendiri alat perlengkapan kearsipan,
4. Mengadakan Pembinaan secara rutin baik teori maupun praktek kepada aparatur pemerintah di SKPD, Kecamatan dan Nagari

## 26. Urusan Perpustakaan

### 1. Alokasi dan Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 632.997.350 ,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 620.396.990,- atau 98,00% Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 Program ( 20 Kegiatan ), dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Kantor
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya listrik dan air
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - e. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Konsultasi keluar daerah.
  - f. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - g. Rapat-Rapat Koordinasi keluar daerah
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas
  - c. Kegiatan Rutin/berkala gedung kantor
  - d. Kegiatan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan
  - a. Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca
  - b. Kegiatan Sosialisasi Minat dan Gemar Membaca
6. Program Pembinaan Kapasitas Perpustakaan
  - a. Kegiatan Pembinaan Teknis Pembinaan Pustaka Nagari dan Perpustakaan Sekolah
  - b. Kegiatan Penyediaan Peralatan Pustaka Nagari, Sekolah, Pesantrean dan TBM
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
  - a. Kegiatan Operasional Mobil Perpustakaan Keliling.

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
 a. Pengadaan Mesin Absensi  
 b. Pengadaan Pakaian Dinas

No	Program dan Kegiatan		Anggaran dan Realisasi				
	Uraian	Capaian Program	Sumber dana	Anggaran	Realisasi	%	
A	Program Pelayanan Administrasi Kantor						
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat yg dapat diproses	DAU	37.000.000,-	36.983.348,-	99,96
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Persentase terbayarnya listrik, air dan telepon & speedy	DAU	10.500.000,-	10.176.190,-	96,92
	3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan	DAU	29.200.000,-	29.018.000,-	99,38
	4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya ruangan kantor yang bersih dan nyaman demi kelancaran tugas	DAU	44.800.000,-	44.798.000,-	100,00
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pengadaan koleksi buku perpustakaan daerah pemkab Padang pariaman serta surat kabar	DAU	43.000.000,-	42.726.500,-	99,36
	6.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya makanan dan minuman pegawai	DAU	1.150.000,-	1.075.700,-	93,54
	6.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Lancarnya koordinasi dengan instansi terkait demi kelancaran tugas dan fungsi SKPD	DAU	50.000.000,-	49.863.750,-	99,73
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	1.	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas kantor dengan tersedianya sarana yang dibutuhkan	DAU	23.810.000,-	23.810.000,-	100,00
	2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pelaksanaan tugas dengan terpeliharanya kondisi Kendaraan dinas	DAU	47.000.000,-	46.903.500,-	99,79
	3.	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas dengan kondisi gedung yang terjaga	DAU	5.000.000,-	4.997.000,-	99,94
	4.	Pemeliharaan rutin/berkala	Lancarnya pelaksanaan tugas	DAU	7.000.000,-	7.000.000,-	100

		Peralatan Gedung Kantor	dengan kondisi peralatan yang terjaga				
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
	1.	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM Pegawai Kantor Perpustakaan dan arsip mengikuti bimtek	DAU	20.000.000,-	19.946.000,-	99,73
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian target kinerja SKPD	DAU	14.000.000,-	13.974.995,-	99,82
E.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan						
	1.	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Terlaksananya lomba bercerita tingkat SD/MI se kabupaten Padang pariaman	DAU	20.321.450,-	20.321.450,-	100,00
	2.	Sosialisasi Minat dan Bu Daya Baca	Terlaksana sosialisasi fungsional pustakawan di lingkungan kab. Padang pariaman	DAU	59.000.000,-	54.437.350,-	92,27
F.	Program Pembinaan Kapasitas Perpustakaan						
	1.	Pembinaan Teknis Pembinaan Nagari dan Perpustakaan Sekolah	Terciptanya pustaka nagari dan pustaka sekolah yang menerapkan sistem baku pengelolaan perpustakaan	DAU	21.500.000,-	21.384.095,-	99,46
	2.	Penyediaan Peralatan Pustaka Nagari, Sekolah, Pesantren dan TBM	Terciptanya perpustakaan nagari di kab. Padang pariaman	DAU	65.000.000,-	61.570.000,-	94,72
G.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi						
	1.	Operasional Mobil Perpustakaan Keliling	Terlaksananya layanan perpustakaan keliling di wilayah yang jauh dari perpustakaan daerah	DAU	50.000.000	48.010.975,-	98,56
H.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
	1.	Pengadaan Mesin Absensi	Bertambahnya Asset Kantor dan meningkatnya Disiplin Pegawai	DAU	4.000.000,-	4.000.000,-	100,00
	2.	Pengadaan	Terciptanya	DAU	1.600.000,-	1.600.000,-	100,00

	Pakaian Dinas	perpustakaan nagari di kab. Padang pariaman				
--	---------------	---------------------------------------------------	--	--	--	--

## 2. Tingkat Pencapaian Estándar Pelayanan Minimal

Seperti yang telah diketahui bahwa SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip merupakan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang mempunyai kewenangan dibidang urusan wajib pemerintahan yaitu bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian Stándar Pelayanan Minimal pada SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip dapat dilihat pada Lampiran III.2

## 3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Wajib

Keadaan Pegawai Pada SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip  
Per 31 Desember 2015

No	Nama/Nip	Pendidikan	Jabatan
1.	Drs. Bahari.MM/ 19591115 198403 1 003 Pembina (IV/c)	S2	Kepala Kantor
2.	Marnelis/ 19580922 198403 2 001 Penata Tk. I (III/d)	SMA	Kasubag Tata Usaha
3.	Aismar/ 19620803 198503 2 006 Penata Tk. I (III/d)	SMA	Kasi Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelestarian Kearsipan
4.	Anasman, S.Pd/ 19641001 198506 1 001 Pembina (IV/a)	S2	Kasi Pembinaan, Pengembangan dan Pengkajian Kearsipan
5.	Zulherjal/ 19610713 198403 1 002 Penata Tk.I (III/d)	SMA	Kasi Perpustakaan
6.	Herlina Kurniati A.Md/ 19880405 201101 2 010 Pengatur (II/c)	Sarjana Muda	Staf
7.	Sal Amini Eka Putra S.Kom/ 19780109 201310 1 001 Penata (III.a)	Sarjana	Staf
8.	Suryadi S.Sos/ 19620327 198503 1 010 Penata Tk.I (III.d)	Sarjana	Staf
9.	Syamsudin,SE 19600207 198503 1 005 Penata Tk.1 (III.d)	Sarjana	Staf
10.	Yandrizon, SE 19720112 201406 1 002 Penata Muda (III.a)	Sarjana	Staf
11.	Elwas,SE 19610919 198303 1 008 Penata Tk.1 (III.d)	Sarjana	Staf

12.	H.Osman, SH,MM 19661120 199303 1 001 Pembina Tk.1 (IV.b)	S2	Staf
13.	Hutriyal Alwi A.Md 19900807 201503 1 002 Pengatur (II.c)	Sarjana Muda	Staf
14.	Cisilla Zayu, SE	Sarjana	Pegawai Harian Lepas
15.	Merisafeni A.Md	Sarjana Muda	Pegawai Harian Lepas
16.	Sylvina Dwi Agustia S A.md	Sarjana Muda	Pegawai Harian Lepas

3. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan  
Dokumen Pelaksaaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Tertuang dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA) yang merupakan penjabaran dari renja dan renstra SKPD

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan ini serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

Permasalahan :

- Kurangnya Sumber daya manusia di bidang ilmu perpustakaan
- Belum adanya jabatan fungsional pustakawan
- Masih kurangnya variasi koleksi buku perpustakaan untuk dapat meningkatkan minat baca dan pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan.
- Belum tersedianya ruangan baca perpustakaan yang nyaman karena masih tergabung dengan ruangan kerja pegawai sehingga selain mengganggu kenyamanan pengunjung juga mengganggu kelancaran tugas pegawai.
- Belum optimalnya penyelenggaraan perpustakaan nagari
- Rendahnya Minat baca masyarakat kabupaten padang pariaman.Tidak tercapainya sasaran perpustakaan daerah untuk melayani masyarakat kabupaten padang pariaman dikarenakan sampai saat ini perpustakaan daerah masih berada di kota pariaman sehingga masyarakat yang dilayani kebanyakan penduduk kota pariaman.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diatas telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

5. memberdayakan semua pegawai yang ada dulu sembari menunggu ada penempatan pegawai pada SKPD Perpustakaan dan Arsip oleh Pemerintah Daerah Kab. Padang Pariaman.
6. Satu persatu dari kekurangan sarana dan prasarana ini mulai bisa diatasi yaitu dengan adanya Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pada Tahun Anggaran 2014.

7. Perlunya merekrut tenaga pustakawan baik ahli maupun terampil dalam mengembangkan perpustakaan yang berdaya guna dan berhasil guna. Bekerjasama dengan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumbar menyelenggarakan Layanan Mobil Perpustakaan Keliling.
8. Pada Tahun 2014 ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Mendapatkan Bantuan mobil perpustakaan keliling dan perlengkapannya sehingga jangkauan layanan mobil perpustakaan keliling di kab.padang pariaman menjadi lebih luas.
9. Memberdayakan Pegawai Harian Lepas yang berlatar belakang pendidikan Perpustakaan sebanyak 2 orang.

6. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Pada tahun 2015 Ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Memberikan Bantuan Kepada 2 Perpustakaan Pesantrean, 6 Perpustakaan TBM dan 2 Perpustakaan Sekolah Swasta.

### C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

#### 1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman,

##### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran dari program dan kegiatan tahun 2015 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman seperti pada tabel berikut.

Program Kegiatan					Alokasi Anggaran dan Realisasi			
Uraian		Target	Realisasi	%	Sumber Dana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	1 tahun	100	APBD	30.000.000	29.840.150	99,46
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	100	APBD	50.000.000	45.248.403	90,50
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	1 tahun	100	APBD	160.100.000	159.900.000	99,99
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	100	APBD	40.000.000	39.400.000	98,50
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100	APBD	40.000.000	38.945.591	97,36
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	100	APBD	8.000.000	6.997.500	87,47
7.	Penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	1 tahun	100	APBD	30.000.000	21.819.700	72,73
8.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 tahun	1 tahun	100	APBD	125.000.000	118.546.088	94,84
9.	Penyediaan Jasa	1 tahun	1 tahun	100	APBD	27.800.000	27.600.000	99,28

	Pendukung Administrasi Perkantoran							
10.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	1 tahun	100	APBD	20.000.000	19.733.000	98,67
11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	1 tahun	100	APBD	100.000.000	98.030.606	98,03
12.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	1 tahun	100	APBD	5.000.000	4.905.000	98,10
13.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 paket	5 paket	100	APBD	40.000.000	39.632.100	99,08
14.	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	4 kelompok	4 kelompok	100	APBD			99,92
15.	Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP)	6 Kelompok	6 Kelompok	100	APBD	30.000.000	29.996.000	99,99
16.	Operasional Kapal Pengawas Multifungsi Blue Marlin	2 kali	2 kali	100	APBD	50.000.000	47.279.400	94,56
17.	Operasional dan Pengembangan UPTD Pusat Data Dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1 tahun	1 tahun	100	APBD	50.000.000	49.782.000	99,56
18.	Operasional Penangkaran Penyu	1 tahun	1 tahun	100	APBD	25.000.000	24.900.000	99,60
19.	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Konservasi	1 tahun	1 tahun	100	APBD	30.000.000	29.887.800	99,63
20.	Penyusunan Ranperda Zonasi dan renstra Pengelolaan Wilayah pesisir	1 tahun	1 Tahun	100	APBD			99,13
21.	Restocking Benih Ikan	4 Pokmaswas	4 Pokmaswas	100	APBD			99,29
22.	Operasional dan Pengembangan UPTD Wilayah I	1 tahun	1 tahun	100	APBD	30.000.000	29.917.100	99,72
23.	Pembinaan Pada Pembudidaya ikan	1 kali	1 kali	100	APBD			99,50
24.	Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya	4 pokdakan	4 pokdakan	100	APBD	20.000.000	19.859.900	99,30
25.	Demplot budidaya ikan kerapu	1 paket	1 paket	100	APBD			99,65
26.	Pengadaan Bahan Baku Pelet untuk BBI	1 paket	1 paket	100	APBD			99,68
27.	Pembinaan Petani Ikan	1 tahun	1 tahun	100	APBD			99,88
28.	Pemanfaatan Kolam terlantar	1 paket	1 paket	100	APBD	150.000.000	147.595.000	98,40
30.	Pembinaan pada Kelompok Perikanan Tangkap	5 kelompok	5 kelompok	100	APBD			100,00
31.	Operasional dan Pengembangan UPTD Wilayah II	1 tahun	1 tahun	100	APBD	40.000.000	28.035.050	70,09

32.	Operasional dan Pengembangan UPTD Wilayah IV	1 tahun	1 tahun	100	APBD	20.000.000	19.969.800	99,85
33.	Operasional kapal penangkapan ikan 30 GT	2 kali operasional	2 kali operasional	100	APBD			99,59
34.	Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan tangkap	15 kelompok	15 kelompok	100	APBD	20.000.000	19.920.000	99,60
35.	Pelatihan Perawatan Mesin Tempel	1 paket	1 paket	100	APBD			60,64
36.	Operasional dan Pengembangan Workshop PPI Pasir Baru	1 tahun	1 tahun	100	APBD	25.000.000	23.190.000	92,76
37.	Operasional Penyuluh Perikanan	1 tahun	1 tahun	100	APBD	60.000.000	47.045.000	78,41
38.	Pengawasan dan Pengujian Mutu Produksi Perikanan	1 tahun	1 tahun	100	APBD	25.000.000	24.734.900	98,94
39.	Operasional dan Pengembangan UPTD Wilayah III	1 tahun	1 tahun	100	APBD	30.000.000	30.000.000	100,00
40.	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	3 kecamatan	3 kecamatan	100	APBD	55.000.000	53.774.900	97,77
41.	Pengembangan Usaha Mina Pedesaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	6 poklaksar	6 poklaksar	100	APBD	25.000.000	24.879.950	99,52
42.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap (DAK)	2 unit rumpon/A patemen ikan, 2 Unit Alat Bantu Penangkapan Ikan	2 unit rumpon/A patemen ikan, 2 Unit Alat Bantu Penangkapan Ikan	100	DAK	1.074.318.000	1.074.318.000	100,00
43.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap (Pendamping DAK)	2 unit rumpon/A patemen ikan, 2 Unit Alat Bantu Penangkapan Ikan	2 unit rumpon/A patemen ikan, 2 Unit Alat Bantu Penangkapan Ikan	100	APBD	1.074.318.000	1.074.318.000	100,00
44.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan budidaya (DAK)	1 unit BBI, 1 Paket Calon Induk Ikan, 1 paket sarana BBI, 1 paket Meubeler BBI, 2 Paket KJA, 1 Paket Mesin Pelet	1 unit BBI, 1 Paket Calon Induk Ikan, 1 paket sarana BBI, 1 paket Meubeler BBI, 2 Paket KJA, 1 Paket Mesin Pelet	100	DAK	2.048.184.009	2.030.676.500	99,15
45.	Pengadaan Sarana	1 unit BBI,	1 unit BBI,	100	APBD			

	dan Prasarana Perikanan budidaya (Pendamping DAK)	I Paket Calon Induk Ikan, 1 paket sarana BBI, 1 paket Meubeler BBI, 2 Paket KJA, 1 Paket Mesin Pelet	I Paket Calon Induk Ikan, 1 paket sarana BBI, 1 paket Meubeler BBI, 2 Paket KJA, 1 Paket Mesin Pelet			2.048.184.009	2.030.676.500	99,15
46.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (DAK)	1 unit kend roda 2, unit Pos Pengawas , 1 unit sarana Air Bersih, I Paket Jalan Penangkar an Penyu	1 unit kend roda 2, unit Pos Pengawas , 1 unit sarana Air Bersih, I Paket Jalan Penangkar an Penyu	100	DAK	1.451.424.991	1.049.449.100	72,30
47.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Pendamping DAK)	1 unit kend roda 2, unit Pos Pengawas , 1 unit sarana Air Bersih, I Paket Jalan Penangkar an Penyu	1 unit kend roda 2, unit Pos Pengawas , 1 unit sarana Air Bersih, I Paket Jalan Penangkar an Penyu	100	APBD	1.451.424.991	1.049.449.100	72,30
48.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)	1 paket sarana pengolahan hasil perikanan , 1 paket peralatan pengolahan data (5 unit lap top, 2 unit net book, 1 unit printer), dan 1 paket lap top dan net book penyuluh (12 unit lap top, 3 unit net book)	1 paket sarana pengolahan hasil perikanan , 1 paket peralatan pengolahan data (5 unit lap top, 2 unit net book, 1 unit printer), dan 1 paket lap top dan net book penyuluh (12 unit lap top, 3 unit net book)	100	DAK	928.559.000	900.862.000	97,01
49.	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket sarana	1 paket sarana	100	APBD	928.559.000	900.862.000	97,01

	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Pendamping DAK)	pengolahan hasil perikanan , 1 paket peralatan pengolahan data (5 unit lap top, 2 unit net book, 1 unit printer), dan 1 paket lap top dan net book penyuluh (12 unit lap top, 3 unit net book)	pengolahan hasil perikanan , 1 paket peralatan pengolahan data (5 unit lap top, 2 unit net book, 1 unit printer), dan 1 paket lap top dan net book penyuluh (12 unit lap top, 3 unit net book)					
50.	Operasional administrasi DAK	1 tahun	1 tahun	100	APBD	300.000.000	278.345.792	92,78
	Jumlah					8.757.181.430	8.160.682.635	98,33

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan indikator kinerja kunci SPM pada urusan pilihan kelautan dan perikanan seperti pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada DKP tahun 2015

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Rumus	Capaian Kinerja
1	Produksi perikanan	$\frac{71752.03 \text{ Ton}}{48323 \text{ Ton}} \times 100\%$	148 %
2	Konsumsi ikan	$\frac{29.52 \text{ Kg}}{42 \text{ Kg}} \times 100\%$	65 %

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2015 pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari 2 indikator kinerja Kunci (IKK) yaitu :

### a. Produksi perikanan

Produksi perikanan bersumber dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap dengan total produksi sebesar 71752.03 ton, sedangkan target produksi daerah sebesar 48323 ton, sehingga capaian kinerja produksi perikanan sebesar 148%.

Dibandingkan dengan target daerah pada tahun 2014 maka produksi perikanan tahun 2013 sebesar 70765 ton melebihi target daerah yaitu sebesar 42.249,1 ton (167,9%).

Menurunnya produksi perikanan tercapai dibanding tahun sebelumnya disebabkan oleh rasionalisasi produksi dan akibat fluktuasi cuaca seperti: kabut asap dan angin puting beliung di perairan laut.

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 sebesar 29.52 Kg, sedangkan target konsumsi ikan daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 sebesar 45 Kg, sehingga capaian kinerja konsumsi ikan sebesar 65%.

Dibandingkan dengan target daerah pada tahun 2014 maka konsumsi ikan masyarakat tahun 2014 sebesar 42 kg dapat mencapai target konsumsi ikan daerah yaitu sebesar 42 kg (100%).

Tidak tercapainya tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan target daerah yaitu 45 Kg/kapita/tahun diantaranya disebabkan oleh formulasi awal dalam perhitungan konsumsi ikan masyarakat padang pariaman berdasarkan perhitungan manual yaitu: Banyaknya ikan yang diproduksi dikurangi banyaknya ikan yang dipasarkan keluar daerah dibagi jumlah penduduk. Mulai pada tahun 2015 BPS perhitungan konsumsi ikan berdasarkan formula Susenas (Sensus social ekonomi nasional) Oleh BPS dengan formulasi perhitungan mempertimbangkan aspek jumlah ikan yang diproduksi, jumlah ikan yang dipasarkan keluar daerah, jumlah restoran dan kondisi social ekonomi masyarakat yang disurvei.

3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Wajib/Pilihan dan Susunan Personilnya:

Tabel 2.3. Golongan dan Eselonering Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015

Gol/Ruang	Eselon					Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Fung	Staf	
Golongan IV/E	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/D	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/C	-	1	-	-	-	-	-	1
Golongan IV/B	-	-	-	-	-	1	-	1
Golongan IV/A	-	-	2	1	-	-	-	3
Jumlah Golongan IV	0	1	2	1	0	1	0	5
Golongan III/D	-	-	3	9	-	2	-	14
Golongan III/C	-	-	1	10	-	1	1	13
Golongan III/B	-	-	-	3	-	3	4	10
Golongan III/A	-	-	-	-	-	-	4	4
Jumlah Golongan III	0	0	4	22	0	6	9	41
Golongan II/D	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan II/C	-	-	-	-	-	1	-	1
Golongan II/B	-	-	-	-	-	-	2	2
Golongan II/A	-	-	-	-	-	-	2	2
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	0	1	5	6
Golongan I/D	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan I/C	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan I/B	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan I/A	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	1	5	24	0	12	14	56

#### 4. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2014 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2011 – 2015 untuk tahun terakhir (kelima) (2015). Berdasarkan Renstra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) Dinas kemudian diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA). Implementasi dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 46 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 46 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015.

Sesuai dengan Renstra, dalam penyusunan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015 ditetapkan 10 sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan dan berkembangnya usaha kelautan dan perikanan.
- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat pesisir terhadap lingkungan laut
- b. Terpeliharanya kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari
- c. Menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
- d. Meningkatnya daya saing produk perikanan
- e. Terwujudnya wisata pesisir dan laut yang ramah lingkungan
- f. Meningkatnya keterampilan nelayan pengolah dan pembudidaya ikan
- g. Meningkatnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
- h. Meningkatnya kinerja aparatur dan sarana prasarana pendukung
- i. Meningkatnya kualitas SDM aparatur

Pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan dimaksud sejalan dengan pencapaian target RPJMD urusan pilihan kelautan dan perikanan, dengan indikator RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 adalah :

- a. Produksi perikanan tangkap (ton)
- b. Produksi perikanan budidaya (ton)
- c. Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)
- d. Cakupan bina kelompok pelaku utama (nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar, dan pengawas ) (%)
- e. Jumlah Unit pengolahan ikan (Unit)

Capaian target RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 menurut indikator kinerja RPJMD Tahun 2011-2015 seperti pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 : Capaian Target RPJMD yang Dilaksanakan Oleh DKP Tahun 2015

No.	INDIKATOR KINERJA (RPJMD TAHUN 2011- 2015)	KONDISI PERIODE RPJMD TAHUN 2010	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014			URUSAN/ INFORMASI DARI SKPD
			TARGET TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2015	%	
1	2	3	4			9
	Kelautan dan Perikanan					
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	21.086	24.444.50	22.720.50	93%	DKP
2	Produksi perikanan budidaya (ton)	13.879,70	23.879.00	49.031.73	202%	DKP
3	Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)	30,5	45	29.52	65%	DKP
4.	Cakupan bina kelompok pelaku utama (nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar, dan pengawas ) (%)	60,00	93.09	98	105%	DKP
5.	Jumlah Unit pengolahan ikan	60	100	171	171%	DKP

## 5. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

- Kurangnya personil baik yang mempunyai latar belakang bidang ilmu teknis kelautan dan perikanan maupun bidang ilmu keahlian ekonomi akuntansi.
- Kurangnya tenaga Penyuluh Perikanan yang merupakan ujung tombak dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku utama (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan).
- Adanya penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya.
- Kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi pelaku utama (nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan) yang dapat berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga pelaku utama perikanan.
- Kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- Terbatasnya anggaran pembangunan, sehingga tidak semua tupoksi dinas dapat ditunjang dengan anggaran yang memadai.

### b. Solusi

Untuk memecahkan permasalahan diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman mengusulkan solusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai berikut :

- Membuka formasi penerimaan CPNS untuk tahun yang akan datang yang mempunyai disiplin ilmu kelautan dan perikanan untuk mengisi kekurangan tenaga struktural dan fungsional Penyuluh Perikanan.
- Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten kiranya melibatkan SKPD dengan meminta usulan/pertimbangan kepada SKPD yang bersangkutan dalam penempatan para pejabat yang akan mengisi SOTK.
- Diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi pelaku utama perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan) sehingga Dinas Kelautan

dan Perikanan dapat mewujudkan salah satu misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

- Pemerintah daerah kiranya dapat meningkatkan penganggaran pada tiap SKPD untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur sehingga dapat dihasilkan aparatur yang kompeten dan kualified yang akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan.

## 2. Urusan Pertanian

### A. URUSAN PERTANIAN YANG DILAKSANAKAN

#### 1. Alokasi dan Realisasi Program / Kegiatan

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	( % )	CAPAIAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</b>	<b>768.420.000</b>	<b>730.584.663</b>	<b>96,71</b>	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	40.000.000	100	Lancarnya proses surat menyurat dan administrasi keuangan selama 1 tahun
1.2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dn Listrik	55.000.000	36.059.579	65,56	Lancarnya operasional kegiatan diinas selama 1 tahun
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	190.700.000	187.043.600	98,08	Terselenggaranya pengelolaan dan pelaporan keuangan SKPD selama 1 tahun
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000	29.992.000	99,97	Terjaganya K3 kantor selama 1 tahun
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000	14.880.000	99,20	Terpeliharanya peralatan kerja selama 1 tahun
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000	29.990.000	99,97	Lancarnya kinerja pegawai selama 1 tahun
1.7	Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan	16.000.000	15.919.000	99,49	Terciptannya kenyamanan dan keamanan selama 1 tahun
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.837.000	98,37	Terlaksananya pembayaran jasa surat kabar selama 1 tahun
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000	28.790.000	95,97	Tercapainya koordinasi antar

					aparatur
1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	125.000.000	124.778.103	99,82	Tercapainya koordinasi ke dalam dan luar daerah selama 1 tahun
1.11	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	69.100.000	65.960.000	95,46	Terlaksananya pembayaran honor 4 orang PTT
1.12	Penyediaan dana operasional UPTD *)	157.620.000	147.335.381	93,48	Lancarnya operasional UPTD
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>365.000.000</b>	<b>299.487.984</b>	<b>82.05</b>	
2.1	Pemeliharaan Rutin/berkala kend.Dinas /Operasional	200.000.000	134.659.484	67,33	Operasional kendaraan dinas berjalan lancar selama 1 tahun
2.2	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	90.000.000	89.828.500	99,81	Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	75.000.000	75.000.000	100	Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun
3	<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>52.500.000</b>			
3.1	<b>Pengadaan mesin/kartu absensi</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>99,00</b>	Tersedianya mesin/kartu absensi dan Lancarnya kinerja pegawai
3.2	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	<b>42.500.000</b>	<b>42.405.000</b>	<b>99,78</b>	Tersedianya pakaian dinas dan lancarnya kinerja pegawai
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>30.000.000</b>	<b>25.515.000</b>	<b>85,05</b>	
4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	25.515.000	85,05	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur selama 1 tahun
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>30.000.000</b>	<b>25.927.500</b>	<b>86,43</b>	
5.1	Penyusunan Laporan Capaian	30.000.000	25.927.500	86,43	Tersedianya

	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				RKA,DPA,RENSTRA,RE NJA dan LAKIP sebanyak 5 paket
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>	<b>546.000.000</b>	<b>505.530.636</b>	<b>92,59</b>	
6.1	Peningkatan Produksi kakao Melalui Intensifikasi	60.000.000	59.984.000	99.97	Meningkatnya Produksi Kakao pada 5 kelompok tani
6.2	Satu Petani Satu ternak	416.000.000	378.138.036	90.90	Meningkatnya pendapatan peternak miskin dan peningkatan populasi ternak sebanyak 37 ekor
6.3	Pengembangan Kawasan Agribisnis Kakao	70.000.000	67.408.600	96.30	Terbangunnya kawasan agribisnis kakao sebanyak 2 gapoktan
7	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/BUN)</b>	<b>2.762.600.000</b>	<b>2.611.718.092</b>	<b>94.54</b>	
7.1	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	50.000.000	46.109.000	92.22	Peningkatan mutu produk olahan untuk kesejahteraan petani sebanyak 5 kelp
7.2	Penyusunan Laporan Statistik	40.000.000	39.018.415	97.55	Terlaksananya penyusunan laporan statistik selama 1 tahun
7.3	Pengawasan pupuk bersubsidi	20.000.000	19.286.500	96.43	Terawasinya peredaran pupuk di Kab Pdg Pariaman
7.4	Pembibitan tanaman hortikultura ( buah, sayuran, tanaman hias dan obat-obatan)	75.000.000	65.532.632	87.38	1 paket
7.5	Rakorbang dan Musrenbang Tk. Kabupaten	35.000.000	24.202.500	69.15	Terlaksananya musrenbangtan di Kab. Padg Pariaman
7.6	Penyusunan ARAMDA	61.000.000	59.179.045	97.01	Tersedianya angka ramalan produksi daerah ARAMDA) th 2015 dengan baik
7.7	Pengembangan usaha	48.000.000	46.202.200	96.25	Terbentuknya P3A

	pertanian melalui peningkatan produktifitas lahan dan air ( HIBAH WISMP)				dan GP3A pada daerah irigasi kegiatan WISMP sebanyak 6 Kelp, tersusunnya perencanaan ola tanam mendukung RP21 pada 6 daerah irigasi dan terlaksananya Dem Area SRI di 2 GP3A
7.8	Penunjang kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan	155.000.000	154.343.000	99,58	Terlaksananya Teknologi GP-PTT Padi dan Jagung serta peningkatan produksi tanaman pangan
7.9	Pemanfaatan lahan terlantar melalui optimalisasi lahan (OPL)	240.000.000	235.185.000	97,99	Tercapainya sasaran tanaman pangan dan horti
1.11	Pengawasan dan peredaran alsintan	20.000.000	19.593.000	97,97	
1.12	Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi	20.000.000	19.519.800	97,60	Tersedianya data penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang di tingkat kecamatan dan kabupaten
1.13	Penunjang TP Pengelolaan Lahan dan Air	116.600.000	66.289.500	56,85	Terlaksananya kegiatan OPL 1000 ha, terlaksananya pengembangan metode SRI 500 ha dan terlaksananya pengembangan jaringan irigasi 11.640 ha
1.14	Bantuan Alsintan	100.000.000	99.155.000	99,16	Tersedianya alat perontok gabah dan berkurangnya kehilangan hasil panen gabah di kab. Padang Pariaman
1.15	Pembangunan dan rehabilitasi JIUT dan JIDES ( Lanjutan Program DAK )	1.500.000.000	1.454.199.500	96,95	Tercapainya peningkatan produksi pertanian tanaman

					pangan/perkebunan
1.16	Perlindungan Lahan Pangan berkelanjutan	195.000.000	185.616.500	95.19	Tersusunnya naskah akademis LP2B, Tersusunnya draf ranperda LP2B dan RT/RW dan Tersosialisasikan LP2B di Kec
1.17	Pengembangan Usaha pertanian melalui peningkatan produktifitas lahan dan air	87.000.000	78.288.500	89.98	Terbentuknya P3A dan GP3A pada daerah irigasi kegiatan WISMP, tersusunnya perencanaan pola tanam mendukung RP21 di 6 daerah irigasi dan terlaksananya dem area SRI
8	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/BUN</b>	<b>60.000.000</b>	<b>59.689.900</b>	<b>99.48</b>	
8.1	Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggul daerah	30.000.000	29.753.400	99.18	Kab. Padang pariaman
8.2	Penunjang Pasca Panen Tanaman Pangan dan hortikultura	30.000.000	29.936.500	99.79	Tersedianya sarana kegiatan pasca panen tanaman pangan dan hortikulura
9	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/BUN</b>	<b>235.000.000</b>	<b>218.455.900</b>	<b>92.96</b>	
9.1	Bulan Bakti Peternakan dan kesehatan hewan	40.000.000	38.760.000	96.90	Terlaksananya kontes ternak di payakumbuh
9.2	Operasional Rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	20.000.000	19.139.900	95.70	Tersedianya komoditi tanaman horti dan perkebunan
9.3	Pengembangan Tanaman Jambu Biji Merah	79.000.000	77.767.500	98.44	Terlaksananya penanaman bibit jambu biji merah pada kelompok tani

9.4	Pengembangan Tanaman Karet	47.000.000	46.977.500	99.95	Terlaksananya pengembangan tanaman karet sebanyak 3.250 bibit
9.5	Teknologi Pertanian / Peternakan ( Pengolahan Kompos )	49.000.000	35.811.000	73.08	Terpenuhinya kebutuhan petani tentang pupuk kompos sebanyak 20Ha
10	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/BUN</b>	<b>428.000.000</b>	<b>425.327.000</b>	<b>99.38</b>	
10.1	Pengembangan Rehabilitasi kelapa	53.000.000	52.890.000	99.79	Terlaksananya rehabilitasi kelapa sebanyak 3000 btg
10.2	Perlindungan dan Pengendalian HTP Tanaman Pangan	150.000.000	149.876.000	99.92	Terkendalnya serangan hama dan penyakit tanaman pangan dan horti di Kab Pdg Pariaman
10.3	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan ( Butu Tupai)	200.000.000	197.661.000	98,83	Terkendalnya serangan hama tupai sebanyak 31.000 ekor
10.4	Pengembangan Tanaman Hortikultura ( sirsak,pisang )	25.000.000	24.900.000	99,60	Terlaksananya penanaman pisang dan sirsak untuk kelompok tani sebanyak 600 btg
11	<b>PROGRAM DAK BIDANG PERTANIAN</b>	<b>17.790.989.500</b>		<b>95,63</b>	
11.1	Peningkatan produktivitas produksi Pertanian (Dana DAK )	5.083.410.000	5.063.552.726	99.61	Terlaksananya pemb/rehabilitasi pipanisasi/pompanisas sebanyak 10 uniti, embung, dan damparit sebanyak 1.900 ha
11.2	Peningkatan Produktivitas produk pertanian ( Pendamping DAK )	508.341.000	506.346.274	99.61	Terlaksananya pemb/rehabilitasi pipanisasi/pompanisas sebanyak 10 uniti, embung, dan damparit sebanyak 1.900 ha
11.3	Adm peningkatan produktivitas Produksi Pertanian	150.000.000	114.148.395	76.10	1 tahun
11.4	Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan	308.599.500	253.015.000	81.99	Tersedianaya dokumen perencanaan

	Produktifitas produksi pertanian				pipanisasi/pompanisasi/embung/dam parit sebanyak 4 wilayah dan terawasinya pekerjaan pembangunan/rehabilitasi/pipanisasi/pompanisasi/embung/dam parit sebanyak 4 wilayah
11.5	Peningkatan Produktifitas produksi pertanian (DAK Tambahan Bidang Pertanian)	16.771.300.000	16.628.447.252	99.15	Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan
12	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN PENYAKIT TERNAK</b>	<b>215.000.000</b>	<b>197.834.513</b>	<b>92.02</b>	
12.1	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	35.000.000	34.129.942	97.51	Meningkatnya kesehatan dan kekebalan ternak terhadap penyakit SE dan Rabies di 17 Kec
12.2	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	75.000.000	62.495.000	83.33	Menurunnya populasi anjing liar sebanyak 1000 ekor dan menurunnya kakus gigitan anjing liar sekitar 50 %
12.3	Pelayanan Kesehatan hewan	50.000.000	49.444.571	98.89	Terlaksananya pengobatan ternak masyarakat/pemerintah di 17 Kec
12.4	Operasional PDSR Bio-Security dan kompensasi	35.000.000	32.345.000	92.41	Terlaksananya kegiatan biosecurity dan vaksinasi untuk sektor IV di 17 Kec
12.5	Uji bahan pangan asal hewan	20.000.000	19.420.000	97.10	Terlaksananya pengambilan/pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan sebanyak 47 sampel
13	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN</b>	<b>335.000.000</b>	<b>329.668.997</b>	<b>98.41</b>	
13.1	Monev penyebaran dan	30.000.000	29.830.000	99.43	Terlaksananya

	pendistribusian ternak lebaran				monitoring dan evaluasi penyebaran ternak di 17 kec
13.2	Pelayanan Inseminasi buatan	100.000.000	97.868.997	97.87	Terlaksananya IB kepada masyarakat sebanyak 3.000 ekor
13.3	Monitoring dan pembuatan pemanfaatan dana TP dan Dekonsentrasi	20.000.000	19.240.000	96.20	Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana TP/Prop sebanyak 15 kelp
13.4	Peningkatan pemanfaatan pakan lokal	35.000.000	34.360.000	98.17	Bertambahnya luas kebun HMT sebanyak 2 ha dan termanfaatnya teknologi pengolahan pakan
13.5	Operasional UPT Pembibitan dan Keswan	150.000.000	148.370.000	98.91	Meningkatnya pendapatan peternak miskin
14	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.802.000</b>	<b>99.01</b>	
14.1	Pembinaan usaha peternakan	20.000.000	19.802.000	99.01	20 klp

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pertanian.

Urusan kehutanan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja kunci (IKK), dengan

tingkat pencapaian sebagai berikut :

### 1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Program rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2015 mempunyai kegiatan yaitu Pembuatan bibit / benih tanaman kehutanan, Budidaya Lebah Madu dan Forum Komunikasi Das di tambah dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari dana DAK. Luas hutan dan lahan yang dapat direhabilitasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah seluas 385 ha.

Luas hutan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman saat ini adalah 30,983 ha, dan lahan kritis seluas 55.196 ha. Dengan arti kata luas hutan dan lahan yang direhabilitasi di tahun 2015 adalah 0,007% dari luas total hutan dan lahan kritis yang ada.

### 2. Penurunan Kerusakan kawasan hutan

Dari luas hutan seluas 30,983 ha yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, tidak terjadi kerusakan selama tahun 2015. Dengan demikian tidak adanya kerusakan hutan pada tahun 2015 ini.

### 3. Susunan Personil Urusan Pertanian.

No	Jumlah Pegawai Menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
	I	-	SD	-	
	II	4	SLTP	-	
	III	21	SLTA	18	
	IV	1	D-3/D1	2	
			S.1	9	
			S.2	1	

### 4. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan pada Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun usulan kegiatan dari Nagari dan Kecamatan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian ( Musrenbangtanhut)
2. Menghimpun Usulan kegiatan dari masing-masing Bidang di Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman
3. Penyusunan Renstra
4. Penyusunan Renja Tahunan (RKT) yang berpedoman pada Renstra
2. Penyusunan RKA
3. Penyusunan DPA

### 5. Permasalahan Dan Solusi Urusan Pertanian

#### a. Permasalahan

Kegiatan pada urusan kehutanan ini tidak di temuinya permasalahan yang begitu berarti. Semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

#### b. Solusi

Kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan dan sesuai dengan anggaran.

### 3. Urusan Kehutanan

#### Alokasi dan Realisasi Program / Kegiatan

1	PROGRAM REHABILITASI HUTADAN LAHAN	80.000.000	54.200.000	67.75	
1.1	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	20.000.000	20.000.000	100	Terdapatnya 1 unit persemaian dan tersedianya bibit untuk keperluan penanaman di fasilitas umum dan fasilitas sosial

1.2	Budibaya lebah madu	40.000.000	34.200.000	85.50	Meningkatnya pendapatan masyarakat di kawasan hutan sebanyak 50 stup
1.3	Forum Komunikasi DAS	20.000.000	0	00	Terpadunya upaya pembangunan DAS antara stake holder terkait sebanyak 13 DAS
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	58.000.000	57.865.000	99.77	
2.1	Operasi pengawasan dan pengamanan hutan	38.000.000	37.935.000	99.83	Terpeliharanya keamanan kawasan hutan di kabupaten padang pariaman sebanyak 4 kawasan
2.2	Pengawasan Peredaran Hasil Hutan	20.000.000	19.930.000	99.65	
3	PROGRAM DAK BIDANG KEHUTANAN	1.462.166.00 0		99.02	
3.1	Rehabilitasi Hutan dan lahan ( DAK Kehutanan )	1.378.560.000	1.297.500.000	94.12	Terlaksananya pembuatan hutan rakyat sebanyak 75 ha, penkayaan hutan rakyat 250 ha, budidaya tanaman gaharu 10, pembuatan dan penahan 1 unit, pemeliharaan hutan rakyat Th.1 225 ha, serta tersedianya sarana prasarana pengamanan hutan 1 paket, sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan dan terlaksananya pengakayaan reboisasi 50 ha
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (	137.856.000	129.620.000	94.03	Terlaksananya

	Pendamping DAK Kehutanan)				pembuatan hutan rakyat sebanyak 75 ha, penkayaan hutan rakyat 250 ha, budidaya tanaman gaharu 10, pembuatan dan penahan 1 unit, pemeliharaan hutan rakyat Th.1 225 ha, serta tersedianya sarana prasarana pengamanan hutan 1 paket, sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan dan terlaksananya pengakayaan reboisasi 50 ha
3.2	Administrasi Rehabilitasi hutan dan lahan	50.000.000	49.510.000	99.02	Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berjalan baik sesuai ketentuan petunjuk teknis

### Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kehutanan

Urusan kehutanan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja kunci (IKK), dengan tingkat pencapaian sebagai berikut :

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Program rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2015 mempunyai kegiatan yaitu Pembuatan bibit / benih tanaman kehutanan, Budidaya Lebah Madu dan Forum Komunikasi Das di tambah dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari dana DAK. Luas hutan dan lahan yang dapat direhabilitasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah seluas 385 ha.

Luas hutan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman saat ini adalah 30,983 ha, dan lahan kritis seluas 55.196 ha. Dengan arti kata luas hutan dan lahan yang direhabilitasi di tahun 2015 adalah 0,007% dari luas total hutan dan lahan kritis yang ada.

2. Penurunan Kerusakan kawasan hutan

Dari luas hutan seluas 30,983 ha yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, tidak terjadi kerusakan selama tahun 2015. Dengan demikian tidak adanya kerusakan hutan pada tahun 2015 ini.

## Susunan Personil Urusan Kehutanan

No.	Jumlah Pegawai Menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
	I	-	SD	-	
	II	4	SLTP	-	
	III	21	SLTA	18	
	IV	1	D-3/D1	2	
			S.1	9	
			S.2	1	

## Proses Perencanaan Pembangunan

No.	Jumlah Pegawai Menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
	I	-	SD	-	
	II	4	SLTP	-	
	III	21	SLTA	18	
	IV	1	D-3/D1	2	
			S.1	9	
			S.2	1	

## 4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

### 1. Alokasi dan Realisasi Program/ Kegiatan Tahun 2015:

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
<b>IX</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan</b>	<b>290,000,000</b>	<b>168,101,400</b>	<b>57.97%</b>	<b>outcome : Persentase capaian target PAD</b>
1	Pengolahan Data Sistem Informasi global (SIG) ESDM	39,500,000	23,450,000	59.37%	Output :Terlaksananya operasional pengelolaan SIG 1 tahun
2	Pengadaan Peralatan di Bidang Pertambangan	39,500,000	21,201,250	53.67%	Output :Tersedianya alat-alat survey tambang 1 paket
3	Sosialisasi dan Mitigasi Bencana Geologi	34,500,000	22,751,150	65.95%	Output : Terlaksananya sosialisasi dan mitigasi bencana geologi 75orang
4	Penyusunan Ranperda Pengelolaan Air Tanah	30,000,000	18,330,000	61.10%	Output : Tidak Terlaksananya penyusunan dan pembahasan ranperda pengelolaan air tanah
5	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	39,500,000	27,502,000	69.63%	Output : Terlaksananya penataan Izin Usaha pertambangan (WIUP), rekomendasi izin sesuai dengan Wilayah Pertambangan (WP) dan tata ruang wilayah Kabupaten Padang pariaman. 7 rekomendasi
6	Pemungutan pajak mineral non logam dan batuan	78,000,000	48,532,000	62.22%	Output : Terlaksananya pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan 1 tahun

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
7	Pemeliharaan Sumur Bor	29,000,000	6,335,000	21.84%	Tidak terlaksananya perbaikan sumur bor dalam.karena tidak terdaftar dalam aset Pemkab Padang Pariaman
<b>XI</b>	<b>Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan</b>	<b>101,000,000</b>	<b>78,273,950</b>	<b>77.50%</b>	<b>outcome: Luas tambang yang ditertibkan 18,5 ha</b>
<b>XII</b>	<b>Pengawasan dan penertiban pertambangan rakyat</b>	<b>71,000,000</b>	<b>58,122,250</b>	<b>81.86%</b>	<b>Output : Terlaksananya monitoring dan penertiban penambang liar di Padang Pariaman di 17 Kecamatan</b>
1	Sosialisasi Tambang Rakyat Kelistrikan dan Migas	30,000,000	20,151,700	67.17%	Output :Terlaksananya sosialisasi tambang rakyat & sosialisasi migas 70 orang
<b>XIII</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>	<b>13,399,547,000</b>	<b>12,909,475,718</b>	<b>96.34%</b>	<b>outcome: Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat sektor ketenagalistrikan</b>
1	Penyusunan Ranperda Ketenagalistrikan	29,500,000	13,320,000	45.15%	Tidak terlaksananya penyusunan ranperda ketenagalistrikan 1
2	Penanggulangan Kemiskinan Melalui listrik Pedesaan	300,000,000	244,388,000	81.46%	Terlaksananya bantuan pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga miskin dan pemasangan tiang listrik untuk desa tertinggal 87 kk
3	Pengawasan Kelistrikan energi dan Migas	49,000,000	23,303,580	47.56%	Output : terawasinya penggunaan listrik (17 kecamatan) dan kelancaran pendistribusian migas (100%) (SPBU, pangkalan mita, konversi gas)
4	Rehab dan Meterisasi lampu jalan	399,000,000	333,122,500	83.49%	Terlaksananya pemasangan alat pengukur meter PJU (meterisasi) 178 titik PJU
5	Pemeliharaan lampu Jalan	73,000,000	52,478,530	71.89%	Terlaksananya pemeliharaan lampu jalan wilayah kecamatan 9 Kecamatan
6	Pengadaan Lampu Jalan	479,047,000	431,374,000	90.05%	Tersedianya lampu jalan baru 46 titik PJU
7	Penyediaan Pembyran Rekening Listrik PJU	11,000,000,000	10,905,625,308	99.14%	Terlaksananya Pembayaran Rekening Lampu Jalan 11 bulan
8	Pendataan PJU	100,000,000	73,642,500	73.64%	Terlaksananya pendataan PJU
9	Pengadaan Mobil Truklift PJU	970,000,000	832,221,300	85.80%	Terlaksananya pengadaan mobil trucklift PJU 1 unit

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 2 (dua), dengan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

### 1. Pertambangan tanpa ijin

Rumus :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Luas Penambangan liar yang ditertibkan}}{\text{Luas area penambangan yang liar}} \times 100 \\
 & = ((47.84 + 18,5) / 80.4) \times 100\% = 82,51\%
 \end{aligned}$$

Dari 80,4 Ha perkiraan area penambangan liar yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman terdapat sebanyak 66,34 Ha penambang liar yang sudah ditertibkan. Tingkat pencapaian sebesar 82,51%.

b. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100$$

$$= 893.625.9/14.412.403.5 \times 100\% = 6,2\%$$

Dari jumlah total PDRB Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2014 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 14.412.403.5 (dalam juta) maka sektor pertambangan memberikan kontribusi sebesar Rp 893.625.9 (dalam juta), sehingga capaian kinerja untuk indikator Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB adalah sebesar 6,2% meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 3,28%

3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Wajib: Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Pariaman.

No	Jumlah Pegawai Menurut			Ket.	
	Golongan		Pendidikan		
1	Golongan IV c		SD	-	
2	Golongan IV b	2	SLTP	-	
3	Golongan IV a	8	SLTA/Sederajat	19	
4	Golongan III d	14	Diploma III	2	
5	Golongan III c	10	S1 (Sarjana)	19	
6	Golongan III b	8	S2 (Magister)	10	
7	Golongan III a	2	S3 (Doktor)	-	
8	Golongan II d	2			
9	Golongan II c	1			
10	Golongan II b	2			
11	Golongan II a	1			
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	

4. Proses Perencanaan Pembangunan :

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas dimaksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renja SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Masih banyaknya penambang rakyat dan juga perusahaan-perusahaan yang mempunyai izin usaha yang menambang di lokasi daerah yang dilarang atau diluar lokasi izin yang diberikan
- Terbitnya UU No. 34 tahun 2014 yang berlaku efektif tahun 2015 telah mengakibatkan kebingungan bagi aparat di daerah untuk melaksanakan kewenangan karena adanya pengalihan kewenangan di bidang ESDM dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Propinsi.

Solusi

- Pengesahan peta wilayah pertambangan oleh Bupati dan DPRD
- Penetapan Perda Pertambangan
- Upaya pemasangan papan larangan tambang di lokasi tambang yang ditertibkan.
- Pengawasan secara terpadu yang juga sebaiknya ikut melibatkan unsur dari kecamatan/ nagari dan masyarakat
- Melakukan sosialisasi dan juga menindak setiap penambang yang melanggar baik secara lisan, tertulis bahkan secara hukum sehingga menimbulkan efek jera

5. Urusan Pariwisata

9. Alokasi dan Realisasi Anggaran

	<b>PARIWISATA</b>				
	<b>Program penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>				
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan	1.020.000.000,00	19.760.000,00	1,94	Tersedianya tanah untuk relokasi disekitar makam
	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>				
	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	50.220.000,00	50.220.000,00	100,00	Adanya pemb berkesinambungan di objek wisata
	Pelaksanaan Event Pasie Maelo	180.000.000,00	151.097.500,00	83,94	Melestarikan budaya daerah Pd.Prm serta promosi pariwisata
	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>				
	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	29.000.000,00	27.410.000,00	94,52	Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat
	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>				
	Pelaksanaan promosi Pariwisata Nusantara	150.000.000,00	147.242.700,00	98,16	Terpromosinya objek wisata dan kebudayaan Pd.Prm
	Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata	100.000.000,00	99.675.000,00	99,68	Terpromosinya objek wisata dan

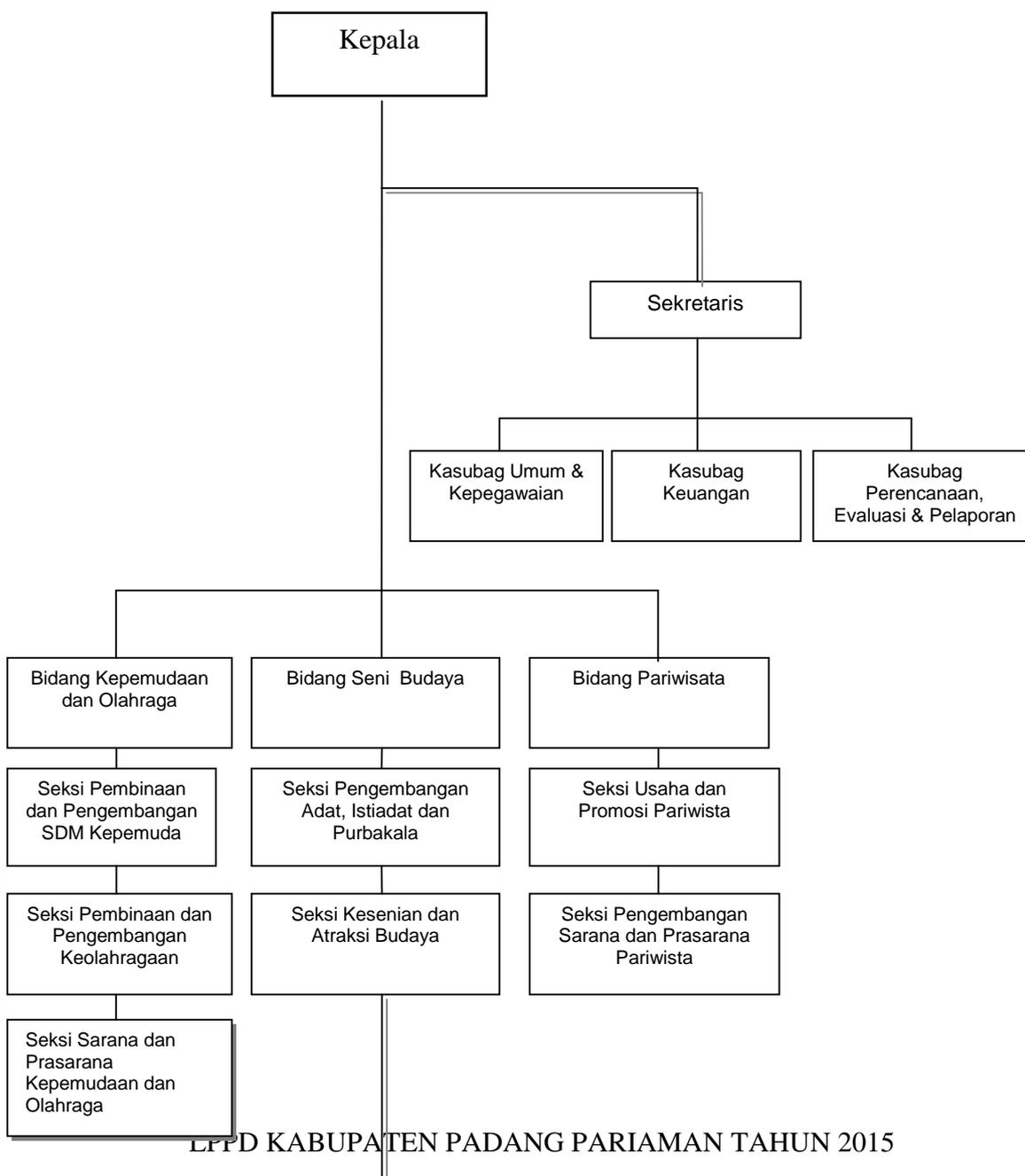
					kebudayaan Pd.Prm
	Partisipasi pada event Tour De Singkarak	267.000.000,00	251.155.700,00	94,07	Terpromosinya objek wisata dan kebudayaan Pd.Prm
	Pemilihan Uni dan Ajo	105.000.000,00	104.845.000,00	99,85	Terpromosinya objek wisata dan kebudayaan Pd.Prm

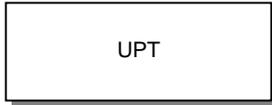
10. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Urusan Pariwisata mempunyai indikator kunci sebagai berikut :

Untuk urusan pilihan yang berada pada Bidang Pariwisata yang menjadi capaian kinerja menunjukkan total jumlah kunjungan wisatawan pertahunnya dan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib (Struktur Organisasi)





12. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	6
2	Strata 1 (S-1)	20
3	Sarjana Muda / D3	2
4	SLTA	8
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah	36

13. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran yang sangat strategis, untuk itu tuntutan akan profesionalitas, akuntabilitas dan efektivitas kerja pemerintahan menjadi bentuk yang tidak dapat dielakan dalam mekanisme kerjanya, sehubungan dengan hal itu kaidah normatif pemerintahan tersebut menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme Pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman.

## 6. Urusan Industri

### 1. Alokasi dan Realisasi Program/ kegiatan Tahun 2015:

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
<b>XV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi</b>	<b>39,500,000</b>	<b>31,575,500</b>	<b>79.94%</b>	<b>Bertambahnya Industri yang menerapkan sistem mutu 15 IKM</b>
1	Sosialisasi dan Penerapan GKM	39,500,000	31,575,500	79.94%	Pelaku IKM memahami dan mempraktekan tentang cara produksi manufaktur yang baik 20 IKM
<b>XVI</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>137,500,000</b>	<b>128,261,475</b>	<b>93.28%</b>	<b>Meningkatnya jumlah IKM 11.092 Unit usaha</b>
1	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	24,500,000	23,460,500	95.76%	Terlaksananya penyuluhan, fasilitasi pendaftaran merk dagang, PIRT dan halal untuk industri pangan 44 PIRT, 2 halal
2	Peningkatan Jaringan Usaha	20,000,000	17,642,400	88.21%	Terlaksananya fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta/ perusahaan dalam pemasaran produknya dan perbankan 15 IKM
3	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Produk Industri Kerajinan Daerah	68,500,000	67,293,575	98.24%	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan diversifikasi produk kerajinan border 15 IKM dan anyaman pandan 15 orang, 2 kelompok
4	Pengawasan dan Pembinaan IKM	24,500,000	19,865,000	81.08%	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi 55 IKM
<b>XVII</b>	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	<b>414,350,000</b>	<b>316,183,524</b>	<b>76.31%</b>	<b>Meningkatnya Nilai Produksi IKM 2 %</b>
1	Peningkatan Mutu Pengembangan Produk Olahan Jagung	43,875,000	25,430,146	57.96%	Terlaksananya pelatihan diversifikasi dan fasilitasi pengembangan produk olahan jagung 15 IKM
2	Peningkatan Mutu Pengembangan Produk Pangan Berbasis Tepung Moka	228,875,000	188,740,650	82.46%	Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi pengembangan produk pangan berbasis tepung moka 15 IKM
3	Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Kelapa	112,100,000	79,762,728	71.15%	Terlaksananya pelatihan dan peningkatan mutu minyak kelapa dan VCO 20 IKM dan bantuan mesin presskelapa 2 unit
	Pelatihan Peningkatan Mutu Olahan Pepaya	29,500,000	22,250,000	75.42%	Terlaksananya pelatihan, pendampingan pengembangan produk olahan pepaya 15 IKM
<b>XVIII</b>	<b>Program Penataan Struktur Industri</b>	<b>47,500,000</b>	<b>43,432,500</b>	<b>91.44%</b>	
	Pengembangan Klaster Industri Alsintan	47,500,000	43,432,500	91.44%	Terlaksananya pelatihan dan pengembangan IKM Alsintan 15 IKM

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal  
Urusan Industri mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 2 (dua), dengan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

- a. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100$$

$$= (1.713.063.7/14.412.403.5) \times 100\% = 11,89\%$$

Dari jumlah total PDRB Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2014 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 14.412.403.5 (dalam juta) sektor industri memberikan kontribusi sebesar Rp 1.713.063.7 (dalam juta), sehingga capaian kinerja untuk indikator Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB adalah sebesar 11,89%. Tingkat pencapaian sebesar 11,892% meningkat dari tahun sebelumnya (9,62%), dan sektor industri termasuk dalam kelompok 5 besar sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam rangka memberikan peningkatan yang lebih signifikan terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman, maka diperlukan peran aktif dunia usaha (pelaku industri), pemerintah dan masyarakat (pengguna hasil industri). Peran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, melalui Dinas Koperindag ESDM yang perlu ditingkatkan adalah berupa pembinaan terhadap sumber daya manusia industri tersebut, peningkatan kemampuan teknologi industri dan pembinaan dalam pengembangan Industri Kabupaten Padang Pariaman yang sebagian besar merupakan Industri Kecil dan Menengah.

- b. Pertumbuhan Industri

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah industri tahun 2015} - \text{jumlah industri tahun 2014}}{\text{Jumlah industri s/d tahun 2014}} \times 100$$

$$= [(1510-1475)/1475] \times 100\% = 2,37\%$$

Dari sebanyak 1.510 unit industri yang ada sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman maka pertambahan jumlah industri pada tahun 2015 dibandingkan dengan jumlah industri pada tahun 2014 sebanyak 35 unit, sehingga capaian kinerja untuk indikator Pertumbuhan Industri adalah sebesar 2,37%. Tingkat pencapaian sebesar 2,37% menunjukkan trend yang menurun dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya (2,50%)

3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Wajib: Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Pariaman.

No	Jumlah Pegawai Menurut				Ket.
	Golongan		Pendidikan		
1	Golongan IV c		SD	-	
2	Golongan IV b	2	SLTP	-	
3	Golongan IV a	8	SLTA/Sederajat	19	
4	Golongan III d	14	Diploma III	2	
5	Golongan III c	10	S1 (Sarjana)	19	
6	Golongan III b	8	S2 (Magister)	10	
7	Golongan III a	2	S3 (Doktor)	-	
8	Golongan II d	2			
9	Golongan II c	1			
10	Golongan II b	2			
11	Golongan II a	1			
	Jumlah	50		50	

4. Proses Perencanaan Pembangunan :

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas dimaksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renja SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Kurang mampu bersaingnya produk-produk yang dihasilkan dari segi kualitas
- Lemahnya modal usaha terutama untuk pemasaran dan peningkatan teknologi produksi
- Masih kurangnya promosi produk yang ada
- Keterbatasan personil pembina industri dan sarana transportasi yang tersedia, tidak adanya tenaga fungsional/ penyuluh industri

Solusi

- Mengikutsertakan IKM dalam diklat-diklat teknis.
- Memfasilitasi promosi dan pemasaran
- Penambahan tenaga penyuluh bidang industri untuk meningkatkan cakupan pembinaan IKM

## 7. Urusan Perdagangan

### 1. Alokasi dan Realisasi Program/ kegiatan Tahun 2015 :

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
<b>XII</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>171,000,000</b>	<b>146,934,800</b>	<b>85.93%</b>	<b>Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Konsumen, tertib ukur serta pengawasan barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen</b> <b>Jumlah UTTP yang diter : 1797UTTP</b>
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	27,000,000	17,977,700	66.58%	Terlaksananya pengawasan terhadap barang beredar di pasar (SNI Wajib, Label dan barang yang diatur tataniaganya)
2	Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP	40,000,000	39,397,500	98.49%	Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP
3	Monitoring distribusi pupuk bersubsidi	19,500,000	11,724,600	60.13%	Terlaksananya dan lancarnya distribusi pupuk bersubsidi di kecamatan-kecamatan sesuai aturan yang berlaku
4	Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian	17,500,000	12,020,000	68.69%	Meningkatnya pemakaian UTTP dalam usaha perdagangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku melalui pengawasan kemetrologian
5	Fasilitasi dan Operasional Penyelesaian Pengaduan dan Perlindungan	67,000,000	65,815,000	98.23%	Terlaksananya fasilitasi dan operasional penyelesaian permasalahan dan pengaduan konsumen serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan BPSK
<b>XIII</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>39,500,000</b>	<b>36,901,800</b>	<b>93.42%</b>	<b>Terwujudnya pasar BANA</b>
1	Temu Usaha Pemasaran Komoditi Ekspor Daerah Kabupaten Padang Pariaman	39,500,000	36,901,800	93.42%	Output : Terlaksananya penyusunan profil pasar dan pembinaan pengelolaan pasar Nagari
<b>XIII</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri</b>	<b>3,369,643,360</b>	<b>2,929,961,737</b>	<b>86.95%</b>	<b>Outcome : Terwujudnya pasar BANA</b>
1	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	39,500,000	39,275,568	99.43%	Terlaksananya pemetaan dan penyusunan profil pasar nagari 32 pasar
2	Pengembangan pasar lelang daerah	49,000,000	46,867,000	95.65%	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pasar lelang komoditi unggulan dan turunannya 2 kali
3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	20,000,000	19,578,100	97.89%	Terlaksana dan tersedianya data informasi harga sembako dan kebutuhan lainnya melalui media cetak dan elektronik 1 tahun
4	Pembangunan Pasar Nagari (DAK)	2,056,143,360	1,757,056,119	85.45%	Terlaksananya pembangunan pasar nagari 3 Pasar
5	Operasi Pasar Kebutuhan Bahan Pokok	110,000,000	106,437,700	96.76%	Terlaksananya operasi pasar murah bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Padang Pariaman 4.050 paket

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
6	Promosi Hasil Produk Daerah	195,000,000	193,373,050	99.17%	Terlaksananya promosi hasil produk daerah melalui pameran, dll 5 kali
7	Pelatihan manajemen pengelolaan pasar	40,000,000	39,650,000	99.13%	Output : Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan pasar bagi pengurus pasar
8	Pembangunan Pasar Nagari	860,000,000	727,724,200	84.62%	Output : Terlaksananya pembangunan pasar nagari 30orang
2	<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>	<b>85,000,000</b>	-	<b>0.00%</b>	<b>Outcome : Meningkatnya cakupan binaan terhadap PKL</b>
	Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	85,000,000	-	0.00%	Terlaksananya pembinaan dan pemberian bantuan sarana kepada PKL

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal  
 Urusan Perdagangan mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 1 (satu), dengan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

1) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100$$

$$= (1.191.533,70/14.412.403,50) \times 100\% = 8,27\%$$

Dari jumlah total PDRB Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2015 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 14.412.403,50 (dalam juta) maka sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar Rp 1.191.533,70 (dalam juta), sehingga capaian kinerja untuk indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 8,27%. Sektor Perdagangan merupakan termasuk dalam kelompok 5 besar sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Tingkat pencapaian sebesar 8,27% menunjukkan trend yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya (10,46%)

3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Wajib: Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Pariaman.

No	Jumlah Pegawai Menurut		Ket.
	Golongan	Pendidikan	

1	Golongan IV c		SD	-	
2	Golongan IV b	2	SLTP	-	
3	Golongan IV a	8	SLTA/Sederajat	19	
4	Golongan III d	14	Diploma III	2	
5	Golongan III c	10	S1 (Sarjana)	19	
6	Golongan III b	8	S2 (Magister)	10	
7	Golongan III a	2	S3 (Doktor)	-	
8	Golongan II d	2			
9	Golongan II c	1			
10	Golongan II b	2			
11	Golongan II a	1			
	Jumlah	50		50	

4. Proses Perencanaan Pembangunan :

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas dimaksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renja SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a) Masih rendahnya kualitas komoditi produk ekspor daerah
- b) Masih banyak pasar tradisional yang belum direnovasi, karena kendala keterbatasan anggaran dan masalah lahan.
- c) Masih ditemuinya barang-barang yang tidak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999, seperti lampu hemat energi tanpa SNI, makanan dan minuman dalam kemasan yang telah kadaluarsa.
- d) Belum adanya juklak/juknis tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pelayanan tera/tera ulang UTTP dan pengawasan UTTP dan BDKT menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan PP No.38 tahun 2007 tanggal 9 Juli 2011, sehingga pelaksanaan tera/tera ulang belum bisa dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
- e) Kurangnya kendaraan dinas roda dua untuk melakukan kegiatan ini kelapangan. Untuk itu hendaknya hal-hal yang menunjang pelaksanaan kegiatan ini dapat dipenuhi ditahun berikutnya.

## 8. Urusan Transmigrasi

### Alokasi dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Transmigrasi

I	Program Transmigrasi Lokal	0			
1	Pembekalan Calon Transmigrasi Lokal Pasca Gempa	0	0	0	0

### Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Transmigrasi

Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 1 (satu), dengan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

- Transmigrasi swakarsa sebanyak 0 % dimana Jumlah transmigrasi swakarsa sebanyak 0 dibagi Jumlah transmigran 0

### Susunan Personil Urusan Transmigrasi

No.	Jumlah Pegawai Menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
1	I	-	SD	-	
2	II	1	SMP	-	
3	III	1	SMA	1	
4	IV	-	D-3/D1	1	
5			S.1	-	
6			S.2	-	

### Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2013 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2011 – 2015 untuk tahun ketiga (2015). Berdasarkan Renstra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) Dinas kemudian diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA). Implementasi dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 01 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 36 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015.

Adapun Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

- a. Menciptakan aparatur yang berkualitas
- b. Meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi

Sesuai dengan Renstra, dalam penyusunan perencanaan pembangunan urusan transmigrasi tahun 2015 ditetapkan 21 sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang Transmigrasi sesuai dengan kualifikasi.
- b. Meningkatkan Administrasi Perkantoran.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
- d. Meningkatkan disiplin aparatur
- e. Meningkatkan kapasitas SDM
- f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan.
- g. Tumbuh kembangnya kemampuan berusaha untuk mengurangi ketergantungan warga transmigrasi.
- h. Meningkatnya keterampilan warga Transmigrasi.
- i. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

49

Pencapaian sasaran pembangunan transmigrasi dimaksud sejalan dengan pencapaian target RPJMD urusan pilihan Transmigrasi, dengan indikator RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 adalah :

- a. Meningkatkan kinerja aparatur dan organisasi
- b. Tersedianya dana kegiatan yang memadai
- a. Meningkatkan derajat kesejahteraan warga transmigrasi
- b. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta warga transmigrasi
- c. Peningkatan pendapatan warga transmigrasi

#### 5. Permasalahan dan Solusi

c. Permasalahan :

Rendahnya minat masyarakat untuk menambah ilmu dan keterampilan.

d. Solusi

Tetap memotivasi masyarakat yang akan menjadi transmigrasi untuk menambah ilmu dan ketrampilan.

## BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah sedangkan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang Diberikan tidak ada pelaksanaannya, namun ada kegiatan yang sejenis dengan tugas pembantuan tersebut, yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan yang bersifat hibah, yaitu sumbangan kepada pihak lain yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat, bantuan sosial, serta bantuan keuangan kepada Desa/Nagari.

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

### 1. URUSAN KESEHATAN :

Selama tahun 2015 Dinas Kesehatan menerima bantuan dana dari APBN dari Kementerian Kesehatan RI dalam bentuk tugas pembantuan sebagai berikut :

1. Dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah : DIPA nomor : DIPA – 024.03.4.089302/2014
2. Instansi Pemberi tugas pembantuan : Kementerian Kesehatan RI, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan anak
3. Program dan Kegiatan :  
Program : Program Bina gizi dan Kesehatan Ibu dan anak  
Kegiatan : BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
  - a) Dana Rp. : Rp. 3.943.608.000,- dengan realisasi Rp. 3.800.986.500.- (96,38 %)
  - b) Bentuk Kegiatan : Bantuan Operasional pelayanan di Puskesmas (24 puskesmas) dalam bentuk bantuan operasional kesehatan dan penyelenggaraan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian SPM
  - c) Dilaksanakan Oleh : Bidang Pelayanan Kesehatan
  - d) Hasil : Dana BOK sangat membantu dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan :
    - KIA dan KB (Pendataan sasaran ANC, INC, PNC, Posyandu, Kunjungan rumah, penyuluhan, pembinaan poskesri, senam hamil, dll)
    - Imunisasi (imunisasi di posyandu, BIAS dan sweeping)
    - Perbaikan Gizi masyarakat (PMT Pemulihan, Surveilanz gizi)
    - promosi kesehatan (Penyuluhan konseling, pembinaan posyandu)
    - kesehatan lingkungan (Pengendalian dan pemantauan sanitasi, rumah, TTU
    - pengendalian penyakit (pemberantasan vektor, abatisasi, pemeriksaan jentik
  - e) Dampak kegiatan : Peningkatan cakupan pelayanan beberapa indikator SPM setelah diberikannya dana BOK ke puskesmas seperti peningkatan cakupan Pn (Pertolongan ibu bersalin oleh

nakes terlatih, cakupan kunjungan neonatal pertama (Kn1), balita ditimbang berat badannya (D/S), dll.

## 2. URUSAN TENAGA KERJA :

### Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Dasar Hukum : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 No. SP.DIPA.-026.04.4.089301/2015 tanggal 14 November 2014
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

### 3. Program dan Kegiatan

Program : Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan : a. Padat Karya Infrastruktur pedesaan

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :  
Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan :  
Anggaran bersumber dari APBN Kementerian  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

4. Realisasi kegiatan fisik pelaksanaan kegiatan dari dana Rp. 883.504.000,- telah teralisasi sebanyak Rp. 865.164.300 atau 97,9 . %.
5. Sumber Dana dari APBN ( Kementerian Tenaga Kerja ) Tahun 2015 sebesar Rp. 883.504.000,- dengan jenis kegiatan Padat Karya dimana adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 176 orang kegiatan berupa rehab jalan desa pada Kecamatan Lubuk Alung Nagari Punggung Kasiak, Kecamatan Enam Lingkung Nagari Koto Tinggi dan Kegiatan Tenaga Kerja Muda ( TKM ) Pemberian modal usaha pada berupa paket PMD pada Kecamatan Ulakan Tapakis Nagari Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris Kecamatan Pauh Kamar, dan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Nagari Campago.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan adalah : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kasi Pengawasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

7. Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas :

No.	Jumlah Pegawai Menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
	I		SD	-	
	II	1	SMP	-	
	III	5	SMA	1	
	IV	1	D-3/D1	1	
			S.1	1	
			S.2	3	

8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan ini berupa kendaraan dinas roda 4 ( empat ) sebanyak 2 buah, kendaraan dinas roda 2 ( dua ) sebanyak 2 buah.

9. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang bekerjasama dengan pihak ketiga oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas terkait.

3. URUSAN PERTANIAN :

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan

Uraian pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1. Dasar Hukum.

Landasan hukum pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu hasil pangan Kabupaten Padang Pariaman dan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Perkebunan Satuan Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman (03) Tahun Anggaran 2015 adalah :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 018.03.4.089094/2015 tanggal 23 Juni 2015 ( Revisi V )
2. Petunjuk Operasional Kegiatan ( POK ) Satker Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat ( 03 ) Tahun 2015.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

Program ini merupakan pelimpahan dari Dinas Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015, yang merupakan Dana Tugas Pembantuan dari unit organisasi Ditjen Tanaman Pangan dengan jumlah dana sebesar Rp. 8.588.000.000,- (Delapan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

3. Program dan Kegiatan :
- Program : Peningkatan Produksi Produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan
- Kegiatan : a Pengelolaan produksi tanaman serealia
- b Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan
- c Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan : Sumber dan Jumlah Anggaran yang di gunakan anggaran bersumber dari APBN Ditjen Tanaman Pangan
4. Realisasi kegiatan pelaksanaan kegiatan dari dana 8.588.000.000,- telah teralisasi sebanyak Rp. 8.577.708.200,- atau 99,88 %
5. Sumber dana dari APBN ( Ditjen Tanaman Pangan ) tahun 2015 sebanyak Rp. 8.588.000.000,- dengan jenis kegiatan Pengelolaan produksi tanaman serealia, dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan dimana kegiatan ini sebagai penunjang dari kegiatan APBD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan adalah : Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman
7. Jumlah Pegawai yang Melaksanakan tugas :

No.	Jumlah Pegawai Menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
	I	-	SD	-	
	II	-	SLTP	-	
	III	3	SLTA	-	
	IV	2	D-3/D1	-	
			S.1	3	
			S.2	1	

8. Disini Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan ini adanya kendaraan dinas
9. Permasalahan dan Solusi
- Permasalahan
- Tidak di temuinya permasalahan yang sangat berarti.

#### 4.URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tugas Pembantuan yang Diterima

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5084);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

#### Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI

#### Program dan Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 065-348 Dukcapil Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2015, dimana pada pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015, Program yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Kegiatan : Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu, Komponen Input :

1. Penyusunan laporan pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Kependudukan
3. Monitoring dan Evaluasi ke Kecamatan
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran
5. Pengelolaan Akuntansi Administrasi Kependudukan
6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pelayanan Dokumen Kependudukan
8. Penerbitan Dokumen Kependudukan
9. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

## Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dijelaskan sbb :

NO	KETERANGAN	PAGU	REALISASI	SISA DANA
1	Penyusunan Laporan Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota	129.214.000	109.760.450	19.453.550
2	Koordinasi dan konsultasi Adminstrasi Kependudukan	184.816.000	182.530.555	2.285.445
3	Monitoring dan Evaluasi ke Kecamatan	76.160.000	69.740.000	6.420.000
4	Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran	9.260.000	9.040.000	220.000
5	Pengelolaan Akuntansi Administrasi Kependudukan	35.640.000	29.700.000	5.940.000
6	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Capil	29.000.000	29.000.000	0
7	Pelayanan Dokumen Kependudukan	357.700.000	339.569.450	18.130.550
8	Penerbitan Dokumen Kependudukan	590.814.000	555.416.255	38.080.000
9	Pengelolaan Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan	40.500.000	40.499.990	10
	Jumlah	1.453.104.000	1.365.256.700	87.847.300

### Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Sumber Dana berumber dari APBN TA 2015, dengan Jumlah Anggaran Rp. 1.453.104.000,- realisasi sebesar Rp. 1.365.256.700,- dan sisa dana Rp. 87.847.300,-

### Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

SKPD yang melaksanakan tugas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	5
2	Strata 1 (S-1)	13
3	Sarjana Muda / D3	2
4	SLTA	6
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah	26 orang

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	18
3	II	3
4	I	
5	PTT	1
	Jumlah	26 orang

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	10
4	Pelaksana	
5	Staf	11
	Jumlah	26 orang

Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam penyelesaian Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2015.

## 5.URUSAN PERDAGANGAN

### a. Dasar Hukum

Untuk penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan yang menjadi dasar hukum adalah Surat Pengesahan DIPA DIPA 090.02.4.352425/2015 tanggal 24 Juni 2015.

### b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan yakni Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan untuk kegiatan revitalisasi Pasar Rakyat.

### c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan.

Pelaksanaannya di berupa Pembangunan Pasar Sungai Geringging yang berlokasi di Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, sebanyak 136 kios, dengan total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

### d. Realisasi penggunaan Anggaran adalah :

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0.00%
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0.00%
BELANJA	B.2			
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0.00%
Belanja Barang	B.4	106,000,000	95,007,633	89.63%
Belanja Modal	B.5	5,894,000,000	5,805,589,000	98.50%
Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00%
JUMLAH BELANJA		6,000,000,000	5,900,596,633	98.34%

### e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Sumbar anggaran adalah APBN Perubahan tahun 2015 dengan realisasi sebesar Rp.5.900.596.633,00. atau 98,34%

f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan

SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Koperindag ESDM (Satker Perdagangan).

g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No.	Nama	Jabatan	Fungsi	Pangkat	Golongan	Pendidikan
1.	Rustam, SE, MM	Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran	Pembina Tk. I	IVb	S2
2	Rapini, SE, ME	Kabid Perdagangan	Pejabat Pembuat Komitmen	Pembina	IVa	S2
3	Jasmaiyanti	Kasubag Keuangan	Penerbit SPM	Penata Tk. I	III d	SMA
4	Irnawilis, A.Md.	Bendahara Pengeluaran	Bendahara	Pengatur Tk. I	II d	D3
5	Tarmizi, SE	Kasi Pelayanan dan Jasa	Staf Pengelola	Penata Tk. I	III d	S1
6	Weri Nova Afandi, ST, M.Si.	Kasubag Perencanaan	Staf Pengelola	Penata	III c	S2

h. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana sangat kurang. Tidak ada kendaraan dinas untuk mobilitas personil dalam rangka peninjauan ke lapangan maupun pengurusan pencairan anggaran ke KPPN di Padang. Printer memanfaatkan printer kantor yang kondisinya kurang baik. Ruang kerja panas karena AC tidak berfungsi baik.

i. Permasalahan yang dihadapi

Masalah yang dihadapi adalah lemahnya pengetahuan personil tentang pengelolaan dana APBN.

j. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Perlu adanya master plan pengembangan Pasar dan pemetaan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pembangunan pasar di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga perbaikan dan revitalisasi pasar benar-benar efektif dan tepat sasaran.

**BAB V**  
**TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

**A. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal MoU	Nomor MoU	Perihal
1	1 April 2015	1	Mou dengan BPK RI dan Bank Nagari tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara on line pada PT Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah
2	7 April 2015	2	Mou dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.
3	13 Mei 2015	3	Mou dengan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sumbar, tentang Kerjasama Pertukaran Data, Peraturan, Bimbingan Teknis/Pelatihan, Narasumber dan Informasi lainnya terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan daerah.
4	13 Mei 2015	5	Mou dengan Sticing SNV Nederlands Ontwikkelingsorganisatie tentang kerjasama pembangunan wilayah terpadu yang berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.
5	26 Juni 2015	6	Mou dengan Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi tentang penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2015.
6	11 November 2015	7	Mou dengan Pemkot Cimahi tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
7.	10 Desember 2015	10	Mou dengan Pemkot Padang, Pemkot Pariaman, Pemkab Mentawai tentang pembentukan Badan Kerjasama Lintas Pesisir Regional Wilayah Sumbar.
8	10 Desember 2015	11	Mou dengan BPJS Kesehatan Cabang Padang tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi peserta BPJS Kesehatan

## B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL

- BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah bertujuan untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah Kabupaten Padang Pariaman mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas nasional.

### 1. Forum Koordinasi

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah ditempuh melalui mekanisme Rapat Muspida dan Rapat Koordinasi serta pertemuan informal lainnya. Melalui pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, kondisi Kabupaten Padang Pariaman tetap kondusif dan terkendali. Hal ini merupakan perwujudan sinergitas dalam melaksanakan urusan wajib daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Melalui forum koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, maka dibentuk :

- Tim Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA ) Kabupaten Padang Pariaman yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan konstruktif bagi keamanan dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Kominda bertugas merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
- Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang bertujuan untuk mencapai stabilitas kondisi dalam negeri yang kondusif untuk pembangunan.

### 2. Materi Koordinasi

Materi Koordinasi yang dilakukan oleh :

- Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Padang Pariaman berupa pengkompilasi dan mengkoordinasikan informasi bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat (Ipoleksosbudkamtibmas) yang berpengaruh terhadap segala aspek yang dapat menjadikan hambatan, gangguan dan ancaman kondisi yang kondusif terhadap kebijakan politik Dalam Negeri di Kabupaten Padang Pariaman.

- Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah Kabupaten Padang Pariaman

3. Instansi Vertikal yang terlibat

Instansi Vertikal yang terlibat dalam Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Tahun 2015, yaitu :

- Polres Padang Pariaman.
- Polres Kota Pariaman.
- Dandim 0308 Pariaman.
- Kejaksaan Negeri Pariaman.
- Perwakilan BIN Daerah Sumatera Barat.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariaman.

Instansi Vertikal yang terlibat dalam Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah Tahun 2015, yaitu :

- Polres Padang Pariaman.
- Polres Kota Pariaman.
- Kejaksaan Negeri Pariaman.
- KPU Padang Pariaman.
- Panwaslu Padang Pariaman.
- Kabag Hukum Setdakab Padang Pariaman.
- Kemenag Kabupaten Padang Pariaman.
- Dinas Sosnaker Kabupaten Padang Pariaman.
- Diskoperindagkop SDA Kabupaten Padang Pariaman
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariaman.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Seluruh anggaran yang dialokasikan pada kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 pada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dengan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan :

- Kegiatan Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 98.000.000,- (terbilang : sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.200.000,- (terbilang : Empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang tergabung dalam Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Padang Pariaman dan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah

Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 75/KEP/BPP/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Pembentukan Anggota Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015, yaitu :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 ( S.2 )	2
2	Strata 1 ( S.1 )	13
3	Sarjana Muda / D3	0
4	SLTA	2
5	SLTP	0
6	SD	0
	Jumlah	17 Orang

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	4
2	III	12
3	II	1
4	I	0
	Jumlah	17 Orang

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 87/KEP/BPP/2015 tanggal 15 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015, yaitu :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 ( S.2 )	9
2	Strata 1 ( S.1 )	8
3	Sarjana Muda / D3	0
4	SLTA	3
5	SLTP	0
6	SD	0

	Jumlah	20 Orang
--	--------	----------

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	12
2	III	7
3	II	1
4	I	0
	Jumlah	20 Orang

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan

- Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Kominda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 yaitu Kegiatan Rapat Koordinasi sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan, dimana masing - masing Anggota Tim Kominda menyampaikan laporan yang terjadi di daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang ancaman stabilitas nasional di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat (Ipoleksosbudkamtibmas).
- Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah 4 ( empat) kali pertemuan, dimana masing - masing Anggota tim menyampaikan laporan Rencana Aksi B3, B6, B9, B12 per triwulan.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Hasil dan manfaat koordinasi yang diharapkan dalam pelaksanaan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah oleh :

- Tim Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah terpantaunya stabilitas nasional di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat ( Ipoleksosbudkamtibmas ) di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
- Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah adalah terpantaunya Gangguan Keamanan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

## 9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

- Tindak lanjut hasil koordinasi dengan instansi vertikal yang dilakukan oleh Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Padang Pariaman yaitu :
  1. Adanya sosialisasi dan transformasi informasi yang dilakukan oleh para anggota Tim atau unsur Komunitas Intelijen Daerah yang dituangkan atau disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam bentuk laporan-laporan.
  2. Dari proses transformasi informasi tersebut ditujukan untuk memecahkan atau mendapatkan kejelasan atas suatu masalah yang sedang terjadi diwilayah Kabupaten Padang Pariaman.
  3. Kegiatan pertemuan diadakan secara rutin dan selain konsisten dalam rangka membahas pemecahan suatu masalah yang terjadi juga terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan atau perintah kebijakan, yang artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.
- Tindak lanjut hasil koordinasi dengan instansi vertikal yang dilakukan oleh Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah Kabupaten Padang Pariaman yaitu :
  1. Adanya sosialisasi dan transformasi informasi yang dilakukan oleh para anggota Tim atau unsur Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan atau disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam bentuk laporan-laporan per triwulan untuk di sampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri.
  2. Dari proses transformasi informasi tersebut ditujukan untuk memecahkan atau mendapatkan kejelasan atas suatu masalah yang sedang terjadi diwilayah Kabupaten Padang Pariaman.
  3. Kegiatan pertemuan diadakan secara rutin dan selain konsisten dalam rangka membahas pemecahan suatu masalah yang terjadi juga terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan atau perintah kebijakan, yang artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

## 10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Mengingat pentingnya stabilitas kondisi ketentraman dan ketertiban diwilayah Kabupaten Padang Pariaman yang secara geografis berbatasan dengan Wilayah Kota Padang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar serta adanya indikasi mobilitas atau pergerakan radikal kiri dan radikal kanan lintas wilayah Kabupaten Padang Pariaman, maka dipandang perlu untuk dilakukan koordinasi maupun kerjasama dibidang Intelijen Daerah dengan KOMINDA Kabupaten Padang Pariaman dan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah melalui rapat kerja atau rapat koordinasi dengan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud.

- **BIDANG PERHUBUNGAN**
  - 1) Forum koordinasi, berdasarkan rapat – rapat yang diselenggarakan antara SKPD dengan instansi vertikal yang ada di daerah.
  - 2) Materi koordinasi, berupa tugas – tugas yang saling terkait satu sama lain demi terwujudnya pelayanan yang optimal terhadap masyarakat.
  - 3) Instansi vertikal yang terlibat,
    - Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Resor Padang Pariaman dan Resor Kota Pariaman
    - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman
  - 4) Sumber dan jumlah anggaran, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan jumlah anggaran Rp. 220.000.000,- dan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Dukungan Pengamanan Tour de Singkarak dengan anggaran Rp. 60.000.000,-
  - 5) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah, yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
  - 6) Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan, dalam 1 (satu) tahun ada sekitar 5 (lima) jenis kegiatan, yaitu meliputi : Pengamanan angkutan lebaran, pengamanan lalu lintas pada malam tahun baru, pengamanan lalu lintas pada acara keberangkatan jemaah haji, pengamanan lalu lintas pada saat Shalat Idul Adha dan pengamanan lalu lintas dalam acara balap sepeda skala internasional “Tour D Singkarak”.
  - 7) Hasil dan Manfaat Koordinasi, agar terwujudnya pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pada sektor lalu lintas dan angkutan jalan.
  - 8) Tindak lanjut Hasil Koordinasi, terlaksana secara rutin pada setiap tahunnya dan menjadi agenda tugas rutin bersama antara SKPD dengan instansi vertikal yang terdapat di daerah.
  
- **BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**
  1. Forum Koordinasi  
Forum Koordinasi yang dilaksanakan adalah forum koordinasi untuk pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban Umum dan Masyarakat
  2. Materi Koordinasi  
Materi Koordinasi adalah
    - a. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di daerah
    - b. Penilaian kondisi atas ancaman dan gangguan Kantramtibmas di daerah
    - c. Pengembangan SDM dalam rangka Penyelenggaraan dan pemeliharaan Kantramtibmas Masyarakat di Daerah.
  3. Instansi Vertikal yang terlibat :  
Instansi vertical yang terlibat adalah Polisi, TNI, Kejaksaan, KPU dan Panwaslu

4. Sumber Dana Anggaran.  
Untuk koordinasi disediakan anggaran dan DPA Kantor Satpol PP tahun 2015 yang bersumber dari dana dalam pelaksanaan forum Koordinasi berasal dari APBD, APBN maupun sumber dana lainnya yang sah
5. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah  
Penyelenggaraan koordinasi adalah Satpol PP Kab. Padang pariaman dengan melibatkan pihak Polres. TNI dan kejaksanaan, dan Panwaslu
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
  - a. Jumlah Pegawai sebanyak 87 orang terdiri dari :
    1. PNS = 25
    2. PTT = 32
    3. Kontrak/swakelola = 30
  - b. Kualifikasi Pendidikan anggota Satpol PP terdiri dari:
    1. S2 = 2 orang
    2. SI = 13 orang
    3. D3 = 2 Orang
    4. SMA = 70 orang
  - c. Pangkat / Golongan anggota Satpol PP terdiri dari :
    1. IVa = 2 orang
    2. III/d = 4 orang
    3. III/c = 2 orang
    4. III/b = 1 orang
    5. III/a = 1 orang
    6. II/b = 15 orang
    7. PTT = 32 orang
    8. Kontrak/Swakelola = 30 orang
  - d. Jumlah Pejabat Struktural sebanyak 5 orang terdiri dari :
    1. Eselon IIIa = 1 orang
    2. Eselon IVa = 6 orang
7. Jumlah Kegiatan koordinasi yang Dilaksanakan  
Kegiatan Koordinasi dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau insidentil jika terjadi permasalahan yang mendesak untuk di atasi
8. Hasil (ouput) dari Koordinasi  
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaain Koordinasi ini terwujudnya kesatuan presepsi dalam menangani permasalahan dan hambatan serta terwujudnya sinergitas dalam upaya penanganan setiap permasalahan dan hambatan dalam pemeliharaan Kantramtibmas.
9. Permasalahan dan Solusi  
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama adalah belum efektifnya koordinasi dengan SKPD terkait sehingga sering menjadi kendala dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas operasional di lapangan Untuk pemecahan permasalahan di atas telah diadakan forum korrndinasi dengan SKPD tkait sehingga dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas di lapangan

## BIDANG STATISTIK :

Urusan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi kerjasama dengan Pihak Ketiga. Dimana untuk tahun 2013, Bappeda telah melakukan kerjasama dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman dan Perguruan Tinggi Lokal/Daerah yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Nusantara Pariaman.

Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman ini diawali dengan Nota Kesepahaman Antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 01/NKB-SPE-BAPPEDA/I/2013 dan Nomor : 13061.016A/Pub-Stat/I/2013 tentang Penerbitan Buku Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2013 dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2008-2012 Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013.

Sehubungan dengan nota kesepahaman tersebut, maka kerjasama ini menghasilkan 2 (dua) buah dokumen Statistik Daerah, yaitu:

### 1. Buku Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2013

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.27.500.000,- Kerjasama ini dilaksanakan dalam waktu 185 (seratus delapan puluh lima) hari kalender, terhitung mulai tanggal 30 Januari 2013 s.d 29 Juli 2013 dengan hasil kerjasama dalam bentuk Penerbitan Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2013 sebagaimana tersebut di atas, dengan berdasarkan kesepakatan kerjasama yang tertuang pada SPK Nomor : 01/SPK-SPE-BAPPEDA/I-2013 tanggal 30 Januari 2013

### 2. Buku Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2008-2012 Tahun Anggaran 2013.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 18.500.000,- yang bersumberkan dari Anggaran Bappeda Kabupaten Padang Pariaman pada APBD 2013. Kerjasama ini dilaksanakan dalam waktu 185 (seratus delapan puluh lima) hari kalender, terhitung mulai tanggal 30 Januari 2013 s.d 29 Juli 2013 , dengan hasil kerjasama dalam bentuk Penerbitan Dokumen Statistik Daerah sebagaimana tersebut di atas, dengan berdasarkan kesepakatan kerjasama yang tertuang pada SPK Nomor : Nomor : 02/SPK-SPE-BAPPEDA/I-2013 tanggal 30 Januari 2013

Sementara untuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi Lokal/Daerah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Nusantara, ini diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 61/KEP/KEP/BPP/2013 tanggal 23 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Jaringan Penelitian Kebijakan Bidang Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013.

Adapun Judul dari penelitian ini adalah : Laporan Analisis Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

Tujuan dan manfaat dari diadakannya penelitian dengan judul di atas adalah :

1. Menentukan opsi kebijakan lebih lanjut kedepannya untuk intervensi kebijakan berdasarkan pada tingkat ketersediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Padang Pariaman;
2. Menentukan stratifikasi satuan pendidikan berdasarkan mutu dan pelayanan pendidikan di Sekolah Dasar dan Menengah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Menentukan harga satuan pendidikan untuk mendorong setiap satuan pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada semua siswa didik secara non-diskriminatif
4. Untuk mendukung opsi kebijakan implementasi kurikulum 2013 dan satuan pembiayaannya.

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, tidak ada permasalahan berarti yang ditemukan.

## C. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

### 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN

#### a. Tingkat Kabupaten

Kabupaten Padang Pariaman sebelah Utara dengan Kabupaten Agam, sebelah Selatan dengan Kota Padang, sebelah Barat dengan Samudera Hindia, sebelah Timur dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Namun yang telah jelas batas Wilayahnya dan telah dipatok baru perbatasan dengan Kota Padang dengan rentang 12 KM, sedangkan dengan kabupaten-kabupaten lain baru akan dilanjutkan penataannya secara bertahap.

#### b. Tingkat Kecamatan dan Nagari

- Dalam upaya meningkatkan penguatan fungsi keberdayaan dan optimalisasi pembangunan di Nagari dan Kecamatan tentu perlu didukung kepastian batas Wilayah serta kerjasama antar dua wilayah yang terbatas yang memiliki SDA yang saling mendukung maka untuk itu adapun kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini adalah melakukan pembinaan baik secara administrasi bekerjasama dengan BPN (badan Pertanahan Nasional ) Kabupaten Padang Pariaman maupun tokoh-tokoh masyarakat (Tokoh Adat) dan Pemerintah.



#### D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

##### 1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya

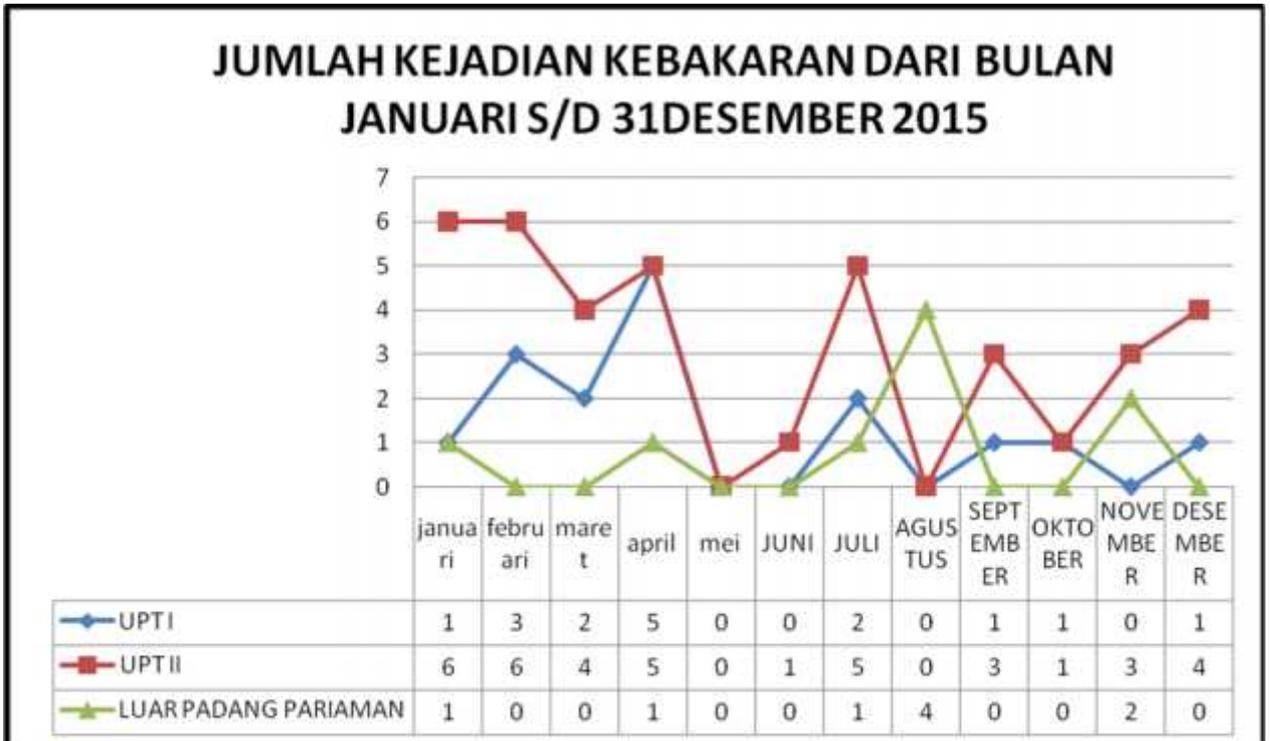
##### a. Bencana Non Kebakaran

Dampak	Jenis Musibah / Type Of Natural Disaster							TOTAL
	Banjir/ Flood	Longsor / Land Slide	Petir / Thunder	Gempa / Earth Quake	Angin Puting Beliung	Lainnya / Other Disaster (Hilang di Laut /sungai )	Abrasi Sungai	
Jumlah Kejadian	6	11	-	-	57	8	1	112
Kerugian								
- Rumah (KK)	160	14	-	-	160		13	399
- Meninggal Dunia (Orang)	1	1	-	-	-	8	-	11
- Lahan (Ha)	80	50	-	-	-	-	-	130
- Mushalla / Pesantren	-	1	-	-	1	-	-	3
- Kantor	-	-	-	-	1	-	-	3
- Jalan/ Jembatan / Irigasi	1	3	-	-	-	-	-	4
- Harta (Rp.)	1,809,000,000	1,045,000,000	-	-	4,660,250,000	-	435,000,000	17,730,845,000

B. Bencana Kebakaran

Selama tahun 2015 telah terjadi 63 kali kejadian kebakaran dengan total kerugian harta benda mencapai Rp. 18.253.000.000 (delapan Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah). Penyebab dominan dari kebakaran yang terjadi selama tahun 2015 adalah kelalaian manusia serta korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran selama tahun 2015.

BULAN	JUMLAH KEJADIAN
Januari	8
Februari	9
Maret	6
April	11
Mei	0
Juni	1
Juli	8
Agustus	4
September	4
Oktober	2
November	5
Desember	5
<b>Total</b>	<b>63</b>



## ANTISIPASI DAERAH DALAM MENGHADAPI KEMUNGKINAN BENCANA

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Menurunkan Tim Anggota Barisan Pemadam Kebakaran dan mobil kebakaran untuk memadamkan api
2. Menurunkan Tim untuk mengevakuasi masyarakat yang terkena bencana
3. Memberikan makan dan snack terhadap masyarakat , relawan dan Tim Evakuasi.
4. Memberikan Penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat
5. Membentuk Tim Siaga Bencana
6. Memfungsikan kelompok-kelompok siaga bencana untuk kesiapsiagaan masyarakat dalam mengahdapi bencana
7. Menyiapkan petunjuk jalur evakuasi dan tempat relokasi
8. Menyiapkan dan menyalurkan kelengkapan logistik ( berupa pemberian selimut, tikar, tenda, atap seng, mie dan sarden dll)
9. Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder/ SKPD yang terkait dalam bidang masing-masing.
10. Melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat/lembaga tekis terkait.
11. Mempersiapkan perangkat hukum untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana

## POTENSI BENCANA YANG DI PERKIRAKAN TERJADI

Potensi bencana yang kemungkinan terjadi di wilayah kabupaten Padang Pariaman meliputi hampir seluruh jenis bencana, yaitu :

1. Gempa
2. Tsunami
3. Banjir
4. Longsor
5. Kebakaran
6. Puting Beliung
7. Orang hilang
8. Abrasi.

## E. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS/ STRATEGIS

Kawasan khusus di Kabupaten Padang Pariaman adalah kawasan strategis berdasarkan Perda RTRW. Kebijakan kawasan strategis nasional dan provinsi, mencermati strategi penataan ruang, rencana pola ruang yang sudah disusun, serta dasar dan kriteria kawasan strategis, maka kawasan strategis untuk Kabupaten padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Kawasan strategis provinsi sebagaimana yang telah ditetapkan pada RTRW Provinsi Sumatera Barat adalah :
  - a. Bidang ekonomi, yaitu kawasan strategis industri yang dikenal juga dengan Padang Industrial Park.
  - b. Bidang lingkungan; Kawasan cepat tumbuh yang perlu dikendalikan yaitu kawasan pada koridor jalan nasional antara Batang Anai sampai dengan Kayu Tanam.
2. Kawasan strategis kabupaten yang merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yaitu :
  - a. Bidang khusus, yaitu kawasan pusat pemerintahan yang merupakan kawasan yang baru dibangun setelah terdapat ketetapan hukum lokasi pemindahan pusat pemerintahan ke Parit Melintang
  - b. Bidang ekonomi yaitu
    - kawasan agropolitan di Kecamatan Sungai Geringging dan Sungai Sariak.
    - Kawasan minapolitan di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dan Sungai Limau

Secara lebih rinci kawasan strategis untuk Kabupaten padang Pariaman dijelaskan sebagai berikut :

1. Kawasan Industri; Padang Industrial Park di Kecamatan Batang Anai.  
Padang Industrial Park (PIP) merupakan pusat kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat, yang terletak di pinggir jalan By Pass antara Kota Padang dan Lubuk Alung, memiliki areal seluas 600 hektar, sebanyak 214 hektar di antaranya telah siap dibangun.
2. Kawasan Agropolitan;
  - a. Kawasan agropolitan pengembangan dan pengolahan Kakao serta PKLp Sungai Garingging
  - b. Kawasan agropolitan dan sentra pengembangan ternak besar Sungai Sariak.
3. Pusat Pemerintahan; pembangunan fasilitas pelayanan sosial pemerintahan dan fasilitas penunjang lainnya di Parit Melintang (Kecamatan Enam Lingkung). Merupakan kawasan pertumbuhan baru yang dikembangkan untuk kawasan perkantoran. Kawasan ini berjarak lebih kurang 5 Km dari jalan negara, namun direncanakan akan dilalui oleh jalan lingkar express way.
4. Koridor Batang Anai-Kayu Tanam; Jalur ini merupakan satu-satunya poros barat - timur di Pulau Sumatera yang mempunyai pergerakan ekonomi (barang dan jasa) dengan frekwensi yang paling tinggi bila dibandingkan poros jalan darat barat - timur di provinsi lain, sehingga menjadikan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tingkat pertumbuhan lebih maju bila dibandingkan provinsi lain yang berada diwilayah belahan barat Pulau Sumatera. Mengingat kawasan ini bertumbuh dengan sangat cepat, sehingga perlu mendapat pengelolaan secara ketat (high control), karena bila kurang tepat dalam penanganannya justru akan menimbulkan persoalan. Jalur ini selain jalur utama transportasi selatan-utara

## F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik :

### A. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi ( konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya)

Pada pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015 adalah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkaitan dengan penanganan terpantaunya stabilitas nasional di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat (Ipoleksosbudkamtibmas) di daerah Kabupaten Padang Pariaman, pelaksanaan kegiatan intelijen daerah oleh Tim Kominda (Komunitas Intelijen Daerah).

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani

Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum secara umum dilaksanakan oleh aparat Polres Kabupaten Padang Pariaman dan Polres Kota Pariaman yang berkerjasama dengan unsur Instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Kodim 0308 Pariaman, BIN, Sekretariat Daerah dan sebagainya. Adapun sesuai dengan fungsinya aparat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman hanya menjalankan tugas-tugas pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pra-kejadian hingga pasca kejadian sebagai bahan informasi dalam bentuk laporan Informasi, laporan kejadian dan laporan khusus yang disampaikan secara langsung kepada Pimpinan Daerah.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 ( S.2 )	2
2	Strata 1 ( S.1 )	3
3	Sarjana Muda / D3	0
4	SLTA	3
5	SLTP	1
6	SD	0
	Jumlah	9 Orang

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	2
2	III	5
3	II	1
4	I	1
	Jumlah	9 Orang

#### 4. Penanggulangan dan Kendalanya

Hingga saat ini sepanjang tahun 2015 tidak ada kejadian atau gangguan yang menonjol yang berpotensi terjadinya konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme, atau lainnya. Namun demikian, tindakan preventif yang dapat dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu dengan meningkatkan koordinasi jajaran melalui peningkatan kegiatan intelijen daerah serta berupaya untuk menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat sehingga stabilitas Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dapat senantiasa terpelihara, aman dan terkendali.

#### 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan

Keikutsertaan aparat keamanan dalam rangka penanggulangan gangguan yang terjadi diwilayah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana disebutkan diatas bahwa peningkatan koordinasi dengan seluruh pihak terkait harus senantiasa berjalan harmonis. Adapun keikutsertaan aparat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman terbatas pada pemantauan lapangan (Pengamanan tertutup).

#### 6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Seluruh anggaran yang dialokasikan pada kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama sebagaimana dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 pada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dengan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, yaitu :

- Kegiatan Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 98.000.000,- (terbilang : Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.200.000,- (terbilang : Empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja:

1. Gangguan yang terjadi  
Gangguan yang sering terjadi adalah Demo terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah seperti Pengelolaan Galian C, PKL PSK dan lain sebagainya.
2. Satuan Perangkat daerah yang menangani  
SKPD yang menangani jika terjadi Gangguan terhadap Kantrantibmas adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariaman
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.  
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional terdiri dari :
  - a. Jumlah Pegawai sebanyak 87 orang terdiri dari :
    1. PNS = 25
    2. PTT = 32
    3. Kontrak/swakelola = 30
  - b. Kualifikasi Pendidikan anggota Satpol PP terdiri dari:
    1. S2 = 2 orang
    2. SI = 13 orang
    3. D3 = 2 Orang
    4. SMA = 70 orang
  - c. Pangkat / Golongan anggota Satpol PP terdiri dari :
    1. IVa = 2 orang
    2. III/d = 4 orang
    3. III/c = 2 orang
    4. III/b = 1 orang
    5. III/a = 1 orang
    6. II/b = 15 orang
    7. PTT = 32 orang
    8. Kontrak/Swakelola = 30 orang
  - d. Jumlah Pejabat Struktural sebanyak 5 orang terdiri dari :
    1. Eselon IIIa = 1 orang
    2. Eselon IVa = 6 orang
4. Penanggulangan dan Kendala  
Penanggulan jika terjadi gangguan Kantrantibmas diawali dengan analisis kejadian, kemudian menyusun langkah penanggulangan dengan mengutamakan pendekatan persuasive dengan melibatkan seluruh instansi terkait serta pemenuh kepentingan lainnya.
5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam Penanggulangan  
Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanganan gangguan Kantrantibmas tergantung atas skala dan ruang lingkup kejadian. Jika skala dan ruang lingkup gangguan dipandang cukup besar maka Satpol PP selalu mengikutsertakan Aparat Keamanan terkait.

## BAB VI

### P E N U T U P

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, yang dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Sesuai dengan laporan tahunan sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu tentang hasil capaian kinerja pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap program dan kegiatan selama tahun anggaran 2015, maka sebagai penutup laporan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bupati Padang Pariaman bersama-sama dengan DPRD telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.
2. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, dalam tahun 2015 Kabupaten Padang Pariaman telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2015.
3. Dalam pelaksanaan tugas pembantuan Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2015 yang mendapat dana tugas pembantuan adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja, Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan.
4. Penyelenggaraan tugas umum pemerintah dalam peningkatan kerjasama antar daerah, dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan strategis serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum telah diupayakan seoptimal mungkin dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia. Walaupun masih ditemui kendala dan hambatan, tapi masih dapat teratasi.